

MODUL PERKULIAHAN PENYULUHAN PERTANIAN

TIM PENYUSUN:

DR. RISWANI, S.P.,M.SI.

DR. SELLY OKTARINA, S.P.,M.SI.

ELLY ROSANA, S.P.,M.SI.

THIRTAWATI, S.P.,M.SI.



LABORATORIUM KOMUNIKASI & PENGEMBANGAN MASYARAKAT - 2023

Kata Pengantar

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan ridhoNya sehingga Buku Modul Perkuliahan Penyuluhan Pertanian ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Modul perkuliahan ini adalah salah satu pedoman pengajaran mata kuliah Penyuluhan Pertanian di Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya yang disusun oleh Tim Penyusun dengan difasilitasi oleh Pimpinan di Fakultas Pertanian Unsri dan jajaran pimpinan di Program Studi Agribisnis, untuk itu terimakasih sebesar-besarnya kami sampaikan.

Di dalam modul ini, disajikan materi perkuliahan Penyuluhan Pertanian berikut soal-soal latihan yang dapat dijadikan bahan untuk evaluasi dalam belajar. Setiap materi yang dibuat dengan total bagian materi sebanyak 14 modul memiliki muatan untuk mewujudkan masing-masing target capaian belajar untuk sikap dan perilaku mahasiswa, serta capaian belajar untuk kemampuan bidang ilmu pengetahuan dan kemampuan bidang pekerjaan secara spesifik yang berpedoman pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah terkait.

Dengan diselesaikannya modul ini, tim penyusun berharap semoga modul ini dapat menjadi salah satu pedoman dalam pengajaran mata kuliah Penyuluhan Pertanian, dan juga dapat memberikan manfaat pada bagian perkuliahan yang lain, serta kebermanfaatannya bagi orang banyak, aamiin.

Indralaya, Februari 2023

Tim Penyusun.

Dr. Riswani, S.P., M.Si.

Dr. Selly Oktarina, S.P., M.Si.

Elly Rosana, S.P., M.Si.

Thirtawati, S.P., M.Si,

Daftar Isi

		Halaman
Modul 1	Sejarah Penyuluhan Pertanian.....	4
Modul 2	Pengertian Dan Ruang Lingkup Penyuluhan Pertanian..	23
Modul 3	Falsafah Dan Prinsip Penyuluhan Pertanian.....	39
Modul 4	Metode Penyuluhan Pertanian.....	49
Modul 5	Sasaran Penyuluhan Pertanian.....	55
Modul 6	Media Penyuluhan Pertanian.....	58
Modul 7	Materi Penyuluhan Pertanian.....	72
Modul 8	Komunikasi Dalam Penyuluhan Pertanian.....	86
Modul 9	Kelembagaan Penyuluhan Pertanian.....	91
Modul 10	Difusi Inovasi Pertanian.....	114
Modul 11	Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi Program Penyuluhan Pertanian.....	132
Modul 12	Revitalisasi Penyuluhan Pertanian.....	142
Modul 13	Sistem Penyuluhan Pertanian Di Era Otonomi Daerah...	149
Modul 14	Penyuluhan Pertanian Di Era Digital.....	158

Modul 1

SEJARAH PENYULUHAN PERTANIAN

Modul 1 ini merupakan modul pembuka dalam mempelajari penyuluhan pertanian yang menjadi dasar bagi mahasiswa dalam memahami materi pada modul-modul selanjutnya. Hal ini dikarenakan pengetahuan tentang sejarah dan perkembangan kegiatan penyuluhan pertanian akan memberikan informasi tentang dasar berfikir dalam menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan penyuluhan, mulai dari pengertian penyuluhan, sampai dengan implementasi ilmu ini pada masyarakat khususnya masyarakat tani.

Materi pada modul 1 ini memiliki muatan sebagai berikut :

- **Capaian belajar untuk sikap dan perilaku (*Learning Outcome for Attitudes and Values*) :**

Sikap : AV 1 : Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

- **Capaian belajar untuk Kemampuan Bidang Ilmu Pengetahuan (*Learning Outcome for Science Competencies*)**

SC 2/CP-KIP 2: Mampu memahami pengetahuan dan teknologi dalam bidang penyuluhan pertanian melalui kajian program pemerintah untuk menghasilkan karya inovatif bidang agribisnis yang teruji melalui program penyuluhan pertanian.

SC 3/CP-KIP 3: Mampu memahami bidang ilmu manajemen, bisnis, kewirausahaan, kelembagaan, sosiologi, penyuluhan dan komunikasi, serta ilmu-ilmu pertanian untuk pengembangan pembangunan agribisnis berkelanjutan.

- **Capaian belajar untuk Kemampuan Bidang Pekerjaan (*Learning Outcome for Occupational Skills*)**

CLO 1/CPMK 1 : Mahasiswa mampu memahami, dan menjelaskan prinsip-prinsip penyuluhan pertanian serta aspek sosial-budaya di pedesaan untuk pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dalam bidang agribisnis

Pada modul 1 ini, akan dideskripsikan sejarah lahirnya kegiatan penyuluhan pertanian di dunia, sampai akhirnya ikut diadopsi di Indonesia. Pengenalan sejarah di awal perkuliahan adalah hal yang penting agar mahasiswa paham bagaimana perjalanan ilmu ini sampai bisa mereka adopsi dan banyak memberikan manfaat saat ini untuk perkembangan ilmu pertanian dan pengadopsian inovasi baru dalam praktek pertanian di semua komoditi yang diusahakan petani. Pada bagian ini, akan dikenalkan awal kegiatan penyuluhan sampai perkembangan saat ini, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kegiatan penyuluhan dengan pasang surutnya, serta perbedaan dan persamaan pengertian penyuluhan yang dikembangkan oleh beberapa pakar. Mahasiswa akan memperoleh pengetahuan tentang sejarah penyuluhan pertanian baik yang berkembang di Indonesia maupun di beberapa negara lain.

Sejarah penyuluhan pertanian akan memberikan pengetahuan tentang upaya-upaya yang dilakukan berbagai pihak dalam kegiatan pembangunan pertanian. Masing-masing negara akan memiliki sejarah perkembangan penyuluhan pertanian yang tidak selalu sama. Hal ini tentu dilatarbelakangi dengan kebijakan pembangunan pertanian yang berbeda pada masing-masing negara, yang tentunya dikaitkan dengan kondisi setempat. Akan tetapi, sejarah penyuluhan pertanian suatu negara, dengan keberhasilan dan kegagalannya, dapat digunakan sebagai inspirasi bagi negara-negara lain dalam membangun sektor pertanian khususnya dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Dari pengetahuan sejarah penyuluhan di beberapa negara lain, dapat diambil informasi yang relevan bagi pengembangan kegiatan penyuluhan pertanian di wilayah kita.

Berikut ini uraian tentang perkembangan sejarah penyuluhan pertanian di beberapa negara yang memiliki sektor pertanian cukup berkembang dan memiliki relevansi cukup erat dengan perkembangan penyuluhan pertanian di Indonesia, diantaranya adalah : Amerika Serikat, Inggris, Thailand, dan di Indonesia sendiri. Pemilihan negara-negara tersebut sebagai contoh dalam uraian sejarah perkembangan penyuluhan pertanian tentunya berdasarkan alasan-alasan khusus yang relevan dengan perkembangan kegiatan penyuluhan di Indonesia

1. Perkembangan Penyuluhan Pertanian Di Negara Lain

1.1. Amerika Serikat (AS)

Amerika Serikat (AS) merupakan salah satu negara yang sektor pertaniannya tergolong cukup baik dan berkembang dengan pesat. Perkembangan sector pertanian di AS dapat terlihat dari ekspor hasil pertanian produk pertaniannya, dalam bentuk segar maupun olahan yang tergolong cukup besar, meskipun AS juga mengimpor produk pertanian tertentu dari negara lain. Kemajuan sektor pertanian tidak lepas dari upaya-upaya melalui kegiatan penyuluhan pertanian, yang telah dimulai sejak abad 19, disamping perkembangan teknologi pendukung sektor pertanian yang maju.

Perkembangan kegiatan penyuluhan pertanian di AS sejalan dengan perkembangan pendidikan pertanian dan dilanjutkan dengan perkembangan penelitian pertanian. Secara bersama-sama ketiganya disebut tritunggal berupa pendidikan-penelitian-penyuluhan yang eksistensinya saling mendukung dan saling memanfaatkan. Pada awalnya, perkembangan penyuluhan ditandai dengan sumbangan pemerintah kepada setiap negara bagian berupa lahan pertanian yang digunakan sebagai laboratorium kegiatan pendidikan pertanian *Agricultural College* yaitu dengan ditandatanganinya *Land-Grant Act* pada tahun 1862 oleh Presiden Abraham Lincoln. Jadi, perkembangan penyuluhan berawal di dalam pendidikan formal. Perkembangan selanjutnya, ditandai dengan pendirian Balai Penelitian Pertanian (*Agricultural Experiment Station*) pada tahun 1887 yang bekerja sama dengan *Agricultural College*. Pendirian ini sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan untuk mengkaji perkembangan masalah pertanian yang makin berkembang pada saat itu dan kegiatan penelitian mendukung kegiatan pendidikan pertanian.

Selanjutnya, pada tahun 1914 didirikan *Extension Service* secara nasional melalui penandatanganan *Smith-Lever Act*. Tujuan pendirian *Extension Service* tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) membantu menyebarkan informasi yang berguna dan praktis, dan
- (2) mendorong penerapan informasi tersebut.

Kedua tujuan tersebut harus dilakukan dan dicapai secara bersamaan, tidak bisa hanya mencapai tujuan pertama dan meninggalkan tujuan kedua. Akan sia-sia apabila kegiatan penyebaran informasi tidak dibarengi dengan kegiatan mendorong penerapan informasi oleh penerima informasi. Dengan kata lain, tercapainya tujuan kedua ditandai dengan penerima informasi mau menerapkan informasi tersebut, merupakan indikator keberhasilan *extension services*.

Pada perkembangan selanjutnya, antara pendidikan, penelitian, dan penyuluhan saling terkait dan saling menyumbangkan serta menggunakan informasi dalam rangka menjawab permasalahan dan tantangan pertanian yang makin kompleks di AS. Hasil kegiatan penelitian berupa ilmu pengetahuan dan teknologi baru disebarluaskan melalui kegiatan pendidikan praktis, dan dorongan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi baru tersebut dilakukan melalui kegiatan penyuluhan (ekstensi). Tentunya, kegiatan penelitian didasarkan pada permasalahan pertanian yang sedang dihadapi, sehingga hasil penelitiannya dapat diterapkan untuk menjawab permasalahan tersebut.

Permasalahan pertanian di AS, antara lain : sulitnya tenaga kerja, luasnya lahan, kebutuhan produk pertanian baru dengan harga yang relevan, pemanfaatan kredit, perubahan sosial budaya, dan kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi baru. Dengan demikian, perkembangan penyuluhan pertanian di AS diawali dengan kebutuhan pendidikan pertanian melalui institusi pendidikan formal. Selanjutnya, pendidikan pertanian tersebut dilengkapi dengan pembentukan balai penelitian yang bekerja sama dengan institusi pendidikan

pertanian tersebut untuk menghasilkan informasi-informasi baru yang akan disebarkan melalui proses pendidikan. Untuk mendorong penerapan informasi baru tersebut dibentuk *extension service* atau jasa penyuluhan kepada masyarakat secara nasional. Perkembangan penyuluhan tidak lepas dari upaya pemerintah AS melalui dukungan perundang-undangan pertanian.

1.2. Inggris

Inggris merupakan salah satu negara di Benua Eropa yang mempunyai sejarah perkembangan penyuluhan pertanian cukup panjang dan penting untuk diketahui. Faktor yang mempengaruhi sejarah perkembangan penyuluhan pertanian di Inggris agak berbeda dengan di AS. Pada abad 19, merupakan awal perkembangan kegiatan penyuluhan pertanian di Inggris, yang ditandai dengan upaya penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan di luar sekolah formal. Melalui pendidikan tersebut, ilmu pengetahuan diinformasikan dan dialihkan dari sumber ilmu kepada sasaran penyuluhan pertanian. Ilmu pengetahuan sendiri dihasilkan melalui kegiatan penelitian, dengan harapan hasil penelitian tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan pemecahan terhadap masalah yang dihadapi.

Dalam perkembangan selanjutnya, hasil-hasil penelitian sangat mendukung kemajuan di bidang pertanian, misalnya: produksi pertanian yang meningkat dan tercapai efisiensi perubahan pertanian. Kemajuan tersebut tentu tidak lepas dari peran proses pendidikan di luar sekolah formal, yaitu menginformasikan, mengalihkan, dan mendorong penerapan hasil penelitian tersebut kepada sasaran atau petani. Namun, pada saat itu mulai dirasakan adanya kebutuhan untuk menemukan metode atau cara penyampaian hasilhasil penelitian yang terbaik. Secara umum ada kebutuhan untuk mengadakan pendidikan di luar sekolah yang lebih sistematis, yang memiliki organisasi yang baik, serta didukung tenaga-tenaga yang profesional yang mampu menginformasikan, mengalihkan, dan mendorong penerapan informasi.

Perkembangan lebih lanjut ditandai dengan terselenggaranya kegiatan pendidikan dan pelatihan oleh organisasi-organisasi yang makin jelas, antara lain: lembaga pelatihan dan pendidikan Kerajaan Inggris (*Royal Agricultural College*) pada tahun 1843; kursus-kursus yang disediakan oleh Universitas Oxford dan Universitas Edinburg dengan jadwal tidak tetap serta penyelenggaraan yang tidak berkesinambungan. Pada akhir abad 19, kegiatan penyuluhan pertanian diselenggarakan oleh swasta yang independen dari campur tangan pemerintah, misalnya Universitas Oxford, Cambridge yang berperan dalam menyediakan tenaga-tenaga profesional tingkat sarjana. Tenaga-tenaga profesional inilah yang akan melakukan kegiatan menyebarkan hasil penelitian dan pendidikan pertanian secara langsung kepada sasaran. Kegiatan ini tidak lain adalah penyuluhan pertanian. Disamping pembentukan organisasi, perkembangan sejarah penyuluhan pertanian di Inggris juga mendapat dukungan pemerintah berupa dikeluarkannya undang-

undang yang terkait dengan pembiayaan. Sebelum ada undang-undang biaya dikeluarkan dan diatur atas inisiatif universitas. Undang-undang tersebut antara lain: undang-undang pemberian wewenang pengaturan dana pelatihan, kursus, dan kuliah di tingkat kabupaten (county), yang diterbitkan tahun 1880 dan undang-undang pendanaan bagi pengembangan pendidikan dan latihan pertanian, yang diterbitkan pada tahun 1904. Dengan dikeluarkannya undang-undang terkait dengan pendanaan, maka kegiatan penelitian-pendidikan-pelatihan makin berkembang dan berjalan dengan baik. Selain itu, universitas atau institut pertanian penyelenggara penelitian-pendidikan-pelatihan mendapat pengawasan dari sebuah badan urusan pertanian yang kemudian disebut kementerian pertanian.

Selanjutnya, perkembangan penyuluhan pertanian di Inggris pada abad 20 dapat diringkas ke dalam tiga masa, yaitu menjelang masa perang dunia kedua, selama perang dunia kedua, dan setelah perang dunia kedua. Pada masa menjelang perang dunia kedua, sektor pertanian di Inggris hanya mampu mencukupi sepertiga dari kebutuhan bahan pangan, dua pertiganya dipenuhi dengan mengimpor. Pada masa itu, universitas atau institut pertanian penyelenggara penelitian-pendidikan-pelatihan memiliki fasilitas memadai yang digunakan sebagai tempat pertemuan dan saling bertukar pikiran antara kelompok tani dengan tenaga institut pertanian, antar anggota kelompok tani, dan antar perkumpulan pemuda tani. Wilayah pertanian yang ada di sekitar universitas atau institut pertanian tersebut umumnya berkembang lebih baik, karena digunakan untuk demonstrasi atau praktek tentang hasil penelitian atau informasi baru, dan jika ada masalah di wilayah tersebut, lebih dekat dan cepat mencari bantuan pemecahannya. Jika universitas atau institut pertanian terdekat tidak bisa memecahkan masalah, maka universitas tersebut bekerja sama dengan universitas atau institut pertanian lain penyelenggara penelitian-pendidikan-pelatihan. Di sini terlihat peran institut pertanian yang memiliki tenaga penyuluh berperan dalam kemajuan sektor pertanian di wilayah sekitarnya, yaitu melakukan kegiatan penyuluhan pertanian terhadap masyarakat petani di wilayah tersebut dengan fasilitas yang dimiliki institut pertanian.

Selama perang dunia kedua, ada kekhawatiran pemerintah Inggris terhadap keselamatan bahan pangan yang diimpor, sehingga pemerintah menerapkan kebijakan untuk melipatgandakan produktivitas pangan dari dalam negeri sendiri. Di sini terlihat peran pemerintah terhadap kegiatan penyuluhan pertanian makin tampak nyata, intensitas bantuan dan bimbingan penyuluh kepada masyarakat petani ditingkatkan di hampir seluruh wilayah Inggris. Untuk memudahkan pengelolaannya, maka pada setiap kecamatan dibentuk panitia pelaksana program pertanian dengan anggota antara lain para petani, petugas teknis, dan penyuluh. Panitia ini melakukan kegiatan mulai dari merencanakan, menyusun, dan melaksanakan program. Secara tidak langsung, melalui keanggotaan panitia, petani mendapatkan pengalaman yang berharga dalam

mengembangkan usahatani, saling bertukar pikiran, dan bersama-sama memecahkan permasalahannya. Jadi, selama perang dunia kedua, sejarah penyuluhan pertanian di Inggris ditandai dengan: pembentukan organisasi yang memungkinkan komunikasi antarpetani dan antara petani dengan penyuluh ataupun petugas teknis berlangsung lebih efektif; hubungan antara petani dan penyuluh makin erat, penyuluh mendapat pengakuan dari petani, dengan kata lain penyuluh dibutuhkan oleh masyarakat petani.

Setelah perang dunia kedua, merupakan masa penyuluhan mendapatkan pengakuan hampir di seluruh wilayah Inggris. Hal ini ditandai dengan diwujudkannya rencana penyatuan seluruh kegiatan penyuluhan dalam satu wadah yang disebut National Advisory Services atau Dinas Penyuluhan Nasional. Berdasarkan pengalaman dan keberhasilan masa sebelumnya, maka kegiatan pendidikan, penelitian, dan pelatihan adalah merupakan satu kesatuan, yang saling mengisi dan terkait yang sangat menentukan bagi keberhasilan kegiatan penyuluhan secara khusus dan perbaikan usahatani secara umum. Berbagai fasilitas penyuluhan ditingkatkan termasuk fasilitas bagi tenaga penyuluh dalam menjalankan perannya.

Pada masa itu, tidak ada wilayah di Inggris yang tidak mempunyai fasilitas pelayanan penyuluhan, akibatnya jumlah institut pertanian bertambah. Hal ini termasuk peningkatan jumlah tenaga penyuluh, peningkatan kemampuan penyuluh, peningkatan pendidikan, pelatihan, dan kursus bagi masyarakat. Dengan demikian, kebijakan pemerintah Inggris menghadapi perang telah mendorong pesatnya perkembangan penyuluhan pertanian serta kebutuhan masyarakat petani terhadap kegiatan penyuluhan pertanian tersebut. Garis besar uraian di atas adalah: kegiatan penyuluhan pertanian di Inggris makin berkembang pesat akibat tekanan perang dunia, sehingga ada kebutuhan masyarakat untuk mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri, agar tidak tergantung pada bahan pangan yang diimpor. Perang dapat menghambat impor pangan. Melalui kegiatan penelitian dilakukan upaya peningkatan dan perbaikan usahatani, dan pemberian informasi hasil penelitian melalui kegiatan pendidikan, latihan, dan kursus melalui sistem pendidikan di luar sekolah formal.

Keberhasilan penyuluhan tidak hanya ditentukan oleh kualitas hasil penelitian, tetapi juga profesionalitas penyuluh pertanian, dan kemauan masyarakat petani untuk melakukan perbaikan atau pemecahan masalah yang dihadapi. Faktor penentu lain adalah kebijakan pemerintah yang mendukung kegiatan penyuluhan pertanian. Meskipun saat ini kita mengenal Inggris sebagai negara industri yang maju, kemajuan tersebut tidak bisa dilepaskan dari perkembangan sektor pertanian, secara khusus peran penyuluhan pertaniannya.

1.3. Thailand

Saat ini, negara Thailand dikenal sebagai pengekspor hasil pertanian yang cukup diperhitungkan di dunia. Ekspor berupa hasil pertanian mentah

maupun produk olahan telah merajai pasar dunia, baik dari segi kuantitas, kualitas, maupun keragaman komoditas pertanian. Tentu menarik kita pelajari mengapa Thailand bisa merajai produk pertanian di dunia, padahal Thailand hanya memiliki luas kurang lebih 514.000 Km² dibandingkan dengan negara kita Indonesia dengan luas kurang lebih 1.900.000 Km². Saat ini, banyak petani dari Indonesia yang berguru ke Thailand untuk mempelajari perkembangan pertanian yang maju di negara tersebut. Kemajuan sektor pertanian di Thailand tidak lepas dari sejarah perkembangan penyuluhan pertanian sebagai salah satu upaya pendukung pembangunan pertanian.

Menurut Departemen Pertanian (2001), sampai dengan akhir tahun 1950-an, pembangunan pertanian di Thailand kurang berkembang dibandingkan sektor lain yang secara nyata menyumbang pendapatan nasional. Padahal, 70% penduduk Thailand hidup di pedesaan dengan mata pencaharian sebagai petani. Salah satu faktor yang dianggap kurang efisien dalam pembangunan pertanian di Thailand adalah masih terpisah-pisahannya kebijakan penyuluhan yang dikeluarkan oleh bermacam-macam dinas penyuluhan pada saat itu. Sebelum tahun 1977, Thailand memiliki departemen pertanian yang terbagi menjadi beberapa departemen yang lebih kecil, misalnya departemen perikanan, departemen peternakan, dan departemen padi. Pada mulanya, masing-masing departemen tersebut memiliki dinas penyuluhan dengan melakukan program penyuluhannya.

Program tersebut ada kemungkinan akan tumpang tindih dengan program penyuluhan dinas yang lain, mengingat masing-masing dinas memiliki kebijakan dan kewenangan sendiri. Akhirnya, pemerintah Thailand melihat permasalahan tersebut dan menyadari potensi yang dimiliki masyarakat petani di wilayahnya; selanjutnya, secara bertahap melakukan pengembangan pertanian melalui kegiatan pengelolaan penyuluhan pertanian. Pada tahun 1977, dibentuk satu departemen penyuluhan pertanian (*Department of Agricultural Extension*) di tingkat pusat, dengan dinas penyuluhan pertanian di tingkat propinsi dan di tingkat kabupaten atau distrik.

Penyatuan dinas-dinas penyuluhan menjadi satu departemen didasarkan atas efisiensi program dan biaya, agar tidak terjadi program yang tumpang tindih antardinas, serta ada kesatuan kebijakan dan kesinambungan program penyuluhan kepada masyarakat. Setelah pembentukan departemen penyuluhan, berbagai program dan pendekatan penyuluhan dengan skala nasional telah diterapkan, di antaranya pengembangan jaringan irigasi, serta dukungan penerapan sistem latihan dan kunjungan. Pengembangan jaringan irigasi tersebut telah mendorong kecepatan kegiatan pembangunan pertanian di pedesaan, dengan sendirinya membutuhkan peningkatan tenaga penyuluh pertanian baik dari segi jumlah maupun kemampuan.

Dalam pembangunan pertanian yang makin cepat, masyarakat tani perlu bantuan dalam memecahkan masalah, perlu bantuan teknis, dorongan,

informasi, akibatnya intensitas pertemuan masyarakat dengan penyuluh makin meningkat. Pada saat inilah penyuluhan pertanian di Thailand mulai mendapat pengakuan dari masyarakat. Salah satu pendekatan penyuluhan yang dianggap berhasil di Thailand adalah sistem latihan dan kunjungan (LAKU) atau training and visit (T&V) yang mulai diterapkan pada akhir tahun 1977. Dalam sistem LAKU, penyuluh mendatangi sasaran untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, memberikan pelatihan atau kursus, mendorong sasaran melakukan dan menerapkan pengetahuan baru, serta mendorong masyarakat untuk terlibat dalam berbagai kegiatan di wilayahnya, misal melalui organisasi tani, wanita tani, dan pemuda tani. Dengan mengikuti organisasi, petani akan mendapat bimbingan dari penyuluh, mengikuti diskusi, dan mengambil keputusan atas dasar kesepakatan bersama. Sistem ini mendorong masyarakat tani untuk lebih aktif dalam kegiatan usahatani, lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap upaya peningkatan usahatani, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Dari uraian di atas, sejarah perkembangan penyuluhan pertanian di Thailand ditandai oleh upaya pemerintah dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini tidak mengherankan, mengingat pertanian merupakan tulang punggung perekonomian di Thailand, karena hampir 70% penduduknya bermata pencaharian dari bertani. Sektor pertanian memberikan sumbangan terhadap pendapatan nasional. Pengelolaan program penyuluhan pertanian yang berkesinambungan dan terpadu secara nasional, telah menjamin keberhasilan kegiatan penyuluhan pertanian, yang pada akhirnya menjamin keberhasilan pembangunan pertanian di Thailand. Keberhasilan pembangunan pertanian dipengaruhi oleh organisasi penyelenggara penyuluhan pertanian yang terkoordinasi serta program-program penyuluhan yang berkesinambungan. Dengan kata lain, kemajuan di bidang pertanian sejalan dengan upaya peningkatan kualitas petani, yaitu melalui kegiatan penyuluhan pertanian yang diterapkan dengan berbagai pendekatan atau metode.

Berdasarkan contoh ketiga negara di atas, dapat disimpulkan bahwa sejarah perkembangan penyuluhan pertanian mengalami pasang surut dengan berbagai tantangan. Berawal dari tujuan memenuhi kebutuhan pangan, meningkatkan produksi pertanian, dan meningkatkan pendapatan petani, yang dibarengi dengan upaya mendorong petani lebih aktif berperan dalam kegiatan usahatannya.

Untuk mencapai tujuan-tujuan itu dibutuhkan: informasi dari hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, metode terbaik dalam menyampaikan pengetahuan yang didukung dengan pendidikan dan pelatihan, serta upaya mendorong agar petani menerapkan informasi atas dasar kesadaran sendiri. Dengan demikian, sejarah perkembangan penyuluhan pertanian tidak bisa berjalan sendiri, tetapi sejalan dengan perkembangan kegiatan penelitian, proses pendidikan dan upaya pelatihan. Penyuluhan-

penelitian-pelatihan merupakan tritunggal yang saling terkait dan aktivitas ketiganya akan saling mempengaruhi, saling memberi dan menerima informasi. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian merupakan salah satu upaya dalam menjamin keberhasilan pembangunan pertanian. Bagaimana dengan Indonesia, negara yang beberapa tahun lalu masih sering disebut negara agraris, adakah faktor-faktor khusus yang mempengaruhi perkembangan penyuluhan pertanian di Indonesia? apakah perkembangan penyuluhan pertanian di negara lain turut berpengaruh atautkah sebaliknya? Apa kontribusi penyuluhan pertanian terhadap pembangunan pertanian di Indonesia? Kapan penyuluhan pertanian mengalami masa kejayaan dan mendapat kepercayaan dari petani, faktor-faktor apa yang mempengaruhi? Anda akan menemukan jawabannya pada uraian berikut, namun cobalah mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan kelompok belajar Anda sebelum mempelajari materi berikut. Pengalaman Anda sebagai penyuluh selama ini dengan berbagai perubahan kebijakan pemerintah dan tantangannya tentu menarik untuk didiskusikan.

2. Perkembangan Penyuluhan Pertanian Di Indonesia

Sejarah penyuluhan pertanian di Indonesia memiliki dinamika yang panjang sejalan dengan perubahan kebijakan pembangunan pertanian pada waktunya. Berawal dari upaya peningkatan produksi pertanian, kebutuhan komoditas baru, kebutuhan ilmu pengetahuan baru yang dihasilkan melalui penelitian, dan kebutuhan penyampaian hasil penelitian kepada sasaran melalui proses pendidikan dan pelatihan, serta yang lebih penting adalah upaya perubahan pada diri petani

Untuk memudahkan pemahaman terhadap sejarah perkembangan penyuluhan pertanian, uraian berikut akan disajikan berdasarkan “kelompok masa” yang mempengaruhi kebijakan pemerintah saat itu, yaitu masa sebelum kemerdekaan, masa kemerdekaan, masa orde baru, dan masa setelah reformasi atau otonomi daerah. Tujuan pengelompokan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan penyuluhan pertanian sangat terkait dengan kebijakan pemerintah pada waktu itu, yang berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan pertanian.

2.1. Masa Sebelum Kemerdekaan (1817-1945)

Pembangunan pertanian pada masa ini belum mengenal istilah penyuluhan pertanian, meskipun ada kegiatan mengenalkan pengetahuan baru, misalnya mengenalkan jenis-jenis tanaman baru. Menurut Departemen Pertanian (1978), pendirian Kebun Raya di Bogor pada 17 Mei 1817 oleh C.G.L.Reinwardt dianggap sebagai awal dari usaha pembangunan pertanian di Indonesia. Pada saat itu diperkenalkan banyak jenis tanaman baru, antara lain kelapa sawit dan 50 jenis ketela pohon.

Berawal dari kebutuhan perbaikan produksi pertanian oleh penjajah, pada tahun 1831 dimulai sistem tanam paksa (*cultuurstelsel*) untuk tanaman

nila/tarum, kopi, tebu, dan tembakau. Petani diwajibkan menanam tanaman tersebut. Selama sistem tanam paksa, Pangreh Praja merupakan satu-satunya badan yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pangreh Praja adalah penguasa lokal pada masa penjajahan Belanda untuk menangani daerah jajahannya. Usaha memperbaiki pertanian lebih didasarkan atas perintah atau paksaan kepada rakyat untuk menanam tanaman yang telah ditentukan.

Usaha-usaha memperbaiki jenis dan jumlah produksi tanaman diwujudkan dengan mendirikan Kebun Tanaman Dagang (*cultuurtuin*) pada tahun 1876, pusat-pusat penyelidikan (sekarang lembaga penelitian) pada tahun 1880, sekolah pertanian (*Land-en Tuinbouw Cursus*) pada tahun 1877 (tahun 1884 ditutup dan dibuka lagi tahun 1903). Pada masa itu telah dihasilkan tenaga pertanian tetapi tidak diberi kewenangan, Pangreh Praja tetap memiliki wewenang memberi perintah langsung kepada petani. Petani melaksanakan perintah karena takut, namun hanya dilakukan selama ada kontrol, akibatnya cara perintah tidak memberikan hasil yang baik dalam upaya memperbaiki pertanian rakyat.

Dengan demikian, sistem tanam paksa hanya berupaya meningkatkan produksi pertanian untuk kepentingan penguasa, bukan memperbaiki kesejahteraan masyarakat tani pada saat itu. Sampai dengan awal abad 19, upaya perbaikan produksi pertanian masih dilakukan dengan sistem tanam paksa. Pangreh Praja dengan kekuasaannya merupakan satu-satunya badan yang mempengaruhi rakyat secara langsung. Artinya, usaha memperbaiki pertanian masih didasarkan atas perintah atau paksaan supaya petani melakukan kegiatan pertanian, bukan dalam upaya menumbuhkan kesadaran rakyat melakukan perbaikan pertanian. Pada saat itu penyebaran pengetahuan melalui proses pendidikan pertanian kepada petani belum dianggap penting. Dengan demikian, meskipun ada tenaga-tenaga penyuluh pertanian lulusan sekolah pertanian, tetapi tidak dapat berperan dengan baik. Hal ini karena penguasa saat itu beranggapan bahwa petani hanya dapat dipengaruhi oleh Pangreh Praja dengan cara tekanan atau paksaan.

Setelah berjalan hampir tiga perempat abad (1817-1900), pemerintahan pada waktu itu menyadari sistem tanam paksa tidak memberikan hasil sesuai harapan. Kemudian, dilakukan perubahan administratif dalam pengelolaan pertanian yang lebih terdesentralisasi, yaitu dengan dibentuknya Departemen Pertanian yang mulai berfungsi pada 1 Januari 1905 dengan tujuan memajukan pertanian rakyat. Mula-mula Departemen Pertanian berlokasi di Kebun Raya di Bogor. Pada awal pembentukannya, Departemen Pertanian yang berfungsi antara lain memajukan pertanian rakyat, memiliki 4 lembaga yaitu: Kebun Raya dan Laboratoriumnya; Balai Penelitian Padi dan Palawija; Sekolah Pertanian; dan Kebun Percobaan Tanaman Tahunan yang dilengkapi dengan kursus-kursus serta latihan praktisnya. Fungsi memajukan pertanian rakyat ternyata tidak didukung dengan lembaga khusus yang memikirkan cara bagaimana

menyampaikan segala pengetahuan yang diperoleh tersebut kepada para petani.

Keadaan ini terkait dengan kebijakan masing-masing direktur Departemen Pertanian yang menjabat pada saatnya. Prof. Dr. Melchior Treub, Direktur Departemen Pertanian pada tahun 1905-1910, berpandangan bahwa petani hanya dapat dipengaruhi oleh pangreh praja, serta pendidikan petani tidak penting. Meskipun pada waktu Melchior menjabat sebagai direktur tersebut, untuk pertama kalinya telah diangkat lima orang penasihat pertanian pada tahun 1908 (selanjutnya dianggap sebagai titik awal perkembangan penyuluhan pertanian). Namun, penasihat pertanian tidak diberi kewenangan pengawasan dan pemeriksaan terhadap petani secara langsung. Pada tahun 1910-1918, direktur Departemen Pertanian adalah Dr.N.J.Lovink yang memiliki pandangan agak bergeser dari pandangan direktur pendahulunya. Lovink berpandangan bahwa pendidikan pertanian merupakan salah satu cara yang bermanfaat untuk memajukan dan memperbaiki pertanian. Sehingga, pada tahun 1911 dibentuklah Dinas Penyuluhan Pertanian (Landbouw Voorlichtings Dienst/LVD) dan pada tahun 1913 didirikan Sekolah Pertanian Menengah Atas (Middelbare Landbouw School/MLS).

Masa kepemimpinan Lovink menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya lembaga yang memikirkan bagaimana cara menyampaikan pengetahuan, yaitu melalui proses pendidikan pertanian kepada rakyat. Dinas Penyuluhan Pertanian berperan dalam proses pendidikan pertanian kepada rakyat, yang didukung oleh tenaga pertanian yang diluluskan dari SPMA. Meskipun demikian, Pangreh Praja tetap memiliki wewenang dalam berhubungan langsung dengan rakyat. Pada tahun 1918-1922 Departemen Pertanian dipimpin oleh Sibinga Mulder, melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap kinerja Departemen Pertanian setelah 13 tahun berdiri.

Salah satu kebijakannya yang penting adalah dalam melaksanakan kegiatan pendidikan pertanian, Dinas Penyuluhan Pertanian perlu melakukan koordinasi dan kesinambungan dengan sumber atau penyedia informasi. Maka, dibentuk Balai Besar Penelitian Pertanian (het Algemeene Proefstation voor den Landbouw/APL) yang merupakan penyatuan dari beberapa balai penelitian yang ada. Lebih jauh, beliau juga melakukan reorganisasi di bidang pendidikan pertanian serta menekankan pentingnya kepala daerah pertanian membuat pedoman kerja untuk kepentingan wilayah setempat, sehingga ada kesempatan pengembangan daerah masing-masing. Dengan demikian, pada masa kepemimpinan Mulder, terlihat mulai ada perhatian terhadap sistem penyuluhan pertanian yaitu dengan menggalang hubungan di antara pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan penyuluhan pertanian, misal dengan APL sebagai sumber pengetahuan baru. Setelah hampir satu abad, upaya memperbaiki pertanian rakyat melalui pengaruh atau perintah Pangreh Praja kepada petani dinilai tidak efektif. Sementara itu, Dinas Penyuluhan Pertanian yang dibentuk tahun 1911

dan telah berusaha untuk bisa berhubungan langsung dengan petani atas dasar pendidikan dan kesukarelaan ternyata memberikan hasil nyata yang lebih baik. Maka pada tahun 1921 Dinas Penyuluhan Pertanian bekerja lepas dari Pangreh Praja.

Cara yang dilaksanakan Dinas Penyuluhan Pertanian dalam meningkatkan pertanian rakyat adalah dengan menganjurkan petani melakukan perbaikan pertanian dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kesadaran atau keinsafan dari dalam diri petani. Untuk menumbuhkan kesadaran petani, maka petani diberi kesempatan untuk menyaksikan sendiri bukti nyata dari percobaan dan percontohan yang telah dilakukan oleh Dinas Penyuluhan Pertanian. Jadi, kegiatan Dinas Penyuluhan Pertanian pada masa itu mulai mengarah pada perbaikan individu petani, menumbuhkan kesadaran petani, dan bukan memaksa petani. Dinas Penyuluhan Pertanian dan kegiatannya terus berkembang sampai datangnya tentara Jepang pada tahun 1942, yang ternyata juga menerapkan sistem tanam paksa dan berakhir saat kemerdekaan Indonesia tahun 1945.

2.2. Masa Kemerdekaan (1945-1966)

Setelah proklamasi kemerdekaan, salah satu upaya penting dalam pengembangan pertanian adalah dengan rencana mendirikan pusat pendidikan bagi masyarakat pedesaan di tiap kecamatan. Pada tahun 1948 rencana tersebut ditetapkan menjadi Balai Pendidikan Masyarakat Desa (BPMD). Ketetapan tersebut tercantum dalam Rencana Kemakmuran Indonesia atau Rencana Kasimo (Kasimo Plan), yang merupakan rencana produksi pertanian jangka 3 tahun (1948-1950). Akan tetapi rencana tersebut tidak dapat dilakukan sepenuhnya karena terjadi agresi militer Belanda pada tahun 1948 dan 1949. Setelah pengakuan kembali kedaulatan RI pada Desember 1949, pemerintah memulai kembali usaha pembangunan pertanian secara lebih sistematis, dengan melaksanakan Rencana Kesejahteraan Istimewa yang merupakan gabungan antara Rencana Kasimo dengan Rencana Wisaksono.

Pada masa ini, pendekatan dan metode penyuluhan masih sama dengan yang dilakukan sebelum kemerdekaan, padahal permasalahan pertanian makin kompleks. Oleh karena itu, pada tahun 1958 dilakukan kegiatan intensifikasi produksi padi, dan petani yang menerapkan kegiatan tersebut akan mendapat bantuan kredit dalam bentuk bibit dan pupuk serta uang. Dalam perjalanannya kegiatan ini tidak berhasil dengan baik, karena sistem kredit yang diterapkan telah memungkinkan terjadi penyelewengan, harga padi yang rendah yang mempengaruhi pengembalian kredit, serta kurangnya tenaga pendukung yang sesuai.

Pada tahun 1959-1968, mendasarkan pada kegagalan-kegagalan sebelumnya maka pendekatan penyuluhan pertanian mengalami pergeseran. Penyuluhan pertanian mulai menerapkan pendekatan gerak cepat, dinamis, dan tepat, bukan lagi alon-alon asal kelakon; caranya dengan menggunakan

pendekatan kelompok, bukan hanya pendekatan perorangan saja, mengganti sistem tetesan minyak dengan tumpahan air, agar semua orang kebagian cipratan air atau semua orang terlibat dalam kegiatan. Namun, pergeseran pendekatan penyuluhan pertanian tersebut tidak banyak memberikan perbaikan bagi pembangunan pertanian. Salah satu penyebabnya adalah penerapan sistem pemerintahan pada saat itu yang bersifat terpimpin, semua kegiatan bermuara dari satu komando pimpinan tertentu. Penerapan pendekatan sistem komando tersebut menyebabkan petani makin menjauhi penyuluh, karena kegiatan penyuluhan dianggap lebih sebagai perintah.

Meskipun telah merdeka sejak 1945 yang berarti telah bebas dari tekanan, kegiatan penyuluhan pertanian di Indonesia sampai tahun 1965 belum memberikan hasil yang lebih baik terhadap pembangunan pertanian. Hal ini akibat sistem komando yang tetap dilakukan dalam kegiatan pembangunan pertanian, bukan atas dasar kesukarelaan petani terlibat dalam kegiatan tersebut. Misalnya, perintah penerapan teknologi baru kepada petani, tanpa petani bisa memilih atau menolak; demikian juga pembentukan kelompok tani yang tidak didasari oleh kebutuhan petani. Pada masa itu, metode penyuluhan pertanian mengalami pergeseran dari prinsip-prinsip semula yang seharusnya didasari oleh upaya meningkatkan kesadaran petani melakukan perbaikan kegiatan pertanian.

2.3. Masa Orde Baru (1966-1998)

Pada awal pemerintahan orde baru tahun 1966, timbul gagasan untuk mengembalikan sistem penyuluhan pertanian kepada asas-asas semula, antara lain kesukarelaan dan demokratis. Departemen Pertanian dan pihak terkait mewujudkan gagasan tersebut dengan membangun organisasi penyuluhan pertanian yang tumbuh dan mengakar di tingkat desa, serta memprogresifkan pendekatan dan cara penyuluhan pertanian. Keberhasilan pembangunan pertanian di masa orde baru tidak lepas dari keberhasilan kegiatan uji coba Panca Usahatani Lengkap di Karawang, Jawa Barat pada tahun 1963-1964. Kegiatan tersebut dilakukan oleh dosen dan mahasiswa tingkat akhir Institut Pertanian Bogor bekerja sama dengan petani setempat pada lahan seluas 104 Ha. Kegiatan yang merupakan Demonstrasi Massal gerakan Swasembada Bahan Makan (SSBM) tersebut secara nyata meningkatkan produksi padi dua kali lipat dan terus diperluas pada 11.000 Ha, dan berikutnya 150.000 Ha.

Pendekatan yang dilakukan adalah setiap dua mahasiswa menangani satu unit areal sawah seluas 50 Ha dan hidup selama enam bulan bersama keluarga tani untuk membimbing petani menerapkan Panca Usahatani tersebut. Pendekatan ini dapat dianggap sebagai kegiatan penyuluhan pertanian. Pada akhirnya, "Panca Usahatani" dijadikan kebijakan nasional menjadi sistem Bimbingan Massal (BIMAS), yaitu suatu paket masukan (input) yang terdiri dari: penyediaan kredit (oleh BRI), pelayanan penyuluhan pertanian secara intensif (oleh PPL dari Dinas Pertanian), sarana produksi yang murah dan mudah

diperoleh petani (dikelola oleh penyalur, kios, dan KUD), serta pengolahan dan pemasaran hasil usahatani (oleh KUD, kelompok tani, maupun swasta perorangan). Sistem BIMAS didasarkan kepada usaha pembinaan petani oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dengan pendekatan kelompok tani, dengan tujuan akhir petani mampu berdiri sendiri. Penyuluh pertanian dari Dinas Pertanian mendapat bantuan dari penyuluh sukarela yang berasal dari kalangan petani, misalnya kontak tani. Para kontak tani tersebut telah mendapat pembinaan dengan pendekatan perorangan melalui kegiatan anjungsana, kursus tani, demonstrasi perorangan atau plot, dan surat-menyurat.

Dengan demikian, pendekatan penyuluhan tidak hanya dilakukan dengan pendekatan massal atau kelompok, tetapi juga pendekatan terhadap perorangan, terutama kepada individu-individu setempat yang memiliki pengaruh terhadap masyarakat petani. Sistem BIMAS banyak didukung oleh kegiatan yang bersifat massal, antara lain: penyuluhan pertanian melalui siaran radio, pameran, penerbitan, pertunjukan film maupun kesenian tradisional (wayang, sandiwara, dagelan, dan lain-lain). Pemanfaatan media-media penyuluhan tersebut sejalan dengan perubahan sistem politik dan kemasyarakatan pada saat itu, sehingga Departemen Pertanian melalui Dinas Pertanian dan para penyuluh pertanian mendapatkan kesempatan untuk menyesuaikan pola, cara, ataupun pendekatan yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Pada awal tahun 1969 disusun pola pengembangan pertanian dengan cara: memperluas program kepada wanita tani dan pemuda, mengembangkan metode demplot, denfarm, demarea dan demunit, siaran pedesaan, bahan cetakan, dan bahan audio visual, serta ditunjang dengan merekrut pegawai baru, pengadaan peralatan kerja dan transpor, penambahan dan perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian, dan pembentukan Balai Informasi Pertanian. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan pertanian makin berkembang dan mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun mendapat penerimaan dari masyarakat petani. Penyempurnaan dan pengembangan pendekatan penyuluhan tersebut menjadi dasar pelaksanaan program pembangunan lima tahun pertama yang dimulai pada tahun 1969 sampai dengan 1974.

Dalam perkembangannya, pelayanan penyuluh dalam bentuk pendidikan bagi keluarga tani ditujukan untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat. Pembentukan kelompok tani terus dilakukan atas dasar kebutuhan petani, serta menentukan kontak tani yang sehari-harinya menjadi pembina langsung para petani dan penggerak perubahan dalam pembangunan pertanian di desanya. Kerja sama kontak tani bersama kelompok taninya pertanian. Selanjutnya, mekanisme kerja sama tersebut diperluas di tingkat nasional. Pembentukan kontak tani dalam kegiatan penyuluhan pertanian, merupakan salah satu bentuk pendekatan dengan memanfaatkan potensi SDM setempat, serta untuk membangkitkan partisipasi masyarakat petani dalam pembangunan pertanian. Penyempurnaan juga dilakukan terhadap kelembagaan penyuluhan, baik jumlah

maupun kualitasnya. Misal: pembangunan Sekolah Pertanian Pembangunan, Balai Latihan Pegawai Pertanian, Balai Informasi Pertanian, Balai Penyuluhan Pertanian, Balai Benih, dan Balai Proteksi Tanaman. Sampai dengan akhir PELITA V tahun 1994 telah dibangun dan disempurnakan sejumlah 1.300 BPP. BPP merupakan lembaga tempat bernaung PPL di tingkat kecamatan. Dengan makin banyak BPP berarti makin dekat jarak petani dengan penyuluh, maka makin intensif penyuluh dalam memberikan bimbingan kepada petani dan membantu penyelesaian masalah petani.

Pada tahun 1986, jabatan fungsional penyuluh pertanian mendapat pengakuan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 73/Menpan/1985. SK.Menpan tersebut diharapkan dapat memotivasi penyuluh melakukan perannya secara berkualitas, yang selanjutnya keberhasilan melakukan peran tersebut akan mendukung perkembangan penyuluhan pertanian yang lebih baik. Dengan demikian penyempurnaan penyuluhan pertanian berupa perbaikan kualitas dan kuantitas tenaga penyuluh, kelembagaan, serta program dan pendekatan penyuluhan, selain itu ada dukungan kebijakan pemerintah. Pada tahun 1984, pemerintah Indonesia menerima penghargaan dari PBB atas keberhasilannya berswasembada beras. Keberhasilan ini merupakan pencapaian dari program BIMAS yang berupaya melipatgandakan produksi padi. Pada saat itu, swasembada beras merupakan tujuan nasional, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut maka pendekatan penyuluhan yang dilakukan bersifat sentralistis (top down) dengan program pembangunan pertanian yang seragam. Namun, kenyataan di lapang menunjukkan bahwa keberhasilan peningkatan produksi padi yang tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan petani akibat peningkatan harga sarana produksi pertanian dan bahan-bahan lain, telah menimbulkan salah persepsi pada sebagian masyarakat pada saat itu, yaitu mengidentikkan kegiatan penyuluhan sebagai upaya meningkatkan produksi padi saja, dan bukan bertujuan meningkatkan kesejahteraan.

Kenyataan lain, tercapainya swasembada beras nasional telah menjadikan petani sebagai manusia yang tergantung pada program, kegiatan, ataupun anjuran pihak di tingkat atas. Kemandirian dan keswadayaan petani makin pudar akibat pendekatan pembangunan pertanian yang bersifat sentralistik tersebut. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan penyuluhan pertanian semula yang berupaya menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian masyarakat petani. Tahun 1986-1991 telah terjadi perubahan dalam pengorganisasian penyuluh, peran penyuluh telah berubah dari yang bersifat polivalen menjadi monovalen.

Perubahan menjadi monovalen tersebut sejalan dengan kebutuhan spesifikasi dalam profesi, dengan harapan penyuluh monovalen dapat lebih intensif melakukan kegiatan penyuluhan dalam subsektor tertentu. Penyuluh pertanian yang semula di bawah Dinas Pertanian Pangan selanjutnya menjadi

bagian dari Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, dan Dinas Perkebunan sesuai bidang tugas monovalennya.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan penyuluhan tidak bisa dilakukan secara intensif mengingat luasan geografis penyuluhan yang bertambah untuk satu orang penyuluh monovalen, petani yang belum terbiasa dengan sistem penyuluh monovalen, dan perlu beragam inovasi oleh penyuluh sesuai keragaman wilayah. Ditambah lagi, pada waktu itu mulai banyak kegiatan proyek pemerintah yang dibebankan kepada penyuluh, sehingga penyuluh kurang dapat menerapkan konsep penyuluhan sebagai proses pendidikan non-formal secara murni. Koordinasi antar subsektor tidak selalu mulus, bahkan terjadi pengkotak-kotakan secara subsektor.

Perubahan sistem kerja penyuluhan pertanian telah mempengaruhi eksistensi diri penyuluh dan tentu juga mempengaruhi perkembangan penyuluhan pertanian akibat penerimaan masyarakat mulai berkurang terhadap kegiatan-kegiatan penyuluhan. Penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian yaitu SKB nomor 54 tahun 1996 dan nomor 301/Kpts/LP.120/4/1996 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, memberi harapan para penyuluh. Penyuluh memiliki keleluasaan dalam berperan secara terintegrasi antar subsektor dan dapat menemukan jati dirinya kembali. Namun, penerapan SKB tersebut belum sesuai harapan karena kenyataan di lapang masih ada kepentingan-kepentingan subsektor yang dominan dibandingkan integrasi semua subsektor. Hal ini terjadi akibat pedoman yang belum jelas tentang hubungan kerja antar lembaga pendukung pembangunan pertanian tersebut. SKB Mendagri dan Mentan yang diharapkan mampu memperlancar penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan selanjutnya mendukung perkembangan penyuluhan pertanian, ternyata belum berjalan sesuai rencana. Dengan demikian, penyuluhan pertanian pernah mengalami masa kejayaan pada masa awal dan pertengahan orde baru, namun di akhir masa orde baru penyuluhan pertanian makin terpuruk akibat pendekatan penyuluhan yang sentralistis yang tidak lagi sesuai dengan kondisi masyarakat serta perubahan kelembagaan penyuluh.

2.4. Masa Setelah Reformasi atau Otonomi Daerah (1998-sekarang)

Reformasi menandai berakhirnya pemerintahan orde baru pada tahun 1998, yang telah mengubah suasana otokrat dan sentralistis menjadi demokratis, yang dalam prakteknya mengharapkan adanya kebebasan dalam berpikir, berbicara, dan bertindak secara bertanggung jawab. Pada masa orde baru, masyarakat sudah terbiasa dengan suasana penyeragaman yang terpusat. Kebijakan tersebut sesuai kondisi masyarakat saat itu yang masih membutuhkan banyak bantuan dan bimbingan serta tujuan pemerintah dalam stabilitas nasional. Setelah berbagai bentuk pembangunan dilakukan tentunya telah mempengaruhi kondisi masyarakat yang makin mandiri dan mampu menentukan pilihan. Dengan demikian, kondisi masyarakat tersebut membutuhkan lingkungan yang

mengakui kemampuan atau potensi setempat dengan segala keragaman, dan bukan lagi bersifat seragam.

Berbagai upaya dilakukan untuk mengakomodasi tuntutan masyarakat yang makin berkembang, terutama mendukung pembangunan pertanian yang sesuai keinginan dan kemampuan masyarakat setempat. Reformasi juga berpengaruh terhadap penyuluhan pertanian di Indonesia, baik individu penyuluh dengan lembaga penyuluhan, kegiatan penyuluhan, kebijakan pemerintah, serta masyarakat petaninya. Salah satunya adalah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Dengan undang-undang ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus peningkatan kualitas sumber daya manusianya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah (terutama masyarakatnya).

Pelaksanaan undang-undang tersebut telah mengubah kebijakan pemerintah tentang pembangunan pertanian termasuk kebijakan dalam penyuluhan pertanian, antara lain pengalihan tanggung jawab penyelenggaraan penyuluhan pertanian dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Keadaan tersebut berdampak pada perubahan kelembagaan penyuluhan pertanian yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, termasuk kebijakan dan program-program penyuluhan yang semula bersifat nasional penyeragaman, sekarang berubah bersifat spesifik lokal. Selain itu, masyarakat petani tidak lagi diharuskan mengikuti program-program pemerintah, petani boleh memutuskan sendiri komoditas yang akan diusahakan. Dengan demikian, setelah masa reformasi dan penerapan otonomi daerah, kegiatan pembangunan pertanian lebih banyak dilakukan atas dasar prakarsa daerah masing-masing. Kondisi ini membutuhkan SDM dengan kualitas yang makin tinggi. Selain tuntutan reformasi dan otonomi daerah, perkembangan penyuluhan pertanian di akhir abad 20 dan di awal abad 21 ini dipengaruhi oleh semakin berkualitasnya petani, tuntutan pasar global, kenyataan bahwa peran sektor pertanian bukan lagi andalan, fasilitas dan prasarana berusaha yang makin membaik, kemajuan bidang pertanian yang tidak merata di semua wilayah, dan keragaman lokal (Slamet, 2001b). Dengan demikian, penyuluhan pertanian diharapkan menerapkan pendekatan yang sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini dengan memperhatikan ragam wilayah (spesifik lokal), kebutuhan, dan potensi setempat.

Faktor-faktor tersebut akan membutuhkan penyuluh pertanian dengan kemampuan tinggi dan beragam. Penyuluh pertanian harus mampu menyediakan berbagai program penyuluhan serta meningkatkan kualitas diri penyuluh pertanian. Jika tidak demikian, maka penyuluh tidak akan mampu menjadi pendamping petani, yang akhirnya petani akan makin jauh dari para penyuluh pertanian. Dengan kata lain, perkembangan penyuluhan pertanian tidak lepas dari upaya perbaikan internal penyuluh baik kemampuan penyuluh

dan kelembagaan serta jaringannya, di samping faktor luar yang sangat dominan berpengaruh.

Sejarah penyuluhan pertanian di Indonesia mengalami pasang surut. Berawal dari pengangkatan 5 penasihat pertanian pada tahun 1908 yang tidak memiliki kewenangan pengawasan terhadap petani, kemudian berkembang dan mencapai masa kejayaan pada tahun 1984. Saat itu dicapai swasembada pangan dengan pendekatan keseragaman program “panca usahatani” dan penyuluh mendapat pengakuan petani, lalu penerapan otonomi daerah yang memperhatikan keragaman wilayah sehingga membutuhkan program penyuluhan pertanian bersifat lokal spesifik serta menuntut kemampuan penyuluh pertanian yang makin tinggi. Penyuluhan pertanian menghadapi banyak tantangan, misal yang bersifat internal organisasi penyuluhan, kebijakan-kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang kadang belum selaras dengan kegiatan penyuluhan, serta komitmen dan kemampuan dari individu penyuluh.

Berbagai metode, pendekatan, dan program penyuluhan dilakukan dengan segala penyempurnaannya dalam rangka mencapai tujuan penyuluhan pertanian. Keberhasilan menghadapi tantangan akan mengukuhkan kembali posisi dan kontribusi penyuluhan dalam pembangunan pertanian. Stabilitas suatu negara antara lain ditentukan oleh ketersediaan pangan bagi penduduknya, berarti sektor pertanian tetap memegang peran penting. Petani sebagai pelaku di garis depan sektor pertanian perlu inovasi secara kontinu yang diadopsi melalui kegiatan penyuluhan, agar mampu berperan dan mau melakukan perbaikan dalam pembangunan pertanian. Dengan demikian, penyuluhan pertanian merupakan komponen yang harus ada dalam pembangunan pertanian suatu negara.

Dari uraian sejarah perkembangan penyuluhan pertanian di Indonesia, AS, Inggris, dan Thailand, yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik garis besar bahwa penyuluhan dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memecahkan masalah yang dihadapi petani, upaya meningkatkan produksi pertanian, dan memperbaiki usahatani. Dengan demikian, penyuluhan diawali dengan proses menyampaikan informasi kepada sasaran yang selanjutnya dilakukan proses untuk mendorong sasaran agar mau menerapkan informasi tersebut yang sesuai dengan permasalahannya.

3. Topik Diskusi Materi Modul 1

Mengingat potensi sektor pertanian di Indonesia dengan sumber daya manusia petani lebih dari 50% jumlah penduduknya, akankah penyuluhan pertanian di Indonesia mengalami kemajuan atau kemunduran? Bagaimana pendekatan penyuluhan yang sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi? Bagaimana upaya terbaik dalam mengembalikan fungsi penyuluhan pertanian yang seharusnya? Silakan Anda mendiskusikan dengan teman-teman kelompok belajar Anda.

4. Evaluasi Hasil Pemahaman Materi Modul 1

Setelah anda mempelajari uraian tentang sejarah perkembangan penyuluhan pertanian di atas, cobalah menguji tingkat pemahaman anda dengan menjawab soal-soal latihan berikut. Usahakan untuk menjawab sendiri lebih dahulu, jika anda masih kesulitan cobalah ulangi memahami materi di atas; baru selanjutnya anda mendiskusikan jawaban Anda dengan teman-teman kelompok belajar. Anda harus aktif dalam diskusi agar benar-benar memahami materi yang anda pelajari.

- 1) Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan penyuluhan pertanian di Amerika Serikat, Inggris, dan Thailand. Adakah persamaan ataupun perbedaannya di ketiga negara tersebut?
- 2) Bagaimana awal perkembangan penyuluhan pertanian di Indonesia?
- 3) Jelaskan perbedaan utama perkembangan penyuluhan pertanian di Indonesia pada masa kemerdekaan dan masa orde baru!
- 4) Dalam kondisi Indonesia saat ini, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan penyuluhan pertanian!

Modul 2

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP PENYULUHAN PERTANIAN

Materi pada modul 2 ini memiliki muatan sebagai berikut :

- **Capaian belajar untuk sikap dan perilaku (*Learning Outcome for Attitudes and Values*) :**

Sikap : AV 1 : Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

- **Capaian belajar untuk Kemampuan Bidang Ilmu Pengetahuan (*Learning Outcome for Science Competencies*)**

SC 2/CP-KIP 2: Mampu memahami pengetahuan dan teknologi dalam bidang penyuluhan pertanian melalui kajian program pemerintah untuk menghasilkan karya inovatif bidang agribisnis yang teruji melalui program penyuluhan pertanian.

SC 3/CP-KIP 3: Mampu memahami bidang ilmu manajemen, bisnis, kewirausahaan, kelembagaan, sosiologi, penyuluhan dan komunikasi, serta ilmu-ilmu pertanian untuk pengembangan pembangunan agribisnis berkelanjutan.

- **Capaian belajar untuk Kemampuan Bidang Pekerjaan (*Learning Outcome for Occupational Skills*)**

CLO 1/CPMK 1 : Mahasiswa mampu memahami, dan menjelaskan prinsip-prinsip penyuluhan pertanian serta aspek sosial-budaya di pedesaan untuk pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dalam bidang agribisnis

1. Pengertian Penyuluhan

Istilah penyuluhan pada dasarnya digunakan hampir di segala bidang, tidak hanya di bidang pertanian. Sehingga masyarakat memiliki pengertian dan pemahaman yang beragam terhadap istilah “penyuluhan”, tergantung di bidang mana masyarakat tersebut berkiprah. Ketidakteragaman pengertian penyuluhan dapat terjadi karena kekurangpahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip dan hal-hal yang harus dilaksanakan dalam penyuluhan, akibatnya masyarakat menggunakan dan memberikan tanggapan serta penilaian yang berbeda. Dampak lebih lanjut dari kekurangpahaman tersebut

adalah dikhawatirkan akan adanya kebijakan ataupun kegiatan penyuluhan yang tidak tepat terhadap permasalahan penyuluhan pertanian khususnya dan pembangunan pertanian pada umumnya. Oleh karena itu, sebelum mempelajari materi modul ini lebih jauh, perlu dipahami dulu pengertian “penyuluhan”, sehingga anda memiliki pengertian yang sama terhadap istilah “penyuluhan”.

Terdapat beberapa istilah penyuluhan yang digunakan oleh berbagai pihak. Istilah tersebut ada kemungkinan memiliki tujuan sama. Beberapa istilah yang memiliki pengertian hampir sama dengan penyuluhan adalah perkembangan (Malaysia), *extension* (Inggris), *voorlichting* (Belanda), *aufklarung* dan *erziehung* (Jerman), *forderung* (Austria), *vulgarisation* (Perancis), *capasitacion* (Spanyol).

Di Inggris, kegiatan penyuluhan menggunakan istilah *university extension* atau *extension of the university*. Hal ini karena kegiatan penyuluhan lahir, dikembangkan, dan dikelola oleh universitas. Menurut Van den Ban dan Hawkins (1999), James Stuart dari Trinity College, di Cambridge, Inggris, dianggap sebagai bapak penyuluhan pertama, karena dedikasinya di bidang penyuluhan pertanian. Pada tahun 1867-1868 James Stuart untuk pertama kalinya memberikan ceramah kepada perkumpulan wanita dan perkumpulan pekerja pria di Inggris Utara. Pada tahun 1871 Stuart mengusulkan pada Universitas Cambridge agar penyuluhan dijadikan mata kuliah. Selanjutnya pada tahun 1873 Universitas Cambridge menerapkan sistem penyuluhan, lalu diikuti oleh Universitas London pada tahun 1876 dan Universitas Oxford pada tahun 1878. Menjelang tahun 1880, kegiatan ini telah merupakan gerakan pendidikan dalam perguruan tinggi yang melebarkan sayapnya ke luar kampus. Dengan demikian, penyuluhan merupakan kegiatan pendidikan di luar pendidikan formal di kampus, yang ditujukan bagi orang-orang dewasa.

Sementara itu, seperti uraian pada modul 1 sebelumnya, bahwa penyuluhan pertanian di Amerika juga berkembang dari universitas yang sasaran pengajarannya tidak lagi hanya terbatas di lingkungan kampus tetapi diperluas hingga semua pihak yang hidup di lingkungan manapun. Pada awal abad 20, istilah penyuluhan pertanian mulai digunakan secara umum. Pengertian istilah penyuluhan tersebut merupakan bentuk “pendidikan untuk orang dewasa” yang menempatkan pengajar sebagai staf universitas. Kegiatan pendidikan tersebut dilakukan oleh akademi pertanian selama bertahun-tahun dengan mempekerjakan penyuluh daerah di setiap negara bagian.

Perkembangan selanjutnya, akibat penurunan jumlah petani, maka penyuluh memberikan pelayanan kepada semua warga tentang informasi yang tersedia dari berbagai sumber di universitas. Dengan demikian, penyuluhan di Amerika merupakan pendidikan orang dewasa yang berawal di bidang pertanian (*agricultural extension*) selanjutnya berkembang di bidang lain (*extension education*). Di Belanda digunakan istilah *voorlichting* yang berarti memberi penerangan untuk menolong seseorang menemukan jalannya. Istilah ini juga

diterapkan pada negara-negara yang menjadi jajahan Belanda saat itu, termasuk Indonesia. Malaysia menggunakan istilah perkembangan yang merupakan pengaruh dari bahasa Inggris. Istilah *aufklarung* dalam Bahasa Jerman berarti pencerahan yang digunakan di bidang kesehatan, sedangkan *erziehung* dipakai dalam bidang pertanian yang memiliki pengertian pendidikan, yang menekankan pada proses mengajar seseorang sehingga dapat memecahkan sendiri masalahnya.

Beberapa istilah lain yang mempunyai pengertian hampir sama adalah *forderung* (Austria) yang berarti menggiring seseorang ke arah yang diinginkan. Pengertian ini sama dengan yang digunakan di Korea yaitu bimbingan pedesaan. Istilah *vulgarisation* (Perancis) menekankan pentingnya menyederhanakan pesan bagi orang awam. *Capasitacion* (Spanyol) menunjukkan adanya keinginan untuk meningkatkan kemampuan manusia yang dapat diartikan dengan pelatihan. Istilah-istilah tersebut memberikan pengertian sama yaitu sebagai upaya memberi pengetahuan kepada sasaran sehingga dari tidak tahu menjadi tahu, serta upaya meningkatkan kemampuan masyarakat melalui suatu proses pelatihan atau belajar. Dengan demikian, istilah **“penyuluhan”** mengandung arti **kegiatan pendidikan terhadap sasaran, yaitu petani yang umumnya orang-orang dewasa, yang dilakukan di luar pendidikan formal atau disebut pendidikan non-formal, sehingga sasaran memiliki kemampuan lebih dan dapat mengambil keputusan untuk mencapai keinginannya.**

Dalam penyuluhan ada materi atau informasi yang disampaikan kepada petani dengan pendekatan, cara, atau metode tertentu sehingga sesuai dengan kondisi petani. Namun, dalam perkembangannya di beberapa negara yang menggunakan istilah *agricultural extension*, muncul pengertian penyuluhan yang telah kehilangan “makna pendidikan”. Mereka memberikan pengertian bahwa penyuluhan adalah kegiatan untuk menjamin peningkatan produksi pertanian, yang merupakan tujuan utama kebijakan pembangunan pertanian. Tujuan tersebut dicapai melalui cara merangsang petani untuk memanfaatkan teknologi produksi modern dan ilmiah yang dikembangkan melalui penelitian. Sesungguhnya, prinsip utama penyuluhan adalah “pendidikan”, sehingga prinsip-prinsip pendidikan yang mengutamakan proses perkembangan pada diri sasaran harus diterapkan serta bersifat berkelanjutan, ada proses timbal balik, dan bukan sekedar menyampaikan (transfer) teknologi yang hanya untuk kebutuhan sesaat.

2. Definisi Penyuluhan

Berdasarkan istilah-istilah di atas, Van den Ban dan Hawkins (1999) menyimpulkan bahwa ada kesamaan persepsi terhadap pengertian istilah “penyuluhan”, yaitu sebagai proses yang ada keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar dengan tujuan membantu

sesamanya memberikan pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan bertitik tolak pada kepentingan sasaran yaitu petani. Penyuluhan sebagai proses membantu petani dalam mengambil keputusan dari berbagai alternatif pemecahan masalah melalui proses belajar atau proses timbal balik antara penyuluh dan sasaran.

Menurut Soemodiwirjo dalam Departemen Pertanian (2001) penyuluhan pertanian merupakan usaha-usaha untuk memajukan ekonomi dan keadaan sosial rakyat, dan harus diperhatikan bahwa kegiatan penyuluhan pertanian adalah kegiatan pendidikan. Alwi dalam Departemen Pertanian (2001) menyatakan bahwa penyuluhan pertanian adalah suatu usaha untuk memberi pengajaran, pendidikan, dan bimbingan pada petani untuk mempertinggi kecerdasan mereka umumnya, pengetahuan teknik khususnya, membangkitkan kerja sama serta giat menolong diri sendiri sehingga dapat menghasilkan cukup untuk memenuhi kehidupan yang layak atau sejahtera.

Sementara itu, Padmanegara dalam Departemen Pertanian (1978) mengartikan penyuluhan pertanian sebagai sistem pendidikan di luar sekolah (non-formal) untuk para petani dan keluarganya (ibu tani, pemuda tani) agar mereka mampu, sanggup, dan berswadaya memperbaiki/meningkatkan kesejahteraannya sendiri serta masyarakatnya. Jadi, tujuan akhir atau tujuan jangka panjang kegiatan penyuluhan adalah tercapainya kesejahteraan sasaran penyuluhan, yaitu petani. Berikut ini beberapa pengertian penyuluhan pertanian menurut pakar penyuluhan pertanian dari luar negeri yang dikutip dari Departemen Pertanian (2001) :

- Kegiatan penyuluhan merupakan sistem pendidikan di luar sekolah tempat orang-orang dewasa dan pemuda belajar sambil berpraktek (Kelsey, 1962).
- Pendidikan penyuluhan merupakan ilmu terapan yang mengandung isi atau materi yang berasal dari hasil penelitian, pengalaman di lapang yang terakumulasi, serta prinsip-prinsip yang disintesis dari ilmu-ilmu perilaku (*behavioural sciences*) dengan menggunakan suatu teknologi yang bermanfaat.
- Hal ini menjadi suatu filosofi, prinsip-prinsip, materi, dan metode-metode dengan fokus masalah-masalah pendidikan luar sekolah bagi orang dewasa dan pemuda (Leagans, 1961).
- Penyuluhan pertanian berintikan pada pendidikan orang dewasa yang bertujuan memberi petunjuk dan mempengaruhi petani agar mengadopsi hal-hal yang paling baik dalam bertani. Pendidikan ini akan mengubah mental petani agar mampu menyatukan ide-ide dan metode-metode baru serta mengambil inisiatif dalam meningkatkan pengetahuan dan praktek-praktek dalam berusahatani (Cruz, 1959).

Jadi, ketiga pakar tersebut lebih menekankan bahwa penyuluhan pertanian sebagai proses pendidikan non-formal, khususnya dalam menghadapi permasalahan petani. Pengertian secara lebih rinci disampaikan oleh Laidlaw

dalam Departemen Pertanian (2001), bahwa penyuluhan pertanian berarti memberikan pendidikan kepada orang-orang yang memang tidak memiliki akses langsung dengan institusi pendidikan. Jika pendidikan tidak diberikan kepada mereka, maka mereka akan tetap tidak memiliki pendidikan, pelatihan ataupun informasi yang diperlukan untuk meningkatkan kehidupannya.

Penyuluhan adalah proses difusi yaitu informasi diberikan oleh sumber utama kepada sejumlah besar orang yang akan memperoleh manfaat darinya. Lebih lanjut, penyuluhan merupakan sistem pendidikan yang terorganisasi dalam rangka membantu orang lain agar orang tersebut dapat membantu diri sendiri *helping people to help themselves*. Pengetahuan sebagai isi dari penyuluhan diperoleh melalui pusat-pusat penelitian, laboratorium dan berbagai institusi pendidikan, perpustakaan, dokumendokumen dan laporan-laporan negara. Melalui kegiatan penyuluhan, selanjutnya pengetahuan atau informasi tersebut diproses atau dikemas sehingga tersedia bagi petani dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Selanjutnya, secara resmi pengertian tentang penyuluhan pertanian dicantumkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, yang menyatakan bahwa penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Penyempurnaan definisi penyuluhan pertanian selanjutnya dilakukan pemerintah menyesuaikan dengan penyempurnaan fungsi penyuluhan masa kini, yang tertera dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian, menyatakan bahwa : Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi Pelaku Utama serta Pelaku Usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup .

Adapun yang dimaksud dengan Pelaku utama kegiatan Pertanian yang selanjutnya disebut Pelaku Utama adalah petani, pekebun, peternak, beserta keluarga intinya. Sedangkan Pelaku Usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha prasarana budi daya pertanian, sarana budi daya pertanian, budi daya pertanian, panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.

Proses penyuluhan tersebut terjadi secara dua arah dan ada aliran umpan balik yang berkelanjutan antara penyuluh dan sasaran. Uraian ini menjelaskan bahwa penyuluhan bukan sekedar menyampaikan pengetahuan, tetapi proses yang berlanjut sampai sasaran mengetahui pengetahuan tersebut dan mampu memutuskan untuk mau memanfaatkannya sesuai permasalahan yang dihadapi. Menurut Departemen Pertanian (2001), penyuluhan pertanian adalah upaya pemberdayaan petani beserta keluarganya, masyarakat pertanian dan pelaku agribisnis lainnya yang dilakukan terutama melalui kegiatan pendidikan (luar sekolah) di bidang pertanian, agar mereka dinamis dan berkemampuan untuk memperbaiki kehidupannya dengan kekuatan sendiri sehingga mampu mewujudkan masyarakat agribisnis yang sejahtera. Sebagai kegiatan pendidikan, penyuluhan pertanian adalah upaya untuk membantu mereka dalam menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif. Kegiatan utama penyuluhan pertanian meliputi:

- 1) memfasilitasi proses pembelajaran petani dan keluarganya, masyarakat pertanian dan pelaku agribisnis lainnya,
- 2) memberikan rekomendasi dan mengikhtiarkan akses petani ke sumber-sumber informasi dan sumber daya yang akan membantu mereka dalam memecahkan masalah yang dihadapi,
- 3) membantu menciptakan iklim usaha yang menguntungkan, dan
- 4) mengembangkan organisasi petani menjadi organisasi sosial ekonomi yang tangguh.

Dengan demikian, penyuluhan pertanian berupaya melakukan proses belajar agar petani dapat: **bertani lebih baik, berusahatani lebih menguntungkan, berorganisasi lebih baik, bermasyarakat lebih baik, berlingkungan yang lebih baik, dan hidup lebih sejahtera**. Pengertian penyuluhan di sini sudah melibatkan unsur agribisnis, sesuai dengan tuntutan kondisi saat ini.

Dari beberapa pengertian di atas, terdapat banyak kesamaan dalam mengartikan penyuluhan pertanian, meskipun ada beberapa perbedaan. Inti sari beberapa pengertian penyuluhan pertanian tersebut adalah sebagai suatu proses pendidikan di luar sekolah, melalui proses pengalaman belajar *learning experience* dengan aliran umpan balik secara berkelanjutan, yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petani, sampai ada perubahan pada diri petani yaitu mampu bertani lebih baik, berusahatani lebih baik, hidup sejahtera secara berkelanjutan. Jadi, pengertian penyuluhan pertanian adalah proses pendidikan non-formal bagi orang dewasa yaitu petani sehingga terjadi perubahan perilaku petani yang meliputi pengetahuan, kemampuan dan kemauan petani yang lebih baik agar mempunyai kesejahteraan hidup secara berkelanjutan.

3. Konsep Utama Pengertian Penyuluhan

Apabila dicermati, maka pengertian penyuluhan pertanian di atas mengandung beberapa konsep utama, yaitu:

- proses pendidikan dengan sistem pendidikan non-formal bagi orang dewasa,
- proses perubahan kemampuan petani, dan
- proses memberdayakan petani.

Jadi, penyuluhan bukan hanya proses menyampaikan informasi saja. Penyebutan konsep-konsep tersebut dalam penyuluhan pertanian tergantung pada sudut pandang yang digunakan pemakai dalam meninjau pengertian penyuluhan, misal bisa menggunakan sudut pandang proses pendidikan, sudut pandang sasaran pendidikan orang dewasa, sudut pandang proses perubahan, atau sudut pandang proses meningkatkan daya dari sasaran. Yang penting, semua konsep tersebut ada dan dilakukan dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Berikut ini uraian masing-masing konsep tersebut.

3.1. Penyuluhan Sebagai Proses Pendidikan

Pendidikan adalah usaha atau proses mengadakan perubahan perilaku manusia secara teratur sejak lahir sampai mati, melalui cara-cara tertentu (misal: belajar) ke arah yang diharapkan. Cobalah membedakan pengertian pendidikan dengan pengertian belajar. Belajar memiliki pengertian usaha aktif seseorang untuk mengubah perilakunya sendiri. Orang yang belajar melakukan interaksi dengan subjek atau materi yang dipelajari. Seseorang yang mendapat pendidikan akan mengalami perubahan perilaku yang didasarkan pada ilmu-ilmu dan pengalaman yang telah mendapat pengakuan dari masyarakat. Perubahan tersebut meliputi perubahan tentang hal-hal yang diketahui (pengetahuan) misalnya pengetahuan tentang jenis-jenis varietas padi, jenis dan dosis pupuk; perubahan tentang hal-hal yang dapat dikerjakan (keterampilan), misalnya keterampilan menggunakan traktor, keterampilan berpikir atau merencanakan tumpangsari; dan perubahan tentang hal-hal yang dapat dirasakan (sikap) misalnya mempunyai pandangan baru, berpikir positif dari negatif, keinginan terus belajar, serta kemauan memperbaiki diri.

Penyuluhan pertanian dilakukan agar petani memiliki kemampuan baru untuk menyelesaikan permasalahannya, artinya penyuluh berusaha melakukan perubahan terhadap sasaran yaitu petani. Petani yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak mampu menjadi mampu, dan dari tidak mau menjadi petani yang mau melakukan perbaikan diri, serta mau mengambil keputusan dari berbagai alternatif untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Dengan demikian penyuluhan adalah kegiatan pendidikan bagi petani yang disesuaikan dengan kondisi petani. Penyuluhan adalah proses mengubah perilaku petani menjadi lebih baik agar mampu memecahkan tantangan yang dihadapi serta meningkatkan kualitas hidupnya.

Sasaran pendidikan dalam penyuluhan pertanian adalah para petani, orang dewasa yang telah memiliki kemampuan tertentu dengan sejumlah pengalamannya, sehingga penyuluhan merupakan pendidikan khusus bagi orang dewasa yang harus sesuai dengan karakteristik orang dewasa tersebut. Penyuluhan harus menerapkan filsafat dan prinsip-prinsip pendidikan khususnya pendidikan untuk orang dewasa, serta memahami karakteristik orang dewasa dengan segala kondisi dan kebutuhannya. Agar proses pendidikan dalam penyuluhan terhadap petani dan keluarganya berjalan baik maka hal-hal yang harus diperhatikan adalah :

- 1) Petani sehari-hari memiliki kesibukan dan kegiatan dalam rangka mencari nafkah, terutama di pedesaan;
- 2) Petani mempunyai pikiran, pandangan, keinginan, dan kebiasaan yang dipengaruhi lingkungan pedesaan (spiritual, material, dan fisik);
- 3) Perubahan apapun akan mempengaruhi penghidupan dan kehidupan petani.

Sehingga, agar terwujud proses pendidikan bagi petani, maka perlu kegiatan-kegiatan untuk memprogresifkan struktur pedesaan dan untuk mendinamiskan masyarakat pedesaan secara keseluruhan (Padmanagara, 1979). Sesuai dengan keadaan, kedudukan, kesibukan, dan sifat sasaran pendidikan yaitu petani beserta keluarganya tersebut maka diperlukan sistem pendidikan tersendiri yang lengkap didasari dengan filsafat, prinsip, tujuan, pendekatan, metode, dan teknik tertentu, serta diselenggarakan oleh organisasi dengan tenaga yang khusus pula. Sistem pendidikan yang sesuai dengan karakteristik tersebut dinamakan “penyuluhan pertanian”. Kegiatan penyuluhan adalah proses pendidikan non-formal jika dilihat dari sistem yang diterapkan. Program atau isinya disesuaikan dengan “kebutuhan” sasaran. dan caranya sesuai dengan “keadaan” sasaran.

Penyuluhan pertanian disebut pendidikan orang dewasa jika dilihat dari sasaran didik yaitu petani yang umumnya orang dewasa dengan segala karakteristiknya. Berdasarkan tempat atau lingkungannya terdapat pendidikan dalam keluarga atau disebut pendidikan in-formal; pendidikan di sekolah yang berjenjang atau disebut pendidikan formal. Pendidikan yang dilakukan di luar keduanya, bukan di dalam keluarga dan bukan di sekolah, tidak berjenjang dan sesuai kebutuhan atau permasalahan yang sedang dihadapi sasaran didik, disebut pendidikan non-formal. Agar lebih jelas pemahaman Anda tentang sistem pendidikan formal dan non-formal, Tabel 2.1 menyajikan perbedaan antara pendidikan formal dan non-formal.

Tabel 2.1. Perbedaan antara pendidikan formal dan non formal

No	Komponen	Pendidikan Formal	Pendidikan Non Formal
1	Kurikulum	Baku, telah ditetapkan sesuai kompetensi yang akan dihasilkan	Fleksibel, tergantung kebutuhan sasaran sesuai permasalahan yang akan diselesaikan
2	Tujuan Pendidikan	Perubahan berjenjang yang bersifat baku	Perubahan yang diharapkan spesifik untuk kelompok sasaran tertentu, berdasar kondisi sasaran
3	Jangka Waktu	Relatif berjangka waktu panjang	Relatif lebih pendek, tergantung kebutuhan sasaran
4	Materi	Relatif baku sesuai kurikulum yang telah ditetapkan	Tergantung kebutuhan dan masalah yang sedang dihadapi sasaran
5	Tempat Kegiatan Pendidikan	Pada umumnya di dalam kelas, secara terstruktur	Sesuai kebutuhan materi dan kesepakatan, bisa di kelas, di lapang, atau di tempat percobaan
6	Waktu Pelaksanaan dan pengajar	Jadwal sudah terstruktur sehingga waktu pelaksanaan tertentu, misal semester atau tahun akademik	Tergantung kebutuhan sasaran dan kesepakatan antara peserta
7	Karakteristik Sasaran	Relatif homogen, baik umur maupun kemampuan dan pengalaman, menurut kualifikasi tertentu	Relatif heterogen dari segi umur, latar belakang sosial budaya, pendidikan, orang dewasa dengan berbagai pengalamannya
8	Karakteristik Pengajar	Memiliki kualifikasi persyaratan formal (misal sarjana, master).	Memiliki kemampuan sesuai materi yang dibutuhkan sasaran didik (misal: seseorang yang berpengalaman dalam bidang tertentu)
9	Metode yang Digunakan	Lebih formal atau baku; misal: kuliah, pengalaman terstruktur	Lebih beragam tergantung Kondisi perilaku yang akan diubah, misal: metode demonstrasi, karyawisata, dll
10	Interaksi Sasaran dengan Pengajar	Cenderung bersifat formal, komunikasi satu arah lebih dominan, transmisi vertikal dari pengajar ke sasaran didik	Cenderung kurang formal, komunikasi dua arah lebih dominan, transmisi lateral, timbal balik
11	Legalitas hasil belajar	Sasaran memperoleh ijazah atau sertifikat dan gelar	Sasaran tidak mendapat gelar, tetapi memilih kemampuan menyelesaikan permasalahan
12	Manfaat	Pendidikan untuk bekal masa mendatang, mempersiapkan sasaran didik agar dapat menghadapi masalah di masa depan, pendidikan untuk kebutuhan yang akan datang	Untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, untuk kebutuhan saat ini, untuk melengkapi pendidikan formal agar sasaran didik dapat berperan saat terjun di masyarakat

3.2. Penyuluhan Sebagai Upaya Perubahan

Kita tentu percaya bahwa di dunia ini tidak ada yang kekal dan tidak ada yang statis, semua makhluk di dunia mengalami perubahan. Namun, ada perubahan yang sifatnya alami, yang umumnya berjalan lambat, kurang membutuhkan sumber daya, tetapi hasil dari perubahan tersebut belum tentu sesuai keinginan dan mungkin tertinggal dari yang lain. Selain itu, ada pula perubahan yang sifatnya buatan atau disengaja, yaitu dilakukan campur tangan manusia dengan menggunakan sumber daya lebih banyak, agar perubahan berjalan lebih cepat. Perubahan yang disengaja bertujuan agar terjadi kondisi sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan perubahan lingkungannya, sehingga tidak tertinggal dengan perubahan bidang lain yang ada di sekitarnya.

Perubahan adalah suatu keadaan dari yang sebelumnya menjadi keadaan yang diinginkan, dari yang kurang menjadi lebih, dari yang sedikit menjadi banyak, dari tidak mampu menjadi mampu, ataupun dari perilaku sekarang menjadi perilaku yang diinginkan. Pertanyaannya, mengapa harus berubah? Untuk apa berubah? Untuk dapat menjawab pertanyaan itu, coba perhatikan sekitar Anda. Pada tahun 1970-an sampai dengan 1980-an Indonesia hanya memiliki satu stasiun televisi, tapi saat ini ada lebih dari 10 stasiun televisi nasional. Pesatnya perkembangan media telah mendorong kecepatan perubahan informasi, keragaman jenis dan volume informasi, kemudahan akses informasi, yang berdampak pada kecepatan perubahan kehidupan menyesuaikan dengan perubahan informasi tersebut (tentunya dipilih informasi yang paling sesuai dengan norma yang ada). Seseorang yang kurang mengakses informasi dengan sendirinya tidak akan mampu mengikuti perubahan sekitarnya, dan makin lama akan tersisih karena tidak mampu menyesuaikan maupun bersaing dengan yang lain. Demikian juga dengan petani, diharapkan selalu mengikuti dan memiliki akses terhadap setiap perubahan di sekitarnya termasuk mampu menyesuaikan dengan perubahan tersebut agar mampu berperan dan bersaing di bidang pertanian. Dengan kata lain, perubahan terhadap petani perlu dilakukan agar mampu berperan dalam pembangunan yang dinamis khususnya pertanian yang sangat dipengaruhi oleh perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi sekitarnya.

Dengan demikian, petani diharapkan akan selalu memiliki perilaku dengan kemampuan lebih baik dalam berusahatani sehingga mampu memperbaiki kesejahteraan hidupnya secara berkelanjutan. Penyuluhan pertanian merupakan kegiatan yang berupaya meningkatkan kemampuan petani dengan pendekatan tertentu, agar petani mampu mengambil keputusan yang tepat terkait dengan penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Kenyataannya, tidak selalu setiap petani menyadari atau merasa akan kebutuhan untuk berubah termasuk kebutuhan untuk menambah ilmu pengetahuan. Jika demikian, maka penyuluh pertanian berperan menumbuhkan kesadaran dan rasa membutuhkan petani terhadap perubahan dan penambahan ilmu pengetahuan, menumbuhkan

“kesadaran petani” untuk berubah dengan perilaku yang lebih baik sehingga mampu berpacu secara mandiri dengan perubahan sekitar. Menumbuhkan kesadaran dan kebutuhan tersebut bukan bersifat paksaan, tetapi bersifat intrinsik dalam diri petani. Dengan kata lain, penyuluhan pertanian berupaya melakukan “perubahan” perilaku petani, dari yang kurang tahu menjadi lebih tahu, dari kurang mampu menjadi mampu, dan dari tidak mau menjadi mau melakukan perbaikan kualitas hidupnya.

Kegiatan penyuluhan pertanian dilakukan dengan memiliki tujuan, disesuaikan dengan kondisi petani dan wilayah setempat, sehingga perubahan yang diinginkan bisa tercapai sesuai yang dikehendaki dan sifatnya berkelanjutan. Penyuluhan pertanian tidak lain merupakan kegiatan perubahan yang dipercepat dengan cara sengaja dan terencana, terhadap perilaku petani agar menjadi lebih baik. Agar perubahan terencana tersebut tercapai dengan baik, beberapa faktor perlu diperhatikan dalam penyuluhan pertanian, yaitu adanya kegiatan perencanaan, pelaksanaan sesuai rencana, dan kegiatan evaluasi untuk mengetahui apakah pencapaian hasil sesuai rencana dan upaya perbaikan yang harus dilakukan. Selain itu, agar terjadi kegiatan perubahan secara cepat, perlu adanya tenaga khusus, yang disebut “agen pemercepat” atau “agen perubahan” atau “agen pembaharu”. Hal ini perlu dukungan petugas penyuluhan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan serta sikap yang sesuai; dan didukung dengan kelembagaan beserta jaringannya serta sarana dan prasarananya. Dengan demikian penyuluhan pertanian merupakan upaya perubahan yang terencana yang menggunakan pendekatan tertentu, dengan tujuan agar petani memiliki perilaku, kemampuan dan kehidupan yang lebih baik sesuai dengan perubahan zaman dan lingkungannya.

3.3. Penyuluhan Sebagai Pemberdayaan

Saat ini, mungkin kita lebih sering mendengar istilah pemberdayaan dibanding istilah “penyuluhan”, misalnya pemberdayaan masyarakat petani, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, pemberdayaan nelayan, pemberdayaan masyarakat korban gempa, dan lain-lain. Apa sebenarnya arti kata pemberdayaan tersebut?

Pemberdayaan berasal dari kata daya, mendapat imbuhan ber menjadi berdaya, dan mendapat imbuhan pe dan an sehingga menjadi pemberdayaan. Pemberdayaan (empowerment) diartikan sebagai proses yang mendorong seseorang atau kelompok agar memiliki daya atau kekuatan untuk menggunakan kemampuannya dalam hidupnya, dalam masyarakat, dengan cara bereaksi atau bertindak terhadap segala masalah penting yang dihadapinya. Pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang diberikan kepada sasaran sampai terjadi perubahan, yaitu dari seseorang yang tidak atau kurang memiliki daya hingga memiliki daya atau kemampuan atau kesanggupan.

Jika demikian apa beda pemberdayaan dengan penyuluhan? Apakah penyuluhan bisa disebut sebagai pemberdayaan? Untuk dapat menjawab

pertanyaan tersebut, Anda perlu mengetahui dulu dari penyuluhan dan pemberdayaan, kemudian Anda perlu mengetahui mengapa masyarakat petani harus diberdayakan? Cobalah mendiskusikan lebih dulu dengan teman-teman belajar Anda. Untuk mengetahui tujuan pemberdayaan, maka mulailah Anda berpikir tentang slogan “karena dia tahu maka dia akan berbuat sesuatu”, artinya jika seseorang memiliki daya atau kemampuan atau kualitas diri yang lebih maka dia akan melakukan sesuatu atau berpartisipasi dalam suatu kegiatan untuk memenuhi keinginannya atau kebutuhannya. Misalnya seorang petani, untuk memenuhi kebutuhannya maka dengan kemampuan yang dimilikinya dia akan berpartisipasi dalam kegiatan pertanian atau pembangunan pertanian untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Dengan kesadaran dan kemauan sendiri untuk berpartisipasi dalam pembangunan pertanian, seseorang akan bertanggung jawab dan dapat menikmati hasil pembangunan.

Pembangunan pertanian dikatakan berhasil hanya jika semua pihak terlibat termasuk pelaku pertanian di lini utama yaitu petani. Petani dapat menikmati hasil pembangunan pertanian apabila petani berpartisipasi dalam pembangunan. Untuk dapat berpartisipasi petani harus memiliki kualitas lebih atau daya, agar memiliki daya maka perlu upaya pemberdayaan kepada petani. Dengan kata lain, supaya petani menjadi lebih berkualitas dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan pertanian, maka masyarakat harus dibuat berdaya melalui kegiatan pemberdayaan. Upaya-upaya yang pernah dilakukan dalam mencapai tujuan pemberdayaan, antara lain melalui bimbingan, kursus, latihan, ataupun melalui bentuk pendidikan non-formal lainnya. Penyuluhan pertanian dilaksanakan untuk menambah kesanggupan atau daya para petani dalam usahanya memperoleh hasil-hasil yang dapat memenuhi keinginan-keinginannya. Artinya penyuluhan berupaya meningkatkan kemampuan petani dalam membuat keputusan yang tepat pada waktu yang tepat dan membangun masa depannya sendiri sesuai yang diinginkannya, dengan pemahaman terhadap perubahan maupun permasalahan di lingkungannya.

Penyuluhan pertanian bertujuan mengubah perilaku petani menjadi lebih baik yang meliputi peningkatan pengetahuan, kemampuan atau kesanggupan, dan kemauan untuk memperbaiki diri. Jadi, penyuluhan bertujuan meningkatkan daya dari petani, sehingga mereka mampu memperbaiki kualitas hidupnya dan lebih sejahtera secara berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan pertanian merupakan kegiatan pemberdayaan, dari petani yang tidak memiliki daya atau kurang memiliki daya menjadi petani yang berdaya sehingga mampu hidup lebih sejahtera secara mandiri dan berkelanjutan.

Margono Slamet (2001) mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan ungkapan lain dari tujuan penyuluhan. Masyarakat berdaya berarti masyarakat yang mampu, tahu, mengerti, paham, termotivasi, berkesempatan, melihat peluang, dapat memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerja sama, tahu berbagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani

menghadapi risiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai situasi.

Pemberdayaan berarti proses membuat masyarakat mampu membangun dirinya sendiri, memperbaiki kehidupannya sendiri, mampu meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri, tidak bergantung pada “belas kasih” pihak lain. Pemberdayaan akan menghasilkan masyarakat yang dinamis dan progresif secara berkelanjutan, sebab didasari oleh adanya motivasi intrinsik dan ekstrinsik sekaligus. Jadi penyuluhan merupakan upaya pemberdayaan.

3.4. Penyuluhan Bukan Hanya Proses Penerangan

Sebagian masyarakat masih memberikan arti yang sama antara kegiatan penerangan dan penyuluhan pertanian, sehingga sering menggunakan kedua istilah tersebut secara bergantian. Menurut Wiriaatmadja (1973), bagi seorang penyuluh pertanian, istilah “penerangan” berarti usaha penerusan atau transmisi suatu amanat atau informasi (misal berupa: keterangan, penjelasan, peraturan, fakta, ideologi, kepercayaan, dan pengetahuan lain) kepada orang-orang atau sasaran, supaya mereka menjadi tahu atau sadar akan adanya sesuatu. Jadi, pemberi penerangan tidak mempunyai maksud yang lebih jauh dari pada itu, misal ingin meyakinkan penerapan suatu anjuran; tidak ada kegiatan lanjutan apakah sasaran menerapkan informasi baru tersebut; tidak ada tindakan lanjutan berupa perubahan perilaku sasaran. Sementara itu pada diri sasaran yang menerima amanat tidak banyak terjadi perubahan perilaku kecuali sadar akan sesuatu hal akibat adanya penerangan tersebut. Sasaran menerima saja apa yang telah disajikan oleh pemberi penerangan, lepas dari masalah senang atau tidak senang terhadap amanat atau informasi tersebut.

Jadi, penerangan hanya proses penyampaian informasi. Sementara itu, penyuluhan pertanian memiliki upaya atau tindakan yang lebih jauh dan luas dari sekedar kegiatan penerangan. Penyuluhan pertanian meliputi penyampaian informasi, mendorong dan menumbuhkan motivasi ekstrinsik dan intrinsik sasaran dalam memilih dan menerapkan informasi melalui kegiatan pemberian contoh atau demonstrasi, mendorong dan membantu sasaran melakukan penerapan pengetahuan baru, dan melakukan interaksi serta memberi umpan balik kepada sasaran sampai sasaran mengalami perubahan perilaku. Dengan kata lain, penyuluhan pertanian merupakan kegiatan yang dilakukan penyuluh sehingga petani memiliki pengetahuan baru, mampu melakukan, sampai sasaran mau memperbaiki kualitas hidupnya dengan kesadaran bukan paksaan. Jadi, penyuluhan pertanian bertanggung jawab sampai sasaran mengalami perubahan perilaku, sedangkan penerangan hanya sekedar menyampaikan informasi tidak peduli apakah sasaran mengalami perubahan perilaku.

Untuk lebih jelas, antara penyuluhan pertanian dengan penerangan dapat dibedakan atas dasar faktor penting antara lain: tujuan, sifat komunikasi, syarat kemampuan petugas, cara pendekatan, serta sifat pesan atau materi yang disampaikan.

a. Tujuan

Tujuan penerangan adalah menyampaikan informasi kepada sasaran. Penerangan dianggap berhasil apabila isi atau pesan atau informasi yang disampaikan telah diterima oleh sasaran yang diinginkan. Sedangkan tujuan penyuluhan pertanian adalah proses menyampaikan informasi sampai terjadi perubahan perilaku pada sasaran. Jadi tujuan penyuluhan lebih jauh dan luas dibanding penerangan.

b. Sifat komunikasi

Penerangan menggunakan komunikasi yang bersifat satu arah (*one-way communication*); sedangkan penyuluhan pertanian menggunakan komunikasi dua arah (*two-way communication*) atau ada hubungan timbal balik antara petugas penyuluhan dengan sasaran yaitu petani. Penyuluhan pertanian mementingkan proses yang terjadi pada sasaran yang menerima informasi, yakin bahwa informasi tersebut sesuai dengan petani, dipahami bahkan dimanfaatkan dengan benar untuk memecahkan masalahnya.

c. Syarat kemampuan petugas

Petugas penerangan harus memiliki kemampuan menyampaikan informasi, sedangkan petugas penyuluhan pertanian selain harus memiliki kemampuan menyampaikan pesan, juga harus memahami/menguasai isi pesan, mampu mengemas informasi sesuai kondisi dan kebutuhan petani, mampu mempraktekkan materi sesuai yang dikehendaki pesan, mampu memberikan umpan balik, mampu menumbuhkan motivasi ekstrinsik dan intrinsik sasaran untuk selalu mau meningkatkan kemampuannya. Dengan demikian, petugas penyuluhan perlu mendapat pendidikan khusus agar memiliki kompetensi sebagai penyuluh.

d. Cara pendekatan

Kegiatan penerangan umumnya menggunakan pendekatan massal, yaitu informasi disampaikan secara massal melalui kelompok atau melalui siaran radio, televisi, dan media massa. Sedangkan kegiatan penyuluhan menggunakan semua pendekatan secara bertahap sesuai tahapan adopsi sasaran, misal secara massal, kelompok, dan individu. Proses belajar sasaran lebih diutamakan sehingga cara pendekatan yang digunakan disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan sasaran dalam penyuluhan pertanian.

e. Sifat pesan atau materi yang disampaikan

Pesan atau materi yang disampaikan melalui penerangan bersifat umum atau bebas, artinya informasi tersebut bisa diterima ataupun ditolak oleh sasaran, tidak akan mempengaruhi petugas penerangan. Sementara itu, materi pada kegiatan penyuluhan pertanian umumnya bersifat khusus, artinya sebelum informasi disampaikan maka petugas penyuluh harus mengetahui

permasalahan, kebutuhan, dan potensi sasaran sehingga informasi atau materi dikemas dan disajikan sesuai dengan kondisi sasaran tersebut.

4. Disiplin Ilmu Terkait Dengan Penyuluhan

Dari uraian di atas telah didapat penjelasan bahwa pengertian penyuluhan pertanian adalah sistem pendidikan non-formal bagi orang dewasa/petani, sehingga mampu mengambil keputusan dari beberapa alternatif yang ada untuk menyelesaikan permasalahannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidupnya secara berkelanjutan. Dengan memahami pengertian penyuluhan pertanian tersebut dan mengetahui bahwa penyuluhan bukan sekedar penerangan, maka akan didapat gambaran betapa berat dan besarnya peran seorang penyuluh pertanian. Untuk bisa melakukan perannya dengan benar sesuai pengertian tersebut, maka seorang penyuluh pertanian bukan hanya sekedar mampu menyampaikan informasi, tetapi lebih dari itu; yaitu penyuluh harus mampu mengubah atau memperbaiki perilaku petani agar mampu mengambil keputusan bagi perbaikan hidupnya.

Penyuluh pertanian harus mampu mengubah pengetahuan dan kemampuan petani menjadi lebih baik dan membangkitkan kemauan petani untuk selalu melakukan perbaikan kesejahteraan hidupnya secara berkelanjutan. Agar mampu melakukan peran tersebut, seorang penyuluh pertanian perlu menguasai beberapa ilmu terkait dengan penyuluhan. Ilmu apa saja yang terkait dengan kegiatan penyuluhan pertanian? Cobalah mendiskusikan dengan teman Anda. Awali diskusi Anda dengan membahas pengertian penyuluhan pertanian, lalu uraikan kemampuan-kemampuan apa yang harus dimiliki supaya dapat melakukan penyuluhan sesuai pengertian tersebut. Uraikan ilmu-ilmu apa yang diperlukan untuk bisa memiliki kemampuan menyuluh tersebut. Secara tidak langsung, Anda akan mendiskusikan tentang peran, fungsi, dan tugas penyuluh pertanian. Meskipun pembahasan tentang peran, fungsi, dan tugas penyuluh pertanian akan disajikan pada modul berikut, tidak ada salahnya Anda mengetahui sebagian pada Modul ini. Hasil diskusi Anda dan teman-teman tentu akan sampai pada kesimpulan bahwa yang terutama harus dikuasai seorang penyuluh pertanian adalah ilmu pertanian, sebagai *subject matter*, baik pertanian tanaman, peternakan, maupun perikanan sesuai spesialisasi yang diminati. Seorang penyuluh harus menguasai ilmu-ilmu terkait dengan “proses” menyuluh, yaitu ilmu pendidikan, psikologi, sosiologi, komunikasi, dan manajemen. Di samping itu mungkin perlu ilmu antropologi, ekonomi, dan lain-lain sesuai minat penyuluh dan permasalahan petani yang dihadapi.

Slamet (2003) menjelaskan bahwa penyuluh pertanian bertugas mengubah atau memperbaiki “usahatani” sekaligus mengubah “kualitas petani dan masyarakatnya” yang lebih baik. Untuk mengubah usahatani diperlukan kemampuan berdasarkan pengetahuan tentang ilmu dan teknologi pertanian serta ekonomi dan bisnis pertanian, sedangkan untuk mengubah petani dan

masyarakatnya perlu kemampuan berdasarkan pengetahuan tentang sosiologi atau kemasyarakatan, pendidikan orang dewasa, psikologi sosial, komunikasi sosial, kepemimpinan, serta ilmu lain terkait.

Dalam perkembangannya, penyuluhan pertanian merupakan ilmu yang interdisipliner. Dalam melakukan kegiatan penyuluhan, penyuluh harus menerapkan prinsip-prinsip belajar mengajar khususnya pada sistem pendidikan nonformal dengan peserta orang dewasa; prinsip-prinsip komunikasi termasuk di dalamnya proses adopsi dan difusi inovasi; prinsip-prinsip psikologi, khususnya psikologi sosial; prinsip-prinsip sosiologi, termasuk didalamnya pemahaman terhadap individu, interaksinya dalam kelompok dan masyarakat serta nilai-nilai yang ada; dan prinsip-prinsip manajemen termasuk mengembangkan kelompok dan organisasi, dan kepemimpinan; serta ilmu-ilmu lain yang diminati penyuluh. Tingkat kedalaman dan keluasan ilmu-ilmu yang harus dikuasai oleh seseorang tergantung dari tingkat spesialisasi yang diminati oleh seorang penyuluh, yaitu apakah sebagai penyuluh pertanian lapangan (subprofesional) atau penyuluh pertanian ahli (profesional). Dengan demikian, anggapan masyarakat bahwa setiap orang bisa melakukan kegiatan penyuluhan adalah tidak benar. Uraian di atas makin meyakinkan bahwa tidak setiap orang bisa melakukan penyuluhan, seperti yang selama ini menjadi anggapan masyarakat. Seorang penyuluh harus menguasai ilmu-ilmu tertentu. Hal penting yang harus dicatat adalah, “betapa mulianya peran penyuluh karena peran penyuluh pertanian sangat diharapkan oleh petani sehingga dapat terlibat dalam pembangunan pertanian khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya yang selanjutnya berdampak pada kesejahteraan petani yang lebih baik.

5. Evaluasi / Latihan Soal

Setelah anda mempelajari uraian tentang “pengertian penyuluhan pertanian” di atas, cobalah menguji tingkat pemahaman anda dengan menjawab soal-soal latihan berikut secara mandiri, setelah itu diskusikan jawaban anda dengan teman-teman kelompok belajar, agar benar-benar memahami materi yang dipelajari.

- 1) Jelaskan intisari pendapat pakar-pakar tentang pengertian penyuluhan pertanian!
- 2) Jelaskan bahwa penyuluhan pertanian adalah proses pendidikan, kaitkan dengan sistem pendidikan yang diterapkan dan karakteristik sasaran penyuluhan!
- 3) Kegiatan penyuluhan pertanian bukan hanya kegiatan penerangan. Jelaskan!
- 4) Setujukah Anda bahwa setiap orang bisa melakukan kegiatan penyuluhan pertanian. Jelaskan!

Modul 3

FALSAFAH DAN PRINSIP PENYULUHAN PERTANIAN

Materi pada Modul 3 ini memiliki muatan sebagai berikut :

- **Capaian belajar untuk sikap dan perilaku (*Learning Outcome for Attitudes and Values*) :**

Sikap : AV 1 : Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

- **Capaian belajar untuk Kemampuan Bidang Ilmu Pengetahuan (*Learning Outcome for Science Competencies*)**

SC 2/CP-KIP 2: Mampu memahami pengetahuan dan teknologi dalam bidang penyuluhan pertanian melalui kajian program pemerintah untuk menghasilkan karya inovatif bidang agribisnis yang teruji melalui program penyuluhan pertanian.

SC 3/CP-KIP 3: Mampu memahami bidang ilmu manajemen, bisnis, kewirausahaan, kelembagaan, sosiologi, penyuluhan dan komunikasi, serta ilmu-ilmu pertanian untuk pengembangan pembangunan agribisnis berkelanjutan.

- **Capaian belajar untuk Kemampuan Bidang Pekerjaan (*Learning Outcome for Occupational Skills*)**

CLO 1/CPMK 1 : Mahasiswa mampu memahami, dan menjelaskan prinsip-prinsip penyuluhan pertanian serta aspek sosial-budaya di pedesaan untuk pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dalam bidang agribisnis

Pada modul 3 ini, akan dikenalkan mengenal falsafah-falsafah dan prinsip-prinsip dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian, yang berbasis teori dan keilmuan penyuluhan. Bagian ini diperlukan karena perubahan paradigma pembangunan pertanian dan pedesaan ke arah desentralisasi, peningkatan daya saing, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, membawa konsekuensi terhadap paradigma penyuluhan. Mendengar kata penyuluhan, maka yang terlintas sebagian orang adalah penyuluh pertanian lapangan (PPL), petugas yang mengendarai motor,

datang mengunjungi petani di desa-desa, menyampaikan informasi dan teknologi pertanian, terkadang juga memandang bahwa penyuluhan merupakan proses “*transfer of technology*” (TOT).

Memasuki era otonomi daerah, terjadi perubahan kelembagaan penyuluhan dan peran penyuluh. Di sisi lain, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam beberapa dekade ini telah berpengaruh terhadap perubahan perilaku masyarakat. Falsafah adalah dasar-dasar pemikiran yang akan dijadikan sebagai landasan kerja. Falsafah penyuluhan pertanian merupakan landasan atau dasar-dasar pemikiran dalam penyuluhan, sebagai pengarah dan pedoman dalam memberikan kegiatan penyuluhan dengan benar.

Paulian (1987) menyatakan falsafah penyuluhan pertanian diantaranya adalah: pertama, belajar dengan mengerjakan sendiri adalah efektif, apa yang dialami sendiri dikerjakan akan berkesan dan melekat pada diri petani dan nelayan dan menjadi kebiasaan baru. Adanya begitu banyak perubahan yang telah dan sedang terjadi di lingkungan pertanian, baik pada tingkat individu petani, tingkat lokal, daerah, nasional, regional maupun internasional maka pelaksanaan penyuluhan pertanian perlu dilandasi oleh pemikiran yang mendalam tentang situasi baru dan tantangan masa depan yang dihadapi oleh penyuluh pertanian.

Bertani adalah profesi para petani, dalam keadaan bagaimanapun petani akan tetap bertani (kecuali dia pindah profesi) dan selalu berusaha dapat bertani dengan lebih baik dari sebelumnya. Dunia petani tidak lagi sebatas desanya, tetapi sudah meluas ke semua daerah di negaranya bahkan ke manca negara. Oleh karena itu para petani juga semakin memerlukan informasi tentang dunianya yang semakin luas. Kalau kebutuhannya akan informasi itu tidak terpenuhi maka para petani itu akan terkendala untuk maju.

Akibat dari adanya desentralisasi dan otonomi daerah, penyuluhan pertanian harus lebih memusatkan perhatian pada kebutuhan pertanian dan petani di daerah kerjanya masing-masing. Ekosistem daerah kerjanya harus dikuasai dengan baik secara rinci, ciri-ciri lahan dan iklim di daerahnya harus dikuasai dengan baik, informasi yang disediakan haruslah yang sesuai dengan kondisi daerahnya, intinya segala informasi di daerah kerjanya harus benar-benar valid. Kepentingan petani harus selalu menjadi titik pusat perhatian penyuluhan pertanian. Kalaulah ada kepentingan lainnya tetap kepentingan petani adalah yang pertama.

Agar berhasil penyuluhan pertanian harus disajikan kepada petani dengan menempatkan petani dalam kedudukan yang sejajar dengan penyuluhnya, dan diperlakukan secara humanistik dalam arti mereka dihadapi sebagai manusia yang memiliki kepentingan, kebutuhan, pendapat, pengalaman, kemampuan, harga diri dan martabat. penyuluhan pertanian di masa depan harus dapat dilaksanakan secara profesional dalam arti penyuluhan

itu tepat dan benar secara teknis, sosial, budaya, dan politik serta efektif karena direncanakan.

1. Prinsip-Prinsip Penyuluhan

Prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijaksanaan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten (Mathews, 1995). Prinsip berlaku umum, dapat diterima secara umum, dan telah diyakini kebenarannya dari berbagai pengamatan dalam kondisi yang beragam. Prinsip dapat dijadikan sebagai landasan pokok yang benar bagi pelaksanaan kegiatan.

Dahama dan Bhatnagar (Mardikanto, 1992) menguraikan beberapa prinsip penyuluhan yang dapat dijadikan pegangan dalam pelaksanaan penyuluhan :

1. Minat dan kebutuhan.
Penyuluhan akan efektif jika selalu mengacu kepada minat dan kebutuhan masyarakat. Harus dikaji, apa yang benar-benar menjadi minat dan kebutuhan setiap individu maupun segenap warga masyarakatnya, sesuai dengan sumberdaya, serta minat dan kebutuhan yang perlu mendapat prioritas dipenuhi terlebih dahulu.
2. Keragaman budaya masyarakat.
Penyuluhan akan efektif jika mampu melibatkan /menyentuh organisasi masyarakat bawah, sejak dari keluarga/kekerabatan.
3. Keragaman budaya.
Penyuluhan harus memperhatikan keragaman budaya. Perencanaan penyuluhan harus selalu disesuaikan dengan budaya lokal. Perencanaan penyuluhan yang seragam untuk seluruh wilayah akan menemui hambatan pada keragaman budaya.
4. Perubahan budaya.
Setiap kegiatan penyuluhan akan mengakibatkan perubahan budaya. Kegiatan penyuluhan harus dilaksanakan dengan bijak dan hati-hati agar perubahan yang terjadi tidak menimbulkan kejutan-kejutan. Penyuluh perlu memperhatikan nilai-nilai budaya lokal seperti tabu, kebiasaan-kebiasaan, dll.
5. Kerjasama dan partisipasi.
Penyuluhan akan efektif jika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerja sama dalam melaksanakan program penyuluhan yang dirancang.
6. Demokrasi dalam penerapan ilmu.
Penyuluh harus memberi kesempatan pada masyarakat untuk menawar setiap ilmu alternatif yang ingin diterapkan, penggunaan metode penyuluhan, dan pengambilan keputusan yang akan dilakukan masyarakat sasarnya.
7. Belajar sambil bekerja.
Penyuluhan harus diupayakan agar masyarakat dapat belajar sambil bekerja atau belajar dari pengalaman yang ia kerjakan. Penyuluhan

menyampaikan informasi atau konsep-konsep teoritis dan memberi kesempatan pada sasaran untuk mencoba memperoleh pengalaman melalui pelaksanaan kegiatan secara nyata.

8. Penggunaan metode yang sesuai.
Penyuluhan harus dilakukan dengan penerapan metode yang selalu disesuaikan dengan kondisi (lingkungan fisik, kemampuan ekonomi, dan nilai sosial budaya) sasarannya. Suatu metode tidak efektif dan efisien diterapkan untuk semua kondisi sasaran.
9. Kepemimpinan.
Penyuluhan harus mampu menumbuhkan dan mengembangkan kepemimpinan lokal atau memanfaatkan pemimpin lokal yang telah ada untuk membantu kegiatannya.
10. Spesialis yang terlatih.
Penyuluh harus benar-benar orang yang telah memperoleh latihan khusus tentang sesuatu yang sesuai dengan fungsinya sebagai penyuluh. Penyuluh yang disiapkan untuk menangani kegiatan khusus akan lebih efektif dibanding yang disiapkan untuk melakukan beragam kegiatan (meski masih terkait dengan pertanian).
11. Kepuasan.
Penyuluhan harus mampu mewujudkan tercapainya kepuasan. Kepuasan akan sangat menentukan keikutsertaan sasaran pada program-program penyuluhan selanjutnya.
12. Segenap keluarga.
Penyuluhan harus memperhatikan keluarga sebagai satu kesatuan dari unit sosial. , Dalam hal ini terkandung pengertian-pengertian :
 - Penyuluhan harus dapat mempengaruhi segenap anggota keluarga,
 - Setiap anggota keluarga memiliki peran/pengaruh dalam pengambilan keputusan,
 - Penyuluhan harus mampu mengembangkan pemahaman bersama.
 - Penyuluhan mengajarkan pengelolaan keuangan keluarga,
 - Penyuluhan mendorong keseimbangan antara kebutuhan keluarga dan kebutuhan usaha perikanan,
 - Penyuluh harus mampu mendidik anggota keluarga yang masih muda,
 - Penyuluh harus mengembangkan kegiatan-kegiatan keluarga,
 - Memperkokoh kesatuan keluarga, baik masalah sosial, ekonomi, maupun budaya, dan
 - Mengembangkan pelayanan keluarga terhadap masyarakatnya.

Prinsip penyuluhan pertanian merupakan hukum dasar dan aturan yang ditemukan melalui penelitian dan dibuktikan oleh pengalaman bertahun-tahun yang sekarang berfungsi sebagai panduan untuk upaya pendidikan yang diperlukan oleh agen penyuluhan. Daham dan Batnagar dalam Mardikato.T (1992), Margono Slamet (2003) menyatakan bahwa prinsip-prinsip penyuluhan tersebut dapat dijelaskan sebagai sebagai berikut;

1. Prinsip Minat dan Kebutuhan
Kegiatan penyuluhan harus didasarkan pada kebutuhan dan minat petani sebagai sasaran penyuluhan. Kepentingan dan kebutuhan ini berbeda-beda antara individu, desa satu dengan desa yang lain sehingga tidak ada satu program penyuluhan yang tepat untuk semua orang dan tempat. Agar efektif, penyuluhan harus dimulai dengan minat dan kebutuhan masyarakat tani. Seringkali kebutuhan petani bukanlah kepentingan kegiatan penyuluhan.
2. Prinsip Perbedaan Budaya
Metode penyuluhan harus sejalan dengan budaya masyarakat agar kegiatan penyuluhan berjalan efektif. Kegiatan penyuluhan didasarkan pada latar belakang budaya dari orang-orang dan dengan siapa kegiatan itu dilakukan. Para penyuluh harus mengetahui kebiasaan, tradisi, keyakinan, nilai masyarakat petani serta tingkat pengetahuan dan keterampilan, metode dan alat yang digunakan oleh mereka dalam melakukan berbagai kegiatan pertanian. Di negara yang luas seperti Indonesia, metode penyuluhan yang berbeda perlu digunakan untuk daerah yang berbeda, karena orang-orang di daerah tertentu berbeda dalam kehidupan dan budaya berpikir mereka. Cetak biru program penyuluhan yang dikembangkan untuk satu area mungkin tidak dapat diterapkan di area lain tetapi dapat berfungsi sebagai panduan di area budaya yang sama.
3. Prinsip Perubahan Budaya
Untuk mengubah perilaku masyarakat melalui penyuluhan, penyuluh harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat pedesaan. Jelas bahwa agen perubahan yang bekerja secara pribadi dengan penduduk desa harus tahu apa yang diketahui penduduk desa dan apa yang mereka pikirkan. Mereka harus percaya bahwa apa yang dikatakan oleh agen penyuluhan memiliki relevansi dengan kehidupan sehari-hari mereka. Dengan mempertimbangkan perubahan kebutuhan masyarakat pedesaan, penyuluh harus mengubah bidang pekerjaannya. Situasi yang berlaku dua puluh tahun yang lalu ketika layanan penyuluhan dimulai dan hari ini sangat berbeda, dan oleh karena itu, pengembangan kerja penyuluhan harus diubah untuk memenuhi perubahan budaya di antara masyarakat.
4. Prinsip Partisipasi
Partisipasi masyarakat adalah kepentingan mendasar dari keberhasilan setiap upaya penyuluhan. Orang harus berbagi dalam pengembangan program dan harus merasa bahwa itu adalah program mereka sendiri. Kegiatan penyuluhan yang baik membantu orang-orang pedesaan mengidentifikasi masalah mereka dan kemudian membantu mereka dalam memecahkan masalah-masalah ini. Biasanya orang tidak akan merasa terikat pada pekerjaan jika mereka diberikan hal-hal yang sudah jadi. Penyuluhan membantu orang untuk membantu diri mereka sendiri. Partisipasi dan pengalaman nyata dari orang-orang dalam program ini menciptakan kepercayaan diri di dalamnya. Mereka juga belajar lebih

banyak dengan melakukan dibandingkan dengan hanya mendengar atau melihat saja.

5. Prinsip Adaptabilitas dalam Penggunaan Metode Pengajaran

Petani berbeda satu sama lain, bentuk satu kelompok tani juga berbeda dengan kelompok tani lain dan kondisi suatu tempat juga berbeda dengan tempat lain. Orang-orang ini berbeda dalam tingkat pemahaman dan pengetahuan mereka. Oleh karena itu, jika hanya satu metode penyuluhan tidak akan berguna dalam memberikan informasi kepada semua orang. Program penyuluhan harus fleksibel sehingga perubahan yang diperlukan dapat dilakukan kapan saja jika diperlukan untuk memenuhi berbagai kondisi. Tidak ada metode pengajaran penyuluhan tunggal yang efektif dalam semua situasi. Materi tertulis akan berguna bagi mereka yang dapat membacanya, program radio berguna bagi mereka yang memiliki radio, pertemuan berguna bagi mereka yang dapat hadir. Situasi yang berbeda ini membutuhkan metode pengajaran yang berbeda. Situasi baru juga muncul di mana kombinasi metode khusus diperlukan. Penggunaan lebih dari satu metode penyuluhan tentu membawa pesan secara efektif kepada orang-orang. Dengan demikian metode penyuluhan harus memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan anggota komunitas yang berbeda dalam usia, pendidikan, ekonomi dan status sosial.

6. Prinsip Organisasi Penyuluhan

Masyarakat pedesaan harus mensponsori kegiatan penyuluhan. Program penyuluhan juga harus sesuai dengan kondisi lokal. Tujuan pengorganisasian masyarakat desa adalah untuk menunjukkan nilai dari praktik atau program baru penyuluhan sehingga lebih banyak orang akan berpartisipasi. Penyuluh harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat pedesaan ketika merencanakan program penyuluhan. Program penyuluhan harus didorong oleh orang-orang dan inovasi serta memiliki relevansi dengan kepentingan para petani. Pada akhirnya para petani merasa bahwa ide-ide yang datang kepada mereka berguna sehingga mereka akan mengadopsi ide-ide tersebut. Program yang didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan akan memberikan hasil yang lebih baik dalam kegiatan penyuluhan.

7. Prinsip Kepemimpinan

Sudah hampir bisa dipastikan mayoritas petani lebih percaya pada pemimpin lokal dan mereka harus digunakan untuk menempatkan ide baru sehingga dapat diterima dengan baik. Semua komunitas memiliki pemimpin atau calon pemimpin. Penyuluh dan spesialis harus melatih dan mengarahkan para pemimpin sukarela ini untuk kegiatan penyuluhan yang baik.

8. Prinsip Keluarga Utuh

Keluarga adalah unit dari masyarakat manapun. Semua anggota memiliki kepentingan yang sama dan mereka harus berkembang sama. Kegiatan penyuluhan berlaku untuk seluruh keluarga dan harus menjangkau semua

anggota keluarga. Kegiatan penyuluhan akan memiliki peluang sukses yang lebih baik jika penyuluhan memiliki pendekatan keluarga utuh, daripada pendekatan terpisah dan tidak terintegrasi. Dalam program penyuluhan, harus ada kesempatan seluruh anggota keluarga.

9. Prinsip Kepuasan

Produk akhir dari upaya penyuluhan adalah kepuasan yang datang dari petani sebagai hasil pemecahan masalah, memenuhi kebutuhan, memperoleh keterampilan baru atau beberapa perubahan perilaku lainnya. Mereka melanjutkan/ melaksanakan hal-hal baru (inovasi) hanya ketika mereka mendapatkan kepuasan melalui inovasi-inovasi tersebut. Kepuasan adalah kunci sukses dalam kegiatan penyuluhan. Orang sering mengatakan bahwa pelanggan yang puas adalah iklan terbaik.

10. Prinsip Evaluasi

Penyuluhan didasarkan pada metode ilmu pengetahuan dan perlu evaluasi konstan. Penting untuk menentukan hasil pengajaran dengan cara yang tidak biasa. Oleh karena itu, penyuluh perlu mengevaluasi perkembangan kegiatan sejauh ini dan melihat apakah kegiatan penyuluhan berjalan ke arah yang benar. Jika tidak, maka perlu dilakukan tindakan korektif. Kegiatan penyuluhan bersifat mendidik dan oleh karena itu, keefektifannya harus diukur dengan mengukur perubahan pada orang yang dihasilkan dari proses penyuluhan. Hasil dari evaluasi akan membantu para penyuluh dalam meningkatkan kualitas program di masa depan.

11. Prinsip Sains Terapan dan Demokrasi

Ilmu pertanian terapan bukanlah proses satu arah. Masalah dibawa ke para ilmuwan yang melakukan eksperimen yang diperlukan untuk mencari tahu solusinya. Penyuluh mengirimkan hasil laboratorium ke petani, tetapi petani memiliki kebebasan untuk memutuskan adopsi atau penolakan inovasi. Dalam demokrasi, kebebasan berpikir dan pendekatan yang tidak bias dan obyektif dari para ilmuwan, menetapkan fakta-fakta yang digunakan dalam pemecahan masalah. Tetapi keluarga petani dapat secara sukarela mengadopsi fakta-fakta ini untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

12. Prinsip Pakar yang Terlatih

Penyuluhan adalah jembatan antara ilmuwan dan petani. Sangat sulit bagi pekerja penyuluhan kemampuan untuk mengikuti perkembangan semua temuan penelitian terbaru di semua cabang ilmu pengetahuan sehingga butuh kepada adanya pakar yang terlatih. Para spesialis ini memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah-masalah para penyuluh dalam subjek mereka. Tenaga penyuluh pertanian yang spesialis bidang tertentu harus memiliki pandangan yang luas serta mampu mengaitkan dengan masalah yang dihadapi petani sehingga berkonsentrasi pada kesejahteraan petani.

13. Prinsip Kerja Sama

Program-program penyuluhan ditujukan kepada petani. Gagasan di balik kerja penyuluhan adalah membangun kerja sama antara sesama petani dan

penyuluhan pertanian dalam sebuah sistem sosial. Program penyuluhan harus menjadi program petani dengan bantuan pemerintah. Sebagian besar anggota masyarakat desa akan bersedia bekerja sama dalam melaksanakan proyek. Semua harus bekerja sama dan saling membantu untuk tugas peningkatan sosial ini. Dalam kegiatan penyuluhan, petani harus didorong untuk belajar hal-hal baru dengan melakukan serta percaya pada inovasi atau ide-ide baru, sampai mereka melihat hasilnya dengan mata kepala mereka sendiri. Motif untuk perbaikan harus datang dari petani. Mereka harus mempraktekkan ide-ide baru dengan benar-benar melakukannya. Ini adalah pembelajaran dengan melakukan, yang paling efektif dalam mengubah perilaku orang dan mengembangkan kepercayaan diri untuk menggunakan metode baru di masa depan.

2. Falsafah Penyuluhan

Falsafah berarti pandangan, yang akan dan harus diterapkan. Falsafah penyuluhan adalah bekerja bersama masyarakat untuk membantunya agar mereka dapat membantu dirinya meningkatkan harkatnya sebagai manusia. Falsafah penyuluhan juga berpijak pada pentingnya pengembangan individu dalam menumbuhkan masyarakat dan bangsa.

Falsafah penyuluhan berakar pada falsafah negara Pancasila, terutama pada sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Jika pelaku utama dan pelaku usaha perikanan diminta bekerja keras meningkatkan produksinya, seluruh warga Indonesia harus mau mengangkat harkat mereka, demi kemanusiaan dan keadilan sosial, yang berlandaskan pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghargai prinsip demokrasi, serta demi tercapainya persatuan bangsa (Slamet, 1989).

Falsafah Penyuluhan Pertanian Falsafah merupakan sebagai suatu pandangan hidup, yang dijadikan landasan pemikiran yang bersumber kepada kebijakan moral tentang segala sesuatu yang akan dan harus diterapkan dalam pelaksanaannya. Falsafah penyuluhan pertanian yang paling utama adalah bekerja bersama masyarakat untuk meningkatkan potensi para petani dan keluarganya sehingga mereka dapat mengatasi kekurangannya, memenuhi kebutuhan tanpa harus tergantung pada orang/pihak lain (Selamet, 2013)

Dari pendapat tersebut, ada tiga poin penting dari falsafah penyuluhan pertanian meliputi :

- (1) Penyuluhan pertanian harus bekerjasama dengan masyarakat tani, dan bukannya menjadi objek suruhan petani,
- (2) Penyuluhan pertanian tidak untuk mendatangkan ketergantungan, namun membangkitkan kreatifitas petani sehingga menghadirkan kemandirian, serta

- (3) Penyuluhan pertanian yang diterapkan bertujuan untuk terwujudnya kesejahteraan petani sebagai khalayak sasaran. Berpijak dari falsafah penyuluhan pertanian dalam pelaksanaannya, sedianya harus mengandung unsur –unsur utama yaitu (1) pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap petani kearah yang lebih baik, (2) membantu petani agar mereka dapat menolong diri sendiri, (3) belajar sambil melakukan sesuatu sehingga ada keyakinan dari hasil proses belajar yang dilakukan petani.

Falsafah penyuluhan berlandaskan pada falsafah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, yang membawa konsekwensi pada: (1) perubahan administrasi penyuluhan dari yang bersifat relatif sentralisme menjadi fasilitatif partisipatif, dan (2) pentingnya kemauan penyuluh memahami budaya lokal yang seringkali mewarnai *local agricultural* praktis.

Landasan falsafah penyuluhan seperti itu mengandung pengertian :

1. Penyuluh harus bekerjasama dengan masyarakat, bukan bekerja untuk masyarakat (Adicondro, 1990). Kehadiran penyuluh harus mampu menumbuhkan, menggerakkan, serta memelihara partisipasi masyarakat, bukan sebagai penentu atau pemaksa.
2. Penyuluhan tidak selalu dibatasi oleh peraturan dari pusat yang kaku dan sentralistis. Pelaku utama dan pelaku usaha perikanan berhak memperoleh keleluasaan mengembangkan dirinya, dan secara cepat mampu mengantisipasi permasalahan-permasalahan di daerah dan tidak menunggu petunjuk/restu dari pusat. Dalam setiap permasalahan yang dihadapi, mereka bisa mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan untuk dapat menyelamatkan keluarganya. Dalam hal seperti itu, penyuluh diberi kewenangan secepatnya mengambil inisiatif sendiri. Administrasi yang terlalu regulatif, sangat membatasi kemerdekaan mereka mengambil keputusan bagi usahanya.
3. Penyuluh selain memberikan ilmunya kepada pelaku utama dan pelaku usaha agribisnis, ia harus mau belajar untuk mengembangkan dirinya (belajar dianggap tidak rasional, penyuluh menganggap rasional adalah petunjuk pusat). Padahal praktek-praktek usahatani yang berkembang dari budaya lokal, sering sangat rasional, karena telah mengalami proses trial and error dan teruji oleh waktu.
4. Penyuluhan harus mampu mendorong terciptanya kreativitas dan kemandirian masyarakat, agar memiliki kemampuan berswakarsa, swadaya, dan swakelola bagi terselenggaranya kegiatan guna tercapainya tujuan, harapan dan keinginan-keinginan masyarakat sasarnya. Penyuluhan harus mengacu pada terwujudnya kesejahteraan ekonomi masyarakat dan peningkatan harkatnya sebagai manusia.

Dari falsafah penyuluhan pertanian (Ensminger, 1962) dapat dirumuskan :

1. Penyuluhan adalah proses pendidikan yang bertujuan untuk mengubah pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat.
2. Sasaran penyuluhan adalah segenap warga masyarakat (pria, wanita dan anak-anaknya) untuk menjawab kebutuhan dan keinginannya.
3. Penyuluhan mengajar masyarakat tentang apa yang diinginkannya, dan bagaimana cara mencapai keinginan-keinginan itu.
4. Penyuluhan bertujuan membantu masyarakat agar mampu menolong dirinya sendiri.
5. Penyuluhan adalah “belajar sambil bekerja” dan “percaya tentang apa yang dilihatnya”.
6. Penyuluhan adalah pengembangan individu, pimpinan mereka, dan pengembangan dunianya secara keseluruhan.
7. Penyuluhan adalah bentuk kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.
8. Penyuluhan adalah pekerjaan yang diselaraskan dengan budaya masyarakatnya,
9. Penyuluhan adalah prinsip hidup dengan saling berhubungan, saling menghormati dan saling mempercayai antara satu sama lainnya.
10. Penyuluhan merupakan kegiatan dua arah.
11. Penyuluhan merupakan proses pendidikan yang berkelanjutan.

Di Amerika Serikat telah lama dikembangkan *falsafah 3-T : teach, truth, and trust (pendidikan, kebenaran dan kepercayaan/keyakinan)*. Artinya, penyuluhan merupakan kegiatan pendidikan untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran yang telah diyakini. Dengan kata lain, dalam penyuluhan pertanian, petani dididik untuk menerapkan setiap informasi (baru) yang telah diuji kebenarannya dan telah diyakini akan dapat memberikan manfaat (ekonomi maupun non ekonomi) bagi perbaikan kesejahteraannya.

3. Soal Latihan

Jawablah soal-soal di bawah ini secara mandiri untuk mengetahui sejauhmana pemahaman anda terhadap materi yang telah dipelajari pada Modul 3 di atas.

- 1) Sebutkan jenis-jenis prinsip penyuluhan yang dapat dijadikan pegangan dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian !
- 2) Apa konsekuensi falsafah penyuluhan berlandaskan pada falsafah Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika?
- 3) Apa yang dimaksud dengan falsafah penyuluhan “Penyuluh harus bekerjasama dengan masyarakat, bukan bekerja untuk masyarakat” ?
- 4) Bagaimana pelaksanaan prinsip perbedaan budaya dalam prinsip penyuluhan pertanian?
- 5) Bagaimana pelaksanaan prinsip belajar sambil bekerja dalam prinsip penyuluhan pertanian?

Modul 4

METODE PENYULUHAN PERTANIAN

Materi pada modul 4 ini memiliki muatan sebagai berikut :

- **Capaian belajar untuk sikap dan perilaku (*Learning Outcome for Attitudes and Values*) :**

Sikap : AV 5 : Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain

- **Capaian belajar untuk Kemampuan Bidang Ilmu Pengetahuan (*Learning Outcome for Science Competencies*)**

SC 2/CP-KIP 2: Mampu memahami pengetahuan dan teknologi dalam bidang penyuluhan pertanian melalui kajian program pemerintah untuk menghasilkan karya inovatif bidang agribisnis yang teruji melalui program penyuluhan pertanian.

SC 3/CP-KIP 3: Mampu memahami bidang ilmu manajemen, bisnis, kewirausahaan, kelembagaan, sosiologi, penyuluhan dan komunikasi, serta ilmu-ilmu pertanian untuk pengembangan pembangunan agribisnis berkelanjutan.

- **Capaian belajar untuk Kemampuan Bidang Pekerjaan (*Learning Outcome for Occupational Skills*)**

CLO 1/CPMK 1 : Mahasiswa mampu memahami, dan menjelaskan prinsip-prinsip penyuluhan pertanian serta aspek sosial-budaya di pedesaan untuk pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dalam bidang agribisnis

Pada modul 4 ini, akan dikenalkan mengenal metode-metode yang dapat digunakan penyuluh dalam memberikan penyuluhan kepada sasaran (petani dan keluarganya). Terdapat beberapa metode yang dapat dijadikan pilihan dalam pelaksanaan penyuluhan yang disesuaikan dengan jumlah sasaran, dan situasi serta kondisi wilayah sasaran.

Metode penyuluhan pertanian merupakan cara dan prosedur yang digunakan oleh penyuluh/komunikator dalam menyampaikan pesan kepada

sasaran agar terjadi perubahan perilaku dan kepribadian sasaran sebagaimana yang diharapkan (Wahjuti, 2014). Seorang penyuluh perlu memahami prinsip-prinsip metode penyuluhan untuk memilih suatu metode yang tepat. Prinsip-prinsip tersebut menurut Mardikanto (1993) antara lain:

1. Pengembangan untuk berpikir kreatif
2. Tempat yang paling baik adalah tempat di kegiatan sasaran
3. Setiap individu terikat dengan lingkungan sosialnya
4. Ciptakan hubungan yang akrab dengan sasaran
5. Memberikan sesuatu untuk terjadinya perubahan

Metode penyuluhan pertanian dibedakan berdasar 3 jenis, yaitu pendekatan perorangan, pendekatan kelompok, dan pendekatan massal. Berikut penjelasan masing-masing penjelasan menurut Mardikanto (1993):

1. Pendekatan Perorangan

Berikut merupakan beberapa metode dan teknik penyuluhan pertanian secara individu menurut Wahjuti (2014): Kunjungan Rumah, Kunjungan Usahatani, Inkuiri, Kontak Informal, Petani Model, dan Bendera Lapangan.

2. Pendekatan Kelompok

Berikut merupakan beberapa metode dan teknik penyuluhan kelompok menurut Wahjuti (2014): Ceramah, Demonstrasi Cara, Demonstrasi Hasil, Diskusi, Kontes / Perlombaan, Magang, Sekolah Lapangan, Hari lapangan petani (Farmers Field Day), Klinik, Widyawisata, Mimbar Sarasehan, Temu Wicara, Temu Usaha, dan Temu Karya.

3. Pendekatan Massal

Berikut adalah beberapa metode penyuluhan pertanian secara massal menurut Wahjuti (2014): Kampanye, Pameran, Brosur, Leaflet, Folder, Surat Kabar, Media Grafis, Siaran Radio, Siaran Televisi, Pemutaran Film, dan Internet.

Menurut Notoatmodjo (2010), terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam penyuluhan sesuai dengan kebutuhan yang ingin dicapai, yaitu sebagai berikut:

1. **Metode Ceramah.**

Metode ceramah adalah suatu cara dalam menerangkan dan menjelaskan suatu ide, pengertian atau pesan secara lisan kepada sekelompok sasaran sehingga memperoleh informasi sesuai yang diinginkan.

2. **Metode Diskusi Kelompok.**

Metode diskusi kelompok adalah pembicaraan yang direncanakan dan telah dipersiapkan tentang suatu topik pembicaraan diantara 5 sampai dengan 20 peserta (sasaran) dengan seorang pemimpin diskusi yang telah ditunjuk.

3. **Metode Curah Pendapat.**

Metode curah pendapat adalah suatu bentuk pemecahan masalah di mana setiap anggota mengusulkan semua kemungkinan pemecahan masalah yang terpikirkan oleh masing-masing peserta, dan evaluasi atas pendapat-pendapat tadi dilakukan kemudian.

4. **Metode Panel.**

Metode Panel adalah pembicaraan yang telah direncanakan di depan pengunjung atau peserta tentang sebuah topik, diperlukan 3 orang atau lebih panelis dengan seorang pemimpin.

5. **Metode Bermain peran.**

Metode bermain peran adalah memerankan sebuah situasi dalam kehidupan manusia dengan tanpa diadakan latihan, dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk dipakai sebagai bahan pemikiran oleh kelompok.

6. **Metode Demonstrasi.**

Metode demonstrasi adalah suatu cara untuk menunjukkan pengertian, ide dan prosedur tentang sesuatu hal yang telah dipersiapkan dengan teliti untuk memperlihatkan bagaimana cara melaksanakan suatu tindakan, adegan dengan menggunakan alat peraga. Metode ini digunakan terhadap kelompok yang tidak terlalu besar jumlahnya.

7. **Metode Simposium.**

Metode simposium adalah serangkaian ceramah yang diberikan oleh 2 sampai 5 orang dengan topik yang berlebihan tetapi saling berhubungan erat.

8. **Metode Seminar.**

Metode seminar adalah suatu cara di mana sekelompok orang berkumpul untuk membahas suatu masalah dibawah bimbingan seorang ahli yang menguasai bidangnya.

Beberapa metode yang dapat digunakan oleh penyuluh pertanian dalam mencapai tujuan penyuluhan :

1. **Metode penyuluhan dan proses komunikasi**

Totok Mardikanto (1982), mengenalkan adanya tiga cara pendekatan yang dapat juga diterapkan dalam pemilihan metode penyuluhan, yaitu :

- Berdasarkan media yang digunakan, metode penyuluhan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :
 1. Media lisan, baik yang disampaikan secara langsung maupun secara tidak langsung.
 2. Media cetak, baik berupa gambar dan atau tulisan yang dibagikan, disebar, atau dipasang ditempat-tempat strategis yang mudah dijumpai oleh sasaran.
 3. Media terproyeksi, berupa gambar dan atau tulisan lewat slide, pertunjukan film, film strip, dll.
- Berdasarkan hubungan penyuluhan kesasarannya, metode penyuluhan dibedakan atas dua macam, yaitu :
 1. Komunikasi langsung, baik melalui percakapan tatap muka atau melalui media tertentu yang memungkinkan penyuluh dapat berkomunikasi secara langsung dari sasarannya dalam waktu yang relatif singkat.

2. Komunikasi tak langsung, baik lewat perantara orang lain, lewat surat atau media yang lain, yang tidak memungkinkan penyuluh dapat menerima respon dari sasarannya dalam waktu yang relatif singkat.

2. Metode penyuluhan menurut keadaan psikososial sasarannya

Metode penyuluhan menurut keadaan psikososial sasarannya dibedakan menjadi 3 hal, yaitu :

1. Pendekatan massal

Jika penyuluh berkomunikasi secara tak langsung atau langsung dengan sejumlah sasaran yang sangat banyak bahkan mungkin tersebar tempat tinggalnya. Dengan metode ini penyuluh pertanian tertuju kepada para petani umumnya di kampung-kampung dan di pedesaan-pedesaan, agar mereka dapat mendengarkan penyuluhan pertanian. Dipandang dari segi penyampaian informasi memang metode ini baik, akan tetapi dipandang dari keberhasilan adalah kurang efektif karena pada dasarnya hanya dapat menimbulkan tahap kesadaran dan tahap minat pada para petani pendengar penyuluhan, itupun kalau pendekatannya dapat dilakukan dengan baik, dapat menarik perhatian para petani kepada suatu hal yang lebih menguntungkan.

2. Pendekatan kelompok

Manakala penyuluh berkomunikasi dengan sekelompok sasaran pada waktu yang sama, seperti pada pertemuan di lapangan, penyelenggaraan latihan. Pendekatan dilakukan terhadap kelompok petani, di mana para petani ini diajak dan dibimbing serta diarahkan secara berkelompok untuk melaksanakan sesuatu kegiatan yang tentunya lebih produktif atas dasar kerja sama. Dalam pendekatan kelompok ini bertujuan juga agar penyuluh tidak terlalu terkuras tenaganya.

3. Pendekatan perorangan

Penyuluh berkomunikasi secara pribadi orang perorang dengan setiap sasarannya. Dalam metode ini penyuluh melakukan hubungan atau pendekatan-pendekatan secara langsung dengan sasaran yaitu seorang petani, biasanya dilakukan secara berdialog langsung, melakukan kunjungan ke rumah petani, kunjungan ke sawah/ladang petani, angjansana, surat menyurat, hubungan telepon. Metode ini memang sangat efektif, petani dapat secara langsung memecahkan apa yang menjadi masalahnya dengan bimbingan khusus dari penyuluh, akan tetapi metode pendekatan ini banyak menyita waktu, sebaiknya dilakukan ketika penyuluh dalam keadaan senggang.

3. Metode Penyuluhan Pertanian Berdasarkan Tujuan

▪ Tujuan untuk pengembangan kreativitas dan inovasi antara lain:

1. Temu Wicara, dialog antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan pejabat pemerintah membicarakan perkembangan dan pemecahan masalah pembangunan pertanian.

2. Temu Lapang (*field day*), pertemuan antara pelaku utama dan pelaku usaha dengan penyuluh pertanian dan/atau peneliti/ahli pertanian di lapangan untuk mendiskusikan keberhasilan usahatani dan/atau mempelajari teknologi yang sudah diterapkan.
 3. Temu Karya, pertemuan sesama pelaku utama dan pelaku usaha untuk tukar menukar informasi, pengalaman dan gagasan dalam kegiatan usahatani.
 4. Temu Usaha, pertemuan antar pelaku utama dengan pelaku usaha/pengusaha dibidang agribisnis dan/atau agroindustri agar terjadi tukar menukar informasi berupa peluang usaha, permodalan, teknologi produksi, pasca panen, pengolahan hasil, serta pemasaran hasil, dengan harapan akan terjadi kontrak kerjasama.
- **Tujuan untuk pengembangan kepemimpinan antara lain:**
 1. Rembug Paripurna, pertemuan lengkap seluruh anggota pengurus organisasi pelaku utama dan pelaku usaha tingkat nasional/provinsi/kabupaten/kota ditambah utusan dari wilayah dibawahnya yang membahas masalah umum pembangunan pertanian yang akan menjadi dasar kegiatan organisasi tingkat nasional.
 2. Rembug Utama, pertemuan lengkap seluruh anggota pengurus organisasi pelaku utama dan pelaku usaha, untuk menilai/mengevaluasi pelaksanaan kesepakatan program dan rencana kerja periode yang lalu, serta menyusun kepengurusan nasional/provinsi/kabupaten/kota periode yang akan datang.
 3. Rembug Madya, pertemuan para anggota pengurus organisasi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mendiskusikan dan mencari kesepakatan dalam pelaksanaan Pekan Nasional Pertemuan Pelaku Utama dan Pelaku usaha pemecahan suatu masalah yang dihadapi untuk kemudian dilaksanakan oleh mereka sendiri beserta kelompoknya.
 4. Mimbar Sarasehan, pertemuan konsultasi secara berkala dan berkesinambungan antara pelaku utama dan pelaku usaha andalan dengan pejabat pemerintah terutama lingkup pertanian untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan pertanian.
 - **Tujuan untuk pengembangan kerukunan dengan masyarakat :**
 1. Temu Akrab, kegiatan pertemuan untuk menjalin keakraban antara pelaku utama dengan masyarakat setempat/sekitar lokasi pertemuan.
 2. Ceramah, media penyampaian informasi secara lisan kepada pelaku utama, pelaku usaha dan/atau tokoh masyarakat dalam suatu pertemuan.

3. Demonstrasi, peragaan suatu teknologi (bahan, alat atau cara) dan atau hasil penerapannya secara nyata yang dilakukan oleh demonstrator kepada pelaku utama dan pelaku usaha.
4. Kaji Terap, ujicoba teknologi yang dilakukan oleh pelaku utama untuk meyakinkan keunggulan teknologi anjuran dibandingkan teknologi yang pernah diterapkan, sebelum diterapkan atau dianjurkan kepada pelaku utama lainnya.
5. Karya Wisata, kegiatan peninjauan oleh sekelompok pelaku utama untuk melihat dan mempelajari keberhasilan penerapan teknologi usahatani di satu atau beberapa tempat.
6. Kunjungan Rumah/Tempat Usaha, kunjungan terencana oleh penyuluh ke rumah/tempat usaha pelaku utama atau pelaku usaha.
7. Kursus Tani, proses belajar-mengajar yang diperuntukan bagi para pelaku utama beserta keluarganya yang diselenggarakan secara sistematis, teratur dan dalam jangka waktu tertentu.
8. Magang di Bidang Pertanian, proses belajar mengajar antar pelaku utama dengan bekerja di lahan dan/ atau tempat usahatani pelaku utama yang berhasil.
9. Mimbar Sarasehan, forum konsultasi antara wakil pelaku utama dan/atau pelaku usaha dengan pihak pemerintah secara periodik dan berkesinambungan untuk musyawarah dan mufakat dalam pengembangan usaha pelaku utama dan pelaksanaan program pembangunan pertanian.
10. Pameran, usaha untuk memperlihatkan atau mempertunjukkan model, contoh, barang, peta, grafik, gambar, poster, benda hidup dan sebagainya secara sistematis pada suatu tempat tertentu.
11. Pemberian penghargaan, kegiatan untuk memotivasi pelaku utama melalui pemberian penghargaan atas prestasinya dalam kegiatan usahatani.
12. Perlombaan unjuk Ketangkasan, kegiatan dengan aturan serta waktu yang ditentukan untuk menumbuhkan persaingan yang sehat antar petani untuk mencapai prestasi yang diinginkan secara maksimal.
13. Temu Karya, pertemuan antar pelaku utama untuk bertukar pikiran dan pengalaman serta belajar atau saling mengajarkan sesuatu pengetahuan dan keterampilan untuk diterapkan. Bentuk kegiatannya merupakan ungkapan pengalaman seseorang yang telah berhasil menerapkan teknologi baru di bidang usahatannya.
14. Temu Lapang, pertemuan antara petani dengan peneliti untuk saling tukar menukar informasi tentang teknologi yang dihasilkan oleh peneliti dan umpan balik dari petani.
15. Widyawisata, suatu perjalanan bersama yang dilakukan oleh kelompok/tani untuk belajar dengan melihat suatu penerapan teknologi dalam keadaan yang sesungguhnya, atau melihat suatu akibat tidak ditetapkannya teknologi di suatu tempat.

Modul 5

SASARAN PENYULUHAN PERTANIAN

Materi pada modul 5 ini memiliki muatan sebagai berikut :

- **Capaian belajar untuk Kemampuan Bidang Ilmu Pengetahuan (*Learning Outcome for Science Competencies*)**

SC 3/CP-KIP 3 : Mampu memahami bidang ilmu manajemen, bisnis, kewirausahaan, kelembagaan, sosiologi, penyuluhan dan komunikasi, serta ilmu-ilmu pertanian untuk pengembangan pembangunan agribisnis berkelanjutan.

SC 4/CP-KIP 4 : Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.

- **Capaian belajar untuk Kemampuan Bidang Pekerjaan (*Learning Outcome for Occupational Skills*)**

CLO 2/CPMK 2 : Mahasiswa mampu menganalisis komponen dan sistem penyuluhan pertanian untuk pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dalam bidang agribisnis

Pada modul 5 ini, akan dikenalkan mengenai sasaran dalam kegiatan penyuluhan. Sasaran adalah seseorang yg berperan sebagai partner penyuluh pertanian, bukan sebagai obyek penyuluhan

1. **Sasaran Penyuluhan sebagai Bagian dari Proses Komunikasi**

Ilmu Penyuluhan tidak terlepas dari ilmu komunikasi

Proses komunikasi sering digambarkan dgn alur SMCRE



- Sasaran menduduki posisi penerima apabila kegiatan yg dilakukan adalah pengintroduksian teknologi baru
- Sasaran merupakan sumber apabila pendekatannya adalah partisipatif

2. Sasaran Penyuluhan sebagai Subjek

Pendekatan penyuluhan bottom-up

Posisi petani sbg subjek (pelaku utama/leader dlm UT nya)

3. Sasaran Penyuluhan sebagai Pelaku Kegiatan Penyuluhan

Pelaku artinya sasaran yg secara langsung terlibat dalam kegiatan bertani dan pengelolaan UT.

Dalam pelaksanaannya, sasaran terbagi atas :

1. Sasaran utama : Petani dan keluarganya, yaitu :

- Langsung terlibat dalam kegiatan
- Petani: tidak bodoh; mempunyai harga diri; memiliki banyak pengalaman; menjunjung norma, adat istiadat, dll.; memerlukan bukti nyata
- Perlu dilakukan identifikasi sebelum melaksanakan penyuluhan

2. Sasaran Penentu : Tidak terlibat langsung/bukan pelaksana kegiatan bertani, tetapi secara langsung /tidak langsung terlibat dalam penentuan kebijakan dan/atau menyediakan kemudahan-kemudahan pelaksanaan dan pengelolaan usahatan, yang terbagi atas :

- Pimpinan lembaga pertanian,
- Peneliti/ilmuwan,
- Lembaga perkreditan,
- Pedagang,
- Produsen dan penyalur saprodi-alsintan,
- Pengusaha/industri pengolahan hasil pertanian

3. Sasaran Pendukung

Secara langsung atau tidak langsung tidak memiliki hubungan dengan kegiatan pertanian tetapi dapat dimintai bantuan guna kelancaran penyuluhan pertanian, yaitu :

- Pekerja sosial,
- Seniman,
- Biro iklan,
- Konsumen hasil pertanian

Pentingnya Memahami Sasaran Penyuluhan Pertanian

Memahami sasaran adalah tugas pertama bagi penyuluh dalam memulai kegiatan penyuluhan. Penyuluh harus benar-benar mengenali sasarannya, melakukan pendekatan, sampai sasaran merasa tidak canggung bila berdekatan

dan berkomunikasi dgn penyuluh. Untuk memahami sasaran tidak jarang seorang penyuluh melakukan penelitian terlebih dahulu thd keadaan sasaran yang akan disuluhnya

Hal-hal yg perlu dipahami dari sasaran

1. Memahami karakteristik sasaran

- Sasaran adalah manusia yg kreati
- Sasaran penyuluhan mempunyai cita2 atau tujuan hidup
- Sasaran penyuluhan adalah bagian dari masyarakat

2. Memahami Karakteristik Wilayah Penyuluhan

Karakteristik wilayah berkaitan dgn keadaan lingkungan fisik desa dlm berbagai aspek, seperti iklim, curah hujan, keadaan dan jenis tanah, ketinggian tempat, kelembaban udara, topografi, dll. Perbedaan fisik tsb menciptakan perbedaan pada jenis tanaman yg diusahakan, sistem pertanian yg diterapkan, dan pola kehidupan masyarakatnya

3. Memahami Keadaan Sosial Budaya Sasaran

Karakteristik sosial budaya sasaran tergambar dari pola pemukiman masyarakatnya dan karakteristik sosial budayanya.

Karakteristik sosbud masing-mas jenis desa terbagi :

- Desa tradisional : lahan berpindah, teknologi Masih primitif, sistem pembagian kerja sederhana, swasembada unit2 sosial (membangun jalan, sarana peribadatan, dll), produksi utama produk primer, memegang teguh tradisi suci, oraginisasi komunal (kerakyatan), status berdasarkan keturunan, semangat kerakyatan sangat tinggi
- Desa transisi : dualisme struktural (tek sederhana dan maju dipakai dlm satu waktu, terdapat perubahan budaya , muncul industrialisasi, adanya urbanisasi, adanya mobilisasi politik dan kerap terjadi rekayasa sosial
- Desa modern : industri telah menggunakan tek maju, pembagian kerja berdasarkan interdependensi unit2 sosial, produksi sudah mulai diarahkan pada produk sekunder, terdapat birokrasi impersonal, mengutamakan prestasi dlm berkerja, urbanisasi cukup besar.

Soal Latihan :

- 1) Mengapa seorang PPL penting untk memahami sasaran penyuluhan pertanian?
- 2) Gambarkan proses komunikasi yang sering digambarkan dengan alur SMCRE yang diadopsi dalam kegiatan penyuluhan pertanian?
- 3) Siapa sasaran utama kegiatan pendukung?
- 4) Siapa sasaran penentu dan pendukung dalam kegiatan penyuluhan?
- 5) Mengapa kelompok ini disebut sasaran penentu dan pendukung ?

Modul 6

MEDIA PENYULUHAN PERTANIAN

Materi pada modul 6 ini memiliki muatan sebagai berikut :

- **Capaian belajar untuk Kemampuan Bidang Ilmu Pengetahuan (*Learning Outcome for Science Competencies*)**

SC 3/CP-KIP 3 : Mampu memahami bidang ilmu manajemen, bisnis, kewirausahaan, kelembagaan, sosiologi, penyuluhan dan komunikasi, serta ilmu-ilmu pertanian untuk pengembangan pembangunan agribisnis berkelanjutan.

SC 4/CP-KIP 4 : Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.

- **Capaian belajar untuk Kemampuan Bidang Pekerjaan (*Learning Outcome for Occupational Skills*)**

CLO 2/CPMK 2 : Mahasiswa mampu menganalisis komponen dan sistem penyuluhan pertanian untuk pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dalam bidang agribisnis

Pada modul 6 ini, akan dikenalkan mengenai media dalam kegiatan penyuluhan, yang digunakan untuk mempermudah penyuluh dalam melaksanakan kegiatannya agar efektif dan efisien. Materi dalam Modul ini meliputi :

1. Pengertian media penyuluhan pertanian;
2. Jenis-jenis media penyuluhan pertanian;
3. Alasan umum penggunaan media penyuluhan pertanian.

1. Media Pendidikan dan Proses Belajar-Mengajar

Kemajuan teknologi modern adalah salah satu faktor yang turut menunjang usaha pembaharuan dalam pendidikan. Diyakini bahwa, untuk hidup dalam masyarakat yang modern harus dimulai dari pendidikan. Karena itu kegiatan-kegiatan pendidikan, baik di sekolah (*formal education*) maupun di luar

sekolah (non formal education) harus berjalan seimbang dan serasi dengan kebutuhan, aspirasi, dan norma-norma dalam masyarakat. Di pihak lain, telah disadari benar akan pentingnya alat-alat dan perlengkapan pendidikan. Alat-alat itu meliputi alat bantu mengajar atau alat peraga pendidikan atau audio visual aids dan juga perlengkapan sekolah/kelas. Alat-alat tersebut berupa papan tulis, bangku-kursi dan meja, serta perlengkapan-peralatan kerja seperti, alat pertukangan, alat pertanian, alat perbengkelan, dan berbagai jenis alat kerja lainnya. Semua peralatan dan perlengkapan kerja itu disesuaikan dengan tuntutan kurikuler dan tingkat kemampuan, serta kematangan para peserta didik.

Di lembaga-lembaga pendidikan yang sudah maju, telah digunakan berbagai jenis media pendidikan yang sesuai dengan tuntutan jaman untuk semua mata pelajaran/mata kuliah. Dewasa ini telah digunakan radio pendidikan, televisi pendidikan, dan komputer. Setiap pendidik akan berhadapan setidaknya-tidaknya dengan lima tantangan, yaitu :

1. Apakah ia memiliki pengetahuan, pemahaman, dan pengertian yang cukup tentang media pendidikan?
2. Apakah ia memiliki keterampilan tentang cara menggunakan media tersebut dalam proses belajar-mengajar?
3. Apakah ia mampu membuat sendiri alat-alat media pendidikan yang dibutuhkan?
4. Apakah ia mampu melakukan penilaian terhadap media yang akan/telah digunakan?
5. Apakah ia memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang administrasi media pendidikan?

Pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan meliputi antara lain:

1. Media sebagai alat komunikasi yang mengefektifkan proses belajarmengajar,
2. Fungsi media dalam rangka mencapai tujuan pendidikan,
3. Proses-proses belajar,
4. Hubungan antara metode mengajar dan media pendidikan,
5. Nilai atau manfaat media pendidikan dalam pengajaran,
6. Memilih dan menggunakan media pendidikan,
7. Berbagai jenis alat dan teknik media pendidikan,
8. Media pendidikan dalam setiap mata pelajaran/mata kuliah,
9. Usaha inovasi dalam media pendidikan.

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa media pendidikan merupakan dasar yang sangat diperlukan yang bersifat melengkapi dan merupakan bagian integral demi berhasilnya proses pendidikan dan usaha pengajaran.

2. Pengertian Media

Kata media berasal dari bahasa Latin “medius” yang secara harafiah berarti “tengah, perantara atau pengantar”. Dalam bahasa Arab media artinya “perantara” atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Menurut Gerlach dan Ely (1971), media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, kejadian yang membangun kondisi siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Guru, buku-buku, fasilitas yang ada, dan lingkungan sekolah merupakan media dalam proses pembelajaran.

Pengertian khusus media dalam proses pendidikan (proses belajar mengajar) diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Batasan lain yang dikemukakan oleh para ahli adalah sebagai berikut :

1. Media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi (Association of education and Communication Technology, 1977).
2. Media adalah moderator yang berfungsi sebagai alat yang turut campur tangan dalam dua pihak dan mendamaikan, artinya media menunjukkan fungsi atau perannya dalam mengatur hubungan yang efektif antar dua pihak utama dalam proses belajar siswa dan isi pelajaran (Fleming, 1987).
3. Media komunikasi adalah perantara yang mengantarkan informasi antara sumber dan penerima. Hal ini termasuk televisi, film, foto, radio, cetakan, dan sejenisnya. Apabila media itu membawa pesan-pesan yang bertujuan instruksional, maka media tersebut disebut media pengajaran (Henich, dkk, 1982).
4. Media adalah semua bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebarkan ide, gagasan atau pendapat sehingga ide, gagasan atau pendapat yang dikemukakan itu sampai kepada penerima yang dituju (Hamidjoyo dan Latuher, 1993).
5. Media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pengajaran yang terdiri atas buku, tape recorder, kaset, video camera, film, slide, foto, gambar, grafik, televisi, dan komputer (Gagne dan Briggs, 1975).
6. Media adalah bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak maupun audio visual dan peralatannya, sehingga media dapat dimanipulasi, dilihat, didengar atau dibaca.
7. Media adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pengajaran.

Kalau seseorang hendak menyampaikan pikiran atau pesan kepada orang lain, apakah yang terjadi sebelum hal itu sampai kepada yang menerimanya?

Ternyata Pikiran atau pesan telah ada dalam otak orang yang akan menyampaikannya.

1. Pikiran atau pesan itu diutarakannya dengan kata-kata yang diucapkan.
2. Kata-kata yang keluar dari mulutnya merupakan suara yang mengadakan gelombang-gelombang udara.
3. Gelombang-gelombang udara itu menyentuh alat pendengar si penerima.
4. Alat pendengar menyampaikannya ke otak.
5. Otak mengolahnya menjadi sesuatu yang dimengerti atau otak tidak dapat mengolahnya sehingga tidak dimengerti.

Tidak berbeda dengan pendidikan formal, penyuluhan pertanian sebagai pendidikan non formal pun harus sejalan dengan kemajuan cara manusia berkomunikasi. Karena itu, penyuluh berkewajiban untuk mengerahkan segala cara dan daya untuk menggunakan semua alat yang ada untuk membuat penyuluhan menjadi efektif.

Alat-alat audio-visual yang digunakan dalam penyuluhan pertanian berguna untuk membuat cara berkomunikasi menjadi efektif. Di antara alat-alat audio-visual itu termasuk gambar, foto, slide, model, pita kaset, tape recorder, film bersuara, televisi, dan komputer.

Menurut Hamzah (1981), di waktu perang terbukti bahwa selain gambar, peta, dan bola dunia, alat-alat audio-visual seperti slide, rekaman suara, dan berbagai proyektor sanggup meningkatkan efisiensi pengajaran antara 25% sampai 50%. Banyak ahli berpendapat bahwa 75% dari pengetahuan manusia sampai ke otaknya melalui mata dan yang selebihnya melalui pendengaran dan indera-indera yang lain. Inilah yang menyebabkan orang sering berkata : "Oh ya, saya ingat rupanya, tetapi lupa namanya". Namun yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa semua itu merupakan alat bantu semata yang harus digunakan secara tepat dan terampil dalam proses penyuluhan.

Dari beberapa pendapat tentang pengertian media yang dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengertian media penyuluhan adalah alat bantu penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan yang dapat merangsang sasaran suluh untuk dapat menerima pesan-pesan penyuluhan, dapat berupa media tercetak, terproyeksi, visual ataupun audio-visual dan komputer. Tanpa alat-alat audio-visual/media maka penyuluhan tidak akan mempunyai efektivitas yang dituntut oleh jaman elektronik sekarang ini, serta penggunaannya memerlukan kemahiran dan keterampilan. Surat kabar, majalah, radio, dan televisi merupakan media yang paling murah untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Walaupun demikian perlu diamati pengaruhnya sebelum diputuskan penggunaannya dalam penyuluhan.

Studi terbaru menunjukkan bahwa media massa dapat berperan lebih besar dalam proses perubahan daripada sebelumnya. Media massa memenuhi beberapa fungsi di dalam masyarakat dan turut berperan mengubah masyarakat tersebut dalam :

1. Menentukan jadwal diskusi yang penting,
2. Mengalihkan pengetahuan,
3. Membentuk dan mengubah pendapat,
4. Mengubah perilaku.

Sebagai contoh, majalah pertanian dan program siaran radio pedesaan dapat memainkan peran penting dalam mendorong petani, penyuluh, dan pemuka desa untuk membicarakan masalah. Beberapa pengetahuan dapat dialihkan melalui media, sedangkan pengetahuan dan keterampilan yang lain tidaklah demikian. Sebagai contoh, bahan-bahan kimia dapat merusak keseimbangan ekologi dengan terbunuhnya musuh alami, sebagai gagasan pokok Pengendalian Hama Terpadu dapat diajarkan melalui TV, tetapi keterampilan lain yang diperlukan untuk mengenali dan menghitung berbagai jenis serangga hanya mungkin dipelajari di lapangan.

3. Jenis-jenis Media Penyuluhan Pertanian

Menurut sumber bacaan ada beberapa jenis media yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan (belajar-mengajar). Jenis media tersebut adalah :

1. Media grafis (grafika) yang terdiri dari bagan, diagram, grafik, poster, kartun, dan komik. Dalam bahasa Yunani “graphikos” mengandung arti melukiskan atau menggambarkan garis-garis. Sebagai kata sifat graphics berarti sebagai penjelasan yang hidup, uraian yang kuat atau penyajian yang efektif. Dengan demikian media grafis adalah media yang dapat mengkomunikasikan fakta-fakta dan gagasan-gagasan secara jelas dan kuat melalui perpaduan antara kata-kata dan gambar.
2. Media fotografi yaitu media berupa gambaran tetap (*still picture*) yang terdiri dari dua kelompok, yaitu: 1) gambar datar tidak tembus pandang (*flat opaque picture*) misalnya, gambar fotografi/foto-foto, dan lukisan tercetak, 2) gambar tembus pandang (*transparent picture*) misalnya, film slide, film strip dan transparansi.
3. Media terproyeksi yang terdiri atas overhead projector, slide, dan film strip.
4. Media audio yaitu media dalam bentuk pita suara atau piringan suara. Termasuk dalam media ini adalah radio, kaset, radio kaset, piringan hitam.
5. Media tiga dimensi yang terdiri dari model dan boneka. Model dapat dibagi atas 3 katagori yaitu model padat (*solid model*), mock up dan diorama. Masing-masing model dapat berukuran sama dengan aslinya atau dapat dengan skala lebih besar atau lebih kecil (Sujana dan Rivai, 2001).

Untuk lebih jelasnya masing-masing jenis media akan diuraikan sebagai berikut :

1. Bagan adalah kombinasi antara media grafis dan gambar foto yang dirancang untuk memvisualisasikan secara logis dan teratur mengenai fakta pokok atau gagasan. Fungsinya untuk menunjukkan hubungan, perbandingan, proses, klasifikasi, dan organisasi. Ada beberapa jenis bagan

di antaranya adalah bagan pohon, bagan alir, bagan arus dan bagan tabel, bagan waktu, dan silsilah.

2. Diagram adalah suatu gambaran sederhana yang dirancang untuk memperlihatkan hubungan timbal balik terutama dengan garis-garis. Diagram lebih sulit dibaca daripada bagan.
3. Grafik adalah suatu penyajian data ber-angka, yang menggambarkan hubungan penting dari suatu data. Lebih jelasnya grafik merupakan keterpaduan yang lebih menarik dari sejumlah tabulasi data yang tersusun dengan baik. Ada beberapa macam grafik diantaranya : grafik garis, grafik batang, grafik lingkaran atau piring, grafik gambar, dan grafik kombinasi.
4. Poster adalah ilustrasi gambar pada selembar kertas dengan ukuran tertentu yang merupakan kombinasi visual antara warna dan pesan. Poster dapat dipasang/dipajang ditempelkan pada tempat yang banyak dilalui orang atau dapat juga disebarluaskan yang bertujuan untuk menarik perhatian orang sehingga tertanam pesan yang mendalam dalam diri penerima pesan. Poster didesain sederhana, sedikit kata-kata, dinamis, dan menonjolkan kualitas.
5. Kartun adalah penggambaran dalam bentuk lukisan atau karikatur tentang orang, gagasan, atau situasi yang didisain untuk mempengaruhi opini masyarakat sasaran. Karakteristik kartun adalah memakai karikatur, sindiran yang berlebihan, sederhana, lambang jelas, dan humor pilihan.
6. Komik adalah suatu bentuk kartun yang mengungkapkan karakter dan memerankan suatu cerita dalam urutan yang erat dihubungkan dengan gambar dan dirancang untuk memberikan hiburan kepada pembaca dalam bentuk buku.
7. Overhead transparan adalah media proyeksi yang memerlukan bahan transparan dan memerlukan alat bantu untuk memproyeksikan yang disebut overhead proyektor.
8. Slide adalah gambaran transparan dalam bentuk positif hasil fotografi dengan ukuran 2 x 2 inci (6 x 5 cm) yang diproyeksikan pada layar, dan merupakan gambar diam.
9. Film strip adalah sama dengan slide hanya berbeda pada mounting (cara menempel pada bingkai). Kalau slide hasilnya dalam bentuk frame (bingkai), film strip dalam bentuk film beruntun yang satu dengan yang berikutnya.
10. Audio card intruction adalah kartu bergambar atau tulisan yang cara penggunaannya dimasukan ke dalam alat dan akan terdengar suara yang mengiringi gambar atau tulisan tersebut.
11. Alat perekam (recorder) adalah suatu alat yang sistemnya terdiri dari record player (alat pemutar hasil rekaman) yang outputnya dihubungkan dengan beberapa headphone.
12. Model padat adalah suatu benda tiruan tiga dimensi yang memperlihatkan bagian luar dari objek. Contoh model antara lain anatomi manusia seperti tengkorak, bola mata, monumen, senapan, tombak, singgasana, buah-buahan, dan lain-lain.

13. Model penampang adalah benda tiruan tiga dimensi yang memperlihatkan bagian objek sebelah dalam apabila permukaannya diangkat.
14. Model susun adalah benda tiruan tiga dimensi yang terdiri dari beberapa bagian objek lengkap atau sedikitnya bagian penting dari objek itu.
15. Model kerja adalah benda tiruan tiga dimensi yang memperlihatkan bagian luar dari objek asli dan mempunyai beberapa bagian dari benda yang sesungguhnya. Beberapa contoh model kerja antara lain mistar sorong, perahu dayung, kapal api, timbangan terompet, seruling, dan piano.
16. Mock ups adalah benda yang merupakan penyederhanaan susunan bagian pokok dari suatu proses atau sistem yang lebih ruwet. Contoh "drivotrainer" yaitu alat mock ups yang digunakan dalam berlatih mengendarai mobil.
17. Diorama adalah pemandangan tiga dimensi mini yang menggambarkan gambar sebenarnya.

Menurut Hamalik (2001), media pendidikan dikelompokkan atas 5 kelompok, yaitu :

1. Kelompok bahan cetakan atau bacaan seperti buku, komik, koran, majalah, buletin, folder, periodikel, famlet. Bahan-bahan ini mengutamakan kegiatan membaca dan penggunaan simbol-simbol kata dan visual.
2. Kelompok alat-alat audio-visual yang terdiri atas: a) media tanpa proyeksi: papan tulis, papan tempel, papan flanel, bagan, diagram, grafik, poster, kartun, komik, dan gambar; b) media tiga dimensi : model, benda asli, contoh benda tiruan, diorama, boneka, topeng, flipchart, peta, globe, pameran, museum; c) kelompok yang menggunakan teknik seperti : slide, film strip, film rekaman, radio, televisi, laboratorium elektronik, dan komputer.
3. Kelompok yang berasal dari sumber-sumber masyarakat berupa objek-objek peninggalan sejarah, dokumentasi, bahan-bahan masalah tentang mata pencaharian, industri, politik, perdagangan, dan lain-lain. Media ini digunakan dengan metode karyawisata, survei, magang, dan lain-lain.
4. Kelompok kumpulan benda-benda (material collections) adalah berupa benda-benda dan barang-barang yang dibawa oleh sasaran untuk dipelajari seperti potongan kaca, potongan sendok, daun, benih, bibit, pupuk, bahan kimia, dan lain-lain.
5. Kelompok contoh-contoh kelakuan yaitu mencakup semua contoh kelakuan yang dipertunjukkan oleh seseorang pada waktu melakukan kegiatan belajar-mengajar, misalnya : gerakan tangan, gerakan kaki, gerakan badan, mimik, dan lain-lain.

Beberapa jenis media lain, yaitu :

1. Papan tulis: adalah media yang umum digunakan, terbuat dari kayu dicat hitam dan ditulis menggunakan kapur tulis. Papan tulis ini berwarnawarni ada yang hijau, kuning, dan putih.

2. Buletin board/papan buletin dan display adalah media yang berupa halaman papan yang khusus digunakan untuk mempertunjukkan contoh-contoh, gambar-gambar, kartu poster, dan objek tiga dimensi yang kecil-kecil.
3. Televisi adalah media audio-visual yang dapat menampilkan objek lebih autentik dan lebih menarik minat sasaran.
4. Dramatisasi adalah media penyajian bentuk drama, dari berbagai gerakan sampai ke permainan yang lengkap dengan pakaian dan dekorasi. Drama meliputi : a) the play, dilakukan di panggung; b) the pageant, pertunjukan sejarah dilakukan di alam terbuka; c) pantomim, adalah sandiwara bisu; d) tablo, yaitu permainan yang terdiri dari orang dan dekorasi, tidak ada suara atau gerakan; e) pupet, sandiwara yang terdiri dari boneka tanpa pakaian yang lengkap; f) psikodrama, bentuk drama yang bersifat perorangan dan ketegangan yang terjadi dalam g) Sosiodrama, yaitu drama tanpa persiapan terlebih dahulu, dan h) role-playing, adalah satu segi dari psikodrama.
5. Demonstrasi adalah media yang memperlihatkan cara melakukan sesuatu.

Berdasarkan tingkat teknologi yang diadopsi, maka jenis media jua terbagi atas :

1. Media Tradisional, termasuk di dalamnya adalah:
 - Visual diam yang diproyeksikan, proyeksi opaque (tidak tembus pandang), proyeksi overhead, slide, dan film strips.
 - Visual yang tak terproyeksikan: gambar, poster, foto, charts, grafik, diagram, pameran, papan info.
 - Audio rekaman piringan, pita kaset, reel, cartridge.
 - Penyajian multimedia : slide plus suara (tape), multi image.
 - Visual dinamis yang diproyeksikan : film, televisi, video.
 - Cetak : buku teks, modul, teks terprogram, majalah ilmiah, majalah berkala, lembaran lepas (hand out).
 - Permainan : teka-teki, simulasi, permainan papan.
 - Realita : model, specimen (contoh), manipulatif (peta, boneka).
2. Media Teknologi Mutakhir, termasuk media ini adalah :
 - Media berbasis telekomunikasi : teleconference, kuliah jarak jauh.
 - 1) Teleconference adalah suatu teknik komunikasi dengan kelompok yang berada di lokasi geografis berbeda menggunakan mikrofon dan amplifier khusus yang dihubungkan satu dengan yang lainnya sehingga setiap orang dapat berpartisipasi dengan aktif dalam suatu pertemuan besar atau diskusi.
 - 2) Kuliah jarak jauh (telelecture) adalah suatu teknik pengajaran dengan seseorang ahli menghadapi kelompok pendengar melalui amplifier telepon. Pendengar dapat mendengar jawaban/tanggapan pembicara.

- Media berbasis mikroprosesor: computer assisted instruction, permainan komputer, sistem tutor intelegen, diskusi interaktif, hypermedia dan compact (video) disc.
 - 1) Computer assisted instruction adalah suatu sistem penyampaian materi yang berbasiskan mikroprosesor yang materinya dirancang dan diprogram ke dalam sistem tersebut.
 - 2) Hypertexts adalah suatu tulisan yang tak berurutan/non sekuensial. Dengan sistem menulis pengarang mampu menghubungkan informasi dari bagian manapun dalam paket pelajaran itu, menciptakan jalur-jalur satu korpus materi dan membuat catatan yang menghubungkan teks-teks itu.
 - 3) Hypermedia adalah perluasan dari hypertexts yang menggabungkan media lain ke dalam teks. Pengarang dapat membuat suatu korpus materi yang kait-mengait antara teks, grafik, gambar animasi, bunyi, dan lain-lain.
 - 4) Sistem tutor intelijen adalah pengajaran dengan bantuan komputer yang memiliki kemampuan untuk berdialog dengan sasaran dan melalui dialog sasaran dapat mengarahkan jalan pelajaran.
 - 5) Interaktif video adalah suatu sistem penyampaian materi dengan video rekaman yang disajikan dengan pengendalian komputer kepada sasaran, yang tidak hanya dapat mendengar, melihat, tetapi dapat memberikan respon yang aktif. Respon itu mempengaruhi/menentukan kecepatan dan sekuensi penyajian. Alat-alat yang diperlukan : komputer, videodisc, dan layar monitor.
 - 6) Compact video adalah sistem penyimpanan rekaman video dengan signal audio visual direkam pada disc plastik bukan pada pita magnetik.

4. Multi Media

Pada dasarnya “Multi Media” pendidikan merupakan suatu kombinasi dari beberapa media pendidikan dan didayagunakan secara berencana dan sistematis dalam proses instruksional atau proses belajar-mengajar untuk mencapai tujuan instruksional tertentu. Tentu saja sebagai media mempunyai kebaikan dan kelemahan serta digunakan dengan prosedur dan cara tertentu.

Multi media memegang/menempati kedudukan yang penting dalam tahap berurutan kegiatan belajar-mengajar atau penyuluhan, karena penggunaan media tidak hanya satu media saja, melainkan digunakan bentukbentuk kombinasi beberapa media. Penggunaan multi media ternyata memberikan kesempatan luas bagi peserta didik untuk melakukan belajar mandiri disamping terjadinya komunikasi yang lebih efektif antara peserta dan instruktur/fasilitator/penyuluh. Konsep Multi Media Multi media adalah seperangkat media yang merupakan kombinasi dari beberapa media yang relevan dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan instruksional. Multi media

merupakan kelompok dokumen yang terdapat pada berbagai jenis media dan penggunaannya secara terpadu dalam bidang pekerjaan yang telah didesain.

Dalam rumusan tersebut terkandung pengertian bahwa suatu dokumen sesungguhnya adalah isi pesan yang terdapat dalam kelompok media, dan menunjuk pada keterpaduan dalam penggunaannya dalam rangka menyajikan suatu pekerjaan (misalnya kegiatan instruksional). Jika materi yang berada dalam macam-macam media itu berkenaan dengan suatu topik atau suatu daerah mata ajaran yang spesifik dan yang membentuk keseluruhan terpadu, maka kita sebut paket multi media.

Beberapa perangkat multi media yang dapat dipilih dan dikombinasikan penggunaannya:

1. Gambar, penggunaannya dapat membantu meningkatkan pengenalan dan pemahaman peserta didik tentang suatu materi. Media gambar lebih efektif bila dikombinasikan dengan rekaman, model, dan sebagainya.
2. Slide, pembuatannya perlu keterampilan khusus, tetapi dapat dibuat dalam bentuk berwarna, lebih realistik, orisinal, mudah direvisi, diadaptasikan, dan mudah disusun kembali serta dikombinasikan dengan tape, rekaman, gambar, dan sebagainya.
3. Film strip, tersusun dalam satu unit dan gambar tersusun dalam urutan yang ketat. Media ini dapat dikombinasikan dengan rekaman atau referensi tertentu.
4. Rekaman, media ini bersifat luwes dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan dan dapat dikombinasikan dengan media gambar, slide, bantuan papan tulis, radio, dan sebagainya.
5. Transparan, mudah dibuat, juga mudah digunakan serta dapat di amati oleh kelas. Transparan lebih dekat bila dikombinasikan dengan rekaman, papan tulis, model, benda sebenarnya dan sebagainya.
6. Videotape, dapat merekam dan disajikan dengan TV, sangat efektif dapat dikombinasikan dengan berbagai media lainnya. Alasan Umum

5. Penggunaan Media Penyuluhan Pertanian

Dalam setiap kegiatan penyuluhan, seorang penyuluh tidak hanya cukup menetapkan topik materi penyuluhan, merancang, dan menggunakan berbagai metode dan teknik penyuluhan. Ada yang tidak boleh dilupakan yaitu persiapan tentang perlengkapan penyuluhan. Perlengkapan penyuluhan sangat penting untuk membantu kelancaran pelaksanaan penyuluhan maupun untuk memperjelas materi yang disampaikan agar mudah diingat dan dipahami oleh sasarannya (Mardikanto, 1993).

Salah satu perlengkapan yang penting untuk dapat menyampaikan materi penyuluhan, menggali pengalaman, menggali kearifan tradisional masyarakat, dan mengajak sasaran suluh agar mau berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan pertanian adalah penggunaan media penyuluhan. Penggunaan

berbagai media dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan, kemampuan penyuluh dalam membuat dan menggunakannya, adanya biaya atau tidak untuk pengadaannya, dan juga tergantung kepada kemampuan sasaran suluh dalam menerimanya.

Berbagai alasan penggunaan media penyuluhan adalah sebagai berikut :

1. Media penyuluhan yang digunakan atau disediakan oleh penyuluh memegang peranan1. dalam proses belajar-mengajar untuk mencapai tujuan instruksional.
2. Dapat merekam dan menyimpan data/informasi, misalnya bunyi suara berbagai jenis burung, laporan wawancara direkam pada cassette recorder.
3. Dapat memanipulasi objek-objek, misalnya proses pembelahan sel pada tumbuhan dapat diperlihatkan dengan mempercepat atau memperlambat.
4. Dapat menyebarkan data/informasi, misalnya melalui siaran radio, TV yang disalurkan lewat satelit komunikasi, dapat diketahui dengan cepat apa yang sedang terjadi baik di dalam negeri, maupun luar negeri.
5. Dengan menggunakan media penyuluhan, penyuluh/fasilitator/pengajar dapat memperkaya dan memperdalam proses belajar-mengajar untuk membangkitkan motivasi, memberikan orientasi, mengadakan evaluasi, memberikan tugas, memberikan ringkasan, dan lain-lain.
6. Dapat membangkitkan keinginan, minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan membawa pengaruh psikologis. Pada tahap orientasi akan sangat membantu keefektivan proses pembelajaran dan penyampaian pesan serta isi pelajaran pada saat itu (Hamalik dalam Widodo, 2000).
7. Media pengajaran paling besar pengaruhnya terhadap indera dan lebih menjamin pemahamannya dengan orang yang mendengar dan melihat.
8. Media visual khususnya mempunyai fungsi menarik dan mengarahkan perhatian sasaran untuk konsentrasi terhadap materi yang ditampilkan (fungsi atensi), dapat menggugah emosi dan sikap sasaran (fungsi afektif), dapat mempermudah sasaran dalam memahami dan mengingat pesan yang terkandung dalam materi (fungsi kognitif), dan membantu sasaran yang lemah dan lambat dalam menerima dan memahami materi yang disampaikan secara teks maupun verbal (fungsi kompensatoris) (Arsyad, 1996).

Alasan lain penggunaan media penyuluhan adalah :

1. Penyampaian materi menjadi lebih baku, artinya setiap individu yang melihat dan mendengar akan menerima pesan yang sama.
2. Pembelajaran menjadi lebih menarik.
3. Pembelajaran menjadi interaktif.
4. Lama waktu pengajaran menjadi lebih pendek.
5. Kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan.
6. Penyuluhan/pengajaran dapat diberikan kapan dan dimana saja.
7. Sikap positif peserta terhadap materi dapat ditingkatkan.

8. Peran penyuluh dapat berubah ke arah yang lebih positif.
9. Penggunaan media (komputer) dapat : a. memperlancar administrasi lembaga penyelenggara pendidikan/penyuluhan, menyimpan dan mengolah data, menyusun jadwal, registrasi, dan peminjaman buku-buku. b. memperlancar administrasi pengajaran/penyuluhan. c. menyajikan problema untuk dipecahkan, dan menentukan diagnosa berdasarkan data yang disajikan. d. dengan materi yang telah diprogramkan, berperan sebagai fasilitator. Untuk menjelaskan materi yang disuluhkan, kadang-kadang perlu dituliskan, maka diperlukan papan tulis, papan penempel, white board, papan panel, kain flanel atau magnetic board.
10. Untuk memperkeras suara, terutama bila penyuluhan dilakukan di lapangan atau sasaran cukup banyak diperlukan "megaphone" dan "microphone".
11. Untuk memproyeksikan tulisan atau gambar, benda-benda tembus cahaya, film, slide, maka diperlukan berbagai alat seperti overhead projector, slide projector dan movie projector.

Menurut Mardikanto (1993), beberapa fungsi penggunaan media penyuluhan adalah :

- a. Memperjelas pengertian tentang segala sesuatu yang diuraikan atau disampaikan penyuluh secara lisan, sehingga dapat menghindari terjadinya salah pengertian yang tidak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh penyuluh.
- b. Membuat penyuluhan lebih efektif, karena sasaran lebih cepat menerima dan memahami segala sesuatu yang dimaksudkan penyuluhnya.
- c. Menarik perhatian atau memusatkan perhatian sasaran, saling lebih mengkonsentrasikan diri untuk mengikuti jalannya penyuluhan.
- d. Menghemat waktu yang diperlukan.
- e. Memberikan kesan yang lebih mendalam, sehingga sasaran tidak mudah melupakan kegiatan penyuluhan yang pernah diikutinya.

6. Manfaat Media

Kalau seseorang menerima informasi atau pesan verbal itu disebut pengalaman dengan kata-kata. Pengalaman serupa ini cenderung membuat pesan/informasi sukar ditangkap, kurang menarik, dan mudah dilupakan. Tidak seperti pengalaman dengan kata-kata, pengalaman nyata sangat efektif, karena mengikutsertakan semua indera dan akal. Namun kita tidak dapat selalu mendapat semua dalam pengalaman nyata, untuk itu diperlukan sesuatu untuk menjembatani jurang antara keduanya. Yang dapat menjembatani adalah pengganti pengalaman nyata, yaitu dengan menggunakan berbagai media, seperti menggunakan media film, slide, gambar untuk menjelaskan tentang "traktor", ketimbang hanya dengan katakata (verbalistis) saja.

Adapun manfaat media dalam proses belajar mengajar atau penyuluhan adalah sebagai berikut :

- 1) Pengajaran atau penyuluhan akan lebih menarik perhatian sasaran sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar.
- 2) Materi penyuluhan akan lebih jelas maknanya sehingga mudah dipahami dan dikuasai.
- 3) Metode penyuluh lebih bervariasi.
- 4) Sasaran lebih banyak melakukan kegiatan belajar karena tidak hanya mendengarkan uraian saja, tetapi melakukan pengamatan, demonstrasi, memerankan, dan lain-lain (Sudjana dan Rivai, 1992).

Menurut Encyclopedia Educational Research, manfaat media adalah :

- a) Meletakkan dasar-dasar yang konkrit untuk berpikir karena mengurangi verbalisme.
- b) Memperbesar perhatian sasaran.
- c) Meletakkan dasar-dasar yang penting untuk perkembangan belajar dan lebih mantap.
- d) Memberikan pengalaman nyata yang dapat menumbuhkan kegiatan berusaha sendiri di kalangan sasaran.
- e) Menumbuhkan pemikiran teratur dan kontiniu melalui gambar hidup.
- f) Membantu menumbuhkan pengertian yang dapat membantu perkembangan kemampuan berbahasa.
- g) Memberikan pengalaman yang tidak mudah diperoleh dengan cara lain membantu efisiensi dan keragaman yang lebih banyak.

Dari pendapat-pendapat yang telah disampaikan sebelumnya, dapat dikatakan manfaat praktis dari media di dalam proses penyuluhan adalah sebagai berikut :

- 1) Media dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses belajar.
- 2) Media dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian sasaran sehingga dapat memotivasi, terjadi interaksi langsung dan memungkinkan sasaran untuk belajar sendiri sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Media dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu :
 - Objek terlalu besar dapat diganti dengan gambar, slide, foto, film dan lain-lain.
 - Objek terlalu kecil dapat disajikan dengan menggunakan mikroskop, gambar, lup, slide atau film.
 - Kejadian langka dimasa lalu dapat ditampilkan melalui video, film. foto, slide, disamping secara verbal.
 - Objek rumit dapat ditampilkan secara konkret melalui gambar, slide atau simulasi komputer.
 - Kejadian atau percobaan yang membahayakan dapat disimulasikan dengan video, film, dan komputer.
 - Peristiwa letusan gunung atau proses kepompong menjadi kupukupu dapat disajikan dengan teknik rekaman video, film dan simulasi komputer.

- 4) Media dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada sasaran tentang peristiwa-peristiwa di lingkungannya, memungkinkan terjadinya interaksi langsung melalui kegiatan karyawisata, kunjungan ke museum atau kebun binatang. Dari pendapat beberapa ahli di atas dapat disimpulkan betapa besar manfaat penggunaan media dalam penyuluhan pertanian, sehingga dapat meningkatkan rasa saling pengertian dan simpati antara penyuluh dan sasaran, melengkapi pengalaman dan memperluas pengalaman sasaran, dan dapat membantu efisiensi dalam proses penyuluhan pertanian.

7. Topik Diskusi Materi Modul 6

Untuk memperdalam pemahaman anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut! Untuk dapat menjawab latihan ini dengan benar, Anda dapat mempelajari lebih seksama modul ini, terutama materi-materi :

1. Pendahuluan.
2. Media pendidikan dan proses belajar-mengajar.
3. Pengertian media.
4. Media penyuluhan pertanian.
5. Media massa.

Alat-alat komunikasi sudah sedemikian majunya, sehingga tidaklah pada tempatnya lagi kalau penyampaian pengajaran dan penyuluhan masih dilakukan secara verbalistik atau dengan kata-kata belaka. Kita mempunyai kewajiban untuk mengerahkan segala cara dan daya untuk membuat penyuluhan menjadi efektif. Tidak berbeda dengan pendidikan formal, penyuluhan pertanian sebagai bentuk pendidikan non formal pun harus sejalan dengan kemajuan cara manusia berkomunikasi. Karena itu penyuluh berkewajiban untuk mengerahkan segala cara dan daya untuk menggunakan semua alat yang ada untuk membuat penyuluhan menjadi efektif.

- 1) Bagaimana menurut Anda bila penyuluhan pertanian hanya dilakukan secara verbalistik?
- 2) Mengapa media pendidikan merupakan dasar yang sangat diperlukan dalam keberhasilan proses pendidikan dan penyuluhan?
- 3) Apakah definisi/batasan media menurut Hamidjoyo dan Latuher (1993)?
- 4) Apakah pengertian media penyuluhan?
- 5) Media massa turut berperan mengubah masyarakat. Mencakup hal-hal apakah itu?
- 6) Apakah arti media grafis?
- 7) Apakah yang disebut poster itu?
- 8) Jelaskan perbedaan antara "slide" dan "film strip"?
- 9) Sebutkan 8 jenis kelompok media menurut Dayton dan Arsyad (1996)!
- 10) Mengapa multi media memegang/menempati kedudukan yang penting dalam proses belajar-mengajar, termasuk dalam penyuluhan?

Modul 7

MATERI PENYULUHAN PERTANIAN

Materi pada modul 7 ini memiliki muatan sebagai berikut :

- **Capaian belajar untuk Kemampuan Bidang Ilmu Pengetahuan (*Learning Outcome for Science Competencies*)**

SC 3/CP-KIP 3 : Mampu memahami bidang ilmu manajemen, bisnis, kewirausahaan, kelembagaan, sosiologi, penyuluhan dan komunikasi, serta ilmu-ilmu pertanian untuk pengembangan pembangunan agribisnis berkelanjutan.

SC 4/CP-KIP 4 : Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.

- **Capaian belajar untuk Kemampuan Bidang Pekerjaan (*Learning Outcome for Occupational Skills*)**

CLO 2/CPMK 2 : Mahasiswa mampu menganalisis komponen dan sistem penyuluhan pertanian untuk pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dalam bidang agribisnis

Pada modul 7 ini, akan dikenalkan mengenai materi dalam kegiatan penyuluhan, yang digunakan untuk membantu petani agar tercapat target kegiatan penyuluhan yaitu membuat petani mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari aspek bisnis dalam berusahatani.

1. Pengertian Materi Penyuluhan

Materi penyuluhan adalah segala sesuatu yang disampaikan dalam penyuluhan pertanian. Dalam bahasa teknis penyuluhan, materi penyuluhan seringkali disebut sebagai informasi pertanian (suatu data/bahan yang diperlukan penyuluh, petani-nelayan, dan masyarakat tani)

Di bidang penyuluhan pertanian materi penyuluhan diartikan sebagai pesan yang akan disampaikan oleh penyuluh kepada sasaran penyuluhan. Pesan penyuluhan dapat berupa pesan kognitif, afektif, psikomotorik maupun

pesan kreatif. Pesan penyuluhan ada yang bersifat anjuran (persuasif), larangan (instruktif), pemberitahuan (informatif) dan hiburan (entertainment).

Dalam bahasa teknis penyuluhan, materi penyuluhan seringkali disebut sebagai informasi pertanian (suatu data/bahan yang diperlukan penyuluh, petani-nelayan, dan masyarakat tani). Materi penyuluhan antara lain dapat berbentuk pengalaman misalnya pengalaman petani yang sukses mengembangkan komoditas tertentu, hasil pengujian/hasil penelitian, keterangan pasar atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Menurut UU Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, materi penyuluhan pertanian didefinisikan sebagai bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan.

2. Tujuan Pembuatan Materi Penyuluhan

Materi penyuluhan pertanian dibuat untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian dengan memperhatikan pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya pertanian. Karena itu materi penyuluhan pertanian yang akan disampaikan kepada pelaku utama dan pelaku usaha pertanian tersebut harus diverifikasi terlebih dahulu oleh instansi yang berwenang di bidang penyuluhan pertanian. Verifikasi materi penyuluhan pertanian tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kerugian sosial ekonomi, lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Dengan demikian materi penyuluhan pertanian yang belum diverifikasi dilarang untuk disampaikan kepada pelaku utama dan pelaku usaha pertanian.

3. Ruang Lingkup

Dalam proses komunikasi antara penyuluh dengan sasaran, penyuluh pertanian akan menyampaikan segala sesuatu yang menyangkut ilmu (teori) dan teknologi (praktis) pertanian, kesemuanya itu disebut materi penyuluhan. Dapat dikatakan bahwa materi penyuluhan pertanian adalah segala isi (content) yang terkandung dalam setiap kegiatan penyuluhan pertanian (Samsudin, 1987 dan Kartasapoetra, 1988). Jadi, ilmu sebagai materi penyuluhan yang disampaikan kepada petani dapat berupa pengetahuan, misalnya pemberian informasi tentang perkembangan pertanian, atau informasi tentang varietas dari suatu komoditi yang sifatnya hanya untuk diketahui, sedangkan yang bersifat praktis, misalnya materi tentang budidaya tanaman seperti, cara memilih benih, cara mengolah tanah, cara memupuk, atau dalam bidang peternakan, seperti cara melakukan vaksinasi, pembuatan pakan dan teknologi yang berhubungan dengan kegiatan petani.

Dengan demikian, informasi teori sifatnya memberikan motivasi, merangsang, dan memperluas wawasan petani terhadap perkembangan dunia

luar, sedangkan informasi teknologi menyangkut cara-cara yang sifatnya membimbing dan mengajarkan petani agar terampil mengerjakan materi yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan. Secara rinci bahan atau materi penyuluhan pertanian yang akan disampaikan kepada pelaku utama dan pelaku usaha pertanian meliputi segala informasi pertanian yang mencakup :

- 1) Pengalaman praktek para petani yang "lebih" berhasil baik dari wilayah yang bersangkutan maupun dari luar wilayahnya yang mempunyai kondisi agroklimat yang (hampir) serupa;
- 2) Hasil-hasil pengujian, terutama dari pengujian lokal (local verification trials);
- 3) Saran rekomendasi yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
- 4) Keterangan pasar seperti : catatan harga hasil-hasil pertanian, penawaran dan atau permintaan akan sarana produksi dan hasil-hasil pertanian, dan lain-lain;
- 5) Berbagai kebijaksanaan dan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah setempat yang berkaitan dengan sektor pertanian seperti kebijaksanaan harga-dasar, peraturan tentang permohonan dan pengembalian kredit, dan lain-lain. .

Ditinjau dari subject-matter (materi pokok) yang harus diberikan sebagai bahan penyuluhan pertanian, pada dasarnya materi penyuluhan pertanian dapat dikelompokkan dalam:

- 1) **Ilmu Teknik Pertanian** yang tidak hanya mencakup mengenai apa yang harus dilakukan, tetapi juga mengapa, bagaimana, kapan dan di mana harus dilaksanakan. Materi yang diberikan harus dlkaitkan dengan pengalaman yang dimiliki petani setempat dan harus disertai kepercayaan kepada realitas-realitas yang ditemui di lapangan. Termasuk dalam materi tentang teknik pertanian adalah:
 - a) kegiatan pra panen yang meliputi: (1) pola bertanam dan teknik pertanamannya. (2) pemupukan yang efektif. (3) pemanfaatan air secara efisien. (4) perlindungan tanaman secara terpadu dengan menerapkan teori ambang ekonomi. (5) penggunaan varietas unggul;
 - b) kegiatan pasca panen meliputi : (1) panen perontokan (2) pengangkutan (3) pengeringan (4) pengolahan dan (5) penyimpanan.
- 2) **Ilmu Ekonomi Pertanian** yang terutama diarahkan kepada usaha pengelolaan usahatani yang lebih bermanfaat secara ekonomis maupun non ekonomis. Termasuk dalam materi ilmu ekonomi pertanian adalah :
 - a) pengelolaan usahatani yang lebih efisien dengan menerapkan prinsip-prinsip optimisasi yakni : (a) hasil fisik yang maksimum (b) keuntungan optimum (c) penekanan biaya (masukan);
 - b) penguasaan dan pemasaran hasil-hasil pertanian;
 - c) penggunaan atau pemanfaatan kemudahan kredit produksi pertanian;
 - d) kelembagaan ekonomi pertanian : koperasi dan lain-lain. Dalam penyampaian ilmu ekonomi pertanian harus selalu menerapkan

pendekatan multi disiplin dengan analisis interdisiplin yang tidak hanya bagi usaha menaikkan pendapatan dan atau keuntungan usahatani dalam waktu terbatas tetapi juga memperhatikan prinsip-prinsip perluasan lapangan dan kesempatan kerja serta usaha pelestarian lingkungan hidup.

3) Ilmu Tatalaksana Rumah Tangga Petani, mengingat bahwa kegiatan usahatani dalam kenyataannya adalah merupakan bagian dari kegiatan rumah tangga petani secara keseluruhan, maka untuk menuju efisiensi pengelolaan usahatani harus selalu dilakukan kegiatan penyuluhan mengenai tatalaksana rumah tangga petani. Termasuk dalam materi untuk bidang tatalaksana rumah tangga petani adalah :

- a) Pengenalan tentang makna usahatani bagi rumahtangga petani yang dapat diresapi;
- b) Proses manajemen secara keseluruhan yang mencakup : (a) Pembuatan atau inventarisasi sumber-sumber (b) Penetapan tujuan berikut skala prioritasnya (c) Penetapan masalah berikut skala prioritasnya (d) Studi tentang alternatif-alternatif yang mungkin tentang: -apa yang diinginkan; -apa yang akan dibayar; -apa yang lebih baik dibayar; -dapat dilaksanakan. (e) Mengembangkan perencanaan anggaran, meliputi kebutuhan uang yang diperlukan, pola pertanaman, produksi yang diharapkan, kemungkinan besarnya pengeluaran (pembiayaan) dan penerimaan yang diharapkan; (f) Perencanaan ikutan tentang catatan singkat yang dapat dipergunakan untuk pemeriksaan kekayaan, pendapatan, dan lain-lain hal yang tercakup di dalam perencanaan anggaran; (g) Evaluasi hasil yang dapat dipergunakan sebagai umpan balik bagi kegiatan berikutnya yang akan diulangi;
- c) Persiapan anggaran berupa analisis usahatani per tahun;
- d) Penerapan perencanaan tatalaksana rumahtangga dan usahatani.

4) Dinamika Kelompok, kegiatan penyuluhan pertanian pada hakikatnya adalah suatu kegiatan yang selalu berurusan dengan "manusia" petani yang harus dapat diajak mengubah sikapnya, cara bertindak, cara bekerja, bahkan juga polapikirnya untuk mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi melalui usaha menaikkan produktivitas dan pendapatan/keuntungan usahatani. Tetapi, jika harga diri mereka direndahkan, jika potensi yang terpendam di dalam diri tidak digali dan dikembangkan, perubahan yang diharapkan itu tak akan mungkin terjadi. Sehubungan dengan itu, mengingat petani adalah golongan masyarakat yang sangat erat ikatan kelompoknya, maka kepada mereka disamping materi penyuluhan pertanian yang lain perlu diberi materi tentang dinamika kelompok. Termasuk di dalam materi ini antara lain :

- a) dasar-dasar pengertian tentang dinamika kelompok;
- b) makna dari dinamika kelompok;

- c) beberapa latihan pengembangan dinamika kelompok seperti : diskusi, kegiatan-latihan gotong-royong untuk mengerjakan sesuatu, dan lain-lain;
- d) dorongan untuk selalu bekerja dan bereksperimen (trials and error).

5) Politik Pembangunan Pertanian, di samping pokok-pokok materi yang telah disebutkan di atas, maka dalam penyuluhan pertanian perlu juga diberikan pokok materi tentang politik pembangunan pertanian yang sedang menjadi program pemerintah. Hal ini penting, sebab tujuan usahatani tidak hanya untuk menuju kesejahteraan orang seorang atau bagi petani saja, melainkan mempunyai tugas yang penting bahkan sangat penting arti dan peranannya bagi kesejahteraan masyarakat dan bangsa pada umumnya. Tidak saja untuk mencukupi kebutuhan pokok, tetapi juga peran dan artinya ditinjau dari martabat bangsa, dari segi keamanan, dan stabilitas nasional dalam arti yang sangat luas. Termasuk dalam materi ini adalah: 1) makna pertanian atau usahatani bagi kehidupan manusia; 2) makna usahatani bagi stabilitas nasional; 3) makna usahatani bagi kehidupan umat manusia; 4) berbagai peraturan dan atau kebijaksanaan “baru” dari pemerintah pusat dan daerah.

4. Sumber-Sumber Materi Penyuluhan Pertanian

Mardikanto (1993) menyebutkan bahwa sumber materi penyuluhan pertanian dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Sumber resmi dari instansi pemerintah, seperti : Kementerian /dinas-dinas terkait, Lembaga penelitian dan pengembangan, Pusat-pusat pengkajian, Pusat-pusat informasi, Pengujian lokal yang dilaksanakan oleh penyuluh
- 2) Sumber resmi dari lembaga-lembaga swasta/lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang penelitian, pengkajian dan penyebaran informasi
- 3) Pengalaman petani, baik pengalaman usahatannya sendiri atau hasil dari petak pengalaman yang dilakukan secara khusus dengan atau tanpa bimbingan penyuluhnya.
- 4) Sumber lain yang dapat dipercaya, misalnya: informasi pasar dari para pedagang, perguruan tinggi dan lain-lain. Sehubungan dengan adanya beragam materi tersebut, maka kiranya perlu diingat bahwa :
 - Materi yang berasal dari lembaga-lembaga resmi (pemerintah dan atau swasta) seringkali tidak sesuai dengan kondisi pengguna, meskipun telah teruji melalui metode ilmiah tertentu. Hal ini disebabkan karena, baik lingkungan fisik maupun sumberdaya yang digunakan tidak selalu sama seperti yang dimiliki atau yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna, khususnya yang berkaitan dengan: peralatan yang digunakan, pengetahuan dan ketrampilan yang dikuasai dan tersedianya modal yang terbatas, sehingga tidaklah mengherankan jika materi-materi yang disampaikan seringkali : a. Secara teknis tidak dapat dilaksanakan

b. Secara ekonomis tidak menguntungkan, dan c. Secara politis dan sosial budaya setempat tidak dapat diterapkan.

- Materi yang berasal dari pengalaman petani seringkali masih diragukan keterandalannya (ketepatan dan ketelitiannya), karena sering tidak memperhatikan metode ilmiah tertentu yang telah dibakukan.
- Materi yang berasal dari sumber lain, seringkali kurang jujur, karena dari padanya melekat kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan pengguna maupun masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu, seyogyanya agar setiap pengguna inovasi selalu bersikap hati-hati, dengan selalu mencoba terlebih dahulu dalam skala usaha yang relatif kecil sebagai petak pengalaman atau dengan melakukan pengujian lokal (*local verification trials*). Penerapan langsung setiap inovasi dalam skala luas hanya dapat diterima manakala pengguna telah memiliki pengalaman yang "baik" dengan setiap sumber materi yang diterimanya.

Materi penyuluhan juga sering disebut sangat beragam, dan beragam pula sumber informasi yang dijadikan materi penyuluhan. Baik yang dihasilkan oleh para peneliti, penyuluh, atau oleh masyarakat pengguna sendiri yang lebih dahulu telah menerapkan inovasi yang ditawarkan. Dari beragam sumber materi tersebut, dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Sumber resmi dari instansi pemerintah, baik yang berasal dari:
 - (a) Departemen/dinas-dinas terkait.
 - (b) Lembaga penelitian dan pengembangan serta perguruan tinggi.
 - (c) Pusat-pusat pengkajian.
 - (d) Pusat-pusat informasi.
 - (e) Pengujian lokal yang dilaksanakan oleh penyuluh.
- b. Sumber resmi dari lembaga-lembaga swasta/lembaga swadaya masyarakat, yang khusus bergerak di bidang penelitian, pengkajian penyebaran informasi.
- c. Pengalaman petani, baik dari pengalaman usahatannya sendiri atau hasil dari "petak-pengalaman" yang dilakukan secara khusus dengan atau tanpa bimbingan penyuluhan.
- d. Sumber lain yang dapat dipercaya, misalnya: informasi pasar dari para pedagang, perguruan tinggi, dan lain-lain. Sehubungan dengan ragam sumber materi yang disebutkan di atas, perlu diingat bahwa :
 - Materi yang berasal dari lembaga-lembaga resmi (pemerintah dan atau swasta) sering kali tidak selalu sesuai dengan kondisi pengguna meskipun telah teruji melalui metoda ilmiah tertentu. Hal ini disebabkan karena, baik lingkungan fisik maupun sumber daya yang digunakan tidak selalu sama seperti yang dimiliki atau yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna, khususnya yang berkaitan dengan: peralatan yang digunakan, pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai dan tersedianya modal yang terbatas. Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika materi-materi yang disampaikan sering kali ternyata: (a) Secara teknis tak dapat dilaksanakan, (b) Secara ekonomis tidak menguntungkan, dan petaninya sudah pupuk

minded maka petani akan sangat responsif, dan petani akan bersedia membayar iuran air.

- Materi penyuluhan sangat beragam, dan beragam pula sumber informasi yang dijadikan materi penyuluhan. Baik yang dihasilkan oleh para peneliti, penyuluh, atau oleh masyarakat pengguna sendiri yang lebih dahulu telah menerapkan inovasi yang ditawarkan.

Dari beragam sumber materi tersebut, dapat dikelompokkan menjadi :

- a. Sumber resmi dari instansi pemerintah, baik yang berasal dari:
 - (a) Departemen/dinas-dinas terkait.
 - (b) Lembaga penelitian dan pengembangan serta perguruan tinggi.
 - (c) Pusat-pusat pengkajian.
 - (d) Pusat-pusat informasi.
 - (e) Pengujian lokal yang dilaksanakan oleh penyuluh.
- b. Sumber resmi dari lembaga-lembaga swasta/lembaga swadaya masyarakat, yang khusus bergerak di bidang penelitian, pengkajian penyebaran informasi.
- c. Pengalaman petani, baik dari pengalaman usahataniya sendiri atau hasil dari "petak-pengalaman" yang dilakukan secara khusus dengan atau tanpa bimbingan penyuluhan.
- d. Sumber lain yang dapat dipercaya, misalnya: informasi pasar dari para pedagang, perguruan tinggi, dan lain-lain.

Sehubungan dengan ragam sumber materi yang disebutkan di atas, perlu diingat bahwa :

- 1) Materi yang berasal dari lembaga-lembaga resmi (pemerintah dan atau swasta) sering kali tidak selalu sesuai dengan kondisi pengguna meskipun telah teruji melalui metoda ilmiah tertentu. Hal ini disebabkan karena, baik lingkungan fisik maupun sumber daya yang digunakan tidak selalu sama seperti yang dimiliki atau yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna, khususnya yang berkaitan dengan: peralatan yang digunakan, pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai dan tersedianya modal yang terbatas. Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika materi-materi yang disampaikan sering kali ternyata:
 - (a) Secara teknis tak dapat dilaksanakan,
 - (b) Secara ekonomis tidak menguntungkan, dan
 - (c) Tidak dapat diterapkan karena pertimbangan-pertimbangan politis, social dan budaya setempat yang tidak mendukungnya.
- 2) Materi yang berasal dari pengalaman petani, sering kali masih diragukan keterandalannya (ketepatan dan ketelitiannya), karena sering kali tidak dilaksanakan dengan memperhatikan metode ilmiah tertentu yang telah dibakukan
- 3) Materi yang berasal dari sumber lain, sering kali tidak jujur, karena dari padanya melekat kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak selalu sesuai

dengan kebutuhan dan kepentingan pengguna maupun masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu, disarankan agar setiap pengguna inovasi selalu bersikap hati-hati, dengan selalu mencoba terlebih dahulu dalam skala usaha yang relatif kecil sebagai petak pengalaman atau dengan melakukan pengujian lokal (local verification trials). Penerapan secara langsung setiap inovasi dalam skala luas, hanya dapat diterima manakala pengguna telah memiliki pengalaman yang "baik" dengan setiap sumber materi yang diterimanya

5. Penyiapan Bahan Materi Penyuluhan Pertanian

Bahan untuk penyusunan materi penyuluhan pada dasarnya harus relevan dengan kebutuhan sasaran yang teridentifikasi. Tujuannya yaitu agar materi yang tersusun menjadi efektif, dalam arti sesuai kebutuhan sasaran dan mampu menyelesaikan permasalahan aktual yang dihadapi petani sasaran. Berkaitan dengan itu, syarat-syarat bahan untuk penyusunan materi yang tepat di antaranya :

- Relevan dengan kebutuhan sasaran
- Berasal dari sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
- Dapat diakses dengan baik

6. Pemilihan Materi Penyuluhan Pertanian

a. Ragam Materi

Apapun materi penyuluhan yang disampaikan oleh seorang penyuluh, pertama-tama harus diingat bahwa materi tersebut harus senantiasa mengacu kepada kebutuhan yang telah dirasakan oleh masyarakat sasarannya. Tetapi didalam praktiknya seringkali penyuluh menghadapi kesulitan untuk memilih dan menyajikan materi yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat sasarannya. Hal ini disebabkan oleh karena keragaman sasaran yang dihadapi, sehingga menuntut keragaman kebutuhan yang berbeda atau keragaman materi yang harus disampaikan pada saat yang sama.

Kesulitan lain juga dapat muncul manakala pemahaman tentang sasaran dan waktu menjadi pembatas. Sehubungan dengan hal tersebut, Arboleda (1981) dalam Mardikanto (1993) memberikan acuan agar setiap penyuluh mampu membedakan ragam materi penyuluhan yang ingin disampaikan pada setiap kegiatannya ke dalam :

- Materi Pokok (Vital) Materi pokok merupakan materi yang benar-benar dibutuhkan dan harus diketahui oleh sasaran utamanya. Materi pokok sedikitnya mencakup 50 persen dari seluruh materi yang disampaikan.
- Materi Penting (Important) Materi penting berisi dasar pemahaman tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan yang dirasakan oleh

sasarannya. Materi ini diberikan sekitar 30 persen dari seluruh materi yang disampaikan.

- Materi Penunjang (Helpful) Materi penunjang masih berkaitan dengan kebutuhan yang dirasakan yang sebaiknya diketahui oleh sasaran untuk memperluas cakrawala pemahamannya tentang kebutuhan yang dirasakannya itu. Materi ini maksimal 20 persen dari seluruh materi yang disampaikan.
- Materi Mubazir (Super flous) Materi ini sebenarnya tidak perlu dan tidak ada kaitannya dengan kebutuhan yang dirasakan oleh sasaran. Karena itu dalam setiap kegiatan penyuluhan sebaiknya justru dihindari penyampaian materi seperti ini. Selanjutnya, materi penyuluhan pertanian juga dapat dikelompokkan berdasarkan jenis usaha tani, kelompok sasaran, dan tujuan yang ingin dicapai -Materi penyuluhan berdasarkan jenis usaha tani: pertanian (pangan, hortikultura, perkebunan), peternakan, atau usaha tani off farm dan on farm.
- Materi penyuluhan berdasarkan kelompok sasaran: pelaku utama dan pelaku usaha -Materi penyuluhan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, yaitu materi dikelompokkan berdasarkan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam program penyuluhan dan rencana kegiatan penyuluhan (pelajari modul tentang menyusun program penyuluhan pertanian).

b. Pertimbangan Memilih Materi

Agar materi yang akan kita sampaikan benar-benar efektif (sesuai dengan kebutuhan sasaran), maka dalam melakukan pemilihan materi penyuluhan pertanian hendaknya mempertimbangkan hal-hal berikut ini :

- **Profitable**, memberikan keuntungan yang nyata kepada sasaran.
- **Complementer**, dapat melengkapi kegiatan yang ada sekarang, atau mengisi waktu luang di antara kegiatan saat ini.
- **Compatibility**, tidak bertentangan dengan adat istiadat dan kebudayaan masyarakat.
- **Simplicity**, sederhana mudah dilaksanakan, tidak memerlukan keterampilan yang terlalu tinggi.
- **Availability**, pengetahuan, biaya dan sarana yang diperlukan, dapat disediakan oleh sasaran.
- **Immediate Applicability**, dapat dimanfaatkan dan segera memberikan hasil yang nyata.
- **In expensiveness**, tidak memerlukan ongkos tambahan yang terlalu mahal.
- **Low risk**, tidak mempunyai resiko yang besar dalam penerapannya.
- **Spectaculer impact**, impact dari penerapannya menarik dan menonjol.
- **Expandible**, dapat dilakukan dalam berbagai keadaan dan mudah diperluas dalam kondisi yang berbeda-beda.

7. Penyusunan Materi Penyuluhan Pertanian

a. Penyusunan Sinopsis

Ringkasan dari materi penyuluhan pertanian perlu disiapkan dan dituangkan dalam bentuk “sinopsis”. Sinopsis berasal dari kata synopical yang artinya ringkas. Berdasarkan asal kata tersebut, sinopsis diartikan: ringkasan suatu materi tulisan yang panjang (baik fiksi maupun non-fiksi) dan sinopsis itu sendiri ditulis dalam bentuk narasi.

Tujuan penyusunan sinopsis yaitu untuk meringkas bahan-bahan materi penyuluhan sehingga menjadi lebih singkat, padat, mudah dipahami, dan terhindar dari bahan-bahan yang kurang relevan dengan topik yang telah ditetapkan. Sinopsis terdiri dari dua versi, yaitu : -Sinopsis yang ditulis untuk meringkas karya yang sudah ada atau sudah ditulis secara lengkap. -Sinopsis yang ditulis untuk persiapan menulis suatu gagasan yang akan dituangkan dalam bentuk fiksi maupun non-fiksi.

Langkah-langkah membuat sinopsis karya yang sudah ada adalah:

- Membaca materi dengan seksama dan penuh konsentrasi;
- Menyediakan waktu khusus untuk membaca;
- Membaca dalam kondisi rileks, tanpa tekanan, pahami materi, pikirkan sinopsis yang akan ditulis siapa pembacanya?;
- Tulis sinopsis dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh pembaca.

Sedangkan langkah-langkah membuat sinopsis untuk menyampaikan ide atau gagasan, adalah:

- Pemetaan materi yang akan disampaikan:
- Siapa sasarannya?;
- Sinopsis yang telah ditulis perlu disertai lembar-lembar presentasi detail gagasan sebagai pendukungnya;
- Siap menerima kritikan dan melakukan revisi (apabila dianggap perlu) bahkan mungkin merombak (re-writing);
- Mempertimbangkan segi ekonomi;
- Siap mempresentasikan sinopsis.

b. Penyusunan LPM

Materi yang telah dipilih untuk disampaikan kepada sasaran selanjutnya disusun dalam Lembar Persiapan Menyuluh (LPM). LPM yaitu lembar persiapan menyuluh setidaknya berisi: Judul; Tujuan; Metode; Media; Waktu; Alat Bantu; Uraian Kegiatan; dan Estimasi Waktu pelaksanaan penyuluhan.

Penyusunan LPM dimaksudkan untuk memudahkan Penyuluh menyampaikan materi penyuluhannya, karena di dalam LPM dicantumkan hal-hal yang akan digunakan dan disampaikan kepada sasaran terkait dengan materi penyuluhan.

c. Lembar Persiapan Menyuluh (LPM)

Materi penyuluhan merupakan informasi atau teknologi atau inovasi yang akan disampaikan kepada sasaran penyuluhan (masyarakat tani). Materi penyuluhan sebaiknya merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh sasaran penyuluhan untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi.

8. Materi Penyuluhan

Materi penyuluhan merupakan informasi atau teknologi atau inovasi yang akan disampaikan kepada sasaran penyuluhan (masyarakat tani). Materi penyuluhan sebaiknya merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh sasaran penyuluhan untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Arboleda (1980 dalam Mardikanto, 1992) membagi materi penyuluhan menjadi:

- a. Materi pokok (inti) adalah materi yang harus disampaikan kepada sasaran terkait dengan materi penyuluhan yang dibutuhkan oleh sasaran.
- b. Materi penting. Materi ini akan membantu sasaran dalam memahami materi penyuluhan yang diberikan oleh penyuluh.
- c. Materi penunjang (pendukung). Materi ini akan menambah wawasan terkait dengan materi penyuluhan yang disampaikan penyuluh. Materi ini dapat berisikan contoh-contoh kejadian sejenis di daerah atau negara lain yang dapat menjadi pembanding sekaligus menjadi motivasi petani untuk mau menerapkan materi penyuluhan tersebut.
- d. Materi tambahan. Materi ini kadangkala tidak terkait dengan materi pokok, bahkan materi disampaikan hanya untuk mengisi waktu atau sekedar selingan agar petani atau sasaran tidak jenuh mendengarkan atau menerima materi pokok, penting, dan penunjang.

Materi penyuluhan yang umumnya berasal dari hasil penelitian belum tentu layak disebarluaskan kepada seluruh lapisan (kelompok) masyarakat. Oleh karenanya, materi penyuluhan sebelum disebarluaskan harus dikaji apakah sudah memenuhi persyaratan. Persyaratan suatu materi penyuluhan secara umum harus memenuhi persyaratan pokok/utama:

- Secara ekonomis menguntungkan. Untuk mengetahui tingkat keuntungan suatu inovasi harus dapat diketahui besarnya manfaat atau keuntungan (ekonomis) bila materi tersebut diterapkan oleh petani. Besarnya tingkat keuntungan penerapan suatu materi (inovasi) dapat diketahui dengan menghitung besarnya Benefit Cost Ratio (B/C) atau Revenue Cost Ratio (R/C).
- Secara teknis dapat diterapkan oleh petani (masyarakat). Materi penyuluhan yang baik harus dapat diterapkan oleh sasaran. Sebagai contoh penyuluhan tentang penggunaan traktor tangan atau "hand tractor" untuk pengolahan lahan (sawah), mesti harus kita pertimbangkan bagaimana kondisi topografis lahan petani setempat, apakah kondisi lahan berada pada

wilayah yang cukup datar atau berada pada kemiringan yang cukup tinggi. Mesin traktor tangan hanya akan sesuai bila digunakan pada lahan yang datar.

- Secara sosial dapat dipertanggungjawabkan. Materi penyuluhan yang baik mesti tidak bertentangan dengan nilai-nilai sosial dan kepercayaan masyarakat. Sebagai contoh materi tentang budidaya ternak babi dari aspek ekonomi dan teknis jelas memenuhi syarat, namun dari aspek sosial, terutama masyarakat yang beragama Islam jelas tidak dapat diterima apalagi untuk diterapkan. Oleh karena itu, latar belakang sosial sasaran penyuluhan harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita menyampaikan materi penyuluhan tersebut.

Selain syarat pokok di atas, sebaiknya materi penyuluhan juga memenuhi beberapa syarat tambahan berikut:

- 1) Materi harus mempunyai risiko kegagalan yang kecil, baik risiko fisik maupun risiko ekonomis (low risk). Risiko fisik adalah risiko yang ditimbulkan oleh turunnya hasil fisik yang disebabkan misalnya karena bencana alam, serangan hama penyakit, kekurangan air. Risiko ekonomi merupakan risiko yang ditimbulkan oleh fluktuasi harga baik yang bersifat musiman atau antar musim. Besarnya risiko ekonomi sangat dipengaruhi oleh faktor pasar dan atau kebijakan pemerintah. Besarnya risiko fisik untuk perkembangan teknologi. Karena sekarang teknologi belum sempurna maka untuk mengatasi risiko fisik kita menganjurkan menanam bermacam-macam tanaman. Risiko fisik untuk daerah satu dengan daerah lainnya tidak sama besarnya.
- 2) Materi harus sederhana dalam banyak hal (simplicity), artinya teknologi yang dianjurkan disesuaikan dengan keadaan pengetahuan petani setempat. Mudah dilaksanakan dalam praktek, tidak memerlukan keterampilan yang tinggi, mudah mengelola dan memeliharanya. Mengenai sederhananya materi ini antara daerah satu dengan daerah lainnya tidak sama. Contoh, untuk daerah dekat pabrik dan bengkel, introduksi traktor merupakan materi yang simpel tetapi untuk daerah lain seperti daerah pelosok pedesaan merupakan hal yang tidak simpel.
- 3) Materi harus tersedia dan dalam jangkauan petani (available and accesable), artinya dapat diperoleh petani baik secara fisik, mental maupun finansial.
- 4) Materi penyuluhan harus segera dapat diterapkan dan memberi manfaat. Untuk tanaman semusim, teknologi baru berupa benih unggul akan lebih mudah masuk sebab hasilnya dapat segera dilihat. Lain halnya dengan tanaman keras, misal bibit tanaman karet, bibit unggul akan sukar masuk sebab hasilnya tidak bisa segera dilihat. Agar lebih mudah masuk caranya diberikan dengan cuma-cuma atau dijual dengan harga murah, diberi bantuan kredit pupuk dan sebagainya.

- 5) Materi penyuluhan untuk menerapkannya tidak memerlukan tambahan biaya yang terlalu tinggi (*inexpensive*). Hal ini mengingat selain syarat pokok di atas, sebaiknya materi penyuluhan juga memenuhi beberapa syarat tambahan berikut:
 - Materi harus mempunyai risiko kegagalan yang kecil, baik risiko fisik maupun risiko ekonomis (*low risk*).
 - Risiko fisik adalah risiko yang ditimbulkan oleh turunnya hasil fisik yang disebabkan misalnya karena bencana alam, serangan hama penyakit, kekurangan air.
 - Risiko ekonomi merupakan risiko yang ditimbulkan oleh fluktuasi harga baik yang bersifat musiman atau antar musim. Besarnya risiko ekonomi sangat dipengaruhi oleh faktor pasar dan atau kebijakan pemerintah. Besarnya risiko fisik untuk perkembangan teknologi. Karena sekarang teknologi belum sempurna maka untuk mengatasi risiko fisik kita menganjurkan menanam bermacam-macam tanaman. Risiko fisik untuk daerah satu dengan daerah lainnya tidak sama besarnya.
- 6) Materi harus sederhana dalam banyak hal (*simplicity*), artinya teknologi yang dianjurkan disesuaikan dengan keadaan pengetahuan petani setempat. Mudah dilaksanakan dalam praktek, tidak memerlukan keterampilan yang tinggi, mudah mengelola dan memeliharanya. Mengenai sederhananya materi ini antara daerah satu dengan daerah lainnya tidak sama. Contoh, untuk daerah dekat pabrik dan bengkel, introduksi traktor merupakan materi yang simpel tetapi untuk daerah lain seperti daerah pelosok pedesaan merupakan hal yang tidak simpel.
- 7) Materi harus tersedia dan dalam jangkauan petani (*available and accesable*), artinya dapat diperoleh petani baik secara fisik, mental maupun finansial.
- 8) Materi penyuluhan harus segera dapat diterapkan dan memberi manfaat. Untuk tanaman semusim, teknologi baru berupa benih unggul akan lebih mudah masuk sebab hasilnya dapat segera dilihat. Lain halnya dengan tanaman keras, misal bibit tanaman karet, bibit unggul akan sukar masuk sebab hasilnya tidak bisa segera dilihat. Agar lebih mudah masuk caranya diberikan dengan cuma-cuma atau dijual dengan harga murah, diberi bantuan kredit pupuk dan sebagainya.
- 9) Materi penyuluhan untuk menerapkannya tidak memerlukan tambahan biaya yang terlalu tinggi (*inexpensive*). Hal ini mengingat pada umumnya permodalan petani lemah. Untuk mengatasi ini maka pemerintah bisa membantu dengan memberikan kredit, namun kalau kredit ini dinilai petani cukup mahal dan prosedurnya berbelit-belit maka respon petani akan rendah sehingga petani tidak mau mengambil.
- 10) Materi harus bersifat *expandable*, artinya mudah disebarluaskan untuk daerah yang cukup luas atau meliputi petani dalam jumlah yang cukup besar sehingga dipandang dari sudut penyuluhan merupakan langkah efisiensi.

- 11) Materi penyuluhan harus mempunyai compatibility yang tinggi. Compatibility atau daya penyesuaian yang tinggi ini artinya materi yang kita suluhkan tidak boleh bertentangan dengan adat istiadat, kepercayaan, agama dari masyarakat setempat.
- 12) Materi penyuluhan harus dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat sehingga mudah disebar luaskan.
- 13) Materi harus mempunyai faktor tambahan yaitu:
 - Sesuai masyarakat lingkungan.
 - Efek sampingan dan efek ikutan yang rendah.
 - Mempertinggi kedudukan sosial.
- 14) Materi yang kita suluhkan tidak mempunyai akibat sampingan (sideeffect) dan akibat ikutan (recidual effect) yang tidak dikehendaki. Ada beberapa jenis obat-obatan pemberantasan hama yang mempunyai recidual effect yang tinggi misal Endrin, DDT, terutama untuk tanaman tembakau atau tanaman yang mendahului tembakau, akibatnya hasil tembakau apabila dipasarkan keluar negeri (Eropa) ditolak. Sebagai akibatnya, kondisi sekarang mengarahkan petani untuk berbudidaya tanaman secara organik dan menggunakan pestisida hayati.
- 15) Materi harus mempunyai daya atau memberikan motivasi yang kuat kepada penyuluh maupun petani agar dapat memberikan daya tarik yang tinggi sehingga menimbulkan keyakinan bahwa materi itu baik. Motivasi bagi petani terutama kalau memberikan keuntungan yang besar. Motivasi bidang sosial juga bisa meningkatkan respon petani.
- 16) Materi penyuluhan harus mempunyai sifat komplementer dari pada teknologi yang sudah diterapkan petani. Misalnya penggunaan pompa air pada musim kemarau, untuk daerah-daerah yang petaninya sudah pupuk minded maka petani akan sangat responsif, dan petani akan bersedia membayar iuran air.

Soal Latihan :

1. Apa yang dimaksud dengan materi penyuluhan pertanian, dan bedanya dengan materi pada bidang yang lain?
2. Jelaskan bagaimana cara penyusunan materi penyuluhan pertanian yang benar?
3. Sebutkan syarat-syarat materi penyuluhan yang ideal?
4. Jelaskan faktor-faktor apa yang harus dipertimbangkan untuk membentuk materi penyuluhan yang ideal?
5. Jelaskan mengapa materi penyuluhan harus berisikan hal-hal yang harus dapat dipertanggungjawabkan?

Modul 8

KOMUNIKASI DALAM PENYULUHAN PERTANIAN

Materi pada modul 8 ini memiliki muatan sebagai berikut :

- **Capaian belajar untuk Kemampuan Bidang Ilmu Pengetahuan (*Learning Outcome for Science Competencies*)**

SC 3/CP-KIP 3: Mampu memahami bidang ilmu manajemen, bisnis, kewirausahaan, kelembagaan, sosiologi, penyuluhan dan komunikasi, serta ilmu-ilmu pertanian untuk pengembangan pembangunan agribisnis berkelanjutan.

SC 4/CP-KIP 4 : Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.

- **Capaian belajar untuk Kemampuan Bidang Pekerjaan (*Learning Outcome for Occupational Skills*)**

CLO 2/CPMK 2 : Mahasiswa mampu menganalisis komponen dan sistem penyuluhan pertanian untuk pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dalam bidang agribisnis.

Pada modul 8 ini, mahasiswa akan dikenalkan mengenal kegiatan komunikasi dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian khususnya oleh penyuluh ke sasarannya. Komunikasi pertanian adalah suatu pernyataan antar manusia yang berkaitan dengan bidang pertanian baik secara kelompok yang sifatnya umum dengan menggunakan lambang tertentu seperti yang dijumpai pada metode penyuluhan.

Komunikasi penyuluhan adalah suatu proses penyampaian informasi kepada khalayak yang terkait, secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam rangka mengubah sikap, pendapat, dan perilaku khalayak sasaran. Dalam kegiatan penyuluhan komunikasi berlangsung secara dua arah, dari penyuluh ke

sasarannya (petani dan keluarganya), dan juga sebaliknya dalam upaya mendapatkan umpan balik (*feed back*).

1. Pengertian, Tujuan dan Unsur Komunikasi Dalam Penyuluhan Pertanian

1.1. Pengertian

Ada beberapa pengertian mengenai komunikasi dalam penyuluhan pertanian, antara lain :

1. Komunikasi merupakan suatu proses yang dilakukan individu dalam hubungannya dengan individu lainnya, atau individu dalam kelompok, organisasi maupun dalam masyarakat guna menciptakan, mengirimkan dan menggunakan serta mempertukarkan informasi untuk mengkoordinasi lingkungannya dan orang lain.
2. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan-pesan dari seseorang (sumber, penyuluh) kepada orang lain (penerima, sasaran, pelaku utama/pelaku usaha) secara timbal balik (*two-way traffic communication*).
3. Komunikasi penyuluhan adalah suatu proses penyampaian informasi kepada khalayak yang terkait, secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam rangka mengubah sikap, pendapat, dan perilaku khalayak sasaran.

Komunikasi merupakan suatu ilmu yang multidisipliner ataupun multidisipliner, artinya komunikasi digunakan pada setiap disiplin termasuk didalamnya kegiatan penyuluhan pertanian. Pengertian komunikasi pada dasarnya adalah terjadinya kesamaan persepsi antara komunikator dan komunikan, sedangkan tujuan komunikasi diantaranya informatif, persuasif dan entertainment atau dengan kata lain dari tidak tahu menjadi tahu, dan terjalannya suatu komunikasi minimal terdapat tiga unsur didalamnya yaitu, sumber, pesan dan penerima.

1.2. Tujuan Komunikasi

Komunikasi mempunyai tiga tujuan, yaitu :

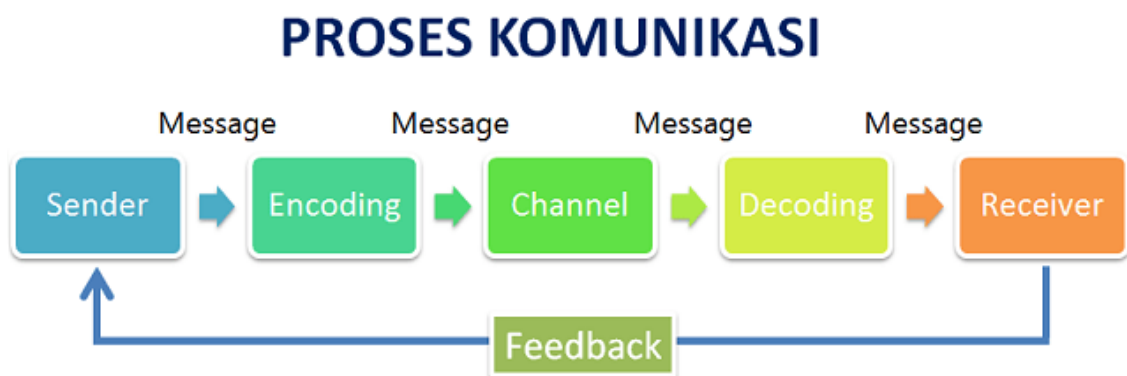
1. Informatif, artinya bahwa komunikasi bertujuan menyampaikan informasi informasi yang bersifat obyektif dan nyata.
2. Persuasif, artinya komunikasi bertujuan untuk menggugah hati dan perasaan sasaran atau komunikan sehingga mau mengikuti atau melakukan tindakan/ perubahan atas kemauan sendiri sesuai yang diharap komunikator.
3. Entertainment, artinya bahwa komunikasi bertujuan untuk menghibur komunikan, membuat mereka senang, tidak bersikap apatis maupun pesimis.

1.3. Unsur-Unsur Komunikasi Dalam Penyuluhan Pertanian

Suatu proses komunikasi akan dapat berlangsung dengan baik apabila terdapat unsur-unsur yang merupakan satu kesatuan. Unsur-unsur komunikasi tersebut minimal ada 3 yaitu :

1. Sumber/komunikator (source/sender),
2. Pesan (message),
3. Penerima/komunikasikan (receiver).
4. Saluran (channel).

Disamping itu, proses komunikasi dalam penyuluhan pertanian diharapkan dapat menimbulkan dampak / perubahan sebanyak-banyaknya. Ada beberapa model komunikasi yang kita kenal, salah satu diantaranya adalah model S-M-C-R-E sebagaimana dalam Gambar 8.1.



Gambar 8.1. Proses Komunikasi

Sumber komunikasi (Sender) adalah pihak yang mengirim pesan atau informasi. Dalam penyuluhan pertanian sumber ini bisa penyuluh atau agen pembaharu.

Pesan merupakan informasi yang ditujukan kepada penerima. Dalam penyuluhan pertanian pesan ini dapat berupa materi penyuluhan. Pesan yang digunakan dalam penyuluhan pertanian didasarkan pada kebutuhan sasaran laki-laki dan perempuan.

Saluran adalah jalan yang dilalui pesan yang disampaikan sumber kepada penerima. Saluran meliputi penggunaan metoda dan teknik serta penggunaan media yang relevan dengan tujuan, sasaran serta sifat pesannya. Pada umumnya semakin banyak indera yang distimuli melalui berbagai media semakin efektif proses komunikasi dalam penyuluhan pertanian. Penggunaan metoda, teknik dan media penyuluhan pertanian selain untuk meningkatkan pemahaman sasaran terhadap pesan yang disampaikan, untuk mendorong aktivitas dan kreativitas sasaran serta tumbuhnya rasa percaya diri.

Penerima adalah pihak yang menerima pesan-pesan atau informasi, yaitu pihak yang diharapkan akan berubah baik perilaku maupun kepribadiannya. Dalam penyuluhan pertanian penerima atau sasaran adalah para petani (pelaku utama) dan pelaku usaha beserta keluarganya.

Efek komunikasi merupakan respon penerima terhadap pesan-pesan yang diterima dan merupakan umpan balik (*feedback*) bagi komunikator /sumber atas pesan-pesan yang disampaikan. Efek komunikasi berupa perubahan-perubahan yang diharapkan terjadi pada sasaran akibat dari proses komunikasi. Perubahan-perubahan yang diharapkan menyangkut perubahan perilaku (pengetahuan, keterampilan, dan sikap), serta perubahan kepribadian sasaran (kemandirian, ketangguhan, kemampuan bekerjasama, percaya diri, kemampuan menempatkan diri pada posisi tawar yang kuat, dsb.). Efek komunikasi ada yang langsung bisa diketahui, misalnya perubahan pengetahuan dan keterampilan, tetapi ada pula yang tidak langsung artinya perlu waktu yang lama seperti perubahan sikap dan kepribadian. Pada komunikasi dua arah (*two way trafficts communication*) komunikator bisa memperoleh umpan balik secara langsung dibanding komunikasi yang searah.

Pada Gambar 8.1 terlihat bahwa sumber (pengirim) berita membuat sandi atau lambang untuk menyampaikan sesuatu pesan (mesage). Setelah sandi atau lambang tadi di sampaikan pada sasaran/penerima, selanjutnya lambang yang berisi pesan/informasi tersebut diterjemahkan dalam suatu pengertian oleh penerima. Sebagai respons dari pengertian yang diterima, sasaran mengirim kembali informasi kepada sumber (feed back). Dengan adanya umpan balik (feed back) maka sumber (penyuluh pertanian) dapat menilai atau mengetahui apakah sudah terjadi saling pengertian (mutual understading) tentang pesan (mesage) atau tujuan komunikasi tersebut. Umpan balik (feed back) sangat bermanfaat bagi penyuluh untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam proses komunikasi sampai tujuan komunikasi dapat tercapai secara baik.

2. Proses Komunikasi

Di dalam kegiatan penyuluhan pertanian, proses komunikasi terjadi karena penyuluh berusaha untuk menyampaikan pesan/informasi kepada petani, dari petani kepada penyuluh, dan juga dari petani kepada petani lainnya. Pesan-pesan dapat disampaikan secara verbal (dengan kata-kata) atau non-verbal (tidak dengan kata-kata, seperti isyarat, gerakan, tindakan, gambar, dsb.) oleh komunikator kepada komunikan/sasaran secara langsung atau melalui sarana untuk mempengaruhi kognisinya, intelektualitasnya, emosinya dan afeksinya, serta psikomotoriknya sehingga sasaran mau merubah perilaku (behavior) dan kepribadiannya (personality). Perilaku (behavior) yang diharapkan berubah adalah meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Sedangkan kepribadian (personality) meliputi kemandirian, ketangguhan serta kepercayaan diri, ketidaktergantungan, serta posisi tawarnya (bargaining position)

Proses komunikasi dalam penyuluhan pertanian bertujuan untuk menarik perhatian, menggugah hati dan perasaan, meyakinkan serta memotivasi sasaran agar mau melakukan tindakan atau perubahan-perubahan untuk pengembangan usaha agribisnisnya, peningkatan produktivitas dan kesejahteraannya serta peningkatan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Uraian diatas memberikan gambaran bahwa proses komunikasi akan berjalan baik atau mudah apabila diantara para pelaku komunikasi yang terlibat terdapat banyak persamaan dalam hal kerangka referensi. Namun tidak berarti bahwa komunikasi baru terjadi apabila kerangka referensi dari masing-masing pelaku (sumber dan penerima) relatif sama. Artinya apabila kita ingin berkomunikasi dengan seseorang secara baik, maka kita harus mengolah dan menyampaikan pesan dalam bahasa dan cara-cara lain yang sesuai dengan tingkat pengetahuan, pengalaman, orientasi, dan latar belakang budayanya. Dengan kata lain pihak sumber perlu mengenali karakteristik individual, sosial dan budaya dari pihak penerima.

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa proses komunikasi adalah suatu proses pembentukan penyampaian, penerimaan dan pengolahan pesan yang terjadi dalam diri seseorang atau diantara dua orang atau lebih untuk tujuan tertentu, dan suatu proses komunikasi akan berjalan dengan baik apabila terdapat pertautan minat dan kepentingan diantara sumber dan penerima pesan, dalam hal ini adanya persamaan yang merujuk pada tingkat pendidikan, pengetahuan, latar belakang pendidikan dan orientasi.

Soal Latihan :

1. Sebutkan unsur-unsur komunikasi yang digunakan pada kegiatan komunikasi dalam penyuluhan pertanian !
2. Jelaskan proses komunikasi dengan model S-M-C-R-E yang dilakukan dalam kegiatan penyuluhan pertanian !
3. Mengapa dalam kegiatan komunikasi penyuluhan pertanian diperlukan unsur feed back (umpan balik)?
4. Apa yang dimaksud dengan komunikasi dua arah (two way trafficts communication) dalam penyuluhan pertanian ?
5. Jelaskan apakah saluran diperlukan dalam kegiatan komunikasi penyuluhan pertanian?

Modul 9

KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN

Materi pada modul 9 ini memiliki muatan sebagai berikut :

- **Capaian belajar untuk Kemampuan Bidang Pekerjaan (*Learning Outcome for Occupational Skills*)**

CLO 3/CPMK 3 : Mahasiswa mampu menerapkan teknologi informasi dalam kegiatan penyuluhan pertanian untuk peningkatan pendapatan petani dan kesejahteraan masyarakat

- **Capaian belajar untuk Kemampuan Ketrampilan Umum (*General Occupational Skills*)**

OC 5/CP-KBP 5 : Mampu berkomunikasi dan bernegosiasi secara efektif dengan pemangku kepentingan dalam pengembangan agribisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mewujudkan agribisnis yang berkelanjutan dan efisien dalam mencapai keberhasilan program penyuluhan pertanian

- **Capaian belajar untuk Kemampuan Ketrampilan Khusus (*Specific Occupational Skills*)**

OC 6/CP-KBP 6 : Mampu menggunakan metode dan merumuskan strategi penggunaan sumberdaya untuk meningkatkan kapasitas diri dan masyarakat dalam menghadapi tantangan pengembangan agribisnis ke depan.

OC 7/CP-KBP 7 : Mampu mengkomunikasikan kebijakan bisnis dan manajemen agribisnis untuk kepentingan pemberdayaan petani.

Modul 9 ini akan menjelaskan ke mahasiswa tentang sejarah dan kebijakan penyuluhan pertanian di Indonesia, menjelaskan perkembangan lembaga penyuluhan di Indonesia, menjelaskan nama dan tugas lembaga-lembaga penyuluhan dari tingkat pusat sampai di tingkat kecamatan, dan menjelaskan kriteria BP3K sebagai *Center of Excellence* (CoE) dalam kegiatan penyuluhan pertanian

1. Sejarah dan Kebijakan Penyuluhan Pertanian

Di Indonesia kegiatan penyuluhan pertanian mulai dikembangkan sejak tahun 1905 bersamaan dengan dibukanya Departemen Pertanian (Department van Landbouw) oleh pemerintah Hindia Belanda, institusi yang dibentuk tersebut antara lain memiliki tugas melakukan kegiatan penyuluhan pertanian, sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh pejabat Pangreh Praja (PP). Pada tahun 1910 dibentuk Dinas Penyuluhan Pertanian (Landbouw Voorlichting Dienst), tetapi baru benar-benar berperan sebagai lembaga penyuluhan pertanian yang mandiri sejak diubah menjadi Dinas Pertanian Provinsi terlepas dari PP pada tahun 1918 (Mardikanto, 1993). Di masa kemerdekaan, kegiatan penyuluhan telah dimulai dengan dibentuknya Balai Pendidikan Masyarakat Desa (BPMD) kemudian dilanjutkan dengan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dengan metode Latihan dan Kunjungan (Mardikanto, 2009). Penyuluh sebagai ujung tombak pembangunan pertanian di era Bimas telah memberikan kontribusi yang nyata dalam meningkatkan produksi pertanian khususnya produksi padi, sehingga pada tahun 1984 pemerintah Republik Indonesia memperoleh penghargaan dari FAO sebagai Negara yang berhasil mencapai swasembada beras (Suprpto, 2009).

Memasuki dasawarsa 1990-an semakin dirasakan menurunnya peran penyuluhan pertanian di Indonesia yang dikelola pemerintah (Departemen Pertanian). Hal ini terjadi karena selain terjadi perubahan struktur organisasi penyuluhan, juga semakin banyak pihak-pihak yang melakukan penyuluhan pertanian (perguruan tinggi, swasta, LSM dll) serta semakin beragamnya sumber-sumber informasi/inovasi yang mudah diakses oleh petani. Pada tahun 1995 terjadi perubahan struktur kelembagaan penyuluhan pertanian melalui SKB Mendagri-Mentan tentang pembentukan Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian (BIPP) di setiap Kabupaten. Namun demikian, kinerja kelembagaan ini pun banyak menuai kritik karena dianggap kurang berkoordinasi dengan dinas-dinas teknis terkait (Mardikanto, 2009). Kondisi seperti ini semakin diperburuk dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang berakibat peran penyuluh pertanian dalam mendukung program pembangunan pertanian mengalami penurunan yang sangat drastis (Suprpto, 2009).

Mencermati kondisi seperti ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang Revitalisasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK) yang dicanangkan pada Tanggal 15 Juni 2005 di Purwakarta oleh Presiden Republik Indonesia, hingga pada tahun 2006 berhasil disahkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagai Dinamika Penyuluhan Pertanian: Dari Era Kolonial Sampai Dengan Era Digital 42 landasan kebijakan, program, kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, pembiayaan, dan pengawasan penyuluhan pertanian (Warya, 2008). Padmowihardjo (2001) berpendapat bahwa

penyuluhan pertanian sebagai metode pendidikan orang dewasa (andragogi) terdapat falsafah untuk membuat saling “asah-asih-asuh” dalam suatu interaksi warga belajar, penyuluh sebagai fasilitator dan motivator yang mampu mendorong petani untuk mandiri dan berswadaya. Penyuluh dan sasaran mengembangkan hubungan timbal balik dan saling membantu dalam kegiatan penyuluhan.

Penyuluhan Pertanian adalah suatu usaha pendidikan non formal untuk keluarga-keluarga yang bergerak di bidang pertanian, yang cara, bahan dan sarannya disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan dan kepentingan, baik dari sasaran, waktu maupun keadaan sehingga kemampuan mereka untuk beradaptasi terhadap perubahan yang dapat meningkatkan kesejahteraannya dapat dipercepat (Sumardjo, 1999). Dalam konteks komunikasi dan inovasi, penyuluhan menurut Leeuwis (2004) adalah serangkaian intervensi komunikatif yang ditanamkan, yang diartikan antara lain untuk membangun dan/atau mendorong inovasi yang seharusnya membantu menyelesaikan situasi problematis (biasanya multi-aktor).

Sumardjo (1999) mengatakan bahwa penyuluhan merupakan suatu intervensi komunikasi yang diselenggarakan oleh suatu lembaga untuk menimbulkan (induce) perubahan kualitas perilaku secara sukarela (*voluntaire change*) bagi kesejahteraan masyarakat. Menurut Margono Slamet (Sumardjo, 1999) bahwa, seorang penyuluh harus menghayati dan berpegang pada falsafah dasar penyuluhan yaitu :

- (1) penyuluhan adalah proses pendidikan,
- (2) penyuluhan adalah proses demokrasi, dan
- (3) penyuluhan adalah proses kontinyu.

Dalam hal ini terkandung makna filosofi yaitu membantu orang agar orang tersebut mampu menolong dirinya sendiri melalui pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraannya (*help people to help themselves through education means to improve their level of living*). Oleh Karena itu penyuluhan pertanian sebagai upaya membantu masyarakat agar mereka dapat membantu dirinya dan meningkatkan harkatnya sebagai manusia (Warya, 2008).

Padmowihardjo (2001) berpendapat bahwa penyuluhan pertanian sebagai metode pendidikan orang dewasa (andragogi) terdapat falsafah untuk membuat saling “asah-asih-asuh” dalam suatu interaksi warga belajar, penyuluh sebagai fasilitator dan motivator yang mampu mendorong petani untuk mandiri dan berswadaya. Penyuluh dan sasaran mengembangkan hubungan timbal balik dan saling membantu dalam kegiatan penyuluhan. Penyuluhan Pertanian adalah suatu usaha pendidikan non formal untuk keluarga-keluarga yang bergerak di bidang pertanian, yang cara, bahan dan sarannya disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan dan kepentingan, baik dari sasaran, waktu maupun keadaan sehingga kemampuan mereka untuk beradaptasi terhadap perubahan yang dapat meningkatkan kesejahteraannya dapat dipercepat (Sumardjo, 1999).

Dalam konteks komunikasi dan inovasi, penyuluhan menurut Leeuwis (2004) adalah serangkaian intervensi komunikatif yang ditanamkan, yang diartikan antara lain untuk membangun dan/atau mendorong inovasi yang seharusnya membantu menyelesaikan situasi problematis (biasanya multi-aktor). Sumardjo (1999) mengatakan bahwa penyuluhan merupakan suatu intervensi komunikasi yang diselenggarakan oleh suatu lembaga untuk menimbulkan (induce) perubahan kualitas perilaku secara sukarela (voluntaire change) bagi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Margono Slamet (Sumardjo, 1999) bahwa, seorang penyuluh harus menghayati dan berpegang pada falsafah dasar penyuluhan yaitu :

1. Penyuluhan adalah proses pendidikan,
2. Penyuluhan adalah proses demokrasi, dan
3. Penyuluhan adalah proses kontinyu.

Dalam hal ini terkandung makna filosofi yaitu membantu orang agar orang tersebut mampu menolong dirinya sendiri melalui pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraannya (*help people to help themselves through education means to improve their level of living*). Oleh Karena itu penyuluhan pertanian sebagai upaya membantu masyarakat agar mereka dapat membantu dirinya dan meningkatkan harkatnya sebagai manusia (Warya, 2008). Nasution (2004) menyatakan, penyuluhan pertanian adalah usaha membantu petani agar senantiasa meningkatkan efisiensi usaha tani.

Dalam pengertian “membantu” masyarakat agar dapat membantu dirinya tersebut terkandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut;

1. Penyuluhan pertanian harus mengacu pada kebutuhan sasaran yang akan dibantu, dan bukannya sasaran harus menuruti keinginan penyuluh pertanian,
2. Penyuluhan pertanian mengarah kepada terciptanya kemandirian, bukan membuat sasaran semakin menggantungkan diri kepada penyuluh pertanian,
3. Penyuluhan pertanian harus mengacu kepada perbaikan kualitas hidup dan kesejahteraan sasaran, dan bukan lebih mengutamakan target-target fisik yang sering kali tidak banyak manfaatnya bagi perbaikan kualitas hidup sasarannya.

Penyuluhan sebagai proses pendidikan, demokrasi dan kontinyu menurut Sumardjo (1999) memiliki makna bahwa :

1. Penyuluh harus dapat membawa perubahan manusia dalam aspek-aspek perilaku, baik kognitif, afektif maupun psikomotoriknya,
2. Penyuluh harus mampu mengembangkan suasana bebas, untuk mengembangkan kemampuan masyarakat dalam hal berfikir, berdiskusi, menyelesaikan masalahnya, merencanakan dan bertindak bersamasama dibawah bimbingan orang-orang diantara mereka, sehingga berlaku penyelesaian dari mereka, oleh mereka dan untuk mereka, dan

3. Penyuluhan harus dimulai dari keadaan petani kearah tujuan yang mereka kehendaki, berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan yang senantiasa berkembang, yang dirasakan oleh sasaran penyuluhan.

Sumardjo (1999), menyatakan bahwa kebijakan sistem penyuluhan yang dominan dengan kepentingan pusat, ternyata berdampak kurang efektif dalam pemberdayaan masyarakat. Sebaliknya, fakta menunjukkan bahwa sistem penyuluhan yang partisipatif dan adanya konvergensi kepentingan masyarakat dan pemerintah ternyata berdampak memberdayakan. Banyak praktek-praktek penyuluhan yang menyimpang dari filosofi penyuluhan (secara non partisipatif). Akibatnya penyuluhan tidak berfungsi memberdayakan bahkan sebaliknya cenderung memperdaya masyarakat. Praktek penyuluhan yang menyimpang tersebut disebabkan karena penyuluhan dilaksanakan oleh orang-orang yang sebenarnya kurang memiliki kompetensi profesional penyuluh (Sumardjo, 2010).

Margono Slamet (Mardikanto, 1993), menyatakan bahwa pentingnya kebijakan desentralisasi penyuluhan pertanian adalah untuk menggantikan sistem penyuluhan yang bersifat regulatif sentralistis ke arah sistem penyuluhan yang fasilitatif partisipatif. Selanjutnya menurut Margono Slamet (2001), bahwa penyelenggaraan penyuluhan pertanian perlu lebih profesional, yang antara lain memerlukan reorientasi :

1. Dari pendekatan instansi ke pengembangan kualitas kinerja individu penyuluh;
2. Dari pendekatan top down ke bottom up;
3. Dari hierarkhi kerja vertikal ke horizontal;
4. Dari pendekatan instruktif ke partisipatif dan dialogis; dan
5. Dari sistem kerja linier ke sistem kerja jaringan.

2. Perkembangan Lembaga Penyuluhan di Indonesia

Perjalanan sejarah pembangunan pertanian Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan perjalanan sejarah penyuluhan pertanian. Hal ini disebabkan penyuluhan pertanian merupakan ujung tombak kegiatan pembangunan pertanian, terutama di wilayah pedesaan sebagai pusat pengembangan produksi pertanian. Sebagai suatu kegiatan, pelaksanaan penyuluhan di masyarakat merupakan kegiatan yang dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah maupun swasta. Peranan lembaga penyuluhan yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah sampai saat ini masih cukup dominan.

Dinamika kelembagaan penyuluhan yang pernah dan masih ada sampai saat ini berjalan seiring dengan sejarah penyuluhan yang pernah terjadi :

a. Lembaga Penyuluhan pada Zaman Belanda (1905-1942)

- Satu Januari 1905 Pemerintah Kolonial Belanda mendirikan Departemen Pertanian, Kerajinan dan Perdagangan (Landbouw Nijverheid en Handel) atas usul Melchior Treub. Tugasnya antara lain melakukan penyuluhan yang

dilaksanakan melalui Pangreh Praja, dan mendasarkan kegiatannya atas perintah-perintah kepada petani.

- Tahun 1908, diangkat lima orang penasehat pertanian (Landbouw Adviseur) dan beberapa pembantunya (Asisten Landbouw Adviseur) sebagai pegawai Departemen Pertanian, yang diperbantukan kepada Pangreh Praja setempat. Tugasnya memberi nasehat pertanian dan menyelenggarakan pendidikan pertanian kepada petani. Mereka merupakan perintis pendidikan pertanian, yang berkembang menjadi penyuluh pertanian yang tidak berdasarkan atas perintah-perintah.
- Tahun 1910, didirikan Dinas Penyuluhan Pertanian (Landbouw Voorlichtings Dienst - LDV) dalam Departemen Pertanian. Di daerah merupakan bagian dari Pangreh Praja. Petugas-petugas penasehat pertanian (1908) diganti sebutannya menjadi Landbouw Consulen dan Adjunct Landbouw Consulent. Mereka bisa berhubungan langsung dengan petani atas dasar pendidikan dan kesukarelaan.
- Tahun 1921, LDV dilepas dari Pangreh Praja dan dijadikan Dinas Daerah Provinsi, karena hasil nyata yang dicapainya. Sejak itu petugas-petugas Dinas Penyuluhan berdiri sendiri dan bertanggung jawab kepada Departemen Pertanian, disamping tetap bertindak sebagai penasehat Pangreh Praja. LDV menangani penyuluhan tanaman pangan dan perkebunan, dan ikut dalam bidang perkreditan.
- Pada periode 1921-1942, Dinas Penyuluhan terus berkembang sampai datang tentera Jepang. Penyuluh pribuminya berasal dari lulusan Meddlebare Landbouw School/MLS (SPMA) Bogor, Cultuur School/CS (SPMP/Sekolah Pertanian Menengah Pertama) Sukabumi dan Malang.

b. Lembaga Penyuluhan pada Zaman Jepang (1942–1945)

Penyuluhan pada masa pendudukan Jepang dapat dikatakan tidak ada. Para petani dipaksa untuk mengusahakan/memproduksi bahan makanan dan bahan strategis lainnya. Son Sidoing (Mantri Pertanian Kecamatan) dan Nogyo Kumiai (Koperasi Pertanian di setiap kecamatan) ditugaskan memperlancar usaha produksi dan mengumpulkan hasilnya bagi keperluan angkatan perang Jepang.

c. Lembaga Penyuluhan pada Zaman Kemerdekaan (1945–1995)

1. Periode Liberal (1945 – 1959)

Pada periode 1945–1950, pengembangan pertanian dimulai dengan Rencana (Plan) Kasimo, yaitu rencana produksi pertanian 3 tahun (1948–1950). Tidak terlaksana sepenuhnya karena revolusi fisik. Pada periode 1950–1959, pemerintah memulai usaha pembangunan pertanian lebih sistematis, rencana Kasimo yang belum terlaksana sepenuhnya digabung dengan Rencana Wisaksono menjadi Rencana Kesejahteraan Istimewa (RKI) tahap ke-1 tahun

1950–1955 dan tahap ke-2 tahun 1955–1960. Untuk menunjang program tersebut dilaksanakan: 1). Perbanyak benih unggul padi dan palawija dengan memperluas dan menambah jumlah Balai Benih dan Kebun Bibit. 2). Perbaiki dan perluasan pengairan pedesaan. 3). Peningkatan penggunaan pupuk untuk segala jenis tanaman, terutama pupuk fosfat dan nitrogen pada padi. 4). Peningkatan pemberantasan hama penyakit tanaman serta memperlancar penyaluran pestisida dan peralatannya. 5). Peningkatan pengendalian bahaya erosi. 6). Peningkatan pendidikan masyarakat pedesaan dengan mendirikan Balai Pendidikan Masyarakat Desa (BPMD) di tiap kecamatan.

2. Periode Terpimpin (1959 - 1963)

Perasaan tidak puas pada kabinet memuncak, sehingga terbitlah Dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945. Sejak itu mulailah periode terpimpin, demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin. Penyuluhan mengalami banyak perubahan. Filsafat "alon-alon waton kelakon" menjadi "segalanya harus cepat dan tepat". Kegiatan-kegiatan berdasarkan menggerakkan massa, pendekatan dan metoda penyuluhan harus sesuai. Kampanye besar-besaran menggantikan pendekatan perorangan. Sistem "tetesan minyak (olie vlek-sijsteem)" diganti dengan "tumpahan air sehingga semua orang kebagian cipratannya". Kesemuanya di bawah pimpinan tertentu, sesuai dengan prinsip ekonomi terpimpin. RKI diganti dengan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) Tahap I, yang meluas dan menyeluruh. Pelaksanaannya tidak bisa rutin, tapi merupakan gerakan dinamis. Gerakan intensifikasi produksi padi Swa-Sembada Beras (SSB), berlangsung dari tingkat nasional sampai ke desa, dengan pimpinan Komando Operasi Gerakan Makmur (KOGM) pada setiap tingkat operasi. Tahun 1970 KOGM meluas menjadi Gerakan Swa-Sembada Bahan Makanan (SSBM), tetapi tidak berhasil mencapai tujuannya. Efek negatif penyuluhan sistem "komando", adalah para petani menjauhi penyuluh. Kegagalan sistem terpimpin, ditambah dengan peristiwa G-30-S, menyebabkan tumbangnyanya Pemerintahan Soekarno dan timbulnya Orde Baru.

3. Periode Konsolidasi (1963 – 1974)

- 3.1. Di akhir masa terpimpin, gerakan SSBM gagal, timbul gagasan mengembalikan penyuluhan kepada azas-azas semula, seperti kesukarelaan, otoaktivitas, demokrasi, dan lain-lain. Berbagai usaha telah dilakukan oleh Departemen Pertanian dengan berbagai pihak, seperti penyuluhan dijalankan oleh Jawatan Pertanian Rakyat, Direktorat Pertanian Rakyat (Dirtara), Fakultas Pertanian, organisasi massa tani, tokoh pertanian, supaya memprogresifkan pendekatan dan membangun organisasi penyuluhan di Indonesia yang berbentuk suatu piramida besar yang dasarnya lebar dan luas, di tingkat desa.

- 3.2. Seiring usaha penyempurnaan penyuluhan, Fakultas Pertanian UI (Institut Pertanian Bogor) bekerjasama dengan Lembaga Koordinasi Pengabdian Masyarakat Departemen PTIP (Pendidikan Tinggi Ilmu Pengetahuan) mengadakan pilot proyek penyuluhan yang efektif, guna meningkatkan produksi padi (1963/1964) dengan penerapan Panca Usaha Lengkap di Kabupaten Karawang. "Action Research" itu dipimpin Dr.Ir. Gunawan Satari dengan asisten Ir. Achmad Affandi, Ir. Djatijanto, dan Ir. Sukmana. Petani dibimbing intensif dan disediakan saprodi secukupnya. Hasilnya, produksi padi meningkat dua kali lipat.
- 3.3. Demonstrasi Massal (DEMAS) dilanjutkan pada MT 1964/1965, dan diperluas lagi pada MT 1965/1966. Proyek ini diubah menjadi Bimbingan Massal AABM atau BIMAS SSBM dan akhirnya menjadi sistem Bimas, yang mengalami perbaikan menjadi Bimas Berdikari, Bimas Biasa, Bimas Baru, Bimas Gotong Royong, dan Bimas yang disempurnakan. Awal program Bimas, Direktur Jenderal Pertanian dijabat Ir. Sadikin Soemintawikarta dan kepala Dirtara Ir. Soegandhi Soerjo Amidharmo. Bimas meliputi masukan (input) yang harus dilakukan, ditetapkan dengan Inpres No. 4/1973 tentang Unit Desa, terdiri dari: (1) penyediaan kredit oleh BRI, (2) pelayanan penyuluhan oleh PPL dinas pertanian, (3) sarana produksi yang murah dan mudah oleh penyalur, kios dan KUD, serta (4) pengolahan dan pemasaran hasil oleh KUD, Kelompok Tani dan swasta perorangan.
- 3.4. Bimas dimaksudkan untuk mengembangkan program intensifikasi massal (INMAS). Petani yang telah menjalani Bimas atas bantuan kredit dari Pemerintah pada akhirnya akan mampu berdiri sendiri. Mereka diberi kesempatan membeli sarana produksi secara tunai.
- 3.5. Sistem Bimas dan Inmas didasarkan pada usaha pembinaan petani dengan pendekatan Kelompok tani oleh Penyuluh Lapangan yang berijazah SPMA, dibantu oleh penyuluh sukarela berasal dari kalangan petani, yang dikenal dengan sebutan Kontaktani. Kontaktani dibina secara perorangan dalam kegiatan anjungsana, kursus tani, demonstrasi perseorangan (demplot) dan surat menyurat.
- 3.6. Usaha peningkatan produksi yang menyeluruh dan meluas ini memerlukan metode massal, seperti penggunaan radio (siaran pedesaan), pameran, penerbitan, pertunjukan film maupun kesenian tradisional (wayang, sandiwara, dagelan, dst). Kesemuanya masih secara adhoc atau insidental, belum sistematis dan berkelanjutan.
- 3.7. Pada periode ini, terjadi perubahan kemasyarakatan dan politik. Pola dan cara penyuluhan dalam menyongsong era pembangunan, diprogramkan oleh Orde Baru dalam program Pembangunan Lima Tahun (PELITA) I. Bimas diartikan sebagai kegiatan penyuluhan massal, untuk meningkatkan produksi pertanian dengan cara intensifikasi khusus padi/beras, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya. Bimas dibina

bersama oleh instansi dan lembaga pemerintah di dalam dan di luar Departemen Pertanian, menuju swadaya masyarakat tani sendiri dengan jalan Panca Usaha, pembinaan, pengolahan dan pemasaran serta pembangunan masyarakat desa. Bimas merupakan kegiatan penyuluhan pertanian yang bersifat: (1) Ada usaha bersama dari berbagai instansi dan lembaga melakukan penyuluhan/bimbingan menurut rencana yang disusun atas dasar musyawarah dan mufakat; (2) Ada koordinasi dalam membuat rencana (waktu, tempat, cara dan biaya); (3) Ada bimbingan melalui satu aparat di pedesaan, yang merupakan pelaksanaan utama Bimas; dan (4) Ada sifat massal dari bimbingan yang diberikan. Tujuan Bimas pada hakekatnya sama dengan tujuan penyuluhan saat itu: (1) Menimbulkan perubahan perilaku dan motif tindakan petani ke arah sasaran yang telah ditentukan, (2) Menuntun, mempengaruhi pikiran, perasaan dan perilaku petani dalam mencapai taraf usaha dan kehidupan yang lebih baik, (3) Menimbulkan dan memelihara semangat petani agar selalu giat memperbaiki segala usahanya, dan (4) Membantu petani agar lebih berswadaya dalam memecahkan dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Sasaran Bimas adalah petani/kelompok tani, baik sebagai objek maupun sebagai Dinamika Penyuluhan Pertanian: Dari Era Kolonial Sampai Dengan Era Digital 50 subjek. Sebagai objek, petani merupakan titik sasaran pelayanan, sedangkan sebagai subjek petani merupakan pemimpin sekaligus pelaksana utama dalam usahatani. Bimas mengarahkan: (1) berusaha yang lebih baik (better farming); (2) berusaha yang lebih menguntungkan (better business); (3) berkehidupan yang lebih layak (better living); dan (4) tata kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera (better community).

- 3.8. Pada Pelita I, penyuluhan harus nyata menunjang pembangunan pertanian berprioritas tinggi mencapai swa-sembada beras. Pola dasar tata penyelenggaraan penyuluhan harus diperkuat, meliputi kelembagaan, aparat dan fasilitas fisiknya. Pengaturan dan pelayanan penyuluhan di lapangan disempurnakan, Keppres No. 95/1969 membentuk Badan Pengendali Bimas yang diketuai Menteri Pertanian, dan Sekretaris BP Bimas, yang sejajar dengan Dirjen lingkup Departemen Pertanian.
- 3.9. Dalam periode konsolidasi, dasar-dasar metode Kelompok tani dan fondasi peranan kontaktani mulai diletakkan. Sebagai klimaknya, tahun 1971 diselenggarakan PENAS (Pekan Nasional) pertama di Cihea, Jawa Barat atas inisiatif Oyon Tachyan (KTNA Jawa Barat), dan PENAS II tahun 1973 di Jember, Jawa Timur. Memantapkan penyelenggaraan penyuluhan pertanian dengan merekrut 2.001 orang PPL dan 113 orang PPS pada tahun 1971.

4. Periode Pematapan I (1974-1983)

- 4.1. Keppres No.44 dan 45/1974 membentuk Badan Pendidikan, Latihan dan Penyuluhan Pertanian (Badan Diklatluh), yang berwenang mengatur pendidikan, latihan dan penyuluhan di tingkat nasional. Di daerah dilakukan oleh berbagai dinas yang ada sesuai dengan UU No. 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
- 4.2. SK Mentan No. 664/1975 membentuk Forum Koordinasi Penyuluhan Pertanian di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). Peraturan ini merupakan landasan menggalang kerjasama yang erat dalam penyuluhan, yang akan meningkat kepada terpadunya penyuluhan.
- 4.3. Mulai tahun 1976 diterapkan sistem kerja Latihan dan Kunjungan (LAKU). Penyuluh sejak 1979 ditata menurut sistem Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL) di tingkat Wilayah Unit Desa (wilud 600-1.000 ha sawah atau setaranya), dan dibina oleh Penyuluh Pertanian Madya (PPM, yang berubah menjadi Penyuluh Pertanian Urusan Program/PPUP). PPM/PPUP berkedudukan di BPP (pengembangan dari Balai Pendidikan Masyarakat Desa/BPMD tahun 1948). BPP menjadi basis kegiatan penyuluhan. PPL mendapat pembinaan teknis dari Penyuluh Pertanian Spesialis (PPS) kabupaten, dan provinsi. Kegiatan latihan bagi PPL oleh PPM/PPUP dan PPS di BPP satu kali dalam 2 minggu untuk menambah pengetahuan dan keterampilan teknik pertanian sesuai dengan kalender produksi pertanian setempat. Latihan dasar bagi PPL, PPM/PPUP dan PPS, berbagai subjek dan komoditas, diatur oleh Balai Latihan Pegawai Pertanian (BLPP) dengan bantuan dinas dan lembaga pendidikan tinggi serta peneliti setempat. Bahan-bahan penyuluhan berupa terbitan, film dan kaset untuk siaran pedesaan lewat radio, merupakan perlengkapan para penyuluh, disediakan oleh Balai Informasi Pertanian (BIP), di wilayah bersangkutan.
- 4.4. PPL dan PPM/PPUP pada umumnya berasal dari Sekolah Pertanian Menengah Atas Negeri, daerah dan swasta. Unit-unit pelaksana teknis berupa SPMA, BLPP dan BIP, dikelola Badan Diklatluh Pertanian, di bawah pengawasan Kepala Kanwil Deptan yang bersangkutan. Pelayanan kebijaksanaan, diberikan kepada swasta dan masyarakat tani sendiri. Penyediaan dan penyaluran sarana produksi seperti pupuk, pestisida, alat-alat pertanian, benih dan bibit, diusahakan oleh perusahaan swasta, BUMN, KUD, Kelompok tani sendiri.
- 4.5. Sejalan dengan pelaksanaan Bimas Nasional Disempurnakan (BND) tahun 1970, aparatur dan metode penyuluhan diperkuat sesuai kebutuhan Gerakan Massal Bimas. Ditetapkan empat kategori demonstrasi: (1) demplot dilakukan perorangan; (2) demfarm

- dilakukan kelompok primer; (3) dem area dilakukan gabungan kelompok; dan (4) dem-unit dilakukan KUD.
- 4.6. Pada sistem LAKU, pengertian kelompok dibakukan sebagai Kelompoktani Hamparan, yang mempunyai kawasan wilayah kelompok (Wilkel) yang merupakan satu unit kunjungan PPL.
 - 4.7. Uji coba dem-area di kabupaten Karawang MT 1975/76 dan MT 76 menunjukkan hasil yang menggembirakan (50-75% penerapan teknologi terujud). Atas hasil tersebut tahun 1979 dimulailah INSUS (Intensifikasi Khusus) dan dilanjutkan dengan OPSUS (Operasi Khusus) pada daerah terbelakang intensifikasinya, OPSUS Tekad Makmur (1980) di Provinsi NTB dan Opsus Lapo Ase di Sulawesi Selatan (1981) dan seterusnya di lain daerah.
 - 4.8. Tahun 1980, formasi penyuluhan diperbesar menjadi 20.626 orang (PPL/PPUP 19513 orang, PPS 1.113 orang).
 - 4.9. Sistem LAKU tahun 1976 dilaksanakan di 9 provinsi, tahun 1977 diperluas ke 14 provinsi dan tahun 1980 ke seluruh Indonesia untuk seluruh subsektor pertanian.
 - 4.10. Penas III dilaksanakan di Bali tahun 1980 dan Penas IV di Kalimantan Selatan tahun 1981. Pada rebug KTNA di Bali disepakati peningkatan metode penyuluhan berupa Mimbar Sarasehan, Temu Wicara dan Temu Karya.
 - 4.11. Tahun 1980, Badan Diklatluh Pertanian meningkatkan kesejahteraan penduduk/Kelompok Petani Nelayan Kecil (KPK) yang hidup di bawah garis kemiskinan, dengan pendekatan partisipatif melalui Proyek Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani Nelayan Kecil (P4K) di 8 provinsi.
 - 4.12. Kelompoktani peserta Insus dirangsang meningkatkan intensifikasi padi dengan perlombaan. Kelompoktani pemenang diundang ke Istana Negara Jakarta, menerima hadiah dari Presiden RI.

5. Periode Pemantapan II (1983-1993)

- 5.1. Keppres No.24/1983, membentuk Direktorat Penyuluhan pada semua Direktorat Jenderal lingkup pertanian dan Pusat Penyuluhan pada Badan Diklatluh. Di Dinas tingkat I dan II/cabang Dinas pertanian, dibentuk subdinas dan seksi penyuluhan.
- 5.2. Pada 1993, Penyuluh ditingkatkan jumlahnya menjadi 39.108 orang (PPL/PPUP 36.830 orang dan PPS 2.278 orang).
- 5.3. Pemantapan penyuluhan dengan adanya kesatuan aparat penyuluhan dan kesatuan pengertian penyuluhan.
- 5.4. Pada MT 1987 dikembangkan pola Supra Insus. Keberhasilan Supra Insus terletak pada kerjasama antar kelompoktani dalam intensifikasi di satu WKPP, menerapkan pola tanam yang menjamin terwujudnya keserempakan panen dan keragaan varietas dalam hamparan areal usahatani se WKPP atau sekurang-kurangnya sehamparan irigasi

tersier. Kerjasama antara kelompok tani di bawah pimpinan kontaktani se WKPP merupakan unit terkecil dari Supra Insus yang disebut Unit Hampan Supra Insus (UHSI).

- 5.5. Sesuai perkembangan zaman, metode massal relatif berkurang dan lebih banyak penerapan metode kelompok dan perorangan. Berkembangnya tingkat pengetahuan petani-nelayan, maka pendekatan partisipatif lebih menarik. Mimbar Sarasehan, Temu Usaha, Temu Karya, Temu Wicara dan Penas, menerapkan berbagai metode penyuluhan. Penas V diselenggarakan di desa Purbolinggo Lampung Tengah tahun 1983, Penas VI di desa Pematang Krasan Simalungun Sumatera Utara, tahun 1986 dihadiri 2.500 orang peserta dari 27 provinsi dengan 20 jenis kegiatan.
- 5.6. Bimas yang didukung penyuluhan membawa Indonesia sukses mencapai swasembada beras tahun 1984 yang diakui FAO. Pada Hari Ulang Tahun FAO ke-40 tanggal 14 Nopember 1985, Presiden Suharto diundang oleh Direktur Jenderal FAO dan menyampaikan pidatonya di depan Sidang FAO di Roma. Acara tersebut dihadiri oleh 32 orang KTNA Indonesia. Pada kesempatan itu, masyarakat pertanian Indonesia secara simbolis menyerahkan sumbangan 100.150 ton gabah kering giling (senilai Rp.15,6 milyar) kepada penduduk Afrika yang menderita kelaparan melalui Dirjen FAO. Atas jasa mencapai swasembada beras, Direktur Jendral FAO memberi penghargaan medali emas kepada Presiden Suharto, yang bertuliskan PRESIDEN SUHARTO – INDONESIA dan FROM RICE IMPORTED TO SELF SUFFICIENCY – FAO-ROME.
- 5.7. Tahun 1986 ditetapkan jabatan fungsional penyuluh. Sejak itu dimulailah penerapan sistem angka kredit untuk peningkatan jenjang karir penyuluh. Kualifikasi tenaga penyuluh ditingkatkan, Penyuluh yang berpendidikan SLTA (SPMA, SNAKMA, SUPM/SPP) ditingkatkan pendidikannya melalui Akademi Penyuluhan Pertanian (APP) mulai tahun 1987 dan Pendidikan Tinggi Pertanian Lapangan/PTPL (pendidikan jarak jauh, kerjasama Departemen Pertanian dengan Universitas Terbuka/UT) mulai tahun 1991. Penyuluh S1, secara bertahap dan terbatas ditingkatkan menjadi S2 atau S3, baik di dalam maupun luar negeri.
- 5.8. Kemampuan dan peran kelompok tani dan kontaktani makin meningkat, bermutu dan mandiri. Peran tersebut terlihat dengan semakin banyaknya Kontaktani menjadi induk semang dalam pemagangan. Bahkan mereka sudah mampu membentuk Pusat Pelatihan Pertanian & Pedesaan Swadaya (P4S). Petani Indonesia menerima petani magang dari Afrika/GNB.
- 5.9. Pengurus KUD meningkat jumlahnya yang berasal dari Kontaktani. Pada waktu itu, kontaktani telah melakukan Studi Banding ke luar negeri, antara lain ke Thailand, terutama bidang hortikultura.

- 5.10. Sejak tahun 1990, jumlah dan mutu kegiatan di Penas makin ditingkatkan. Penas diselenggarakan 4 kali dalam periode Pemantapan II. Penas V di Lampung tahun 1983, Penas VI di Sumatera Utara tahun 1986, Penas VII di Sulawesi Selatan tahun 1988, dan Penas VIII di Magelang tahun 1991.
- 5.11. Diklat bagi petani-nelayan disempurnakan dengan metode Andragogi, Sekolah Lapang Usahatani Berorientasi Agribisnis (SL-UBA).
- 5.12. Pelatihan teknis bagi penyuluh digunakan pola SL terpadu, terdiri dari kegiatan diklat PL-1 (Pemandu Lapangan-1), diklat PL-II dan diklat P-N (Petani-Nelayan). Materi pokok (substansi) diklat diambil dari permasalahan teknis ekonomi yang dihadapi petani-nelayan. Diklat SL dilaksanakan untuk mendukung program nasional pembangunan pertanian yang menerapkan teknologi khusus (PHT, agribisnis) dan harus disebarluaskan karena mempunyai dampak luas terhadap keberhasilan program. Dalam menunjang program pengembangan agribisnis, teknologi yang disebarluaskan melalui SL adalah teknologi ekonomi (menerapkan kaidah-kaidah bisnis dalam berusaha). Teknologi ini harus dikuasai melalui PL-I, PL-II dan P-N.
- 5.13. Untuk menyiapkan generasi muda pertanian, dijalin hubungan antara taruna tani dan siswa SPP melalui kegiatan Temu Siswa dan Taruna Tani Nasional (TESISTANAS) dan dibentuknya Kelompok Siswa dan Taruna Tani (KOSISTA).
- 5.14. Upaya percepatan alih teknologi dilakukan melalui kerjasama antara Badan Diklat Pertanian dan Badan Litbang Pertanian dalam bentuk Temu Aplikasi Teknologi dan Gelar Teknologi.
- 5.15. Melalui SK Mentan Nomor: 789/Kpts/OT.210/1992, fungsi BIP ditingkatkan dan diubah menjadi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP). Tugas BPTP adalah melaksanakan kegiatan penelitian komoditas, pengujian dan perakitan teknologi tepat guna spesifik lokasi, menyampaikan paket teknologi hasil pengkajian dan perakitan untuk bahan penyusunan materi penyuluhan pertanian, pelayanan teknik kegiatan penelitian, pengkajian, dan perakitan teknologi pertanian, Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga Balai.
- 5.16. Untuk memperkuat otonomi daerah tingkat II, sejak tahun 1993 penyuluh non sarjana dan BPP diserahkan/ diperbantukan kepada daerah tingkat II, beserta anggarannya. Pengelolaan administrasi dan operasionalnya dikelola dinas subsektor (Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan). Penyuluh berpendidikan sarjana tetap sebagai pegawai pusat yang dipekerjakan di wilayah, administrasinya dikelola oleh Kanwil Deptan.
- 5.17. Tahun 1989, sistem LAKU dievaluasi oleh Pusat Pengembangan Agribisnis/ PPA dan proyek NAEP III. Hasil evaluasi menunjukkan, LAKU tidak berfungsi sebagaimana mestinya karena kebudayaan. Sebanyak 300 kelompok etnis dengan 200 dialek dan tinggal di 13.667

pulau, menuntut ketangguhan cara kerja penyuluhan. Disarankan modifikasi LAKU, terutama pada pengembangan sumberdaya manusia pelaku utama beserta keluarganya. Titik berat diubah dari komoditas ke komunitas (masyarakat) sebagai pemeran utama pembangunan pertanian. Poktan dibentuk berdasarkan keserasian anggota dan jangkauan nyata untuk menghadiri pertemuan kelompok. Penerapan sensus masalah pada pertemuan Poktan memungkinkan ditetapkan daftar masalah dan peringkatnya oleh pelaku utama sendiri.

- 5.18. Modifikasi sistem LAKU dengan metode sensus masalah, dapat membawa penyuluhan pertanian kepada pendekatan yang menyeluruh (holistik). Kerjasama itu diperlukan untuk melayani semua aspek pembangunan pedesaan yang efektif, pertanian, industri kecil, kesehatan, pendidikan, perkoperasian dan seterusnya.
- 5.19. Keppres No.4/1990, Badan Diklatluh Pertanian diubah menjadi Badan Pendidikan dan Latihan (Diklat) Pertanian, Pusat Penyuluhan Pertanian diubah menjadi Pusat Pendidikan dan Latihan Penyuluhan Pertanian (Pusdiklatluhan).
- 5.20. SK Mentan No. 58/Kpts/LP.120/2/91, mengubah koordinasi penyuluhan. Di tingkat provinsi dipegang oleh Kepala Kanwil Deptan, di Kabupaten/Kotamadya oleh Kepala Dinas Lingkup Pertanian/Ketua Pelaksana Harian Bimas. Koordinasi di tingkat BPP dan desa tidak diatur. Kedudukan dan tugas BPP tidak lagi sebagai unit pelaksana penyuluhan, melainkan hanya sebagai instalasi penyuluhan.
- 5.21. Keppres No. 83/1993, menghapus Direktorat Penyuluhan pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan & Holtikultura, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan.
- 5.22. SK Mentan No. 96/Kpts/OT.210/2/1994, membentuk Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhan), yang bertanggung jawab pada Menteri Pertanian. Secara administratif dibina oleh Sekjen dan secara teknis dibina oleh Dirjen sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

6. Periode Agribisnis-Agroindustri (1993-1997)

- 1) Kebijakan Menteri Pertanian pada awal kebangkitan nasional II (PJP II), memantapkan penyelenggaraan penyuluhan di Indonesia. Dalam PELITA VI, penyelenggaraan penyuluhan menghadapi berbagai tantangan berupa lingkungan sosial ekonomi nasional maupun global yang dinamis, antara lain: Orientasi pembangunan pertanian ke arah penerapan pendekatan agribisnis.
- 2) Peningkatan peranan dan peran-serta masyarakat, dalam hal ini petani dan anggota masyarakat pedesaan lainnya.
- 3) Pelaksanaan desentralisasi mengarah kepada pelaksanaan otonomi daerah tingkat II yang lebih luas dan lebih bertanggung jawab. Perubahan

kebijakan dari petani-nelayan yang hanya terampil berproduksi menjadi kebijakan yang dapat menciptakan iklim motivasi petani-nelayan untuk lebih rasional dan efisien dalam mengembangkan usaha berdasarkan kemampuan wilayah, informasi dan mengenali potensi pasar.

Pada PELITA VI, penyelenggaraan penyuluhan diarahkan :

- 1) Memberi dorongan bagi berkembangnya kelembagaan taninelayan ke arah terciptanya sistem pengguna aktif dari informasi dan berbagai kesempatan berusaha yang muncul sebagai akibat perubahan lingkungan sosial ekonomi yang dinamis. Pengambilan keputusan oleh petani-nelayan secara mandiri melalui perencanaan wilayah yang partisipatif perlu dikembangkan secara bertahap. Para petani dan nelayan diarahkan untuk mampu mengambil manfaat sebesar-besarnya dari keberadaan BPP melalui kunjungan para petani dan nelayan secara berkala ke BPP.
- 2) Memperkuat BPP dengan personil, sarana, prasarana dan pembiayaan yang memadai dalam menghadapi arah perkembangan perilaku petani/nelayan sebagai sistem pengguna aktif berbagai informasi dan kesempatan berusaha. BPP diarahkan menjadi pusat pengelolaan penyuluhan di pedesaan yang mampu melayani seluruh kepentingan pendidikan non formal bagi petani-nelayan beserta keluarganya & masyarakat pedesaan pada umumnya.
- 3) Membangun dan mengembangkan jaringan kelembagaan penyuluh yang mampu mendukung pengembangan kelembagaan petani-nelayan serta mampu menciptakan iklim kepemimpinan demokratis dalam mengembangkan agribisnis. Perangkat terdepannya adalah BPP, yang berfungsi menyalurkan berbagai informasi teknologi produksi, dan membuka berbagai kesempatan berusaha di tingkat daerah, nasional, maupun internasional. Arah itu perlu ditempuh, mengingat perilaku usahawan sangat menentukan dalam mencapai keberhasilan pengembangan agri bisnis. Keberhasilan mengkaitkan sistem produksi pertanian pada mata rantai agribisnis sangat ditentukan oleh keberhasilan upaya-upaya memberikan motivasi kepada poktan untuk berkembang menjadi kelompok-kelompok usaha atau asosiasi sesuatu komoditas dan kombinasi komoditas pertanian. Perkembangan ini hanya dimungkinkan oleh adanya kesempatan berusaha yang lebih luas yang dapat diciptakan melalui pembangunan jaringan kelembagaan penyuluhan yang berkarakter profesional.
- 4) Mengorientasikan para petugas lingkup pertanian (penyuluh dan aparat pembinanya) agar memiliki satu kesatuan tindak dalam penyelenggaraan penyuluhan. Para penyuluh dikembangkan kemampuannya sesuai dengan perubahan orientasi penyuluhan terutama menyangkut kemampuan bekerjasama dengan petani dan peneliti dalam merancang pengembangan wilayah kerja. Penyuluh,

petani dan peneliti hendaknya menjalin kerjasama dalam mengidentifikasi kemampuan wilayah serta kemampuan sosial ekonomi petani dan nelayan sehingga dapat diciptakan suasana pengambilan keputusan pengembangan usaha petani-nelayan secara partisipatif atas dasar efisiensi usaha dan informasi pasar. Penyuluh yang sehari-harinya berintegrasi dengan para petani dan nelayan hendaknya berpangkal kerja di BPP.

- 5) Penyelenggaraan penyuluhan diletakkan pada Daerah Tingkat II dengan materi yang sesuai dengan mandat, misi, tujuan penyuluhan, dan kondisi/potensi riil daerah serta berkaitan dengan berbagai program prioritas pembangunan pertanian.
- 6) Penyuluhan di tingkat provinsi maupun nasional, diarahkan untuk mampu mendukung penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan di kab./kota dan BPP. Dukungan ini terutama dalam bentuk penciptaan iklim berupa kebijaksanaan, pedoman yang didasarkan atas monitoring, evaluasi, studi dan menghubungkan wilayah otonomi Dati II dengan kesempatan menyalurkan berbagai informasi teknologi produksi, dan membuka berbagai kesempatan berusaha di tingkat daerah, nasional, maupun internasional.
- 7) Pendekatan dan metode penyuluhan disesuaikan dengan perkembangan atau tingkat kemajuan sosial ekonomi wilayah dan tujuan yang hendak dicapai dalam wilayah bersangkutan. Pendekatan "participatory and cost sharing" dalam penyelenggaraan penyuluhan cocok diterapkan guna mengembangkan peran-serta dan kemandirian petani/nelayan dalam pembangunan pertanian. Mengingat keragaman kondisi sosial ekonomi petani nelayan, pendekatan lainnya dapat digunakan dalam penyelenggaraan penyuluhan.
- 8) Mekanisme dan tata hubungan kerja penyuluhan didasarkan atas prinsip keterlibatan semua unsur penyuluhan, sebagai suatu jaringan kelembagaan. Fungsinya sebagai penyalur informasi (pasar, harga, kualitas, standar, teknologi, ilmu pengetahuan, kredit, perbankan, kesempatan usaha) dan mendukung interaksi petani-nelayan dengan penyuluh dan peneliti. Mekanisme dan tata hubungan kerja petugas pemerintah yang terkait dengan penyuluh juga melibatkan sektor ekonomi swasta, BUMN dan lembaga sosial/ekonomi pedesaan lainnya. Pengembangan jaringan kelembagaan penyuluhan yang utuh bertujuan untuk melayani kepentingan petani, pemerintah dan sektor ekonomi swasta/BUMN, maupun nasional.
- 9) Untuk memberikan dukungan nyata pada penyelenggaraan penyuluhan, tahun 1994 dibentuk lembaga pengkajian teknologi pertanian di tiap provinsi. Pada April 1995, unit kerja itu mulai dioperasikan dengan status organisasi BPTP, LPTP dan IPPTP.

Sejalan dengan sejarah penyuluhan pertanian di negara kita, sebenarnya lembaga penyuluhan sudah mulai ada sejak kita masih dijajah Belanda, tepatnya setelah didirikannya Departemen Pertanian (Landbouw Voor Lichtingsdienst) pada tahun 1910 dengan cabang-cabangnya sampai tingkat kawedanan:

- Tingkat Propinsi : Inspectur Van Den LandBouw Voor Lichtingdiens
- Tingkat Karesidenan : LandBouw Consulent
- Tingkat Kabupaten : Adjunct LandBouw Consulent
- Tingkat Kawedanan : Mantri Pertanian

Struktur kelembagaan tersebut bertahan sampai kita merdeka dengan titik berat bimbingan kepada masyarakat (penyuluhan pertanian) yang belum tertata dengan baik, meskipun sejak kita merdeka telah memiliki departemen pertanian. Namun, keterbatasan tenaga ahli di bidang pertanian dan tenaga di bidang penyuluhan tugas-tugas penyebaran informasi pertanian kepada masyarakat belum ada lembaga khusus yang mengelolanya. Tugas-tugas tersebut dibebankan pada para pegawai dinas pertanian dari tingkat propinsi sampai tingkat kecamatan yang jumlahnya juga belum memadai.

Menyadari pentingnya upaya menggerakkan masyarakat dalam upaya peningkatan produksi pertanian, pada tahun 1959 terpikirlah perlunya lembaga bimbingan massal dengan didirikannya Balai Pendidikan Masyarakat Desa (BPMD) di setiap kecamatan. BPMD inilah merupakan cikal bakal berdirinya Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang cukup dikenal masyarakat sampai sebelum reformasi tahun 1998. Kegagalan Padi Sentra untuk mencapai swasembada beras dalam jangka 3 (tiga) tahun, mengilhami kegiatan Action Research mahasiswa IPB tahun 1963 di daerah Karawang. Keberhasilan kegiatan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan Demonstrasi Massal (Demas) yang dilakukan oleh Departemen Pertanian pada tahun 1964, dilanjutkan dengan Bimbingan Massal (Bimas) pada tahun berikutnya.

Keberhasilan Bimas mendorong pemerintah melalui Menteri Pertanian menetapkan Lembaga Bimas melalui Keputusan Mentan pada tanggal 24 Mei 1967. Selanjutnya berturut-turut Bimas diperbaiki dan diperkuat dengan Keppres 95/1969, Keppres 6/1979, Keppres 82/1983, Keppres 5/1990, Keppres 84/1993 (khusus untuk Bimas di tingkat pusat), dan Keppres 40/1997. Kelembagaan Bimas menurut Keppres 5/1990 merupakan perangkat terpadu dari kegiatan penyuluhan pertanian disertai penyediaan paket sarana produksi komoditas pertanian melalui intensifikasi. Penyempurnaan Bimas dalam Keppres 40/1997 dikatakan Bimas sebagai suatu sistem manajemen pembangunan pertanian untuk menggerakkan partisipasi petani secara massal dengan berorientasi pada koordinasi penyelenggara fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program Bimas.

Dari aspek Program Bimas, dalam Keppres 5/1990 dinyatakan sebagai program peningkatan produksi dengan sistem Bimas. Struktur kelembagaan tersebut bertahan sampai kita merdeka dengan titik berat bimbingan kepada

masyarakat (penyuluhan pertanian) yang belum tertata dengan baik, meskipun sejak kita merdeka telah memiliki departemen pertanian. Namun, keterbatasan tenaga ahli di bidang pertanian dan tenaga di bidang penyuluhan tugas-tugas penyebaran informasi pertanian kepada masyarakat belum ada lembaga khusus yang mengelolanya. Tugas-tugas tersebut dibebankan pada para pegawai dinas pertanian dari tingkat propinsi sampai tingkat kecamatan yang jumlahnya juga belum memadai.

Menyadari pentingnya upaya menggerakkan masyarakat dalam upaya peningkatan produksi pertanian, pada tahun 1959 terpikirlah perlunya lembaga bimbingan massal dengan didirikannya Balai Pendidikan Masyarakat Desa (BPMD) di setiap kecamatan. BPMD inilah merupakan cikal bakal berdirinya Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang cukup dikenal masyarakat sampai sebelum reformasi tahun 1998. Kegagalan Padi Sentra untuk mencapai swasembada beras dalam jangka 3 (tiga) tahun, mengilhami kegiatan Action Research mahasiswa IPB tahun 1963 di daerah Karawang.

Keberhasilan kegiatan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan Demonstrasi Massal (Demas) yang dilakukan oleh Departemen Pertanian pada tahun 1964, dilanjutkan dengan Bimbingan Massal (Bimas) pada tahun berikutnya. Keberhasilan Bimas mendorong pemerintah melalui Menteri Pertanian menetapkan Lembaga Bimas melalui Keputusan Mentan pada tanggal 24 Mei 1967. Selanjutnya berturut-turut Bimas diperbaiki dan diperkuat dengan Keppres 95/1969, Keppres 6/1979, Keppres 82/1983, Keppres 5/1990, Keppres 84/1993 (khusus untuk Bimas di tingkat pusat), dan Keppres 40/1997. Kelembagaan Bimas menurut Keppres 5/1990 merupakan perangkat terpadu dari kegiatan penyuluhan pertanian disertai penyediaan paket sarana produksi komoditas pertanian melalui intensifikasi.

Penyempurnaan Bimas dalam Keppres 40/1997 dikatakan Bimas sebagai suatu sistem manajemen pembangunan pertanian untuk menggerakkan partisipasi petani secara massal dengan berorientasi pada koordinasi penyelenggara fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program Bimas. Dari aspek Program Bimas, dalam Keppres 5/1990 dinyatakan sebagai program peningkatan produksi dengan sistem Bimas. Penyempurnaan program dalam Keppres 40/1997 dinyatakan sebagai program peningkatan produksi dan usaha pertanian melalui intensifikasi komoditas prioritas yang berwawasan agribisnis di pedesaan dengan sistem bimas dalam rangka meningkatkan pendapatan petani, memantapkan swasembada pangan dan pengembangan komoditas unggulan spesifik lokasi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, dan terdiri dari Program bimas Nasional dan Program Bimas Wilayah.

Semenjak Keppres 95/1969 kelembagaan Bimas tertata dari tingkat pusat sampai tingkat desa.

- Di tingkat pusat bernama Badan Pengendali Bimas (BP Bimas) yang diketuai langsung oleh Menteri Pertanian dengan Ketua Harian dijabat oleh Dirjen Tanaman Pangan.
- Di tingkat propinsi ada Satuan Pembina Bimas (SP Bimas) yang diketuai oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Pertanian (sebelum era otonomi daerah) yang diketuai oleh Kakanwil Pertanian dan ketua harian dijabat Kepala Satuan Pembina Bimas Propinsi.
- Di tingkat Kabupaten ada Satuan Pelaksana Bimas (Satpel Bimas) yang diketuai oleh Bupati, dan ketua harian dijabat oleh Kepala Dinas Pertanian kabupaten.
- Di tingkat kecamatan ada Satuan Penggerak Bimas Kecamatan (Satger Bimas) yang diketuai oleh camat dan ketua harian dijabat oleh kepala BPP setempat.
- Di tingkat desa ada Satuan Penggerak Bimas desa yang diketuai oleh kepala desa dan ketua hariannya dijabat oleh penyuluh (PPL) tanaman pangan setempat.

Untuk membahas berbagai program dan kegiatan serta mengatasi masalah dalam pelaksanaan penyuluhan di lapangan, secara rutin personalia Bimas tersebut berkoordinasi dan berkomunikasi dengan membentuk Forum Koordinasi dan Komunikasi Penyuluhan Pertanian (FKPP) di tingkat propinsi sampai di tingkat desa.

Kelembagaan yang sudah tertata tersebut semenjak Otonomi Daerah mengalami perubahan yang cukup mendasar. Semua penyuluh pertanian (PPL) sebagai pegawai fungsional tidak lagi menginduk ke Lembaga Bimas di pusat, namun diserahkan ke masing-masing daerah. Jadi kelembagaan yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan penyuluhan pertanian juga berubah.

- Di tingkat pusat: Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, Departemen Pertanian.
- Di tingkat provinsi ditetapkan oleh provinsi masing-masing dengan mempertimbangkan pemisahan antara tugas/fungsi pengaturan dan pelayanan dengan penyuluhan pertanian yang bersifat dukungan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di kabupaten/kota. Kelembagaan tersebut ditetapkan dengan SK Gubernur atau Perda dengan memperhatikan kelembagaan yang sudah ada.
- Di tingkat kabupaten/kota, ditetapkan oleh Pemda dalam bentuk Perda dengan mempertimbangkan pemisahan antara tugas/fungsi pengaturan, pelayanan dengan tugas/fungsi penyuluhan pertanian. Kelembagaan penyuluhan pertanian tersebut dibentuk dengan memperhatikan: (a) terselenggaranya fungsi penyediaan dan penyebaran informasi teknologi bagi petani dan pelaku agribisnis lainnya; (b) terselenggaranya administrasi dan pembinaan profesionalisme penyuluh pertanian; (c) terselenggaranya

kegiatan partisipatif dalam pengkajian, pengembangan dan penerapan teknologi spesifik lokasi; (d) tersedianya fasilitas pertemuan dan forum-forum kegiatan kelompok tani; dan (e) terjaminnya kepastian status organisasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- Di tingkat kecamatan, kelembagaan penyuluhan pertanian yang berupa Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) atau lembaga lainnya yang mempunyai tugas dan fungsi yang sama dan ditetapkan dengan SK atau Perda Bupati/walikota. BPP dibentuk dengan memperhatikan: (a) tersedianya fasilitas untuk tersusunnya program penyuluhan pertanian yang tertib; (b) tersedianya fasilitas penyebaran informasi teknologi dan pasar; (c) terselenggaranya kerjasama antara peneliti pertanian, penyuluh pertanian, dan kontak tani nelayan; (d) tersedianya fasilitas untuk kegiatan belajar dan forum-forum pertemuan petani; (e) tersedianya fasilitas untuk percontohan usahatani (model farm) dan kemitraan agribisnis.
- Di tingkat desa kelembagaan penyuluhan pertanian berbentuk kelompok-kelompok tani dan pelaku agribisnis lainnya.

Kelembagaan penyuluhan pertanian di pusat dan daerah memiliki keterkaitan fungsional dan hubungan kerja yang saling mendukung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan PP No.25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

3. Tugas dan Peranan Lembaga penyuluhan

3.1. Latar belakang munculnya perubahan kelembagaan penyuluhan

Kelembagaan penyuluhan saat ini secara rinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Latar belakang munculnya undang-undang tersebut terutama banyaknya masalah yang dirasakan dalam penyelenggaraan penyuluhan di Indonesia. Masalah-masalah tersebut antara lain:

- 1) Adanya perbedaan persepsi tentang pengertian penyuluhan pertanian dari tingkat pusat sampai di lapangan.
- 2) Adanya perbedaan persepsi tentang visi, misi, tujuan penyuluhan dari tingkat pusat sampai di lapangan.
- 3) Penyelenggaraan penyuluhan dilakukan dengan pendekatan, sistem kerja dan metode yang tidak sesuai dengan paradigma baru pembangunan yang partisipatif.
- 4) Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di kabupaten/kota dilakukan oleh berbagai kelembagaan yang dibentuk oleh masing-masing daerah dengan tugas dan fungsi yang tidak terstandar.
- 5) Pembinaan jabatan fungsional penyuluh di kabupaten/kota tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga profesionalisme dan kinerja penyuluh mengalami penurunan.

- 6) Peraturan perundangan yang ada yang menyangkut pembinaan dan pemberdayaan SDM pertanian dalam arti luas belum menguraikan secara jelas tentang penyuluhan pertanian dan belum dapat dipakai sebagai pedoman.
- 7) Penyelenggaraan penyuluhan pertanian belum memberikan jaminan pada petani terhadap berbagai dampak negatif penerapan teknologi yang dianjurkan.
- 8) Penyelenggaraan penyuluhan pertanian belum didukung biaya operasional yang memadai.
- 9) Beberapa perubahan lingkungan strategis (globalisasi, otonomi daerah, perubahan kebijakan, perubahan kondisi petani, pergeseran paradigma) mempunyai dampak yang luas terhadap penyuluhan pertanian menghendaki perubahan sistem penyuluhan pertanian secara menyeluruh. Secara ringkas,

Dalam UU SP3K dijelaskan bahwa fungsi sistem penyuluhan adalah:

- a) Memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha;
- b) Mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi dan sumberdaya lainnya;
- c) Meningkatkan kemampuan, kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha;
- d) Membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola usaha yang baik dan berkelanjutan;
- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan;
- f) Melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang maju dan modern.

Dijelaskan juga bahwa semua kebijakan dan strategi penyuluhan harus memperhatikan beberapa hal berikut:

- a) Harus memperhatikan asas dan tujuan sistem penyuluhan.
- b) Penetapan kebijakan memperhatikan ketentuan bahwa: (1) penyuluhan dilaksanakan secara terintegrasi dengan subsistem pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan; (2) penyuluhan dapat dilaksanakan oleh pelaku utama dan atau warga masyarakat sebagai mitra pemerintah dan pemerintah daerah.
- c) Strategi penyuluhan meliputi metode pendidikan orang dewasa; penyuluhan sebagai gerakan masyarakat; penumbuhkembangan dinamika organisasi dan kepemimpinan; keadilan dan kesetaraan jender; peningkatan kapasitas pelaku utama yang profesional.
- d) Penyusunan strategi penyuluhan, pemerintah / pemerintah daerah melibatkan pemangku kepentingan di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan

3.2. Kelembagaan penyuluhan di Indonesia Pasca UU SP3K

Pasal 8 UU SP3.K menyebutkan kelembagaan penyuluhan terdiri atas:

- a. kelembagaan penyuluhan pemerintah;
- b. kelembagaan penyuluhan swasta; dan
- c. kelembagaan penyuluhan swadaya.

Kelembagaan penyuluhan pemerintah sebagaimana dimaksud diuraikan secara lengkap di bawah ini.

- 1) **Kelembagaan penyuluhan di tingkat pusat** di Kementerian Pertanian membawahi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian.

- Badan Penyuluhan bertanggungjawab kepada Menteri.
- Menteri dibantu Komisi Penyuluhan Nasional.
- Tugas Komisi Penyuluhan Nasional: memberikan masukan kepada menteri sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan.

- 2) **Kelembagaan penyuluhan di tingkat provinsi** berbentuk Badan Koordinasi Penyuluhan (Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan). Bakorluh diketuai oleh Gubernur, dibantu sekretariat yang dipimpin pejabat eselon IIa.

Tugas Badan Koordinasi Penyuluhan:

- Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektoral, optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi, dan sasaran penyuluhan.
- Menyusun kebijakan dan program penyuluhan provinsi yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan nasional.
- Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
- Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, dan swasta.

Penetapan kebijakan dan strategi penyuluhan provinsi, gubernur dibantu oleh Komisi Penyuluhan Provinsi.

Komisi penyuluhan provinsi bertugas memberikan masukan kepada gubernur sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan provinsi.

- 3) **Kelembagaan di tingkat kabupaten/kota** : berupa Badan Pelaksana Penyuluhan (Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan). BP4K dipimpin pejabat setingkat eselon II & bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota.

Tugas BP4K adalah:

- Menyusun kebijakan dan program penyuluhan kabupaten/kota yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional.
- Melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tatakerja, dan metode penyuluhan.
- Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan.

- Melaksanakan pembinaan pengembangan kerjasama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana prasarana, dan pembiayaan.
- Menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
- Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.
- Bupati/Walikota dibantu oleh Komisi Penyuluhan Kabupaten/Kota. Komisi ini bertugas memberikan masukan sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan kabupaten/kota.

4). **Lembaga penyuluhan di tingkat kecamatan** berupa Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K).

Sebelum berubah menjadi BP3K, dahulunya adalah BPP. BP3K merupakan tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha, bertanggungjawab kepada Badan Penyuluhan Kabupaten/Kota. Tugasnya:

- Menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten/kota.
- Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan.
- Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, saprodi, pembiayaan, dan pasar.
- Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha.
- Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, Swadaya, swasta secara berkelanjutan.
- Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan modal usahatani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

5). **Kelembagaan penyuluhan tingkat desa/kelurahan** berupa pos penyuluhan desa/ kelurahan (non struktural).

Pos Penyuluhan merupakan unit kerja non struktural dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama, berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha untuk :

- Menyusun program penyuluhan,
- Melaksanakan penyuluhan di desa/kelurahan,
- Menginventarisasi masalah dan upaya pemecahannya,
- Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usahatani,
- Menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kelembagaan pelaku utama/usaha,
- Melaksanakan kegiatan rembug, pertemuan teknis, dan metode penyuluhan,
- Memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan, serta pelatihan bagi pelaku utama/usaha,

- Memfasilitasi forum penyuluhan pedesaan. Kelembagaan penyuluhan swasta dapat dibentuk oleh pelaku usaha dengan memperhatikan kepentingan pelaku utama dan pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Sementara itu, kelembagaan penyuluhan swadaya dapat dibentuk atas dasar kesepakatan antara pelaku utama dan pelaku usaha.

3.4 Pengembangan BP3K Model CoE

Peran strategis sektor Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (PPK) di daerah harus dioptimalkan untuk meningkatkan daya saing bangsa di era kompetisi global. Peran tersebut diarahkan tidak hanya menuju kemandirian bangsa di bidang pangan, tetapi juga kemandirian bangsa di bidang energi.

Upaya peningkatan kinerja sektor PPK setidaknya harus bertumpu pada: (i) peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) PPK; (ii) penguatan dan peningkatan kapasitas kelembagaan PPK; dan (iii) optimalisasi partisipasi dan peran seluruh stakeholders (internal dan eksternal) dalam implementasi program di lapangan. Semua potensi di daerah (perguruan tinggi, pemda, industri, dan masyarakat) harus segera digerakkan dan dipadukan dalam satu komando agar terbangun kemampuan kolektif bangsa dalam mengelola sumber daya secara optimal dan berkelanjutan.

Sejak tahun 2006 Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. UU tersebut secara khusus mengamanatkan upaya-upaya untuk terus meningkatkan mutu SDM PPK (termasuk SDM penyuluh PPK dan petani). Namun, apabila dicermati sampai saat ini upaya pengembangan SDM penyuluh PPK masih berjalan sangat lambat, sehingga secara praktis sejak kelahiran undang-undang tersebut mutu SDM penyuluh tidak meningkat secara signifikan. Kondisi ini sangat ironis, mengingat cukup banyak potensi kerjasama sinergi yang dapat dibangun dengan perguruan tinggi pertanian dan swasta/industri setempat untuk meningkatkan mutu dan kinerja penyuluh PPK. Untuk itu perlu segera diwujudkan kelembagaan yang mampu menjadi wadah untuk bertemunya (melting point) petani, penyuluh, akademisi, dan praktisi PPK.

Berbagai masalah dan tantangan pembangunan harus dihadapi bersama masyarakat secara kolektif dengan mencari solusi berbasis iptek dan sosial kapital. Proses kolektif tersebut sangat dimungkinkan apabila model pembangunan yang dikembangkan adalah pembangunan berbasis komunitas atau community-based development (Green and Haines, 2008), sehingga tingkat partisipasi masyarakat akan tinggi. Dari sisi iklim makro, sesungguhnya dunia pertanian di Indonesia saat ini berada pada babak yang baru dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan yang tergolong memiliki perspektif mendasar dan luas.

Dua di antara kebijakan tersebut adalah pencaanangan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) 2005-2025 tanggal 11 Juni 2005 di Bendungan Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat; serta telah dikeluarkannya

Undang Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Undang-Undang ini merupakan impian lama kalangan penyuluhan yang sudah diwacanakan semenjak awal tahun 1980-an. Lahirnya UU ini dapat pula dimaknai sebagai upaya untuk mewujudkan revitalisasi pertanian tersebut, pertanian dalam konteks ini dipandang secara luas yang meliputi pertanian, perikanan dan kehutanan.

Pada kedua kebijakan tersebut, permasalahan kelembagaan tetap merupakan bagian yang esensial, baik kelembagaan di tingkat makro maupun di tingkat mikro. Di tingkat makro, satu kelembagaan yang baru lahir adalah Badan Koordinasi Penyuluhan sebagai lembaga pemerintah non departemen, yang akan merumuskan secara terinci tentang metoda penyuluhan, strategi penyuluhan, dan kebijakan penyuluhan. Di tingkat mikro, akan dibentuk beberapa lembaga baru, misalnya Pos Penyuluhan Desa dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Kementerian Pertanian menargetkan membentuk satu Gapoktan di setiap desa khususnya yang berbasis pertanian. Ini merupakan satu lembaga andalan baru yang diinisiasi oleh Kementerian Pertanian, meskipun semenjak awal 1990-an Gapoktan sesungguhnya telah dikenal. Saat ini, Gapoktan diberi pemaknaan baru, termasuk bentuk dan peran yang baru. Gapoktan menjadi lembaga gerbang (*gateway institution*) yang menjadi penghubung petani satu desa dengan lembaga-lembaga lain di luarnya. Gapoktan diharapkan berperan untuk fungsi-fungsi pemenuhan permodalan pertanian, pemenuhan sarana produksi, pemasaran produk pertanian, dan termasuk untuk menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan petani. Pengembangan kelembagaan perlu memperoleh perhatian khusus, karena ia merupakan komponen utama dalam strategi revitalisasi secara keseluruhan. Salah satu ciri RPPK adalah pelibatan banyak pihak sekaligus.

RPPK melibatkan hampir seluruh institusi pemerintahan di tingkat pusat. Selain itu, RPPK juga menyertakan dunia usaha, kalangan petani dan nelayan, serta akademisi dan lembaga masyarakat, baik dalam penyusunannya maupun dalam proses implementasinya. Karena itulah, koordinasi dan sinkronisasi berbagai pihak yang terkait akan menjadi faktor yang sangat menentukan, baik dalam perumusan RPPK maupun dalam mewujudkannya.

Secara teoritis, “koordinasi” dan “sinkronisasi” merupakan dua perhatian utama dalam bidang kelembagaan. Khusus untuk sektor pertanian, dibutuhkan berbagai kebijakan dan strategi mulai dari kebijakan makro, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan pengembangan industri, kebijakan perdagangan, pemasaran, dan kerjasama internasional. Serta kebijakan mikro berupa kebijakan pengembangan infrastruktur, kebijakan pengembangan kelembagaan (termasuk di dalamnya lembaga keuangan, penelitian dan pengembangan, dan pengembangan organisasi petani).

Pada tingkat lokal, pemerintah daerah juga perlu memperhatikan pengembangan infrastuktur pertanian, pengembangan kelembagaan berupa pemberdayaan penyuluh pertanian dan pengembangan instansi lingkup pertanian. Lemahnya kelembagaan pertanian, seperti perkreditan, lembaga

input, pemasaran, dan penyuluhan; telah menyebabkan belum dapat terciptanya suasana kondusif untuk pengembangan agroindustri pedesaan. Selain itu, lemahnya kelembagaan ini berakibat pada tidak efisiennya sistem pertanian, dan rendahnya keuntungan yang diterima petani.

Dari sisi kelembagaan, akan dijumpai kendala yang bersifat fungsional, karena pendekatan strategi revitalisasi pertanian yang terkesan sektoral. Apabila tujuan utama (ends) dari revitalisasi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani, maka peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, perkebunan, dan perikanan haruslah dilihat sebagai instrumen saja (means). Dalam tabel "Matrik Keterkaitan Dukungan Kelembagaan dalam Pembangunan Pertanian" (Badan Litbang Pertanian, 2005), disebutkan dibutuhkan petani. Pengembangan kelembagaan perlu memperoleh perhatian khusus, karena ia merupakan komponen utama dalam strategi revitalisasi secara keseluruhan. Salah satu ciri RPPK adalah pelibatan banyak pihak sekaligus. RPPK melibatkan hampir seluruh institusi pemerintahan di tingkat pusat. Selain itu, RPPK juga menyertakan dunia usaha, kalangan petani dan nelayan, serta akademisi dan lembaga masyarakat, baik dalam penyusunannya maupun dalam proses implementasinya. Karena itulah, koordinasi dan sinkronisasi berbagai pihak yang terkait akan menjadi faktor yang sangat menentukan, baik dalam perumusan RPPK maupun dalam mewujudkannya. Secara teoritis, "koordinasi" dan "sinkronisasi" merupakan dua perhatian utama dalam bidang kelembagaan. Khusus untuk sektor pertanian, dibutuhkan berbagai kebijakan dan strategi mulai dari kebijakan makro, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan pengembangan industri, kebijakan perdagangan, pemasaran, dan kerjasama internasional. Serta kebijakan mikro berupa kebijakan pengembangan infrastruktur, kebijakan pengembangan kelembagaan (termasuk di dalamnya lembaga keuangan, penelitian dan pengembangan, dan pengembangan organisasi petani).

Sementara, dalam "kebijakan pengembangan organisasi ekonomi petani" terdapat kelembagaan ketahanan pangan di pedesaan, dan kelembagaan ekonomi petani di pedesaan. Perbedaan seperti ini tampaknya mengikuti perbedaan, bahwa "kelembagaan" adalah sesuatu yang berada di "atas petani", sedangkan "organisasi" berada di level petani. Perbedaan ini tampaknya mengikuti perbedaan yang dianut di kalangan ahli "ekonomi kelembagaan". Menurut North (2005), institution adalah "the rules of the game", sedangkan organizations adalah "their entrepreneurs are the players". Pendapat ini diperkuat oleh Robin (2005), yang berpendapat bahwa "institutions determine social organization". Jadi, kelembagaan merupakan wadah tempat organisasi-organisasi hidup.

Memperhatikan dokumen RPPK, maka kelembagaan di RPPK dapat dipilah menjadi tiga level, yaitu level di pusat, level lokal di pemerintahan daerah, dan level lokal di tingkat petani atau komunitas. Level pemerintah daerah perlu dibedakan dengan tegas, karena dengan semangat otonomi daerah, maka kewenangan daerah telah menjadi begitu besar. Kelembagaan di pusat

mengaitkan tata hubungan kerja antar departemen, lembaga, atau stakeholders. Pada tataran ini, kewenangan utama kelembagaan adalah dalam hal pembuatan kebijakan. Beberapa kebijakan yang perlu dirumuskan misalnya kebijakan dalam memperluas dan meningkatkan basis produksi berupa kebijakan untuk peningkatan investasi swasta; penataan hak, kepemilikan dan penggunaan lahan; kebijakan pewilayahan komoditas; dan kebijakan untuk meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan SDM pertanian.

Pada tataran pusat ini, salah satu permasalahan lama adalah banyaknya kebijakan dan strategi yang terkait langsung dengan pembangunan pertanian, namun kewenangannya berada di berbagai instansi lain. Kebijakan tersebut meliputi kebijakan makro, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan pengembangan industri, kebijakan perdagangan, pemasaran, dan kerjasama internasional, kebijakan pengembangan infrastruktur khususnya pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan, kebijakan pengembangan kelembagaan (termasuk di dalamnya lembaga keuangan, fungsi penelitian dan pengembangan, pengembangan SDM, dan pengembangan organisasi petani), kebijakan pendayagunaan dan rehabilitasi sumberdaya alam dan lingkungan, kebijakan pengembangan pusat pertumbuhan baru, dan kebijakan pengembangan ketahanan pangan. Implementasi kelembagaan dalam revitalisasi pembangunan pertanian diharapkan tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan dalam pengembangan kelembagaan yang sudah lalu.

Untuk itu, para pelaksana perlu memahami tentang “analisis kelembagaan”. Dalam World Bank (2005a), institutional analysis adalah “... helps to identify the constraints within an organization that can undermine policy implementation. These constraints may exist at the level of internal processes, concern relationships among organizations (e.g., between ministries), or be a product of the way that the system is organized (reporting hierarchies) or operates (the financial year is not followed in practice and accounts are not closed)”.

Dalam analisis kelembagaan, dipelajari kelembagaan-kelembagaan formal maupun “soft institutions” seperti tata aturan, maupun struktur kekuasaan pada berbagai tingkatan. RPPK jangan sampai terjebak kembali pada kekeliruan masa lalu, yang berpedoman pada perencanaan yang bersifat umum dan diterapkan secara menyeluruh (grand scenario) di seluruh wilayah. Mensosialisasikan rancangan atau skenario yang bersifat umum akan sulit dilaksanakan dan lebih banyak bersifat mekanistik dan lepas dari kespesifikan kondisi lokal, akan mematikan inisiatif masyarakat setempat sehingga menjadi kontraproduktif. Skenario yang bersifat umum itu, yang pada umumnya disusun dan dipikirkan oleh sekelompok orang saja secara terpusat, merupakan pendekatan blue print yang banyak mengandung kelemahan (Uphoff, 1986). banyaknya kebijakan dan strategi yang terkait langsung dengan pembangunan pertanian, namun kewenangannya berada di berbagai instansi lain. Kebijakan tersebut meliputi kebijakan makro, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan pengembangan industri, kebijakan perdagangan, pemasaran, dan kerjasama

internasional, kebijakan pengembangan infrastruktur khususnya pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan, kebijakan pengembangan kelembagaan (termasuk di dalamnya lembaga keuangan, fungsi penelitian dan pengembangan, pengembangan SDM, dan pengembangan organisasi petani), kebijakan pendayagunaan dan rehabilitasi sumberdaya alam dan lingkungan, kebijakan pengembangan pusat pertumbuhan baru, dan kebijakan pengembangan ketahanan pangan. Implementasi kelembagaan dalam revitalisasi pembangunan pertanian diharapkan tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan dalam pengembangan kelembagaan yang sudah lalu. Untuk itu, para pelaksana perlu memahami tentang “analisis kelembagaan”.

Model pengembangan kelembagaan BP3K sedapat mungkin disusun melalui kajian akademik yang sistematis, sehingga dapat mengantisipasi dan mengakomodasi seluruh dinamika yang terjadi di lapangan. Dalam UU SP3K, Bab V tentang Kelembagaan, pasal 15 ayat 1 dinyatakan bahwa Balai Penyuluhan (BP3K) memiliki tugas: a. Menyusun program penyuluhan. b. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program. c. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar. d. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan. e. Memfasilitasi kapasitas penyuluh melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan. f. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usahatani.

Untuk dapat melaksanakan semua tugas tersebut, peningkatan kapasitas BP3K sedapat mungkin mencakup beberapa aspek berikut: (i) penataan struktur organisasi/kelembagaan BP3K; (ii) peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM); (iii) peningkatan daya dukung sarana dan prasarana; serta (iv) peningkatan kemampuan mengemas program/kegiatan termasuk mendorong inovasi teknologi spesifik lokasi. Struktur Organisasi BP3K harus dibuat lentur dan ramping, namun harus dilengkapi dengan banyak tenaga fungsional penyuluh pertanian yang akan langsung mengawal pelaksanaan program/kegiatan. Potensi SDM perguruan tinggi pertanian setempat (dosen dan mahasiswa) dapat dioptimalkan untuk mendukung SDM BP3K dalam mengemas dan mengawal program-program pembangunan PPK. Selain itu, potensi SDM tenaga teknis (technical service atau TS) yang ada pada perusahaan/industri agro dapat pula dioptimalkan untuk bersinergi dengan penyuluh yang ada di BP3K. Dengan cara ini maka ke depan BP3K dapat diibaratkan menjadi seperti “mall” bagi orang desa, dalam arti bahwa BP3K dapat memenuhi semua informasi dan teknologi yang dibutuhkan petani. Peningkatan sarana dan prasarana BP3K sedapat mungkin harus dikembangkan sehingga memenuhi standar minimal sebagai berikut.: i. ada ruang kantor lengkap dengan sarana perkantoran termasuk komputer, ii. ada ruang untuk pertemuan (meeting room) lengkap dengan sarana prasarana termasuk laptop dan LCD, iii. ada mess untuk 8 – 10 orang, iv. ada lahan untuk percontohan atau demonstrasi plot (demplot), dan lain-lain.

Dalam jangka panjang, seluruh program/kegiatan pembangunan PPK dari Pemda, Industri/Swasta (melalui program CSR), Perbankan (kredit), Perguruan Tinggi (Pengabdian kepada Masyarakat), dan sebagainya harus dikemas kembali di BPP (re-packing), sehingga menjadi mudah dioperasionalkan di lapangan (di level petani) serta mudah dipantau dan dikawal pelaksanaannya. Dosen dan mahasiswa dari perguruan tinggi serta technical service dari perusahaan dapat dimobilisasi untuk membantu atau mendukung para penyuluh PPK dalam mengemas dan mengawal pelaksanaan kegiatan, serta mempercepat proses inovasi teknologi kepada petani. Mobilisasi SDM perguruan tinggi dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan KKN Tematik atau bentuk-bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat lainnya. Tahap selanjutnya, BP3K sebagai CoE kemudian mengemas program/kegiatan di wilayahnya. Melalui peran BP3K sebagai CoE diharapkan seluruh program pembangunan PPK yang diprogramkan oleh dinas-dinas teknis terkait dapat terkoordinasi dan terintegrasi pada level lapangan. Koordinasi dan integrasi yang terjadi diharapkan dapat mengefektifkan pelaksanaan program karena lebih terkontrol, tuntas, dan berkelanjutan. Dinamika Penyuluhan Pertanian: Dari Era Kolonial Sampai Dengan Era Digital

Soal Latihan:

1. Jelaskan beberapa kebijakan pemerintah Indonesia dalam mencapai swasembada pangan, khususnya beras sebagai makanan pokok bangsa kita!
2. Jelaskan beberapa lembaga penyuluhan yang pernah ada di Negara kita beserta peran dan fungsinya!
3. Jelaskan lembaga-lembaga penyuluhan di tingkat pusat sampai di tingkat desa sejak ditetapkannya UU No: 16 Tahun 2006 tentang SP3K!
4. Jelaskan peranan BP3K yang ada di setiap kecamatan!
5. Jelaskan beberapa kriteria BP3K yang dapat ditetapkan sebagai Center of Excellence (CoE) di setiap kabupaten/kota!

Modul 10

DIFUSI INOVASI PERTANIAN

Materi pada modul 10 ini memiliki muatan sebagai berikut :

- **Capaian belajar untuk Kemampuan Bidang Pekerjaan (*Learning Outcome for Occupational Skills*)**

CLO 4/CPMK 4 : Mahasiswa mampu mengambil keputusan yang tepat untuk merencanakan program penyuluhan pertanian berkelanjutan

- **Capaian belajar untuk Kemampuan Ketrampilan Umum (*General Occupational Skills*)**

OC/CP-KBP 4 : Mampu mengaplikasikan dan memanfaatkan IPTEKS dalam penyelesaian masalah pada bidang agribisnis yang adaptif terhadap perubahan lingkungan dengan mengaplikasikan model penyuluhan pertanian.

OC /CP-KBP 5 : Mampu berkomunikasi dan bernegosiasi secara efektif dengan pemangku kepentingan dalam pengembangan agribisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mewujudkan agribisnis yang berkelanjutan dan efisien dalam mencapai keberhasilan program penyuluhan pertanian

- **Capaian belajar untuk Kemampuan Ketrampilan Khusus (*Specific Occupational Skills*)**

OC 5/CP-KBP 6 : Mampu menggunakan metode dan merumuskan strategi penggunaan sumberdaya untuk meningkatkan kapasitas diri dan masyarakat dalam menghadapi tantangan pengembangan agribisnis ke depan.

OC 5/CP-KBP 7 : Mampu mengkomunikasikan kebijakan bisnis dan manajemen agribisnis untuk kepentingan pemberdayaan petani.

Setelah membaca modul ini diharapkan mahasiswa mampu:

- memahami pengertian inovasi, proses adopsi, dan proses difusi,
- menganalisis sifat-sifat inovasi yang dapat mempengaruhi kecepatan proses adopsi,
- menyebutkan urutan tahap-tahap dalam proses adopsi,

- d. memahami kategori dan sifat adopter berdasarkan sifat keinovatifannya di beberapa negara,
- e. menganalisis beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kecepatan proses adopsi,
- f. menjelaskan unsur-unsur dalam proses difusi

Pengertian inovasi, proses adopsi, dan proses difusi inovasi merupakan suatu temuan baru yang mempunyai sifat relatif, artinya bisa jadi sesuatu masih baru bagi seseorang atau individu, namun bagi orang atau individu lain sudah tidak baru lagi. Dalam proses penyuluhan, tujuan akhir yang ingin dicapai adalah perubahan perilaku pada sasaran, yang selanjutnya diharapkan akan terjadi adopsi terhadap sesuatu yang baru. Kita mengharapkan semua yang kita suluhkan dapat diadopsi oleh petani. Proses adopsi merupakan proses yang terjadi sejak pertama kali seseorang mendengar hal yang baru sampai orang tersebut mengadopsi (menerima, menerapkan, menggunakan) hal yang baru tersebut.

1. Adopsi Dan Inovasi

1.1. Konsep Adopsi Bahlen

Dalam model proses adopsi Bahlen ada 5 tahap yang dilalui sebelum seseorang mengadopsi suatu inovasi yaitu sadar (awreness), minat (interest), menilai (Evaluation), mencoba (trial) dan adopsi (adoption).

Tahap sadar : petani sasaran telah mengetahui informasi tetapi informasi tersebut dirasa kurang.

Tahap minat : petani sasaran mencari informasi atau keterangan lebih lanjut mengenai informasi tersebut.

Tahap menilai : petani sasaran sudah menilai dengan cara value/bandingkan inovasi terhadap keadaan dirinya pada saat itu dan dimasa yang akan datang serta menentukan apakah petani sasaran mencoba inovasi atau tidak.

Tahap mencoba : petani sasaran sudah mencoba meskipun dalam skala kecil untuk menentukan angka dan kesesuaian inovasi atau tidak.

Tahap adopsi : petani sasaran sudah meyakini kebenaran inovasi dan inovasi tersebut dirasa bermanfaat baginya. Pada tahap ini petani sasaran menerapkan dalam jumlah/skala yang lebih besar.

Konsep adopsi digunakan secara meluas oleh peneliti dan penyuluh pertanian. Meskipun demikian model adopsi mempunyai beberapa kelemahan antara lain :

- a) Tidak semua proses tersebut di atas diakhiri dengan tahap adopsi, adakalanya berupa penolakan terhadap adopsi.
- b) Kelima tahap di atas terjadi tidak selalu berurutan.

- c) Suatu proses adopsi pada tahap akhir akan diikuti dengan konfirmasi yaitu dengan cara mencari lebih lanjut untuk memperkuat keputusannya (terus mengadopsi) atau menerapkan inovasi lainnya (menolak)

1.2. Konsep Adopsi Rogers dan Schoemaker

Rogers dan Schoemaker (1992) menjelaskan bahwa proses adopsi dapat terjadi melalui 4 (empat) tahapan yaitu : tahap mengetahui (knowledge), persuasif (persuasive), mengambil keputusan (decision) dan konfirmasi (confirmation) yang selanjutnya diklasifikasikan menjadi empat tahap yaitu :

- a) Tahap mengetahui : petani sasaran sudah mengetahui adanya inovasi dan mengerti bagaimana inovasi itu berfungsi.
- b) Tahap Persuasi : petani sasaran sudah membentuk sikap terhadap inovasi yaitu apakah inovasi tersebut dianggap sesuai atautidak sesuai bagi dirinya.
- c) Tahap Keputusan : petani sasaran sudah terlibat dalam pembuatan keputusan yaitu apakah menerima atau menolak inovasi.
- d) Tahap Konfirmasi:petani sasaran mencari penguat bagi keputusan inovasi yang telah dibuatnya. Mungkin pada tahap ini petani sasaran mengubah keputusan untuk menolak inovasi yang telah di adopsi sebelumnya.

1.3. Konsep Proses Adopsi Kellogg

Model Adopsi Kellogg menyebutkan bahwa pada proses adopsi khususnya teknologi pertanian dapat dilakukan melalui beberapa langkah agar petani bersedia menerima/mengadopsi teknologi tersebut. Model adopsi meliputi (4) empat tahap yaitu diagnosis, perencanaan dan rekayasa teknologi adaptif, pengujian dan verifikasi di tingkat usahatani dan percobaan antar lokasi dan diseminasi.

Pada tahap pertama, penentuan wilayah sasaran dan mendiagnosis situasi petani. Pada umumnya wilayah sasaran diusahakan mempunyai karakteristik agroklimat yang relatif homogen. Penyuluh pertanian dapat mengidentifikasi wilayah sasaran lebih baik dibandingkan peneliti.

Tahap kedua, merencanakan dan merekayasa teknologi adaptif dengan menggunakan informasi yang diperoleh pada tahap pertama. Berdasarkan informasi ini, dapat dibuat perencanaan dan rekayasa teknologi yang sesuai dengan kondisi lapangan.

Tahap ketiga, pengujian dan verifikasi di tingkat usahatani. Hasil penelitian yang diperoleh dari eksperimen sebelumnya dapat diuji dan diverifikasi di tingkat usahatani. Petani sasaran akan bersedia mengadopsi teknologi. Introduksi teknologi dilakukan apabila teknologi tersebut memiliki keunggulan dibanding dengan teknologi sebelumnya, juga hasilnya dilihat sendiri oleh petani sasaran.

Tahap keempat, selama proses pengujian dan verifikasi di tingkat usahatani pasti terjadi percobaan di lahan usahatani yang dilakukan petani. Hal ini mengindikasikan bahwa pilihan teknologi sudah dilakukan petani dan diharapkan terjadi perbaikan teknik budidaya yang signifikan.

Model adopsi Rogers dan Schoemaker digunakan untuk mengatasi keterbatasan model adopsi Bohlen tersebut. Rogers dan Schoemaker (1983) mengatakan bahwa tingkat adopsi dipengaruhi oleh lima (5) faktor yaitu :

- a. Tipe keputusan adopsi inovasi
- b. Atribut yang terkandung dalam inovasi
- c. Karakteristik system sosial petani sasaran
- d. Karakteristik saluran komunikasi yang digunakan
- e. Usaha yang dilakukan penyuluh untuk meyakinkan petani sasaran.

Oleh karenanya, Rogers mengusulkan serangkaian tahap proses adopsi sebagai berikut:

- 1) Pengenalan/pengetahuan: tentang bagaimana inovasi tersebut berfungsi. Melalui berbagai kegiatan promosi atau sosialisasi, maka seseorang dapat mendapatkan pengetahuan tentang adanya inovasi.
- 2) Persuasi/pengimbuhan: setelah ia mengenal atau mengetahui adanya inovasi, kegiatan selanjutnya dari para agen pembaharu adalah pembentukan dan perubahan sikap agar seseorang tersebut mau menerima inovasi tersebut. Dengan pendekatan persuasif, agen pembaharu dapat meyakinkan seseorang terhadap kelebihan dari inovasi tersebut, atau dilakukan penghimbau secara berulang (pervasi) agar mereka mau berubah sikapnya, dari semula menolak menjadi menerima inovasi baru tersebut.
- 3) Implementasi/keputusan: setelah mendapatkan pengenalan dan tambahan informasi yang memadai mengenai inovasi tersebut, seseorang harus memutuskan apakah ia akan menerima atau menolak inovasi tersebut.
- 4) Konfirmasi, pada tahapan berikutnya, seseorang masih mengalami kebimbangan dalam mengambil keputusan tersebut, ia masih perlu mencari anutan bagi pengambilan keputusannya.

2. Penggolongan Adopter Berdasarkan Kecepatan Adopsi

Berdasarkan kecepatan adopsi terhadap suatu inovasi maka dikenal 5 (lima) golongan adopter yaitu :

- 1) Inovator (golongan perintis dan pelapor)

Golongan perintis ini jumlahnya tidak banyak dalam masyarakat. Karakteristik golongan ini antara lain gemar, mencoba, inovasi dan rata-rata pada masyarakatnya pada umumnya berpartisipasi aktif dalam penyebarluasan inovasi.

2) Early Adopter (golongan penerap dini)

Golongan ini mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi, gemar membaca buku, suka mendengar radio, memiliki faktor produksi non lahan yang relative komplet.

3) Early Majority (golongan Penerap awal)

Golongan ini pada umumnya mempunyai tingkat pendidikan rata-rata seperti anggota masyarakat lainnya, dapat menerima inovasi selama inovasi tersebut memberikan keuntungan kepadanya.

4) Late Majority (golongan Penerap akhir)

Golongan ini pada umumnya berusia lanjut dan memiliki tingkat pendidikan rendah, status sosial ekonominya sangat rendah dan lambat menerapkan inovasi.

5) Laggard (Golongan Penolak)

Golongan penolak ini pada umumnya usia lanjut, jumlahnya sangat sedikit dan tingkat pendidikannya sangat rendah bahkan buta huruf, status sosial ekonominya sangat rendah, tidak suka terhadap perubahan-perubahan.

Tabel 10.1. Karakteristik Umum Masing-Masing Golongan Adopter

Variabel	Perintis	Pelopor	Penganut dini	Penganut lambat	Kolot
Umur	½ umur	Muda	½ umur-tua	Muda-tua	Tua
Pendidikan	Tinggi	Tinggi	Rata-rata	Rendah	Rendah sekali
Ekonomi	Baik	Baik	Sedang	Kurang	Jelek
Status social	Tinggi	Sedang	Sedang-Baik	Rendah	Paling rendah
Pola Hubungan	Kosmopolit	Kosmopolit	Agak lokatif	Lokatif	Sangat lokatif

Apakah karakteristik individu tersebut dapat diterapkan pada masyarakat Indonesia yang cukup beragam kondisi social ekonominya. Dalam kegiatan penyuluhan, pembinaan yang dilakukan oleh para PPL telah menghasilkan pengelompokan petani berdasarkan sifat keinovatifannya, yang melahirkan kelompok-kelompok:

- a) Kontak tani/nelayan andalan. Kontak tani/nelayan andalan merupakan sosok kontak tani/nelayan yang memiliki beberapa kelebihan dibanding kontak tani /nelayan yang ada di wilayahnya. Kontak tani/nelayan andalan biasanya merupakan ketua kelompok kontak tani/nelayan di tingkat wilayahnya.

Tingkatan wilayah kontak tani / nelayan andalan ada di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, maupun propinsi.

- b) Kontak tani/nelayan. Kontak tani merupakan ketua kelompok tani atau mantan ketua kelompok tani. Mereka memiliki kelebihan daripada petani anggotanya, dari aspek keinovatifan, kekosmopolitanan, keberanian mengambil risiko usahatani, ekonomi, luas lahan, produktivitas, dan pendapatan usahatannya.
- c) Petani/nelayan maju. Petani/nelayan maju, memiliki ciri keinovatifan yang lebih dari rata-rata anggota biasa, namun masih di bawah kontak tani. Mereka lebih mudah menerima inovasi baru dibanding petani pada umumnya.
- d) Petani/nelayan biasa/peserta biasanya memiliki karakter yang lambat dalam menerima inovasi, luas lahan usahatannya di bawah rata-rata, kurang berani mengambil risiko usahatani, mau mengadopsi inovasi setelah melihat orang-orang di sekitarnya menerapkan, lemah ekonomi, dan kurang kosmopolit.

3. Difusi Inovasi

Salah satu tujuan program penyuluhan pertanian adalah mengubah masyarakat melalui perubahan sosial yang direncanakan. Dalam penyuluhan pertanian ditunjukkan dengan program penyuluhan. Usaha yang secara sengaja ini diarahkan untuk memperbaiki sistem-sistem sosial yang terdapat pada masyarakat. Dan akhirnya penyuluhan ini memperbaiki masyarakat secara keseluruhan .

Perubahan sosial yang direncanakan pd proses penyuluhan sangat rumit yang pada dasar dapat dikelompokkan menjadi tiga tahap yaitu : Inovasi, difusi, dan konsekuensi-konsekuensi inovasi merupakan kegiatan penciptaan atau pengembangan inovasi baru

Difusi merupakan proses penyebaran inovasi dari seorang yang telah mengadopsi inovasi kepada orang lain dalam masyarakat. Konsekuensi merupakan perubahan yang terjadi dalam sistem sosial sebagai akibat adanya adopsi atau penolakan terhadap suatu inovasi.

Penyuluhan Pertanian menitikberatkan perubahan sosial jangka pendek yaitu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan difusi inovasi dan mengarahkan perubahan dalam masyarakat. Wayne Romable (1984) menyatakan bahwa difusi inovasi dapat dipandang sebagai proses komunikasi khusus. Pada difusi inovasi, sumber pesan dapat berupa penemu penyuluh pertanian dan pemimpin. Perubahan secara praktis yang diharapkan adalah pengetahuan, sikap dan perilaku, faktor yang mendorong dan menghambat perubahan. Perolehan sesuai pendapat Leagans (1971) tertera pada Gambar 5.

Model difusi inovasi menggambarkan proses penyebaran inovasi dari suatu sumber inovasi kepada anggota suatu sistem sosial. Dengan patokan bahwa sumber inovasi asalnya dari lembaga penelitian maka terdapat tiga model

difusi inovasi yaitu Model Top Down, Model Feed Back dan Model Farmer Back Farmer.

3.1. Model Difusi Top Down

Model Difusi Top Down dikembangkan berdasarkan penelitian di India, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan sekolah, laboratorium dan stasiun percobaan. Bunting (1979) mengatakan bahwa model top down difusion sebagai model penyuluhan pertanian konvensional. Pada model ini peneliti melakukan penelitian di laboratorium maupun stasiun penelitian dan menghasilkan rekomendasi yang disebarluaskan pada seluruh petani.

3.2. Model Feed-Back

Model ini dikembangkan oleh Benor dan Horison. Model ini dikenal sebagai training and visit system atau di Indonesia di sebut sistem latihan dan kunjungan (sistem laku). Model ini selanjutnya dibukukan dengan judul "Agricultural Eftension The Training and Visit System". Model feed back dianggap sebagai perbaikan model Top Drown yaitu dengan mempertimbangkan mekanisme umpan balik diantara peneliti dan penyuluh pertanian. Model feed-back menjadi populer dan berkembangnya Farming System Research yang mengaitkan penelitian ditingkat usahatani kedalam metode penelitian pertanian.

3.3. Model Farmer Back To Farmer

Model difusi farmer back to farmer dikemukakan oleh Rhoades dan Booth (1982). Model ini mengasumsikan bahwa penelitian harus dimulai dan diakhiri di tingkat petani. Hal ini berarti bahwa petani harus dilibatkan secara aktif sebagai anggota tim pemecahan masalah di lapangan. Petani dengan pengalaman jangka panjangnya mengetahui kondisi usaha taninya, tipe tanah, kualitas sosial, ekonomi, tanaman yang sesuai dan perilaku pasar dari waktu ke waktu. Dengan demikian petani adalah tenaga ahli pada usaha taninya sendiri.

Model difusi farmer back to farmer ini dapat diawali dengan eksperimen sederhana dan diakhiri survey di tingkat petani. Kunci perbedaannya dengan model difusi yang lain adalah fleksibilitas dan penelitian di tingkat petani untuk mengidentifikasi sumber daya yang ada di tingkat usaha tani.

4. Sifat-Sifat Inovasi

Ada beberapa sifat suatu inovasi yang dapat mempengaruhi kecepatan proses adopsi. Menurut Rogers dan Shoemaker (1986) sifat-sifat tersebut adalah:

- 1) Keuntungan relatif (relative advantage) :** sejauh mana teknologi baru mempunyai keuntungan lebih tinggi daripada teknologi yang akan digantikan. Bila nilai yang baru lebih rendah, maka adopsinya akan lebih lambat. Tingkat keuntungan relatif seringkali dinyatakan dengan atau dalam bentuk keuntungan ekonomis, meskipun dapat juga diukur dengan cara lain.

- 2) **Kompatibilitas (compatibility)** : sejauh mana suatu inovasi dianggap konsisten dengan nilai-nilai yang ada, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan penerima. Dengan kata lain, kompatibilitas mengacu ada tidaknya hubungan dengan hal-hal yang telah ada. Suatu inovasi mungkin kompatibel dengan (a) nilai-nilai dan kepercayaan sosiokultural, (b) dengan ide-ide yang telah diperkenalkan sebelumnya, dan (c) dengan kebutuhan klien terhadap inovasi.
- 3) **Kompleksitas (complexity)** : tingkat kerumitan suatu inovasi. Suatu inovasi yang susunannya kurang baik akan kelihatan kompleks, sebaliknya inovasi yang sesungguhnya kompleks tetapi dengan susunan yang baik akan kelihatan mudah dan tidak kompleks. Kompleksitas suatu inovasi sifatnya relatif, bisa jadi suatu inovasi dianggap sederhana bagi seseorang, namun dianggap rumit bagi yang lain, atau sebaliknya. Penyuluh harus berusaha mengurangi kompleksitas inovasi yang disuluhkannya. Bila inovasi yang bersangkutan kesannya rumit di mata petani, maka akan memperlambat adopsinya.
- 4) **Trialabilitas (trialability)**: mudah tidaknya dicobanya suatu inovasi. Inovasi yang lebih mudah dicoba akan mempercepat adopsi. Suatu inovasi yang dapat dicoba akan memperkecil risiko bagi adopter. Beberapa inovasi mungkin lebih sulit dicoba dulu (dalam skala kecil); bahkan beberapa inovasi harus "ambil atau tinggalkan".
- 5) **Observabilitas (observability)**; mudah tidaknya dilihat baik hasil maupun caranya. Inovasi yang mudah dilihat atau ditemukan di lingkungan masyarakat akan lebih mudah menyebar dan dikomunikasikan antar calon adopter.

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan proses adopsi

Faktor waktu/kecepatan sangat penting dalam proses adopsi. Menurut Margono Slamet (1980), banyak faktor yang mempengaruhi pada tiap tahapan proses adopsi:

1) Tahap Kesadaran :

Faktor Pribadi :

- kontak dengan sumber-sumber informasi; orang yang lebih banyak berhubungan sumber-sumber informasi akan memiliki informasi yang lebih banyak yang dapat membantu menambah wawasan dan pengetahuan terhadap inovasi, sumber informasi dapat berupa lembaga atau media.
- kontak dengan individu dan kelompok dalam masyarakat; individu dan kelompok-kelompok masyarakat dapat menjadi sumber informasi yang lain bagi setiap idividu.

Faktor Lingkungan :

- tersedianya media komunikasi; media komunikasi yang ada di sekitar kita dapat menjadi sumber informasi bagi seseorang, seperti televisi, radio, koran, majalah, dan sebagainya.
- adanya kelompok-kelompok dalam masyarakat; kelompok-kelompok masyarakat di sekitar kita akan sangat membantu seseorang dalam pencarian informasi tentang inovasi; contohnya kelompok-kelompok tani yang sudah maju, kelompok-kelompok studi atau kelompok-kelompok pengkajian teknologi.
- bahasa dan kebudayaan; pemahaman bahasa dan budaya dari mana inovasi berasal perlu dipahami agar pemahaman terhadap inovasi bersifat komprehensif dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat yang akan mengadopsi inovasi.

2) Tahap Minat : 1

Faktor Pribadi :

- tingkat kebutuhan; minat seseorang untuk mengadopsi inovasi sangat dipengaruhi oleh tingkat kebutuhan seseorang terhadap inovasi, orang yang sangat membutuhkan inovasi akan mendorong peningkatan minatnya terhadap inovasi yang dikenalnya.
- kontak dengan sumber-sumber informasi; minat seseorang dapat muncul karena sumber-sumber informasi menyediakan informasi yang dapat memacu atau mendorong minat seseorang terhadap inovasi, misalnya informasi tentang kelebihan atau manfaat informasi.
- keaktifan mencari sumber informasi; orang yang aktif mencari informasi akan mendapatkan lebih banyak informasi atau pengetahuan tentang inovasi yang dapat menjadi pendorong munculnya minat seseorang terhadap inovasi.

Faktor Lingkungan :

- adanya sumber-sumber informasi secara detail; ketersediaan informasi yang lebih lengkap di sekitar kita akan membantu mendorong tumbuhnya minat seseorang terhadap inovasi.
- dorongan dari masyarakat setempat; minat seseorang terhadap inovasi bisa disebabkan adanya dorongan masyarakat sekitar, misalnya kebutuhan akan alat angkut kereta dorong untuk mengangkut kelapa sawit sangat dirasakan oleh para pekerja pemanenan sawit, bila informasi ini disampaikan kepada majikannya, dapat mendorong minatnya untuk membeli alat angkut kereta dorong agar lebih meringankan dan mempercepat kerja tugas pemanenan.

3) Tahap Penilaian:

Faktor Pribadi :

- pengetahuan tentang keuntungan keuntungan relatif; keuntungan relatif sering diukur dari aspek ekonomis, orang mengetahui keuntungan relatif suatu inovasi mempunyai kemampuan untuk menilai atau membandingkan keuntungannya bila memakai inovasi sebelumnya atau inovasi sejenis.
- tujuan usaha; tujuan usaha yang bersifat profit oriented akan berbeda dengan tujuan usaha yang bersifat sosial; tujuan usaha.

Faktor Lingkungan :

- penjelasan tentang keuntungan relatif; seringkali ukuran keuntungan relatif belum dipahami secara menyeluruh; masyarakat atau anggota masyarakat sekitar dapat menjadi sumber informasi yang dapat memperjelas bagaimana menghitung keuntungan relatif suatu inovasi, atau bahkan dari pengalaman pihak-pihak lain dalam masyarakat yang sudah lebih dahulu menerapkan inovasi tersebut dapat memberikan penjelasan konkrit tentang keuntungan relatif suatu inovasi.
- pengalaman orang lain; pengalaman orang lain merupakan salah satu sumber pembandingan dalam menilai kelebihan dan kekurangan suatu inovasi.
- derajat komersialisasi; semakin komersial usaha seseorang akan lebih hati-hati dalam menilai kelebihan dan kekurangan suatu inovasi.

4) Tahap Mencoba :

Faktor Pribadi :

- keterampilan spesifik; inovasi yang memerlukan keterampilan spesifik akan lebih susah untuk dicoba dari pada inovasi yang lebih sederhana, sehingga teknologi yang sederhana biasanya akan lebih cepat diadopsi.
- kepuasan pada cara-cara lama; inovasi yang membawa nilai-nilai baru dan biasanya harus mampu memberikan bukti bahwa inovasi tersebut dapat memberikan kepuasan tersendiri bagi pemakainya, oleh karenanya inovasi baru dirancang demi memberikan kepuasan yang lebih daripada inovasi sejenis sebelumnya.
- keberanian menanggung risiko; penerapan suatu inovasi memerlukan keberanian dalam menanggung risiko; makin berani seseorang menanggung risiko, maka akan semakin cepat ia untuk mencoba inovasi.

Faktor Lingkungan :

- penjelasan tentang cara praktik serta spesifikasi; agar seseorang berani mencoba suatu inovasi memerlukan penjelasan detail tentang cara mempraktikkan inovasi tersebut, demikian halnya penjelasan spesifikasi inovasi yang memadai akan membantu memudahkan seseorang dalam mencoba suatu inovasi.

- faktor-faktor alam, lingkungan alam sekitar tempat tinggal seseorang untuk menerapkan inovasi akan sangat mempengaruhi kecepatan seseorang dalam mencoba suatu inovasi; lingkungan alam yang mendukung sangat besar pengaruhnya dalam mempercepat seseorang untuk mau mencoba suatu inovasi.
- faktor-faktor harga; harga suatu inovasi yang terjangkau akan mempercepat seseorang untuk mau mencoba suatu inovasi.

5) Tahap Adopsi :

Faktor Pribadi :

- kepuasan pada pengalaman pertama; kecepatan seseorang mengadopsi suatu inovasi sangat ditentukan oleh kepuasan pada pengalaman pertama seseorang menggunakan inovasi tersebut, kesan yang positif akan mempercepat seseorang untuk mengadopsi suatu inovasi.
- kemampuan mengelola usaha dengan cara baru; kadangkala suatu inovasi baru memerlukan cara atau teknik baru dalam penerapannya, sehingga kemampuan seseorang dalam mengelola usaha dengan cara baru akan sangat menentukan cepat lambatnya seseorang mengadopsi suatu inovasi.

Faktor Lingkungan :

- analisis keberhasilan/kegagalan; dalam penerapan di masyarakat, keberhasilan atau kegagalan dapat diketahui apabila seseorang mampu melakukannya dengan metode analisis tertentu, kemampuan yang memadai untuk melakukan analisis tersebut akan sangat mendukung kecepatan seseorang mengadopsi suatu inovasi.
- tujuan dan minat keluarga; dalam mengambil keputusan untuk penerapan suatu inovasi oleh seseorang biasanya juga dipengaruhi orang-orang dekat di sekitarnya, termasuk keluarga, bila minat dan tujuan keluarga sejalan akan membantu mempercepat penerapan inovasi, sebaliknya bila bertentangan akan menghambat penerapan suatu inovasi. penjelasan spesifikasi inovasi yang memadai akan membantu memudahkan seseorang dalam mencoba suatu inovasi.

Faktor-faktor Alam,

- lingkungan alam sekitar tempat tinggal seseorang untuk menerapkan inovasi akan sangat mempengaruhi kecepatan seseorang dalam mencoba suatu inovasi; lingkungan alam yang mendukung sangat besar pengaruhnya dalam mempercepat seseorang untuk mau mencoba suatu inovasi.
- faktor-faktor harga; harga suatu inovasi yang terjangkau akan mempercepat seseorang untuk mau mencoba suatu inovasi.

Perbedaan-perbedaan individual yang mempengaruhi cepat lambatnya proses adopsi :

1. Umur, secara umum semakin tua umur seseorang akan lebih lambat dalam menerima suatu pembaharuan atau untuk menerapkan suatu inovasi.
2. Tingkat pendidikan, makin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan lebih mudah menerima pembaharuan atau menerima adanya inovasi baru.
3. Status sosial ekonomi, status ekonomi yang lebih baik dan mendukung akan lebih mempercepat proses adopsi inovasi.
4. Pola hubungan (localite vs cosmopolite); orang yang makin kosmopolit (memiliki pola hubungan yang luas dan terbuka) akan lebih mudah menerima ide pembaharuan atau suatu inovasi baru.
5. Keberanian menanggung risiko, makin berani seseorang menanggung risiko akan makin cepat seseorang menerima inovasi tersebut.
6. Sikap terhadap perubahan; orang yang bersifat terbuka terhadap perubahan akan semakin mudah menerima inovasi baru.
7. Motivasi berkarya; makin tinggi motivasi seseorang akan semakin cepat ia menerima inovasi baru, sebab umumnya inovasi baru menawarkan kemudahan-kemudahan dalam meringankan tugas atau pekerjaan seseorang.
8. Aspirasi, tingkat aspirasi yang lebih luas dan lebih maju akan mempercepat penerimaan seseorang terhadap inovasi baru.
9. Fatalisme, orang yang sudah bersikap apatis terhadap sesuatu yang baru biasanya akan lebih susah menerima ide-ide pembaharuan dari inovasi baru.
10. Diagnostisme; kepercayaan terhadap nilai-nilai kepercayaan adat yang berlebihan sering menjadi penghambat bagi seseorang dalam mengadopsi suatu inovasi.

Modul 11

PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN EVALUASI PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

Materi pada modul 11 ini memiliki muatan sebagai berikut :

- **Capaian belajar untuk Kemampuan Bidang Pekerjaan (*Learning Outcome for Occupational Skills*)**
CLO 4/CPMK 4 : Mahasiswa mampu mengambil keputusan yang tepat untuk merencanakan program penyuluhan pertanian berkelanjutan
- **Capaian belajar untuk Kemampuan Ketrampilan Umum (*General Occupational Skills*)**
OC/CP-KBP 4 : Mampu mengaplikasikan dan memanfaatkan IPTEKS dalam penyelesaian masalah pada bidang agribisnis yang adaptif terhadap perubahan lingkungan dengan mengaplikasikan model penyuluhan pertanian.
OC /CP-KBP 5 : Mampu berkomunikasi dan bernegosiasi secara efektif dengan pemangku kepentingan dalam pengembangan agribisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mewujudkan agribisnis yang berkelanjutan dan efisien dalam mencapai keberhasilan program penyuluhan pertanian
- **Capaian belajar untuk Kemampuan Ketrampilan Khusus (*Specific Occupational Skills*)**
OC 5/CP-KBP 6 : Mampu menggunakan metode dan merumuskan strategi penggunaan sumberdaya untuk meningkatkan kapasitas diri dan masyarakat dalam menghadapi tantangan pengembangan agribisnis ke depan.

Setelah membaca modul ini diharapkan mahasiswa mampu: a. Memahami pengertian program penyuluhan. b. Menyebutkan tahap-tahap penyusunan

program penyuluhan. c. Memahami pengertian monitoring dan evaluasi penyuluhan. d. Menyebutkan tahap-tahap pelaksanaan evaluasi penyuluhan.

1. Program Penyuluhan

Pembangunan (pedesaan) yang efektif bukanlah semata-mata karena adanya kesempatan tetapi merupakan hasil dari penentuan pilihan-pilihan kegiatan, bukan hasil "trial and error" melainkan akibat dari perencanaan yang baik (Martinez, 1985).

Beberapa pengertian tentang perencanaan diungkapkan oleh ahli-ahli berikut :

- 1) Proses pemilihan dan menghubungkan fakta serta menggunakannya untuk menyusun asumsi-asumsi yang diduga bakal terjadi di masa mendatang, untuk kemudian merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan untuk tercapainya tujuantujuan yang diharapkan (Terry, 1960)
- 2) Prosedur kerja bersama-sama masyarakat dalam upaya merumuskan masalah dan upaya pemecahan yang mungkin dapat dilakukan demi tercapainya tujuan dan sasaran yang ingin dicapai (Venugopal, 1957)

Lawrence (1980) menyatakan perencanaan merupakan proses berkelanjutan, dan menyangkut perumusan tentang:

- 1) Proses perancangan program. Pada tahap ini kita merancang atau membuat sketsa rencana program yang akan dijalankan. Rancangan program ini harus didasarkan pada data yang aktual, akurat, komprehensif, dan representatif. Data aktual merupakan data yang terkini atau terbaru dan ukurannya tepat dan dapat dipercaya kebenarannya (autentik). Data yang dikumpulkan harus menyeluruh, menyangkut semua aspek yang terkait dengan keperluan penyusunan program, serta representatif artinya data tersebut dapat mewakili populasi yang ada. Pengumpulan data primer harus dilakukan dengan kaidah metodologi yang benar.
- 2) Penulisan perencanaan program. Pada tahap ini program yang direncanakan harus dirumuskan secara tertulis, hal ini dimaksudkan agar dapat dibaca oleh orang atau pihak lain yang mungkin dapat membantu melengkapi, menyempurnakan atau mengevaluasi rencana program yang disusun. Selain itu, penulisan rencana program akan menjadi dokumen yang dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang berpentingan.
- 3) Rencana kegiatan. Setelah rencana program terumuskan, maka langkah berikutnya adalah perumusan rencana kegiatan. Rencana program yang terumuskan dapat dijabarkan menjadi beberapa kegiatan demi pencapaian tujuan program.
- 4) Rencana pelaksanaan program (kegiatan). Tahap selanjutnya adalah perumusan rencana pelaksanaan program atau kegiatan dalam bentuk

tindakan (action). Hal ini menyangkut perumusan siapa pelaksana kegiatan, dimana kegiatan dilaksanakan, metode pelaksanaan, target atau kelompok sasaran, peralatan yang diperlukan, dan rencana anggaran biaya, serta sumbernya.

- 5) Rencana evaluasi hasil pelaksanaan program. Pelaksanaan kegiatan harus mengacu pada upaya pencapaian tujuan kegiatan, sejauhmana efektivitas pencapaiannya. Rencana evaluasi harus merumuskan cara atau metode evaluasinya, siapa pelaksananya, alat yang diperlukan evaluasi, pada tahap mana saja evaluasi harus dilakukan, rumusan ukuran keberhasilan, dan rencana anggaran yang dibutuhkan. Rencana evaluasi dapat dilaksanakan bersamaan pelaksanaan kegiatan atau yang disebut pemantauan (monitoring) atau akan dilaksanakan pada akhir setelah semua tahap kegiatan diselesaikan.

Adapun manfaat perencanaan yang dapat kita rasakan:

- 1) Dapat menjadi acuan dalam mempertimbangkan secara seksama tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melaksanakan suatu program.
- 2) Tersedianya acuan tertulis yang dapat digunakan oleh masyarakat dan semua pihak yang terlibat dalam program.
- 3) Sebagai pedoman pengambilan keputusan terhadap usul penyempurnaan atau perbaikan.
- 4) Memantapkan tujuan-tujuan yang ingin dan harus dicapai.
- 5) Mencegah kesalahan penafsiran tentang tujuan akhir. Segala penafsiran tujuan hendaknya dikembalikan pada rumusan tujuan yang tertuang dalam program.
- 6) Menjaga kelangsungan dalam diri personal pelaksana program, hal ini banyak dirasakan manfaatnya karena budaya kita sering kali setiap pergantian pimpinan atau pejabat baru selalu membawa atau membuat program yang baru atau berbeda dengan program yang sudah ada sebelumnya meskipun program yang sudah ada sudah baik.
- 7) Membantu pengembangan kepemimpinan. Bila program dilaksanakan oleh tim kerja dengan pembagian tugas dan tanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung telah mengajarkan kepada bawahan bagaimana memimpin suatu kegiatan.
- 8) Menghindarkan pemborosan sumberdaya dan merangsang efisiensi. Perumusan program yang benar akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan. Efisiensi dapat dirasakan karena rencana kebutuhan tenaga dan biaya dapat dipersiapkan secara benar, dan pelaksanaannya dapat diaudit agar akuntabilitas pelaksanaan program dapat dipertanggungjawabkan.
- 9) Menjamin kelayakan kegiatan yang dilakukan. Perumusan program secara tertulis memberi peluang pihak lain untuk dapat mengevaluasi kelayakan kegiatan yang dilakukan.

Perencanaan program harus dilakukan secara benar agar hasil yang dicapai juga optimal. Perencanaan program yang baik memiliki beberapa karakteristik berikut:

- 1) Mengacu pada kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat dapat kita ketahui dengan benar bila kita lakukan analisis fakta dan keadaan nyata dalam masyarakat melalui tahap analisis situasi atau analisis keadaan.
- 2) Bersifat komprehensif, artinya bersifat menyeluruh. Program yang dirumuskan seharusnya menjangkau sebagian besar sasaran (masyarakat) dengan segala permasalahan yang dihadapi.
- 3) Luwes, artinya program dapat dilaksanakan kapan saja, dimana saja, dan oleh siapa saja serta terbebas dari pengaruh waktu, tempat, dan faktor pelaksana program.
- 4) Merupakan proses pendidikan. Pelaksanaan program yang melibatkan masyarakat secara tidak langsung melibatkan masyarakat dalam proses pendidikan. Hal ini berarti kita telah melibatkan masyarakat dalam proses belajar dari lingkungan dan pihak lain.
- 5) Beranjak dari sudut pandang masyarakat. Kebutuhan yang dirumuskan dan tujuan yang ingin kita capai melalui program harus berpijak pada kebutuhan masyarakat, bukan beranjak dari kepentingan program atau bahkan kepentingan politis pejabat.
- 6) Memerlukan kepemimpinan yang andal. Pelaksanaan program sebaiknya dilakukan oleh pimpinan yang memiliki kompetensi dan profesionalisme.
- 7) Menggunakan teknik-teknik dan penelitian untuk memperoleh informasi. Dalam merumuskan program, informasi atau data yang diperlukan sebaiknya dikumpulkan dengan teknik-teknik dan atau penelitian yang benar.
- 8) Mengharapkan partisipasi masyarakat agar mereka dapat membantu diri sendiri. Pelaksanaan program sebaiknya hanya bersifat sebagai stimulan agar masyarakat tergugah dan selanjutnya dapat merumuskan dan melaksanakan programnya secara mandiri, sehingga keterlibatan mereka dapat optimal.
- 9) Menerapkan evaluasi secara berkelanjutan. Program yang baik seharusnya dirancang untuk dapat dievaluasi setiap waktu pada setiap tahapan program dan berkelanjutan serta dapat dimanfaatkan untuk penyempurnaan program pada masa yang akan datang. Lingkup materi program sangat ditentukan oleh kebutuhan masyarakat (sasaran). Kebutuhan masyarakat sebaiknya adalah kebutuhan yang betul-betul dirasakan (felt need).

Lingkup materi program secara khusus antara lain:

- 1) Optimasi pemanfaatan sumberdaya untuk kegiatan produksi usahatani.
- 2) Efisiensi sistem produksi (teknis dan ekonomis).
- 3) Efisiensi pemasaran produksi.
- 4) Pengelolaan usaha termasuk ekonomi rumah tangga.
- 5) Pengembangan sumberdaya keluarga.
- 6) Pengembangan kelembagaan ekonomi dan sosial.
- 7) Pembinaan kepemimpinan.
- 8) Pemberdayaan kelompok.
- 9) Efisiensi usaha kelompok, dan sebagainya.

Unsur-unsur suatu program meliputi :

- a) Keadaan, merupakan gambaran umum keadaan wilayah dimana program akan dilaksanakan. Keadaan umum sebaiknya mencakup semua aspek kewilayahan seperti aspek geografis, fisiologis, demografis, klimatologis, social, ekonomis, dan budaya. Gambaran keadaan tersebut sebaiknya berdasarkan data atau fakta. Dari data atau fakta yang ada kita lakukan analisis sehingga terumuskan adanya masalah yang harus dipecahkan melalui program yang kita susun. Data yang kita kumpulkan sebaiknya mencakup data potensi maupun data aktual setempat.
- b) Masalah. Secara umum masalah merupakan suatu kondisi atau keadaan yang tidak memuaskan. Masalah dapat kita rumuskan dari hasil analisis keadaan. Masalah juga dapat kita rumuskan dari kesenjangan antara data potensial dan data aktual.
- c) Tujuan. Tujuan merupakan rumusan tentang keadaan yang ingin dicapai. Rumusan tujuan harus mempertimbangkan potensi yang ada. Tujuan harus menjawab kebutuhan masyarakat. Harus dihindari bahwa penetapan tujuan adalah untuk mencapai target (misalnya target pejabat pemerintah yang bersifat politis).
Cara mencapai tujuan. Cara mencapai tujuan merupakan penjabaran metode atau teknik mencapai tujuan. Tujuan dapat dicapai melalui penerapan metode yang tepat, frekuensi kegiatan, volume kegiatan, tenaga pelaksana kegiatan yang terlibat, sasaran yang terlibat, fasilitas dan peralatan yang diperlukan, biaya yang diperlukan, dan sumber pembiayaannya.
- d) Data keadaan seharusnya merupakan fakta. Data merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi. Fakta atau sekumpulan fakta akan menjadi data yang dapat memberikan informasi bagi pihak lain. Data yang diperlukan dalam penyusunan program seharusnya memenuhi beberapa syarat:
 - Aktual. Data aktual artinya data terbaru atau data terakhir yang tersedia, dan bersifat mutakhir.

- Akurat. Data seharusnya merupakan ukuran-ukuran yang bersifat standar.
- Kategoris. Data sebaiknya dapat dikelompok-kelompokkan sesuai dengan jenis data dan keperluannya, misalnya data sosial, ekonomi, kependudukan, dsb.
- Representatif artinya data yang diambil harus mewakili populasinya. Untuk mendapatkan data yang representatif, penentuan sampel sebagai sumber data harus diambil dari populasi dengan metode yang tepat. Data yang kita kumpulkan mesti kita ukur dari sumbernya. Data dapat berupa data kualitatif atau data kuantitatif.

Berdasarkan pengukurannya, data dibedakan menjadi 4 (empat) jenis:

- a. Ukuran nominal. Ukuran nominal adalah tingkat pengukuran yang paling sederhana. Dasar penggolongan hanyalah kategori yang tidak tumpang tindih. "Angka" yang ditunjukkan tidak merefleksikan nilai, tetapi hanya sekedar label atau kode.. Angka-angka tersebut tidak dipandang sebagai nilai, tetapi hanya sekedar sebagai label.
- b. Ukuran ordinal. Pengukuran ini memungkinkan kita untuk mengurutkan dari tingkatan "paling rendah" ke tingkatan "paling tinggi" menurut atribut tertentu. Contoh untuk ukuran kelas ekonomi: kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Ukuran ini tidak menunjukkan rata-rata kelas ekonomi, dan tidak menunjukkan berapa besar interval antara kelas ekonomi rendah dan kelas ekonomi atas.
- c. Ukuran interval. Ukuran ini dapat mengurutkan orang atau obyek berdasarkan suatu atribut, selain itu juga memberikan informasi tentang interval antara satu orang atau obyek dengan orang atau obyek lainnya. Interval atau jarak yang sama pada skala ini dipandang sebagai mewakili interval atau jarak yang sama pula pada obyek yang diukur. Contoh: Indeks Prestasi (IP) mahasiswa.
- d. Ukuran rasio. Ukuran ini diperoleh apabila selain informasi tentang urutan dan interval antar obyek, kita mempunyai informasi tambahan tentang jumlah absolut atribut yang dimiliki oleh salah satu obyek. Jadi ukuran rasio adalah suatu bentuk interval yang jaraknya tidak dinyatakan sebagai perbedaan nilai antar obyek.

Langkah-langkah penyusunan program penyuluhan Secara ringkas dan skematis, Pesson (1962) merumuskan langkah-langkah penyusunan program penyuluhan bahwa arah langkah perencanaan mengikuti arah jarum jam, sebaliknya arah berlawanan jarum jam merupakan langkah evaluasi. Dari beberapa tahap penyusunan program, identifikasi masalah merupakan langkah yang paling menentukan. Penetapan masalah seharusnya identik dengan kebutuhan kelompok sasaran (petani). Untuk itu permasalahan yang dihadapi masyarakat harus kita jaring atau kita kumpulkan dengan wawancara atau metode survei. Selanjutnya berbagai masalah yang dihadapi masyarakat yang

cukup banyak kita prioritaskan berdasarkan urgensinya, jumlah sasaran yang merasakannya, atau lokasi masalahnya.

Dalam penyusunan program penyuluhan, masalah dikelompokkan atau dibedakan menjadi:

- Perilaku. Masalah perilaku mencakup masalah yang terkait dengan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap manusia.
- Non perilaku. Masalah non perilaku mencakup masalah yang terkait dengan masalah yang bersifat teknis, ekonomis, sosial dalam masyarakat. Karena kegiatan penyuluhan berusaha mengubah perilaku manusia ke arah yang lebih baik dan semua masalah non perilaku dapat dipecahkan, maka masalah non perilaku yang ada juga harus diubah atau dijabarkan menjadi masalah perilaku.

Evaluasi penyuluhan

Secara rinci kegunaan/manfaat evaluasi penyuluhan dapat dikelompokkan menjadi:

Bagi penyuluh:

- Mengetahui sejauh mana tujuan kegiatan tercapai.
- Mencari bukti apakah seluruh kegiatan telah dilaksanakan seperti yang direncanakan.
- Mengetahui masalah yang muncul/dijumpai.
- Mengukur efektivitas dan efisiensi sistem kerja.
- Menarik simpati para aparat.
- Penyuluh merasa diperhatikan dan tidak dilupakan.
- Melakukan penilaian terhadap kualitas kegiatan penyuluh.
- Penyuluh selalu mawas diri, agar kegiatannya dinilai baik.

Bagi aparat:

- Kebiasaan mengutarakan pendapat berdasar fakta, bukan asumsi, praduga atau intuisi.
- Kebiasaan bekerja sistematis.
- Memperoleh peningkatan pengetahuan dan keterampilan (teknik pengumpulan data, pengukuran yang tepat, dan analisis yang tajam).

Beberapa prinsip yang harus dipegang teguh dalam proses evaluasi antara lain;

- Merupakan bagian integral dari kegiatan perencanaan program.
- Harus memenuhi persyaratan: obyektif, standardizied, gunakan data yang tepat, alat ukur yang tepat dan dipercaya.
- Harus menggunakan alat ukur yang berbeda untuk mengukur tujuan evaluasi yang berbeda pula.
- Harus dinyatakan dalam bentuk: data kuantitatif dan kualitatif.
- Harus efektif dan efisien.

Model Evaluasi Program:

Beberapa model evaluasi program memiliki penekanan yang agak berbeda. Namun demikian semua evaluasi bertujuan untuk merumuskan perbaikan program yang sudah ada. Secara ringkas model evaluasi program disajikan pada tabel berikut.

Tabel 11.1. Beberapa model evaluasi program berdasarkan penekanannya

No	Model	Penekanan
1	Goal-oriented Evaluation	Mengidentifikasi kemajuan (progress) dan efektivitas proses pelaksanaan
2	Decision-oriented Evaluation	Memfasilitasi pengambilan keputusan yang bijak dari pengambil keputusan
3	Transactional Evaluation	Melukiskan proses program dan cakrawala nilai-nilai dari orang-orang kunci
4	Evaluation Research	Memfokuskan pada penjelasan pengaruh program dan pembagian strategi pelaksanaan
5	Goal-free Evaluation	Mengakses pengaruh program yang didasarkan pada kriteria yang ada dalam kerangka konseptual dari program yang dijalankan
6	Adversary Evaluation (pertentangan)	Mencerminkan kasus terbaik dari dua atau lebih alternatif interpretasi terhadap nilai-nilai program

Jenis-jenis Evaluasi :

1) Evaluasi Awal (Pre-evaluation)

Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui kondisi awal sasaran sebelum kegiatan penyuluhan dilakukan. Dari evaluasi ini menggambarkan adanya masalah yang dihadapi oleh sasaran, dan harus dipecahkan atau diselesaikan melalui pemberian materi penyuluhan.

2) Evaluasi Proses (Monitoring)

Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan atau pelaksanaan maupun penyimpangan yang terjadi pada kegiatan, apakah sesuai dengan apa yang direncanakan. Apabila ditemukan adanya penyimpangan, maka seharusnya diluruskan agar tidak terulang lagi.

3) Evaluasi Akhir (Post-evaluation)

Evaluasi ini dilakukan setelah kegiatan selesai serta mengetahui perubahan perilaku yang terjadi pada sasaran, apakah perubahan yang terjadi sesuai dengan tujuan yang telah kita tetapkan. Hasil evaluasi ini akan menjadi pertimbangan bagi penyempurnaan program pada waktu yang akan datang.

Perencanaan akan menghasilkan rencana. Rencana dapat disusun menjadi suatu program. Program merupakan rencana tertulis tentang segala kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu tertentu. Program terdiri dari empat unsur yaitu rumusan keadaan, masalah, tujuan, dan cara mencapai tujuan. Masalah merupakan kesenjangan antara data potensial dan data actual atau kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan, sedangkan tujuan merupakan kondisi atau harapan yang kita inginkan. Masalah di suatu wilayah dapat kita identifikasi dengan memahami data lapangan.

Data yang kita kumpulkan hendaknya bersifat actual, akurat, kategoris, komprehensif, dan representatif. Kesenjangan antara data potensial dan data aktual merupakan masalah yang harus kita pecahkan. Masalah tersebut sering kita identifikasi sebagai masalah yang bersifat teknis dan ekonomis (bersifat non perilaku). Masalah tersebut dapat dipecahkan melalui kegiatan penyuluhan bila kita ubah menjadi masalah perilaku. Evaluasi merupakan tahap untuk menilai sejauhmana pelaksanaan program dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam mengevaluasi suatu program, beberapa prinsip yang harus dipegang teguh antara lain:

- a. merupakan bagian integral dari kegiatan perencanaan program,
- b. harus memenuhi persyaratan: obyektif, standardizied, gunakan data yang tepat, alat ukur yang tepat dan dipercaya,
- c. harus menggunakan alat ukur yang berbeda untuk mengukur tujuan evaluasi yang berbeda pula,
- d. harus dinyatakan dalam bentuk: data kuantitatif dan kualitatif, dan
- e. harus efektif dan efisien.

Evaluasi dapat dilakukan di awal amaupun akhir suatu kegiatan. Evaluasi juga dapat dilakukan selama kegiatan berjalan (monitoring), sehingga kita kenal istilah monitoring dan evaluasi (monev). Tahapan pelaksanaan evaluasi :

- a. Perumusan tujuan evaluasi,
- b. Perumusan indikator dan parameter. Indikator (tolok ukur) adalah penunjuk bagi kita sehingga kita bisa menilai apakah sesuatu sudah sesuai dengan rencana atau belum.
- c. Penetapan metode evaluasi: perancangan evaluasi, penentuan sampel, data yang diperlukan, teknik pengumpulan data, perumusan instrumen uji coba instrumen (ketepatan dan ketelitian atau validitas dan reliabilitas),

- d. Pengukuran indikator/parameter,
- e. Pelaporan.

Soal Latihan:

Tuliskan jawaban B bila pernyataannya benar, dan S bila salah.

1. Dalam penyusunan program kita harus mendasarkan pada data yang terbaru atau data yang bersifat out of date.
2. Suatu program penyuluhan pertanian yang disusun tidak seharusnya dievaluasi.
3. Program penyuluhan disusun dan dilaksanakan oleh penyuluh.
4. Masalah merupakan suatu keadaan atau keinginan yang tidak terpenuhi.
5. Kesenjangan data potensial dan data aktual menunjukkan adanya masalah di suatu wilayah.
6. Evaluasi penyuluhan umumnya hanya dilakukan pada akhir kegiatan saja.
7. Pelaksanaan evaluasi diawali dengan adanya perumusan indikator keberhasilan suatu program.
8. Indikator outcome lebih mengacu pada pengaruh atau dampak yang ditimbulkan oleh adanya suatu kegiatan.
9. Monitoring dapat dilakukan pada tahap pelaksanaan sampai akhir kegiatan
10. Salah satu manfaat adanya evaluasi adalah agar kita belajar bekerja secara sistematis.

Soal untuk didiskusikan:

1. Identifikasi data potensial dan data aktual yang mendukung bagi penyusunan program penyuluhan di wilayah tugas Saudara!
2. Identifikasi atau rumuskan masalah yang ada di wilayah tugas Saudara, bila masalah yang ada bersifat non perilaku, coba dirunut apa penyebab munculnya masalah tersebut yang termasuk masalah perilaku!

Susunlah kuisisioner (instrumen) untuk evaluasi penyuluhan di wilayah kerja Saudara dengan memperhatikan kaidah penskoran.

Modul 12

REVITALISASI PENYULUHAN PERTANIAN

Materi pada modul 12 ini memiliki muatan sebagai berikut :

- **Capaian belajar untuk Kemampuan Bidang Pekerjaan (*Learning Outcome for Occupational Skills*)**

CLO 3/CPMK 3 : Mahasiswa mampu menerapkan teknologi informasi dalam kegiatan penyuluhan pertanian untuk peningkatan pendapatan petani dan kesejahteraan masyarakat

- **Capaian belajar untuk Kemampuan Ketrampilan Umum (*General Occupational Skills*)**

OC /CP-KBP 5 : Mampu berkomunikasi dan bernegosiasi secara efektif dengan pemangku kepentingan dalam pengembangan agribisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mewujudkan agribisnis yang berkelanjutan dan efisien dalam mencapai keberhasilan program penyuluhan pertanian

- **Capaian belajar untuk Kemampuan Ketrampilan Khusus (*Specific Occupational Skills*)**

OC 6/CP-KBP 6 : Mampu menggunakan metode dan merumuskan strategi penggunaan sumberdaya untuk meningkatkan kapasitas diri dan masyarakat dalam menghadapi tantangan pengembangan agribisnis ke depan.

OC 7/CP-KBP 7 : Mampu mengkomunikasikan pendekatan dan tahapan pemberdayaan masyarakat untuk keberhasilan penyuluhan pertanian secara berkelanjutan

1. Kebijakan dalam Penyuluhan Pertanian

Pembangunan pertanian merupakan salah satu pendukung utama pertumbuhan ekonomi nasional. Indonesia dengan potensi sumberdaya alam yang sangat besar mempunyai kepentingan yang sangat tinggi untuk mengelola sumberdaya alam sebagaimana layaknya suatu negara agraris.

Kesalahan dalam membuat kebijakan dan mengeksekusi kebijakan akan berdampak sangat besar bagi kemajuan bangsa. Oleh karena itu diperlukan kajian yang mendalam dan komprehensif dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan nasional.

Banyak aspek yang terkandung dalam pembangunan pertanian, baik dari segi potensi sumberdaya alam, situasi dan kondisi lingkungan global, serta kebijakan yang dilaksanakan. Kebijakan pembangunan pertanian antara lain tercermin dalam kebijakan penyuluhan pertanian.

Penyuluhan pertanian sebagai ujung tombak pembangunan pertanian yang bersentuhan langsung dengan pelaku pembangunan pertanian, menjadi penting dalam menggerakkan pembangunan pertanian. Penyuluhan pertanian (termasuk juga perikanan dan kehutanan), adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup (Undang Undang RI Nomor 16 tahun 2006).

Dalam pengertian yang lebih operasional, penyuluhan pertanian dimaknai sebagai pemberdayaan petani dan pelaku usaha pertanian lain dengan sistem pendidikan non formal di bidang pertanian agar memiliki kompetensi di bidang ilmu dan teknologi, berwirausaha, manajerial, bekerja dalam tim, berorganisasi, bermitra usaha, dan memiliki integritas moral yang tinggi sebagai pengusaha pertanian yang meliputi usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan, serta mampu menolong dirinya sendiri, baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik, sehingga peningkatan pendapatan dan kesejahteraan mereka dapat dicapai (Badan Pengembangan SDM Pertanian, 2004).

Pada prinsipnya penyuluhan pertanian ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, yaitu agar dapat bertani lebih baik (*better farming*), berusahatani lebih baik (*better business*), hidup lebih sejahtera (*better living*), masyarakat lebih baik (*better community*), dan kelestarian lingkungan lebih terjaga (*better environment*).

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut tentu diperlukan upaya-upaya konkrit dari Pemerintah, terutama tentunya dari aspek penyediaan prasarana dan sarana pertanian, fasilitas-fasilitas pendukung, penyuluhan pertanian, dan regulasi yang memperkuat upaya tercapainya berbagai tujuan penyuluhan pertanian dan tujuan pembangunan pertanian.

2. Peran Penyuluh Pertanian Swakarsa

Penyuluh pertanian merupakan pemegang ujung tombak pembangunan pertanian. Tercapainya tujuan-tujuan penyuluhan pertanian dan pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh para Penyuluh Pertanian.

Oleh karena itu jumlah penyuluh pertanian harus mencukupi dan kompetensinya juga terpenuhi. Kondisi sekarang ini penyuluh pertanian sangat terbatas. Hal ini disebabkan karena terbatasnya dana Pemerintah untuk mengangkat tenaga penyuluh pertanian, sementara penyuluh yang ada banyak yang pensiun dan juga banyak yang dimutasi menjadi pegawai dinas diluar fungsi Penyuluh.

Dengan kondisi keterbatasan penyuluh pertanian, maka upaya yang perlu dilakukan adalah dengan mengangkat penyuluh swakarsa atau penyuluh swadaya. Ini adalah penyuluh yang berasal dari ketua kelompok tani, petani andalan, atau petani maju, yang tidak diangkat sebagai PNS atau ASN, jadi tidak digaji Pemerintah.

Penyuluh Pertanian Swakarsa adalah petani dan pelaku usaha pertanian lain yang mempunyai usaha pertanian hulu, usahatani, usaha pertanian hilir dan/atau usaha jasa pertanian, dengan kesadarannya sendiri, mau, mampu dan mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pengalaman dan keberhasilan usahanya kepada petani dan pelaku usaha pertanian lain sehingga usahanya dan organisasinya berkembang serta taraf hidupnya meningkat (Badan Pengembangan SDM Pertanian, 2004).

Senada dengan Penyuluh Pertanian PNS, Penyuluh Swakarsa mempunyai fungsi yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sebagai pelopor atau inovator yang memberikan (menawarkan) hal-hal baru yang lebih baik bagi kehidupan para petani dan pelaku usaha pertanian lain.
2. Sebagai motivator, yaitu mendorong dan menumbuh-kembangkan semangat berusaha para petani dan pelaku usaha pertanian lain.
3. Sebagai katalisator, yaitu menjembatani dan mempercepat kemajuan usaha para petani dan pelaku usaha pertanian lain.
4. Sebagai fasilitator, yaitu memberi kesempatan, membukakan peluang-peluang bagi kemajuan kehidupan para petani dan pelaku usaha pertanian lain.
5. Sebagai pembimbing dalam penerapan dan pengembangan teknologi serta membantu dan mengikhtikarkan kemudahan-kemudahan bagi petani dan pelaku usaha pertanian lain.

Sebagaimana layaknya penyuluh pertanian, Penyuluh Pertanian Swakarsa mempunyai peran antara lain sebagai berikut :

1. Menyebarkan atau menyampaikan informasi kepada petani dan pelaku usaha pertanian lain.
2. Menyampaikan rekomendasi/anjuran kepada petani dan pelaku usaha pertanian lain.
3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta membentuk sikap positif petani dan pelaku usaha pertanian lain terhadap teknologi baru.
4. Membimbing penerapan teknologi kepada petani dan pelaku usaha pertanian lain.

5. Mengembangkan kepemimpinan dan kemandirian melalui peningkatan swadaya dan swakarsa petani dan pelaku usaha pertanian lain.

Sesuai dengan fungsi dan perannya, Penyuluh Pertanian Swakarsa seharusnya mempunyai beberapa kompetensi; antara lain:

1. Mempunyai pengalaman dan wawasan yang cukup,
2. Mempunyai usaha tani yang lebih maju dan berhasil,
3. Mempunyai sifat kepemimpinan, sehingga dihormati dan disegani petani lainnya, dan
4. Mempunyai kemauan membantu dan membina petani di sekitarnya.

3. Petani Milenial Sebagai Penyuluh Pertanian Swakarsa

Petani milenial dimaknai sebagai petani muda yang berumur mulai 19 tahun hingga 39 tahun. Meskipun ada batasan formal berupa umur, namun demikian makna yang lebih luas dan substantif adalah semua petani yang berjiwa dan semangat muda, tanggap terhadap perkembangan zaman, dan adaptif terhadap teknologi digital. Dengan demikian umur sebetulnya bukan merupakan kendala atau batasan mutlak dari petani milenial (Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, 2019).

Era sekarang adalah era teknologi digital, dimana teknologi informasi berkembang sangat cepat dan dinamis. Oleh karena itu diperlukan orang-orang yang responsif terhadap perkembangan teknologi, dan ini biasanya ranahnya para pemuda-pemudi, termasuk yang ada di perdesaan, tentunya juga para petani dan pelaku usaha pertanian lainnya.

Era teknologi digital juga merambah ke bisnis pertanian. sekarang ini pemasaran produk-produk pertanian sudah mulai dengan sistem online. Ini adalah peluang petani milenial di perdesaan untuk memanfaatkan teknologi digital dengan sistem online. Pasar menjadi terbuka lebar, tidak hanya lokal dan regional, bahkan hingga internasional.

Peran petani milenial diperlukan sebagai penyuluh swakarsa, terutama yang terkait pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi digital di perdesaan. Mereka termasuk golongan yang melek teknologi canggih, berbeda dengan penyuluh PNS yang biasanya sudah tua dan kurang tanggap terhadap teknologi digital. Di era glonalisasi dimana teknologi informasi dan digital menjadi penting, maka peran petani milenial sebagai penyuluh swakarsa menjadi sangat penting.

Selain peran penting petani milenial dalam memanfaatkan teknologi informasi dan digital, petani milenial diharapkan memberikan semangat baru dalam membuka lapangan kerja baru terutama yang berbasis teknologi informasi dan digital, menumbuhkan wirausaha muda pertanian, menekan urbanisasi dengan membangun desa, dan tentunya dampak tidak langsung lainnya adalah mengurangi kemiskinan di desa dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa.

4. Revitalisasi Penyuluhan Pertanian

Sejak dikeluarkannya Undang Undang RI Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, upaya untuk merevitalisasi penyuluhan mulai dilakukan. Upaya ini banyak difokuskan pada penataan kelembagaan penyuluhan di tingkat birokrasi, yaitu dengan dibentuknya lembaga Pemerintah yang mengelola penyuluh, baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Penyuluh Pertanian ditempatkan di Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian (Bapeluh) di Kabupaten/Kota dan Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian (Bakorluh) di Provinsi.

Tujuan pembentukan lembaga penyuluhan ini sebetulnya untuk lebih mengkoordinasikan penyuluh di dalam satu lembaga, tidak terpisah-pisah di Dinas-Dinas masing-masing (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Kehutanan); namun demikian perkembangan di lapangan menjadi lain. Banyak terjadi friksi dan “perpecahan” antara Bakorluh/Bapeluh dengan Dinas-Dinas yang membidangi pertanian. Mereka jalan sendiri-sendiri, tidak bersinergi, sehingga antara program Dinas dan fungsi penyuluhannya tidak bersinergi, yang berakibat tujuan-tujuan pembangunan pertanian menjadi tidak tercapai.

Pada akhirnya Pemerintah membubarkan Bakorluh dan Bapeluh dan mengembalikan para Penyuluh ke Dinas-Dinas. Sementara karena keterbatasan dana Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Dinas-Dinas yang dibentuk juga berragam dan penempatan para penyuluh serta alokasinya menjadi masalah tersendiri karena banyak yang tidak proporsional. Ada Dinas yang mendapatkan penyuluh banyak, sementara Dinas yang lain tidak kebagian atau hanya mendapatkan sedikit. Melihat kondisi seperti di atas, sudah sewajarnya fungsi-fungsi penyuluhan pertanian perlu direvitalisasi kembali agar pembangunan pertanian kembali tetap dalam arah yang benar mewujudkan tujuan mencapai kesejahteraan petani.

Oleh karena itu peran revitalisasi menjadi penting, yaitu menata kembali fungsi dan tujuan penyuluhan pertanian. Revitalisasi penyuluhan pertanian secara umum mencakup: a) penataan kelembagaan penyuluhan pertanian, b) peningkatan kuantitas dan kualitas penyuluh pertanian, c) peningkatan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian, dan d) peningkatan kepemimpinan dan kelembagaan petani (Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian, 2007).

Dalam rangka melanjutkan revitalisasi penyuluhan pertanian, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian sekarang ini sedang menyusun konsep Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian, yaitu mencakup tahapan sebagai berikut :

1. Penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian, terutama di tingkat Kecamatan (Balai Penyuluhan Pertanian), dan tingkat Desa (Pos Penyuluhan Desa).

2. Peningkatan kompetensi penyuluh dan penumbuhan penyuluh swakarsa/swadaya.
3. Penguatan kelembagaan petani, terutama dengan penumbuhan dan pengembangan kelompok tani, gabungan kelompok tani, koperasi tani.
4. Pengembangan sistem penyuluhan berbasis cyber dan multimedia.
5. Peningkatan diseminasi dan adopsi teknologi dengan penguatan Research and Extension Linkage (REL) dan adaptasi teknologi spesifik lokasi di Balai Penyuluhan Pertanian (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, 2019).

Kesimpulan

Penyuluhan pertanian yang merupakan ujung tombak pembangunan pertanian mengalami pasang surut mengikuti perkembangan zaman, kebijakan Pemerintah, dan kondisi lingkungan. Kebijakan di bidang penyuluhan pertanian yang kurang tepat mengakibatkan terhambatnya upaya mewujudkan tujuan pembangunan pertanian, bahkan terkadang juga mereduksi capaian-capaian sebelumnya. Kebijakan Otonomi Daerah juga mengakibatkan makin beragamnya kondisi dan kebijakan yang dijalankan daerah, sehingga terjadi keragaman pencapaian hasil-hasil pembangunan pertanian.

Bertolak dari kondisi di atas, maka perlu disusun kembali konsep revitalisasi penyuluhan pertanian, dengan rincian kebijakan sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu menyusun Kebijakan Umum Penyuluhan Pertanian yang memayungi strategi dan kebijakan operasional penyuluhan pertanian yang nantinya dipakai sebagai payung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan dan langkah operasional kegiatan penyuluhan pertanian.
2. Penataan Kelembagaan Penyuluhan dan Penyuluh Pertanian juga harus dirumuskan secara nasional sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam menata organisasi dan alokasi penyuluh pertanian dengan prosedur dan pembagian tugas secara komprehensif.
3. Perlu penguatan SDM Pertanian yang lebih jelas arahnya, baik untuk petani maupun aparat pertanian. Penguatan Penyuluh, Penyuluh Swadaya/Swakarsa dan Petani Milenial menjadi prioritas. Penyuluh menjadi tulang punggung kegiatan penyuluhan sehingga perlu penguatan Penyuluh Swakarsa termasuk prioritasnya Petani Milenial yang berjiwa pemimpin sebagai Penyuluh Swakarsa.
4. Perlu penguatan kelembagaan penyuluhan di lapangan (BPP dan Pos Penyuluhan Desa) dengan penyediaan anggaran yang memadai, mensinergikan dengan kegiatan Dana Desa, dan menggerakkan tokoh-tokoh masyarakat, aparat Desa, dan Penyuluh Pertanian (PNS, Penyuluh Swakarsa, Penyuluh Milenial).
5. Memanfaatkan teknologi informasi, teknologi digital, dan agribisnis sistem online, dengan membekali Penyuluh Pertanian (PNS, Penyuluh Swakarsa,

Penyuluh Milenial) dengan iptek berbasis teknologi informasi. Selanjutnya dirintis usaha-usaha berorientasi agribisnis dengan sistem online (misalnya pemasaran produk dan jasa pertanian menggunakan sistem online).

Soal Latihan :

Dari materi yang telah dipelajari pada modul 12 ini, jelaskan dan uraikan mengapa revitalisasi penyuluhan pertanian ini harus dilakukan, apa latar belakang dan apa manfaatnya.

Modul 13

SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN DI ERA OTONOMI DAERAH

Materi pada modul 13 ini memiliki muatan sebagai berikut :

- **Capaian belajar untuk Kemampuan Bidang Pekerjaan (*Learning Outcome for Occupational Skills*)**

CLO 3/CPMK 3 : Mahasiswa mampu menerapkan teknologi informasi dalam kegiatan penyuluhan pertanian untuk peningkatan pendapatan petani dan kesejahteraan masyarakat

- **Capaian belajar untuk Kemampuan Ketrampilan Umum (*General Occupational Skills*)**

OC /CP-KBP 4 : Mampu mengaplikasikan dan memanfaatkan IPTEKS dalam penyelesaian masalah pada bidang agribisnis yang adaptif terhadap perubahan lingkungan dengan mengaplikasikan model penyuluhan pertanian.

- **Capaian belajar untuk Kemampuan Ketrampilan Khusus (*Specific Occupational Skills*)**

OC 6/CP-KBP 6 : Mampu menggunakan metode dan merumuskan strategi penggunaan sumberdaya untuk meningkatkan kapasitas diri dan masyarakat dalam menghadapi tantangan pengembangan agribisnis ke depan.

OC 7/CP-KBP 7 : Mampu mengkomunikasikan pendekatan dan tahapan pemberdayaan masyarakat untuk keberhasilan penyuluhan pertanian secara berkelanjutan

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, otoritas penyuluhan pertanian juga telah didelegasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tingkat kabupaten. Meskipun masih perlu didukung dengan data-data empiris, kecenderungan umum menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah kurang pro terhadap kegiatan terkait penyuluhan pertanian. Kinerja dan aktivitas penyuluhan pertanian yang menurun antara lain disebabkan oleh perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dengan daerah dan antara

eksekutif dengan legislatif terhadap arti penting dan peran penyuluhan pertanian, keterbatasan alokasi anggaran untuk kegiatan penyuluhan pertanian dari pemerintah daerah, ketersediaan materi informasi pertanian terbatas, penurunan kapasitas dan kemampuan manajerial dari penyuluh serta penyuluh pertanian kurang aktif untuk mengunjungi petani dan kelompoknya, kunjungan lebih banyak dikaitkan dengan proyek.

Seiring perubahan global dan isu lingkungan strategis, layanan penyuluhan pertanian juga mengalami perubahan-perubahan. Subejo (2002) mengindikasikan bahwa transformasi penyuluhan pertanian sedang berlangsung di seluruh dunia. Perubahan terjadi pada organisasi, sistem penugasan, dan praktek sistem penyuluhan pertanian dan pedesaan. Tantangan untuk mengintrodusir suatu sistem institusi baru yang lebih sesuai menjadi pertimbangan dalam mereformasi sistem penyuluhan pertanian. Jika hal tersebut dikesampingkan maka sistem pelayanan penyuluhan akan menjadi suatu yang usang dan ketinggalan.

Salah satu isu utama dalam penyuluhan adalah desentralisasi. Searah dengan semangat desentralisasi, kebijakan nasional yang tertuang dalam UU No. 22/1999 yang direvisi dengan UU No. 32/2004 telah memberikan ruang gerak desentralisasi melalui kebijakan "otonomi daerah". Desentralisasi dipandang penting karena membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat sipil dalam memantau kebijakan pemerintah. Akhmadi (2004) menyatakan bahwa kewenangan di bidang penyuluhan pertanian sejak tahun 2001 dilimpahkan kepada pemerintah daerah agar daerah mampu meningkatkan kinerja penyuluhan pertanian. Melalui otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kinerja penyuluhan pertanian.

Terkait dengan hal tersebut, Saragih (2005) berpendapat bahwa dengan adanya otonomi daerah, telah diberikan kebebasan kepada *regional agricultural services* untuk mengambil inisiatif dalam mendisain kebijakan spesifik lokal, sementara itu pemerintah pusat melalui Menteri Pertanian bertanggungjawab hanya pada penyusunan dan manajemen strategi, kebijakan nasional dan standar-standar. Dengan dukungan anggaran yang besar, pemerintah lokal memiliki lebih banyak sumber daya serta kebebasan yang lebih besar untuk mengembangkan kebijakan spesifik lokal dan teknologi lokal melalui kajian/penelitian di lembaga penelitian lokalnya. Dengan otonomi daerah ini, tanggung jawab pembangunan pertanian dalam kendali kepala daerah bukan lagi pegawai/dinas pertanian.

Selain dampak positif dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian melalui kebijakan otonomi daerah, namun juga ada beberapa kendala atau dampak negatifnya. Mawardi (2004) mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh penyuluhan pertanian era otonomi daerah :

- 1) adanya perbedaan pandangan antara pemerintah daerah dan anggota DPRD dalam memahami penyuluhan pertanian dan perannya dalam pembangunan pertanian,

- 2) kecilnya alokasi anggaran pemerintah daerah untuk kegiatan penyuluhan pertanian,
- 3) ketersediaan dan dukungan informasi pertanian sangat terbatas,
- 4) makin merosotnya kemampuan manajerial penyuluh.

Penelitian World Bank di beberapa pedesaan Indonesia (2000) melaporkan persepsi petani dengan kepemilikan modal kecil merasa telah ditinggalkan oleh pihak yang berkompeten dalam pertanian. Sekitar tahun 1980-an ketika sedang digiatkan usaha untuk peningkatan produksi padi secara nasional, penyuluh pertanian datang ke dusun secara periodik dan memberi anjuran terkait dengan kebutuhan petani. Namun saat ini penyuluh jarang berkunjung ke dusun tersebut. Petani merasa bahwa petugas pertanian tidak lagi membantunya dalam menemukan penyelesaian masalah-masalah yang muncul secara praktis.

Memaknai "Privatisasi dan Demokratisasi" Penyuluhan Pertanian World Bank (2002) menyimpulkan bahwa penyuluhan pertanian secara substansial telah meningkatkan tingkat adopsi teknologi, tingkat kesadaran dan tingkat produktivitas petani. Kontribusi penyuluhan tidak hanya untuk diseminasi teknologi yang sophisticated, namun juga information sharing untuk teknologi pedesaan (tercakup di dalamnya inovasi sederhana untuk petani miskin dan tidak dapat baca tulis) telah meningkatkan produktivitas. Meskipun di berbagai negara penyuluhan pertanian telah dianggap memberikan kesuksesan dalam pembangunan pertanian, banyak pihak mengkritisi kinerja *public extension service*. Institusi tersebut dikritisi karena kurang efisien, kurang efektif dan penargetan lemah. World Bank (2002) melalui evaluasi pada proyek-proyek penyuluhan mengindikasikan bahwa penyuluhan belum memenuhi orientasi dan kepentingan client, kapasitas sumberdaya manusia dan komitmen pemerintah lemah.

Beberapa masalah yang dihadapi kadangkala berupa *external factors* seperti lemahnya komitmen politik dan ketergantungan pada *complementary policies*. Problem lain yang muncul, kadangkala kegiatan penyuluhan pertanian memiliki akuntabilitas yang rendah serta keterbatasan untuk mengelola sistem penyuluhan yang luas dan kompleks. Penyuluhan pertanian Indonesia nampaknya menghadapi problem dan kondisi yang mirip seperti hasil evaluasi dari World Bank.

Beberapa alternatif yang dapat dilakukan sebagai bagian dari reformasi institusi untuk meningkatkan pelayanan penyuluhan sebagaimana yang direkomendasikan World Bank (2002) mencakup: (1) desentralisasi, (2) privatisasi, dan (3) pemisahan funding dari execution. Suatu pemikiran rasional tentang perlunya penyediaan layanan dari sektor swasta dalam penyuluhan pertanian didasarkan pada suatu asumsi yang kuat bahwa hal itu akan meningkatkan efisiensi dan daya kompetisi melalui private market, efisiensi akan memberikan kontribusi pertumbuhan GNP.

Argumentasi lain tentang privatisasi penyuluhan menurut Rivera (1997) yaitu :

- 1) pelayanan dan penyampaian lebih efisien,
- 2) menurunkan anggaran belanja pemerintah, dan
- 3) pelayanan dengan kualitas tinggi.

Kidd, et al. (2000) menyatakan umumnya sektor private terbebas dari sistem administratif/birokrasi dan hambatan kepentingan politik. Hal ini mengimplikasikan suatu kemampuan yang cukup pada sektor private untuk mengalokasikan sumberdaya dengan lebih efisien. Privatisasi mungkin juga memiliki beberapa kelemahan yaitu akses terhadap sumber penyuluhan menjadi tidak sama karena keberagaman agency dan kesulitan berkoordinasi dengan kelompok luar dan departemen pemerintah. Agen penyuluhan pertanian swasta akan lebih berorientasi pada komersialisasi dan kurang bertanggungjawab terhadap arah kebijakan yang dibuat pemerintah.

Menurut Rivera (1997) selama ini telah terjadi *misleading* dalam pemahaman "privatization of agricultural extension. Pada sebagian besar kasus, pemerintah tidak sepenuhnya mem-privatisasi-kan pelayanan penyuluhan pertaniannya. Dalam pengertian aslinya, privatization merupakan suatu transfer penuh dalam hal kepemilikan (umumnya dengan cara penjualan) dari pemerintah kepada lembaga/pihak swasta, di mana pihak tersebut selanjutnya akan menanggung seluruh biaya dan menerima seluruh keuntungan.

Di dalam kasus penyuluhan, pemerintah dapat melakukan beberapa langkah strategis antara lain:

- 1) mengenalkan komersialisasi pelayanan dengan tetap menguasai lembaga penyuluhannya,
- 2) memindahkan pelayanan penyuluhan pada private dengan tetap memberikan basis pendanaan, dan
- 3) mencari alternatif biaya untuk membayar layanan penyuluhan komersial.

Privatisasi penyuluhan digunakan dalam arti yang luas yaitu pengenalan dan pemberian kesempatan yang lebih luas pada pihak swasta untuk berpartisipasi, yang tidak perlu berarti transfer seluruh aset pemerintah kepada sektor swasta (baik profit dan atau non-profit institutions). Dalam menentukan jenis penyuluhan mana yang akan tetap ditangani oleh agen pemerintah dan mana yang akan dilakukan oleh sektor private, Rivera (1997) memberikan beberapa rambu-rambu antara lain ketika penyuluhan disampaikan secara private, ini menggambarkan suatu keputusan yang komersial sedangkan ketika penyuluhan disampaikan secara public, ini merupakan suatu keputusan politik atau birokrasi. Dalam menentukan apakah perlu dilakukan privatisasi atau tidak, ini penting diidentifikasi dan ditetapkan apakah program itu didisain untuk membantu enterprise yang komersial atau diperuntukkan bagi petani skala kecil dan pembangunan pedesaan.

Salah satu penyuluhan pertanian berkualitas dan tepat sasaran yang direkomendasikan oleh World Bank (2002) adalah melalui competitive grant fund and contract (CGF's). Penyuluh bekerjasama dengan peneliti dapat membuat suatu usulan kegiatan yang komprehensif dan terpadu dalam penyebarluasan suatu teknologi baru kepada petani dengan dukungan dana CGF's untuk periode tertentu misalnya proposal yang berkualitas dan mampu memberikan return tinggi diberikan kontrak selama tiga sampai lima tahun. Alternatif sumber pendanaan layanan penyuluhan pertanian dapat berasal dari anggaran pemerintah, private enterprise, nongovernment organizations (NGO's) atau voluntary fund dari sumber lainnya.

Farrington (1995) menengarai suatu pergerakan baru menuju penyediaan dana untuk petani dengan income rendah untuk melakukan sistem kontrak layanan penyuluhan pertanian dari pemerintah dan NGO's melalui suatu perancangan terpadu. Alex, G, et al. (2002) mendesain pembagian peran antara public dan private dalam penyediaan sumber dana dan pelayanan penyuluhan pertanian yang secara rinci dapat diperjelas dengan suatu matrik seperti disajikan pada Gambar 13.1.

		Sumber Pendanaan		
		Public	Private (Petani)	Private (Lainya)
Penyedia Layanan	Public	• Penyuluhan konvensional	• <i>Fee</i> untuk layanan penyuluhan	• Kontrak dengan <i>public institutions</i>
		• Subsidi untuk penyedia layanan penyuluhan	• Layanan konsultasi yang komersial	• Informasi disediakan dengan penjualan input
	Private	• Kontrak dengan pendanaan publik untuk layanan penyuluhan	• Penjualan majalah, surat kabar, informasi tercetak	• Penyuluhan disediakan oleh kontraktor
				• Iklan di surat kabar, radio, TV dan majalah

Gambar 13.1.

Mendesain pembagian peran antara public dan private dalam penyediaan sumber dana dan pelayanan penyuluhan

Suatu model yang dapat dicoba untuk dikembangkan dalam privatisasi sistem penyuluhan baru adalah sistem kontrak. Qamar (2002) menyarankan dengan sistem kontrak penyuluhan, pemerintah dapat memberikan kontrak kepada pihak lain untuk menyelenggarakan dan memberikan layanan penyuluhan pertanian yang spesifik dalam area yang spesifik dan periode yang spesifik pula. Sistem lain yang telah berkembang adalah sistem vouchers. Pengalaman Chile membuktikan bahwa sistem ini dapat dikembangkan berkat kerjasama pemerintah dengan sektor private. Rivera (1997) menyatakan beberapa negara telah mengganti sistem layanan penyuluhan dengan sistem

vouchers yang didistribusikan oleh petugas pemerintah kepada petani atau kelompok yang dapat digunakan untuk menyewa *private extension consultants*.

Di negara-negara maju serta sebagian negara berkembang yang memiliki sektor pertanian komersial dengan kepemilikan aset yang relatif besar sudah mulai mengembangkan sistem layanan penyuluhan murni komersial (*commercial extension services*). Petani komersial akan menanggung beban biaya layanan. Layanan informasi tentang teknologi baru yang disampaikan melalui penyuluhan pertanian mulai dipandang sebagai salah satu input dalam sistem produksi pertanian sehingga cukup rasional jika penggunaannya menanggung seluruh atau sebagian besar biaya input tersebut yang dalam hal ini layanan penyuluhan.

Pembagian peran serta peluang kontribusi dari berbagai pihak dalam penyuluhan sebenarnya juga merupakan wujud demokratisasi penyuluhan pertanian. Hal ini mengindikasikan tidak terjadi monopoli baik dalam hal kebijakan, pedanaan serta layanan penyuluhan pertanian. Stakeholders terkait memiliki peluang dan ruang gerak partisipasi yang cukup dalam proses penyuluhan pertanian.

Berkaitan dengan isu demokratisasi dan privatisasi penyuluhan pertanian, bagaimanapun juga peran agen/penyuluh pemerintah tetap penting. Kidd, et al. (2000) menyatakan bahwa *capacity building* pada penyuluh pertanian baik spesialis maupun penyuluh lapangan akan tetap menjadi investasi yang penting bagi sektor public, secara khusus di dalam masa transisi perpindahan menuju peran sektor private yang lebih efisien dan memiliki responsibilitas tinggi. Hal ini dapat mencakup skema untuk membantu pihak *private agricultural advisors* agar dapat establish atau mendayagunakan sebagian *public resources*. Perhimpunan advisor profesional dapat memberikan suatu kontribusi untuk *quality control* bagi sistem penyuluhan dalam pelaksanaan kerangka sistem pengaturan.

Secara umum peranan petugas penyuluhan pertanian lapangan sebagai sumber informasi utama dalam penyebaran teknologi baru pertanian mulai menurun. Dengan semakin berkembangnya *private enterprise extension* dan *information technology system (IT)* maka terjadi pergeseran peran sebagai sumber utama informasi tentang teknologi baru.

Farrington (1995) membuktikan bahwa sumber informasi utama dalam penyebaran teknologi baru pertanian dari interpersonal adalah petani lain (39%) dan kontak tani (31%), sedangkan peranan petugas penyuluh lapangan kurang dari 10 persen. Sumber utama dari mass media adalah surat kabar (29%) dan *private broadcasting* (26%).

Phelan (1995) melaporkan studi di Irlandia menunjukkan bahwa surat kabar, tetangga serta teman dekat petani merupakan sumber informasi yang terpenting dalam penyebaran teknologi baru pertanian bagi keluarga tani. Walaupun masih terbatas, beberapa hasil studi tersebut menunjukkan suatu arah perubahan baru dalam pembagian peran antara public service dengan private. Dominasi layanan penyuluhan pertanian yang sering terkait dengan kepentingan politik dan birokrasi oleh agen sektor public mulai berkurang.

Meskipun secara formal belum diakui, sebenarnya embrio privatisasi penyuluhan sudah mulai muncul sungguhpun di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir.

Berkembangnya sistem partnership pada layanan technical service dalam agribisnis komoditas tertentu di beberapa daerah antara lain komoditi jagung, melon, semangka, kentang, dan hortikultura lainnya serta ayam potong dan sapi perah telah memberikan fakta empiris adanya semangat dan praktek privatisasi penyuluhan. Implementasi privatisasi dalam arti khusus untuk penyuluhan pertanian di Indonesia nampaknya memiliki prospek yang cukup baik di masa-masa mendatang. Privatisasi penyuluhan memungkinkan iklim kompetisi yang sehat dalam pelayanan penyuluhan pertanian antara sektor public dan private.

Keunggulan penyuluhan private yang umumnya berorientasi profit antara lain penggunaan media dan teknik penyuluhan yang lebih menarik, kemampuan technical assistant yang tinggi. Sebagai ilustrasi sederhana yaitu sekelompok penyuluh private dengan technical advisor-nya datang ke kelompok tani dengan membawa paket video, sampel sarana produksi serta alat peraga yang menarik, menjelaskan tentang inovasi terkini dalam komoditas tertentu mulai dari prospek, teknik produksi serta kendalanya, kemudian dilanjutkan diskusi informal serta kalau memungkinkan ada direct advisory di lahan petani. Setelah itu dilakukan demonstrasi plot yang bisa melibatkan petani sehingga petani bisa mempraktekkan dan mengevaluasi prospek komoditi yang ditawarkan. Tidak cukup sampai disitu, advisory dan fasilitasi masih dilanjutkan dengan penyediaan sarana produksi serta penjualan produk petani yang dalam beberapa kasus sudah diformalkan dalam kontrak untuk periode tertentu.

Sulaiman dan Suresh (2005) mendasarkan temuan privatisasi penyuluhan di India, melaporkan bahwa salah satu keunggulan penyuluhan sektor private adalah penyediaan akses pada dua sisi yaitu pasar input dan output yang dikombinasikan dengan bimbingan dan konsultasi yang tepat waktu. Beberapa keunggulan penyuluhan sektor private tersebut juga menjadi pelajaran berharga bagi sektor public untuk terus meningkatkan kapasitas staf lapangannya sehingga tetap mampu menjadi alternatif yang dipilih petani untuk memberikan layanan penyuluhan. Bagaimanapun juga dengan mempertimbangkan berbagai hal, nampaknya penyuluh sektor public tetap memainkan peran yang penting dan strategis.

Dengan mempertimbangkan tingkat profitabilitas dan harga produk komoditas pertanian, pada komoditas yang memiliki profitabilitas tinggi ada kecenderungan dapat dilayani oleh penyuluh dari sektor private karena client dimungkinkan menanggung sebagian dan atau seluruh biaya layanan penyuluhan, namun untuk komoditas dengan profitabilitas rendah seperti padi dan ketela dengan luas perusahaan yang rata-rata kecil tetap perlu mendapat layanan penyuluhan dari sektor public yang tanpa biaya. Implikasi strategis privatisasi penyuluhan pertanian dalam pembuatan kebijakan adalah menciptakan iklim kondusif agar tercipta suatu situasi di mana sektor public

menjadi pemeran utama dan memiliki fokus untuk bertanggungjawab sebagai suatu agen pengkoordinasi.

Rivera (1997) memberikan rekomendasi tentang implikasi privatisasi penyuluhan pertanian yang mungkin juga dapat diterapkan di Indonesia yaitu:

- 1) public sector dapat mengidentifikasi dan memberikan layanan pada audience yang tidak dapat terlayani oleh sektor private,
- 2) mengkoordinasikan berbagai penyedia layanan penyuluhan pertanian,
- 3) sebagai acuan akhir atau penengah pada conflicting information,
- 4) menjamin akuntabilitas baik layanan yang diberikan oleh public maupun sektor private, dan
- 5) memfasilitasi operasi yang kompleks melalui pengaturan dan penyediaan informasi.

Isu privatisasi serta demokratisasi dengan pemaknaan yang khas pada penyuluhan pertanian nampaknya juga menjadi salah satu materi penting yang diangkat dalam bahasan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang saat ini masih dalam pembahasan intensif antara lembaga eksekutif, legislatif serta stakeholders terkait. Nampaknya pembagian peran antara sektor publik dan private sudah menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pemberian layanan penyuluhan pertanian di masa-masa yang akan datang. Meskipun dalam pasal-pasal yang membahas hal tersebut masih sangat abstrak serta nampaknya belum menyentuh substansi pembagian peran yang serasi dalam berbagai hal seperti kelembagaan, materi, sistem delivery, pendanaan, dll.

Strategi penyuluhan pertanian modern di Indonesia nampaknya perlu diorientasikan pada penerapan "*segmented client oriented approach*." Perlu dilakukan perubahan mindset dari birokrasi pusat dan lokal, hal ini seharusnya juga perlu terus didorong sehingga mereka menjadi lebih pro terhadap kebijakan penyuluhan pertanian. Program yang perlu dikembangkan antara lain pendidikan tentang arti penting penyuluhan dalam pembangunan pertanian dan kesejahteraan masyarakat baik terhadap birokrat, politisi serta legislatif yang memiliki otoritas kuat dalam membuat kebijakan terkait dengan penyuluhan pertanian.

Layanan jasa penyuluhan pertanian seharusnya mampu menunjukkan akan manfaat program kepada pemerintah daerah dengan menunjukkan dampak positif yang akan diperoleh dengan adanya aktivitas penyuluhan. Untuk mendukung hal tersebut serta dalam rangka menyikapi tuntutan global, para petani seharusnya juga mulai dididik dalam hal isu-isu yang terkait dengan globalisasi dan liberalisasi perdagangan termasuk di dalamnya produk pertanian yang secara cepat atau lambat akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat petani.

Penyuluhan pertanian bukanlah suatu hal yang bisa ditangani secara mandiri namun memerlukan keterkaitan dan kerjasama antar lembaga, bukan hanya peneliti dan penyuluh namun juga antara petugas penyuluh dengan

pelaku bisnis pertanian lainnya seperti pelaku pemasaran, transportasi, penyimpanan serta institusi terkait dengan pembangunan pedesaan.

Kesimpulan

Penyuluhan pertanian sebagai salah satu pilar utama pembangunan pertanian di Indonesia saat ini sedang menghadapi berbagai isu strategis antara lain desentralisasi, liberalisasi dan demokratisasi serta privatisasi. Terkait dengan hal tersebut, sangat diperlukan kajian-kajian yang mendalam sehingga dapat dirumuskan strategi baru penyuluhan pertanian yang tetap memberikan komitmen kuat dan orientasi untuk pelayanan penyuluhan pertanian yang terbaik bagi clientnya. Era otonomi daerah nampaknya memiliki prospek yang baik bagi pengembangan penyuluhan pertanian. Meskipun beberapa indikasi empiris menunjukkan terdapat beberapa kelemahan dalam operasionalisasi penyuluhan pertanian, sebenarnya peluang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyuluhan pertanian cukup besar.

Diperlukan penyamaan persepsi antara eksekutif dan legislatif lokal tentang peran dan kontribusi penyuluhan dalam pembangunan pertanian dan masyarakat. Otonomi daerah memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih pendek, mengakomodasi isu-isu lokal serta keberpihakan yang kuat pada potensi dan kepentingan masyarakat lokal dalam penyuluhan pertanian. Harmonisasi pembagian peran layanan penyuluhan dan pendanaan antara sektor publik dan private akan menjadi tema strategis dalam layanan dan pendanaan penyuluhan pertanian di masa mendatang.

Privatisasi penyuluhan pertanian yang dimaknai sebagai pembagian peran yang serasi juga merupakan wahana demokratisasi karena membuka peluang partisipasi aktif dari stakeholders terkait untuk berkontribusi dalam proses penyuluhan pertanian. Monopoli sepihak dalam penyuluhan pertanian bisa dihindari, namun justru memunculkan iklim kompetisi sehat yang memungkinkan client untuk bisa memilih alternatif yang terbaik yang mampu menyediakan kebutuhan akan layanan penyuluhan pertanian. Meskipun penyuluhan sektor private akan semakin menguat karena efektivitas dan efisiensinya, namun bagaimanapun juga penyuluhan publik tetap penting sebagai penyedia *public goods*. Nampaknya perlu segmentasi layanan, untuk komoditas yang melibatkan orang banyak dengan profitabilitas dan harga produk rendah tetap menjadi tanggungjawab sektor *public* yang memungkinkan *client* mendapat layanan tanpa dipungut biaya. Penyuluh *public* juga dapat berfungsi sebagai mediator dan koordinator penyuluhan.

Modul 14

PENYULUHAN PERTANIAN DI ERA DIGITAL

Materi pada modul 14 ini memiliki muatan sebagai berikut :

- **Capaian belajar untuk Kemampuan Ketrampilan Umum (*General Occupational Skills*)**

OC /CP-KBP 4 : Mampu mengaplikasikan dan memanfaatkan IPTEKS dalam penyelesaian masalah pada bidang agribisnis yang adaptif terhadap perubahan lingkungan dengan mengaplikasikan model penyuluhan pertanian.

- **Capaian belajar untuk Kemampuan Ketrampilan Khusus (*Specific Occupational Skills*)**

OC 5/CP-KBP 5 : Mampu berkomunikasi dan bernegosiasi secara efektif dengan pemangku kepentingan dalam pengembangan agribisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mewujudkan agribisnis yang berkelanjutan dan efisien dalam mencapai keberhasilan program penyuluhan pertanian

OC 6/CP-KBP 6 : Mampu menggunakan metode dan merumuskan strategi penggunaan sumberdaya untuk meningkatkan kapasitas diri dan masyarakat dalam menghadapi tantangan pengembangan agribisnis ke depan.

OC 7/CP-KBP 7 : Mampu mengkomunikasikan pendekatan dan tahapan pemberdayaan masyarakat untuk keberhasilan penyuluhan pertanian secara berkelanjutan

Setelah membaca modul ini mahasiswa mampu:

- 1) menjelaskan pengertian *cyber extension* sebagai istilah baru dalam penyuluhan,
- 2) menyimpulkan beberapa sarana prasarana yang dibutuhkan dalam *cyber extension*,

- 3) menjelaskan beberapa keterampilan yang dibutuhkan penyuluh dalam program cyber extension,
- 4) menjelaskan beberapa peranan *cyber extension* dalam penyuluhan di Indonesia di masa datang.

1. Pengertian Cyber Extension

Cyber extension merupakan suatu mekanisme pertukaran informasi pertanian melalui area cyber, suatu ruang imajiner - maya di balik interkoneksi jaringan komputer melalui peralatan komunikasi. Dalam penerapannya cyber extension merupakan media komunikasi inovasi baru yang bersifat hybrid dan konvergen yang memanfaatkan jaringan internet, komunikasi melalui komputer dan multimedia interaktif digital untuk menjembatani proses transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi baru di bidang pertanian secara cepat.

Cyber extension berhubungan dengan teknologi informasi, internet, dan virtual reality (realitas maya). Virtual reality adalah sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer, sehingga pengguna merasa berada di dalam lingkungan tersebut. Kelebihan tersebut disadari oleh pemerintah sehingga diterapkan sebagai program dari Kementerian Pertanian RI yang diluncurkan pada tahun 2010 yang lalu. Cyber extension merupakan salah satu mekanisme komunikasi inovasi pertanian yang memadukan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berbasis komputer dengan beragam komponen komunikasi lainnya untuk menjangkau pengguna akhir (*end user*). Sebuah sistem cyber extension memfokuskan pada keseluruhan pengembangan usahatani termasuk produksi, manajemen, pemasaran, dan kegiatan pembangunan lainnya. Dengan demikian konsep cyber extension adalah model komunikasi dan penjelasan apa saja yang dapat berkaitan dengan model ini. Model komunikasi cyber extension mengumpulkan atau memusatkan informasi yang diterima oleh petani dari berbagai sumber yang berbeda maupun yang sama dan disederhanakan dalam bahasa lokal disertai dengan teks dan ilustrasi audio visual yang dapat disajikan atau diperlihatkan kepada seluruh masyarakat desa khususnya petani (Adekoyaa, 2007 dalam Sumardjo, Baga, dan Mulyandari, 2010).

Wijekoon et.al. (2009) menyatakan bahwa: "*Cyber extension is an agricultural information exchange mechanism over cyber space, the imaginary space behind the interconnected computer networks through telecommunication means. It utilize the power of networks, computer communication and interactive multimedia to facilitate information sharing mechanism*" (Cyber extension adalah mekanisme pertukaran informasi pertanian melalui area cyber, suatu ruang imajiner-maya di balik interkoneksi jaringan komputer melalui peralatan komunikasi. Cyber extension ini memanfaatkan kekuatan jaringan, komunikasi komputer dan multimedia interaktif untuk memfasilitasi mekanisme berbagi informasi atau pengetahuan. Melalui media internet, penyuluh diharapkan dapat

mengakses segala kebutuhan informasi teknologi untuk dapat membantu dan mempermudah dirinya dalam melaksanakan penyuluhan di lapangan.

Melalui cyber extension ini penyuluh dapat menemukan teknologi pertanian terbaru dan materi untuk disampaikan kepada petani. Selain itu, cyber extension merupakan wadah bagi penyuluh untuk memberikan sumbangan ilmu dan pengalamannya dalam bentuk tulisan tentang teknologi pertanian yang spesifik lokasi. Spesifikasi lokasi merupakan teknologi pertanian yang diterapkan khusus di satu daerah. Penyuluh pertanian sebagai ujung tombak pembangunan pertanian seyogyanya mampu menjembatani antara layanan informasi melalui media on-line yang dikembangkan oleh kementerian pertanian dengan petani sebagai pengguna teknologi, dengan demikian kehadiran cybex.go.id, semestinya disikapi sebagai tantangan baru bagi penyuluh pertanian untuk menguasai keterampilan komputer dan memanfaatkan internet. Sangat ironis apabila sampai terjadi pelaku utama dan pelaku usaha sebagai sasaran penyuluhan sudah memanfaatkan dan bahkan mengelola layanan on-line, sedangkan penyuluh pertaniannya masih asing dengan dunia internet.

Mengacu pada Permenpan Nomor: Per/02/Menpan/2/2008, Pasal 8, penyuluhan pertanian melalui website, merupakan salah satu tugas penyuluh pertanian terutama bagi penyuluh pertanian yang telah menyandang jabatan fungsional sebagai Penyuluh Pertanian Ahli. Jadi dalam hal pemanfaatan media on-line tugas penyuluh adalah mengelola informasi melalui media on-line bukan hanya sekedar memanfaatkan informasi dari media on-line. Penyediaan informasi dengan menggunakan media on-line yang dilakukan Kementerian Pertanian terus mengalami perbaikan. Layanan informasi yang semula diberi nama <http://www.cyberextension.web.id> telah direvisi menjadi <http://cybex.deptan.go.id> Revisi tersebut tentunya bukan hanya bertujuan agar layanan tersebut mudah diingat, tapi justru memberi ruang gerak yang lebih leluasa terhadap program cyber extension yang digagas kementerian pertanian. Cyber extension tidak lagi dimaknai sebagai nama sebuah website, tapi lebih difahami sebagai suatu program terobosan dalam penyediaan informasi pertanian melalui media on-line dan <http://cybex.deptan.go.id> menjadi salah satu bagian penting dari cyber extension.

Sarana prasarana yang dibutuhkan dalam cyber extension Untuk berjalannya sistem cyber extension antara sumber informasi dan pengakses harus terhubung melalui jaringan internet. Khusus mengenai peralatan koneksi internet, saat ini di pasaran banyak ditawarkan berbagai modem (GSM dan CDMA) dan berbagai kartu telepon (HP) yang memudahkan pengguna dalam mengakses internet, persoalannya adalah setting profile koneksi berbagai modem dan kartu telepon (HP) berbeda-beda. Bagi penyuluh pertanian maupun petani yang ingin menggunakan modem sebagai peralatan koneksi, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Jenis sinyal (GPRS, EDGE, 3G, 4G - LTE) dan kekuatan sinyal HP** yang ada disekitar kita. Berikut dipaparkan pemahaman jenis sinyal tersebut. Berikut penjelasan berbagai jenis sinyal tersebut.

GPRS (General Packet Radio Service) adalah suatu teknologi yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan data lebih cepat dibandingkan dengan penggunaan teknologi Circuit Switch Data (CSD). Penggabungan layanan telepon seluler dengan GPRS menghasilkan generasi baru yang disebut 5G. Sistem GPRS dapat digunakan untuk transfer data (dalam bentuk paket data) yang berkaitan dengan e-mail, data gambar (MMS),

Wireless Application Protocol (WAP), dan Wara Waring Wanua atau World Wide Web (WWW). Wireless Application Protocol disingkat WAP adalah sebuah protokol atau sebuah teknik messaging service yang memungkinkan untuk sebuah telepon genggam digital atau terminal mobile yang mempunyai fasilitas WAP, melihat atau membaca isi sebuah situs di internet dalam sebuah format teks khusus. Situs internet ini harus merupakan situs dengan fasilitas WAP. WAP dipublikasikan oleh WAP Forum, ditemukan pertama kali oleh Ericsson pada tahun 1997. Motorola, Nokia, dan Unwired Planet juga melakukan hal yang sama. Anggota Forum itu kini beranggotakan lebih dari 90% pasar telepon genggam, software developer dan organisasi yang lain. WWW merupakan kumpulan peladen web dari seluruh dunia yang mempunyai kegunaan untuk menyediakan data dan informasi untuk dapat digunakan bersama. WWW adalah bagian yang paling menarik dari internet. Melalui web, para pengguna dapat mengakses informasi-informasi yang tidak hanya berupa teks tetapi bisa juga berupa gambar, suara, video dan animasi. Kegunaan ini tergolong masih baru dibandingkan surat elektronik, sebenarnya WWW merupakan kumpulan dokumen yang tersimpan di peladen web, dan yang peladennya tersebar di lima benua termasuk Indonesia yang terhubung menjadi satu melalui jaringan Internet. Dokumen-dokumen informasi ini disimpan atau dibuat dengan format Hypertext Markup Language (HTML). Suatu halaman dokumen informasi dapat terdiri atas teks yang saling terkait dengan teks lainnya atau bahkan dengan dokumen lain. Keterkaitan halaman lewat teks ini disebut pranala. Dokumen informasi ini tidak hanya terdiri dari teks tetapi dapat juga berupa gambar, mengandung suara bahkan klip video. Kaitan antardokumen yang seperti itu biasa disebut hipermedia. Jadi dapat disimpulkan bahwa WWW adalah sekelompok dokumen multimedia yang saling bertautan dengan menggunakan tautan hiperteks. Dengan mengklik pranala (hipertaut), maka para pengguna bisa berpindah dari satu dokumen ke dokumen lainnya.

Sinyal E atau EDGE

Generasi setelah GPRS adalah EDGE (Enhanced Data rate for GSM Evolution). Walau disebut “Evolution” sinyal E tidak begitu cepat untuk data transfer. Kecepatan data transfer sinyal EDGE ini antara 120 Kbps sampai dengan 384 Kbps. Pada Smartphone iPhone generasi awal sinyal EDGE adalah jaringan tertinggi yang bisa dipindah. Walau agak lambat, namun sinyal E tidak terlalu menjemukan dibandingkan sinyal GPRS.

Sinyal 3G

Sinyal 3G mungkin sedang menjadi andalan di Indonesia. Sinyal 3G sebenarnya turunan dari 2G atau GPRS. 3G sendiri adalah 3GPRS atau GPRS versi 3. Yang membedakan adalah protokol transfer data yang menggunakan UMTS (United Mobile Telecommunication Technology). Kecepatan datanya dimulai dari 384 Kbps sampai 2 Mbps. Untuk membuka di HP, sinyal 3G lumayanlah, walau memang butuh kestabilan sinyal yang diterima.

Sinyal H atau HSPA/HSDPA

Generasi jaringan berikutnya adalah HSPA (High Speed Packet Access) atau kadang dikenal dengan 3,5G. Sedikit lebih cepat dari sinyal 3G, transfer datanya antara 600 Kbps sampai 10 Mbps. Walau sebenarnya hanya rata-rata 1-3 Mbps. Sinyal HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) atau kadang H+ memiliki kecepatan mencapai 7,2 Mbps. Untuk membuka di HP sinyal H ini dapat sangat diandalkan. Sayangnya, sinyal H sulit untuk terlacak di daerah-daerah tertentu khususnya daerah pelosok.

Sinyal 4G atau LTE

4G adalah singkatan dari istilah dalam bahasa Inggris :fourthgeneration technology. Istilah ini umumnya digunakan mengacu kepada standar generasi keempat dari teknologi telepon seluler. 4G merupakan pengembangan dari teknologi 3G dan 2G. Sistem 4G menyediakan jaringan pita lebar ultra untuk berbagai perlengkapan elektronik, contohnya telpon pintar dan laptop menggunakan modem USB. Terdapat dua kandidat standar untuk 4G yang dikomersilkan di dunia yaitu standar WiMAX (Korea Selatan sejak 2006) dan standar Long Term Evolution (LTE) (Swedia sejak 2009). Di Indonesia, WiMAX pertama kali diluncurkan oleh PT. FirstMedia dengan merk dagang Sitra WiMAX sejak Juni 2010. Kemudian teknologi LTE pertama kali diluncurkan oleh PT. Internux dengan merk dagang Bolt Super 4G LTE sejak 14 November 2013. Sistem 4G menyediakan solusi IP yang komprehensif di mana suara, data, dan arus multimedia dapat sampai kepada pengguna kapan saja dan di mana saja, pada rata-rata data lebih tinggi dari generasi sebelumnya. Bagaimanapun, terdapat beberapa pendapat yang ditujukan untuk 4G, yakni: 4G akan merupakan sistem berbasis IP terintegrasi penuh. Ini akan dicapai setelah teknologi kabel dan

nirkabel dapat dikonversikan dan mampu menghasilkan kecepatan 100Mb/detik dan 1Gb/detik baik dalam maupun luar ruang dengan kualitas premium dan keamanan tinggi. 4G akan menawarkan segala jenis layanan dengan harga yang terjangkau. Setiap handset 4G akan langsung mempunyai nomor IP v6 dilengkapi dengan kemampuan untuk berinteraksi internet Sinyal H atau HSPA/HSDPA Generasi jaringan berikutnya adalah HSPA (High Speed Packet Access) atau kadang dikenal dengan 3,5G. Sedikit lebih cepat dari sinyal 3G, transfer datanya antara 600 Kbps sampai 10 Mbps. Walau sebenarnya hanya rata-rata 1-3 Mbps. Sinyal HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) atau kadang H+ memiliki kecepatan mencapai 7,2 Mbps. Untuk membuka di HP sinyal H ini dapat sangat diandalkan. Sayangnya, sinyal H sulit untuk terlacak di daerah-daerah tertentu khususnya daerah pelosok. Sinyal 4G atau LTE 4G adalah singkatan dari istilah dalam bahasa Inggris :fourthgeneration technology. Istilah ini umumnya digunakan mengacu kepada standar generasi keempat dari teknologi telepon seluler. 4G merupakan pengembangan dari teknologi 3G dan 2G. Sistem 4G menyediakan jaringan pita lebar ultra untuk berbagai perlengkapan elektronik, contohnya telpon pintar dan laptop menggunakan modem USB. Terdapat dua kandidat standar untuk 4G yang dikomersilkan di dunia yaitu standar WiMAX (Korea Selatan sejak 2006) dan standar Long Term Evolution (LTE) (Swedia sejak 2009). Di Indonesia, WiMAX pertama kali diluncurkan oleh PT. FirstMedia dengan merk dagang Sitra WiMAX sejak Juni 2010. Kemudian teknologi LTE pertama kali diluncurkan oleh PT. Internux dengan merek dagang Bolt Super 4G LTE sejak 14 November 2013. Sistem 4G menyediakan solusi IP yang komprehensif di mana suara, data, dan arus multimedia dapat sampai kepada pengguna kapan saja dan di mana saja, pada rata-rata data lebih tinggi dari generasi sebelumnya. Bagaimanapun, terdapat beberapa pendapat yang ditujukan untuk 4G, yakni: 4G akan merupakan sistem berbasis IP terintegrasi penuh. Ini akan dicapai setelah teknologi kabel dan nirkabel dapat dikonversikan dan mampu menghasilkan kecepatan 100Mb/detik dan 1Gb/detik baik dalam maupun luar ruang dengan kualitas premium dan keamanan tinggi. 4G akan menawarkan segala jenis layanan dengan harga yang terjangkau. Setiap handset 4G akan langsung mempunyai nomor IP v6 dilengkapi dengan kemampuan untuk berinteraksi internet telephony yang berbasis Session Initiation Protocol (SIP). Semua jenis radio transmisi seperti GSM, TDMA, EDGE, CDMA 2G, 2.5G akan dapat digunakan, dan dapat berintegrasi dengan mudah dengan radio yang di operasikan tanpa lisensi seperti IEEE 802.11 di frekuensi 2.4 GHz & 5-5.8Ghz, bluetooth dan seluler. Integrasi voice dan data dalam channel yang sama. Integrasi voice dan data aplikasi SIP-enabled. (<https://id.wikipedia.org/wiki/4G> diakses 31 Mei 2018)

WiMax

WiMAX adalah singkatan dari Worldwide Interoperability for Microwave Access, merupakan teknologi akses nirkabel pita lebar (broadband wireless access atau disingkat BWA) yang memiliki kecepatan akses yang tinggi dengan jangkauan yang luas. WiMAX merupakan evolusi dari teknologi BWA sebelumnya dengan fitur-fitur yang lebih menarik. Selain kecepatan data yang tinggi mampu diberikan, WiMAX juga merupakan teknologi dengan open standar. Dalam arti komunikasi perangkat WiMAX diantara beberapa vendor yang berbeda tetap dapat dilakukan (tidak proprietary). Dengan kecepatan data yang besar (sampai 70 MBps), WiMAX dapat diaplikasikan untuk koneksi broadband 'last mile', ataupun backhaul.

Wi-Fi

Wi-Fi merupakan salah satu varian teknologi komunikasi dan informasi yang bekerja pada jaringan dan perangkat WLAN (wireless local area network) yang didasari pada spesifikasi IEEE 802.11. Dengan kata lain, Wi-Fi adalah sertifikasi merek dagang yang diberikan pabrikan kepada perangkat telekomunikasi (internet) yang bekerja di jaringan WLAN dan sudah memenuhi kualitas kapasitas interoperasi yang dipersyaratkan. Standar terbaru dari spesifikasi 802.11a atau b, seperti 802.16 g, saat ini sedang dalam penyusunan, spesifikasi terbaru tersebut menawarkan banyak peningkatan mulai dari luas cakupan yang lebih jauh hingga kecepatan transfernya.

- 2. Informasi tarif dan layanan internet pada setiap kartu HP** tidak sama, sehingga sebaiknya dipilih layanan yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan.
3. Penyuluh dan petani harus mengenali program windows yang terpasang di komputer (XP, Vista, Windows 7, Windows 10, linux dll).
4. Modem yang terpasang di komputer kita yang support dengan program windows (Modem support XP kadang sulit diinstal di windows)
5. Instalasi modem harus mengikuti petunjuk agar penginstalan ke komputer berjalan lancar dan tidak ada kendala.
6. Harus dicari informasi cara setting profil koneksi kartu HP yang akan digunakan dan lakukan penyetingan (parameter koneksi dan profil network).

Layanan sinyal 3G oleh beberapa operator telepon seluler (Telkomsel, Indosat, XL, dan 3) sudah menjangkau hampir seluruh wilayah Provinsi Lampung, bahkan di wilayah pusat-pusat pertumbuhan, perkotaan dan sekitarnya sudah terlayani sinyal 4G. Para operator telepon seluler secara mandiri atau dengan rental tower (based transceiver station /BTS) untuk memperluas jangkauan layanan sinyal ke semua wilayah. Kondisi tersebut jelas sangat mempermudah para penyuluh dan petani mengakses informasi teknologi pertanian secara lebih cepat dan murah.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas para penyuluh dan mendukung program cyber extension, mulai tahun 2010 sudah ada program BP3K Model dari BPSDMP Kementerian Pertanian.

Seiring perkembangan TIK, saat ini operasional kerja berbasis internet pada suatu lembaga atau kantor lebih murah menggunakan Wi-Fi daripada menggunakan modem. Namun, sampai saat ini semua BPP belum terpasang atau menyediakan Wi-Fi, hal ini banyak dikeluhkan oleh penyuluh. Kondisi tersebut sangat tergantung pada komitmen pimpinan untuk dapat merealisasikannya.

Keterampilan yang dibutuhkan penyuluh dan petani dalam program cyber extension

Selain keterampilan dasar mengoperasikan komputer, pengelolaan informasi melalui media on-line membutuhkan keterampilan yang memadai, diantaranya pengetahuan tentang peralatan koneksi internet, cara membuat website/blog, cara posting, editing, cara mempercantik tampilan website/bog dan keterampilan-keterampilan lain yang berdasar pada preferensi pembuat dan terutama preferensi pemanfaat layanan. Sepintas keterampilan yang diperlukan seperti itu sulit dipelajari, namun dalam kenyataannya semua itu juga dapat dipelajari secara mandiri. Hal ini tergantung pada si pengguna, apakah memiliki kemauan untuk itu atau tidak.

Prinsip kerja komputer yang dapat dipergunakan untuk mengakses data lewat internet saat ini sudah dipakai juga pada handphone (terutama yang sudah android). Hal ini memungkinkan para penyuluh dan petani pengguna handphone android dapat mengakses informasi teknologi pertanian secara cepat.

Bagi sebagian besar penyuluh, mengoperasikan komputer sudah hal biasa, meskipun masih ada sekitar 5 persen penyuluh yang tidak bisa. Penyuluh yang tidak dapat mengoperasikan komputer umumnya sudah berusia mendekati pensiun. Penyuluh yang demikian apabila ada pekerjaan atau tugas yang harus dikerjakan dengan komputer, mereka meminta bantuan orang lain atau anak-anak mereka yang sudah terbiasa bekerja menggunakan komputer atau laptop. Demikian halnya dengan pemanfaatan HP, bagi sebagian besar penyuluh sudah menggunakan HP minimal 3G, meskipun masih ada sebagian kecil penyuluh (sekitar 5 persen) penyuluh yang menggunakan HP 2G. Penyuluh dengan HP 2G hanya memanfaatkan HP untuk telepon atau bertukar SMS, mereka tidak memanfaatkan media sosial yang sudah sangat berkembang di masyarakat. Sebaliknya bagi penyuluh yang umumnya sudah memanfaatkan HP 3G atau yang lebih tinggi, menggunakan HP untuk mengakses internet sudah biasa, sehingga mereka lebih mudah mencari informasi teknologi pertanian secara lebih cepat.

Bagi sebagian besar petani, layanan informasi melalui media daring (online) nampaknya masih memerlukan proses panjang, karena akses petani terhadap internet masih sangat terbatas. Tanpa upaya terobosan, pemanfaatan layanan tersebut oleh para petani akan berjalan lambat.

Saat ini sebagian besar petani (yang umumnya sudah berusia di atas 50 tahun) menggunakan HP hanya untuk keperluan telepon dan atau kirim/terima SMS ke saudara atau keluarga dekat. Meskipun HP mereka sudah 3G namun masih sedikit yang dapat memanfaatkannya untuk mencari informasi teknologi pertanian. Dari kenyataan tersebut, potensi pemanfaatan HP 3G untuk mengakses internet ada pada petani usia muda yang lebih mudah mengikuti perkembangan TIK. Perkembangan yang begitu cepat munculnya berbagai media sosial berbasis facebook, blackberry messenger (BBM), line, what's app, dan sebagainya memungkinkan para petani dan penyuluh pengguna handphone android dapat berbagi informasi teknologi pertanian secara cepat melalui jejaring pribadi ataupun group.

Peranan cyber extension dalam penyuluhan di Indonesia di masa datang

Sampai saat ini kegiatan penyuluhan pertanian di Indonesia masih didominasi oleh peran penyuluh pertanian lapangan (PPL). Namun, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta semakin berkurangnya interaksi langsung antar individu peran PPL akan semakin menurun, model penyuluhan melalui dunia maya seperti cyber extension akan menjadi trend di masa depan. Para penyuluh tidak harus setiap saat datang ke kelompok tani, meskipun komunikasi tatap muka masih diperlukan. Sebagian besar informasi teknologi pertanian dapat disebarluaskan secara cepat dan murah melalui internet. Kondisi tersebut dapat tercapai manakala dukungan sarana prasarana internet di suatu wilayah tersedia. Jaringan sinyal telepon seluler minimal 3G yang kuat, dan semua penyuluh atau petani sudah memanfaatkan komputer atau HP android yang dapat digunakan untuk akses internet.

Bagi sebagian besar petani, layanan informasi melalui media daring (online) nampaknya masih memerlukan proses panjang, karena akses petani terhadap internet masih sangat terbatas. Tanpa upaya terobosan, pemanfaatan layanan tersebut oleh para petani akan berjalan lambat. Sampai saat ini kegiatan penyuluhan pertanian di Indonesia masih didominasi oleh peran penyuluh pertanian lapangan (PPL). Namun, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta semakin berkurangnya interaksi langsung antar individu peran PPL akan semakin menurun, model penyuluhan melalui dunia maya seperti cyber extension akan menjadi trend di masa depan. Para penyuluh tidak harus setiap saat datang ke kelompok tani, meskipun komunikasi tatap muka masih diperlukan. Sebagian besar informasi teknologi pertanian dapat disebarluaskan secara cepat dan murah melalui internet. Kondisi tersebut dapat tercapai manakala dukungan sarana prasarana internet

di suatu wilayah tersedia. Jaringan sinyal telepon seluler minimal 3G yang kuat, dan semua penyuluh atau petani sudah memanfaatkan komputer atau HP android yang dapat digunakan untuk akses internet.

Melalui implementasi cyber extension dengan berbagai tantangan dan peluangnya yang mengedepankan pada pengembangan jaringan komunikasi inovasi pertanian diantara seluruh pelaku pembangunan pertanian diharapkan dapat mendukung revitalisasi penyuluhan pertanian di Indonesia. Dukungan infrastruktur dan pelatihan berjenjang sampai di tingkat pengguna akhir perlu ditingkatkan. Penguatan kelembagaan baik formal maupun nonformal yang sudah ada juga perlu dilakukan seiring dengan dinamika tuntutan global. Dengan demikian, hambatan dalam implementasi cyber extension untuk komunikasi inovasi pertanian dalam mendukung revitalisasi penyuluhan pertanian dapat ditingkatkan, sebaliknya dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat ditekan. Sudah saatnya petani juga dapat menikmati manisnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, karena manfaatnya dapat dirasakan dalam mendukung peningkatan kesejahteraannya.

Ringkasan

Cyber extension merupakan media komunikasi inovasi baru yang bersifat hybrid dan konvergen yang memanfaatkan jaringan internet, komunikasi melalui komputer dan multimedia interaktif digital untuk menjembatani proses transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi baru di bidang pertanian secara cepat. Cyber extension berhubungan dengan teknologi informasi, internet, dan virtual reality (realitas maya).

Virtual reality adalah sebuah teknologi yang membuat pengguna atau user dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada dalam dunia maya yang disimulasikan oleh komputer. Cyber extension merupakan salah satu mekanisme komunikasi inovasi pertanian yang memadukan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berbasis komputer dengan beragam komponen komunikasi lainnya untuk menjangkau pengguna akhir (end user).

Sebuah sistem cyber extension memfokuskan pada keseluruhan pengembangan usahatani termasuk produksi, manajemen, pemasaran, dan kegiatan pembangunan lainnya. Berjalannya sistem cyber extension antara sumber informasi dan pengakses harus terhubung melalui jaringan internet. Khusus mengenai peralatan koneksi internet, saat ini di pasaran banyak ditawarkan berbagai modem (GSM dan CDMA) dan berbagai kartu telepon (HP).

Bagi penyuluh pertanian maupun petani yang ingin menggunakan modem sebagai peralatan koneksi, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Jenis sinyal (GPRS, EDGE, 3G, 4G - LTE) dan kekuatan sinyal HP yang ada disekitar kita.

- b. Informasi tarif dan layanan internet pada setiap kartu HP tidak sama, sehingga sebaiknya dipilih layanan yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan.
- c. Penyuluh dan petani harus mengenali program windows yang terpasang di komputer (XP, Vista, Windows 7, Windows 10, linux dll).
- d. Modem yang terpasang di komputer kita yang support dengan program windows (Modem support XP kadang sulit diinstal di windows 7).
- e. Instalasi modem harus mengikuti petunjuk agar penginstalan ke komputer berjalan lancar dan tidak ada kendala.
- f. Harus dicari informasi cara setting profil koneksi kartu HP yang akan digunakan dan lakukan penyetingan (parameter koneksi dan profil network).

Untuk mendukung cyber extension, selain keterampilan dasar mengoperasikan komputer, pengelolaan informasi melalui media on-line membutuhkan keterampilan yang memadai, diantaranya pengetahuan tentang peralatan koneksi internet, cara membuat website/blog, cara posting, editing, cara mempercantik tampilan website/blog dan keterampilan-keterampilan lain yang berdasar pada preferensi pembuat dan terutama preferensi pemanfaat layanan. Penyuluh sebaiknya menguasai keterampilan tersebut, namun bagi petani sebagai pemanfaat layanan informasi teknologi pertanian minimal memiliki keterampilan dalam koneksi internet, mengunduh, dan memposting informasi kepada sesama petani melalui media sosial yang berkembang cukup pesat.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta semakin berkurangnya interaksi langsung antar individu peran PPL akan semakin menurun, model penyuluhan melalui dunia maya seperti cyber extension akan menjadi trend di masa depan. Generasi muda petani akan menjadi tumpuan perkembangan pertanian di masa depan. sebagai peralatan koneksi, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Jenis sinyal (GPRS, EDGE, 3G, 4G - LTE) dan kekuatan sinyal HP yang ada disekitar kita.
- b. Informasi tarif dan layanan internet pada setiap kartu HP tidak sama, sehingga sebaiknya dipilih layanan yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan.
- c. Penyuluh dan petani harus mengenali program windows yang terpasang di komputer (XP, Vista, Windows 7, Windows 10, linux dll).
- d. Modem yang terpasang di komputer kita yang support dengan program windows (Modem support XP kadang sulit diinstal di windows 7).
- e. Instalasi modem harus mengikuti petunjuk agar penginstalan ke komputer berjalan lancar dan tidak ada kendala.
- f. Harus dicari informasi cara setting profil koneksi kartu HP yang akan digunakan dan lakukan penyetingan (parameter koneksi dan profil network).

Untuk mendukung cyber extension, selain keterampilan dasar mengoperasikan komputer, pengelolaan informasi melalui media on-line membutuhkan keterampilan yang memadai, diantaranya pengetahuan tentang peralatan koneksi internet, cara membuat website/blog, cara posting, editing, cara mempercantik tampilan website/bog dan keterampilan-keterampilan lain yang berdasar pada preferensi pembuat dan terutama preferensi pemanfaat layanan. Penyuluh sebaiknya menguasai keterampilan tersebut, namun bagi petani sebagai pemanfaat layanan informasi teknologi pertanian minimal memiliki keterampilan dalam koneksi internet, mengunduh, dan memposting informasi kepada sesama petani melalui media sosial yang berkembang cukup pesat.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta semakin berkurangnya interaksi langsung antar individu peran PPL akan semakin menurun, model penyuluhan melalui dunia maya seperti cyber extension akan menjadi trend di masa depan. Generasi muda petani akan menjadi tumpuan perkembangan pertanian di masa depan.

Soal Latihan:

Tuliskan jawaban B bila pernyataannya benar, dan S bila salah.

1. Cyber extension merupakan media komunikasi inovasi baru yang bersifat hybrid dan konvergen yang tidak perlu memanfaatkan jaringan internet.
2. Cyber extension merupakan salah satu mekanisme komunikasi inovasi pertanian yang memadukan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berbasis komputer.
3. Saat ini sudah banyak pelaku utama dan pelaku usaha sebagai sasaran penyuluhan sudah memanfaatkan dan bahkan mengelola layanan on-line, sedangkan penyuluh pertaniannya masih ada yang merasa asing dengan dunia internet.
4. Di pasaran banyak ditawarkan berbagai modem (GSM dan CDMA) dan berbagai kartu telepon (HP) yang memudahkan pengguna dalam mengakses internet.
5. HP yang dapat digunakan untuk mengakses internet harus HP android.
6. Terdapat dua kandidat standar untuk 4G yang dikomersilkan di dunia yaitu standar standar Long Term Evolution (LTE) (Korea Selatan sejak 2006) dan WiMAX (Swedia sejak 2009).
7. Secara umum BPP saat ini sudah dilengkapi dengan Wi-Fi untuk mendukung cyber extension.
8. Prinsip kerja komputer yang dapat dipergunakan untuk mengakses data lewat internet saat ini sudah dipakai juga pada handphone.
9. Sebagian besar petani (yang umumnya sudah berusia di atas 50 tahun) meggunakan HP hanya untuk keperluan telepon dan atau kirim/terima SMS ke saudara atau keluarga dekat.

10. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta semakin berkurangnya interaksi langsung antar individu, peran PPL akan semakin menurun dan model penyuluhan melalui dunia maya seperti cyber extension tidak akan berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Brown, J.W.,R.B. Lewis, and F.F Harcleroad. (1983). *Audiovisual Instruction: Technology, Media, and Method*. New York: MacGraw-Hill.
- Budi, S. 2018. *Penyuluhan Pertanian:Teori dan Penerapannya*. CV. Sefa Bumi Persada – Aceh
- Departemen Pertanian. 2000. *Revitalisasi Pertanian*. BP SDM Pertanian Departemen Pertanian, Jakarta.
- Departemen Pertanian. 2001. *Penyuluhan Pertanian*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Sinar Tani.
- Gitosaputro, S dan Indah L. 2018. *Dinamika Penyuluhan Pertanian : Dari Era Kolonial Sampai Dengan Era Digital*. Aura Publishing, Bandar Lampung
- Gunadi, A. 1989. *Visualaudio dan Pedoman Penggunaan Alat Bantu Penyuluhan*. Jakarta: BPLPP.
- Gunadi, A. 1985. *Pedoman Pembuatan Foto Berwarna Proses Negatif*. PT.. Jakarta: Gramedia.
- Hamzah, S. 1981. *Media Audiovisual untuk Pengajaran Penerangan dan Penyuluhan*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Harjati, S. 2002, *Sejarah dan Pengertian Penyuluhan Pertanian*. Universitas Terbuka
- Iswarahadi, T.G. 1982. *Media Murah..* Yogyakarta: Kanisius.
- Mardikanto, T. 1993. *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Mardi. K. 1992. *Wawancara Video dengan Satu Kamera*. Kanisius. Yogyakarta
- Nuraeni, I. 2002. *Pengertian Media Penyuluhan Pertanian*. Universitas Terbuka
- Olivera, M. 1989. *Group Media*. Yogyakarta: Kanisius.
- Pusat Pendidikan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian. 2017. *Buku Ajar Evaluasi Penyuluhanpertanian*. Kementerian Pertanian, Jakarta.
- Rogers, E.M. 2003. *Diffusion of Innovation*. Free Press. New York.
- Rogers, E.M. and. F.F. Shoemaker. 1987. *Memasyarakatkan Ide-ide Baru. Usaha Nasional*. Surabaya.
- Slamet, M. 2001. *Memantapkan Posisi dan Meningkatkan Peran Penyuluhan Pembangunan*.
- Slamet, M. 2001. *Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian di Era Otonomi Daerah*. Makalah disajikan pada Seminar PERHIPTANI 2001 di Tasikmalaya, Jawa Barat, 21 Oktober 2001.
- Sadiman, A.S. 1990. *Media Pendidikan*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Sudjana, N. dan A. Rivai. 1980. *Media Pengajaran (Penggunaan dan Pembuatannya*. Bandung: Sinar Baru.
- Sularko 1980. *Audiovisual*. Bandung: Bina Cipta.
- Salkind NJ. 1985. *Theories of Human Development*. New York: John Wiley & Sons, Inc.

- Sastraatmadja, E. 1986. Penyuluhan Pertanian. Alumni Bandung.
- Slamet, M. 1978. Komunikasi, Adopsi, dan Diffusi Inovasi. Proyek Pembinaan Pendidikan dan Latihan Pertanian. Ciawi-Bogor.
- Soekartawi. 1988. Prinsip Dasar Komunikasi Pertanian. UI Press. Jakarta.
- Sumardjo, Baga LM, Mulyandari RSH. 2009. Cyber extension Peluang dan Tantangan dalam Revitalisasi Penyuluhan Pertanian. Bogor: IPB Press.
- Sumardjo, Mulyandari RSH. 2011. Pengembangan Sistem Informasi Untuk Meningkatkan Keberdayaan Petani Sayuran dalam Proses Pengambilan Keputusan Usaha tani. Kerjasama Badan Litbang Pertanian Kementan dengan Care IPB, melalui project KKP3T. Bogor
- Van den Ban, A.W. dan H.S. Hawkins. 1999. Penyuluhan Pertanian. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Van der Volk, J. 1992. Produksi Film Video. Yogyakarta. Kanisius.
- Wiriatmadja, S. 1973. Pokok-pokok Penyuluhan Pertanian. Jakarta: Yasaguna
- Widodo, S. 2000. Diktat Media Penyuluhan. Bogor: STPP
- Wiriaatmadja, S. 1973. Pokok-pokok Penyuluhan Pertanian. CV Yasaguna. Jakarta.
- Williams BK, Sawyer SC. 2007. Using Information Technology: A Practical Introduction to Computers and Communications terjemahan Indonesia. Penerbit Andi. Yogyakarta